BANK INDONESIA
BANK SENTRAL REPUBLIK INDONESIA

LAPORAN PEREKONOMIAN PROVINSI BALI

Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali

AGUSTUS
2019

PESONA KOTA
DENPASAR

BANK INDONESIA
BANK SENTRAL REPUBLIK INDONESIA

LAPORAN PEREKONOMIAN PROVINSI BALI

AGUSTUS 2019

Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi:

Grup *Advisory* dan Pengembangan Ekonomi

Kelompok Koordinator Asesmen Ekonomi Keuangan Regional dan Advisory Daerah

Fungsi Asesmen Ekonomi dan Surveilans

Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali

Jl. Letda Tantular No. 4 Denpasar - Bali, 80234 (0361) 248982 leo_a@bi.go.id, umran_u@bi.go.id, wilda_tf@bi.go.id, riyan_h@bi.go.id

VISI BANK INDONESIA

"Menjadi bank sentral yang berkontribusi secara nyata terhadap perekonomian Indonesia dan terbaik diantara negara *emerging markets*"

MISI BANK INDONESIA

1. Mencapai dan memelihara stabilitas nilai Rupiah melalui efektivitas kebijakan moneter dan bauran kebijakan Bank Indonesia.
2. Turut menjaga stabilitas sistem keuangan melalui efektivitas kebijakan makroprudensial Bank Indonesia dan sinergi dengan kebijakan mikroprudensial Otoritas Jasa Keuangan.
3. Turut mengembangkan ekonomi dan keuangan digital melalui penguatan kebijakan sistem pembayaran Bank Indonesia dan sinergi dengan kebijakan Pemerintah serta mitra strategis lain.
4. Turut mendukung stabilitas makroekonomi dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan melalui sinergi bauran kebijakan Bank Indonesia dengan kebijakan fiskal dan reformasi struktural pemerintah serta kebijakan mitra strategis lain.
5. Memperkuat efektivitas kebijakan Bank Indonesia dan pembiayaan ekonomi, termasuk infrastruktur, melalui akselerasi pendalaman pasar keuangan.
6. Turut mengembangkan ekonomi dan keuangan syariah di tingkat nasional hingga di tingkat daerah.
7. Memperkuat peran internasional, organisasi, sumber daya manusia, tata kelola dan sistem informasi Bank Indonesia.

NILAI STRATEGIS BANK INDONESIA

"Nilai-nilai strategis Bank Indonesia adalah: (i) kejujuran dan integritas (*trust and integrity*); (ii) profesionalisme (*professionalism*); (iii) keunggulan (*excellence*); (iv) mengutamakan kepentingan umum (*public interest*); dan (v) koordinasi dan kerja sama tim (*coordination and teamwork*) yang berlandaskan keluhuran nilai-nilai agama (religi)"

VISI KANTOR PERWAKILAN BANK INDONESIA

"Menjadi Kantor Perwakilan yang kredibel dalam pelaksanaan tugas Bank Indonesia dan kontributif bagi pembangunan ekonomi daerah maupun nasional"

MISI KANTOR PERWAKILAN BANK INDONESIA

"Menjalankan kebijakan Bank Indonesia dalam menjaga stabilitas nilai rupiah, stabilitas sistem keuangan, efektivitas pengelolaan uang rupiah dan kehandalan sistem pembayaran untuk mendukung pembangunan ekonomi daerah maupun nasional jangka panjang yang inklusif dan berkesinambungan"

...Memberikan saran kepada pemerintah daerah mengenai kebijakan ekonomi daerah, yang didukung dengan penyediaan informasi berdasarkan hasil kajian yang akurat...

(Salah satu dari lima tugas pokok Kantor Perwakilan Bank Indonesia)

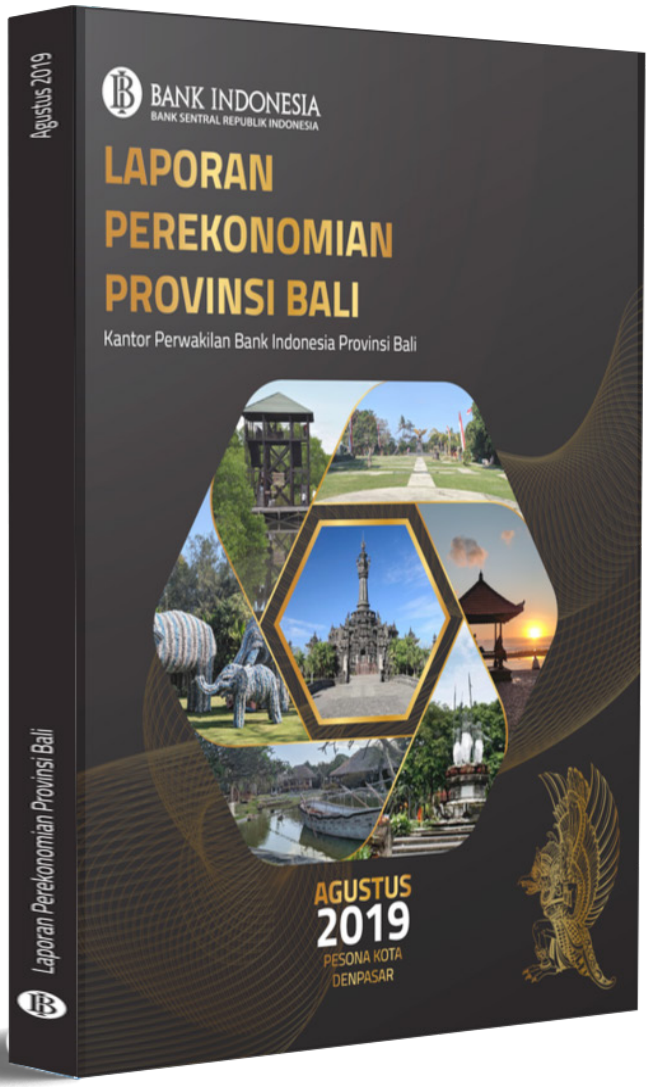
BANK INDONESIA
BANK SENTRAL REPUBLIK INDONESIA
LAPORAN
PEREKONOMIAN
PROVINSI BALI
Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali
AGUSTUS
2019
PESONA KOTA
DENPASAR
Agustus 2019
Laporan Perekonomian Provinsi Bali

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas segala rahmat dan karunia-Nya, sehingga kami dapat menyusun Laporan Perekonomian Provinsi Bali Agustus 2019. Laporan ini disusun untuk memenuhi kebutuhan stakeholders internal maupun eksternal Bank Indonesia mengenai informasi perkembangan ekonomi, moneter, perbankan, keuangan, dan sistem pembayaran di Provinsi Bali.

Bank Indonesia berpandangan bahwa perekonomian daerah khususnya Provinsi Bali mempunyai posisi dan peran yang strategis terhadap pembangunan ekonomi nasional serta dalam upaya menjaga kestabilan nilai Rupiah. Hal ini didasari oleh fakta pembangunan nasional merupakan agregasi dari pembangunan daerah dan semakin meningkatnya proporsi inflasi daerah dalam menyumbang inflasi nasional. Oleh sebab itu Bank Indonesia, sebagai Bank Sentral Republik Indonesia, menaruh perhatian yang besar terhadap upaya-upaya mendorong pertumbuhan ekonomi daerah guna semakin mendorong pertumbuhan ekonomi nasional termasuk dalam upaya pengendalian inflasi daerah guna mencapai target inflasi nasional.

Salah satu wujud dari kepedulian Bank Indonesia terhadap dinamika perekonomian daerah adalah melakukan berbagai kajian dan diseminasi hasil-hasil kajian kepada stakeholders

Salah satunya melalui Laporan Perekonomian Provinsi Bali yang berisikan kajian dan informasi mengenai perekonomian daerah dan dipahami secara luas oleh seluruh pihak terkait. Selanjutnya, stakeholders dapat memanfaatkan informasi dari Laporan Perekonomian Provinsi Bali ini sesuai dengan kepentingan masing-masing dalam upaya perbaikan kinerja ekonomi Provinsi Bali di masa depan. Kami juga berharap akan muncul ide-ide konstruktif yang dapat memberikan nilai tambah serta menjadi stimulus upaya-upaya pengembangan ekonomi daerah melalui kebijakan maupun kajian – kajian lanjutan.

Pada kesempatan ini, kami menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu dalam penyediaan data dan informasi yang kami perlukan antara lain Pemerintah Daerah Provinsi Bali, Badan Pusat Statistik (BPS), perbankan, akademisi, dan instansi pemerintah lainnya. Kami menyadari bahwa cakupan dan analisis dalam Laporan Perekonomian Provinsi Bali masih belum sepenuhnya sempurna, sehingga saran, kritik dan dukungan informasi/data dari Bapak/Ibu sekalian sangat diharapkan guna peningkatan kualitas dari kajian tersebut.

Akhir kata, kami berharap semoga Laporan Perekonomian Provinsi Bali ini bermanfaat bagi para pembaca.

Denpasar, 2 September 2019

KEPALA PERWAKILAN BANK INDONESIA

PROVINSI BALI

TTD

Trisno Nugroho

Direktur

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR iv

DAFTAR ISI vi

DAFTAR GRAFIK ix

DAFTAR TABEL xiv

RINGKASAN EKSEKUTIF xviii

TABEL INDIKATOR TERPILIH xxiv

01

BAB I
PERKEMBANGAN EKONOMI MAKRO DAERAH 1

1.1. KONDISI UMUM KINERJA EKONOMI PROVINSI BALI TRIWULAN II 2019 2

1.1.1. Kinerja Perekonomian Provinsi Bali Triwulan II 2019 2

1.1.2. Perkiraan Kinerja Ekonomi Bali Triwulan III 2019 3

1.2. PERTUMBUHAN EKONOMI BALI TRIWULAN II 2019 SISI PERMINTAAN 4

1.2.1. Konsumsi 4

1.2.2. Investasi 7

1.2.3. Ekspor dan Impor 8

1.3. PERTUMBUHAN EKONOMI BALI TRIWULAN II 2019 SISI PENAWARAN 11

1.3.1. Lapangan Usaha Penyediaan Akomodasi Makan & Minum 12

1.3.2. Lapangan Usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan 14

1.3.3. Lapangan Usaha Industri Pengolahan 15

1.3.4. Lapangan Usaha Konstruksi 16

1.3.5. Lapangan Usaha Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil, dan Sepeda Motor 17

02

BAB II
KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH 36

2.1. GAMBARAN UMUM 38

2.2. APBD PROVINSI BALI 41

2.2.1. Pagu Anggaran Pendapatan Provinsi Bali 41

2.2.2. Realisasi Belanja dan Transfer di Provinsi Bali 44

2.3. GABUNGAN ANGGARAN KABUPATEN/KOTA 46

2.3.1. Target Anggaran Pendapatan Daerah Gabungan Kabupaten/Kota 46

2.3.2. Realisasi Pendapatan Daerah Gabungan Kabupaten/Kota 47

2.3.3. Target Anggaran Belanja Daerah Gabungan Kabupaten/Kota 49

2.3.4. Realisasi Belanja Daerah Gabungan Kabupaten/Kota 50

2.4. REALISASI APBN PROVINSI BALI 51

2.4.1. Realisasi Belanja APBN Provinsi Bali 51

03

BAB III
PERKEMBANGAN INFLASI DAERAH 54

3.1. PERKEMBANGAN UMUM INFLASI 56

3.2. ANALISIS PERKEMBANGAN INFLASI 57

3.2.1. Inflasi Menurut Kelompok Barang dan Jasa 57

3.2.2. Inflasi Menurut Kota 61

3.3. DISAGREGASI INFLASI 64

3.4. INFLASI PERDESAAN 66

3.5. KOORDINASI PENGENDALIAN INFLASI 66

04

BAB IV
STABILITAS KEUANGAN DAERAH, PENGEMBANGAN AKSES KEUANGAN DAN UMKM 70

4.1. ASESMEN INTERMEDIASI PERBANKAN 72

4.1.1. Jaringan Kantor dan Aset 72

4.1.2. Kinerja Bank Umum 72

4.1.2.1. Dana Pihak Ketiga 72

4.1.2.2. Penyaluran Kredit 73

4.1.2.3. LDR dan NPL 74

4.1.3. Kinerja Bank Perkreditan Rakyat (BPR) 74

4.1.4. Kinerja Bank Syariah 75

4.2. ASESMEN SEKTOR KORPORASI 75

4.2.1. Sumber Kerentanan Sektor Korporasi 75

4.2.2. Kinerja Korporasi 76

4.2.3. Eksposur Perbankan Pada Korporasi 77

4.3. ASESMEN SEKTOR RUMAH TANGGA 79

4.3.1. Sumber Kerentanan dan Kondisi Sektor Rumah Tangga 79

4.3.2. Kinerja Keuangan Rumah Tangga 80

4.3.3. Dana Pihak Ketiga Perseorangan (Di Perbankan) 82

4.3.4. Kredit Perbankan Pada Sektor Rumah Tangga 83

4.3.4.1. Kredit Kepemilikan Rumah dan Apartemen 85

4.3.4.2. Kredit Kepemilikan Kendaraan Bermotor 86

4.3.4.3. Kredit Multiguna 86

4.4. AKSES KEUANGAN DAN UMKM 87

4.4.1. Akses Keuangan Kepada UMKM 87

4.4.2. Akses Keuangan Kepada Penduduk 89

05

BAB V
PENYELENGGARAAN SISTEM PEMBAYARAN DAN PENGELOLAAN UANG RUPIAH 92

5.1. PERKEMBANGAN SISTEM PEMBAYARAN DI BALI 94

5.1.1. Transaksi Sistem Pembayaran Tunai 94

5.1.1.1. Aliran Uang Masuk/Keluar (*Inflow/Outflow*) 94

5.1.1.2. Uang Tidak Layak Edar (UTLE) 95

5.1.2. Transaksi Sistem Pembayaran Non Tunai 95

5.1.2.1. Transaksi Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia (SKNBI) 95

5.1.2.2. Perkembangan Tolakan Transaksi Cek/BG 96

5.2. UPAYA MENJAGA KELANCARAN SISTEM PEMBAYARAN 97

5.2.1. Penyediaan Uang Layak Edar dan Penanganan Uang Tidak Asli 97

5.2.2. Perkembangan Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing Bukan Bank (KUPVA BB) di Provinsi Bali 98

5.2.3. Perkembangan Inklusi Keuangan Provinsi Bali 99

5.2.4. Pengembangan Layanan Keuangan Nontunai dan Elektronifikasi 102

06

BAB VI
KETENAGAKERJAAN & KESEJAHTERAAN 110

6.1. KETENAGAKERJAAN 112

6.1.1. Kondisi Ketenagakerjaan Di Bali 112

6.1.2. Prospek Ketenagakerjaan Triwulan III 2019 dan Triwulan IV 2019 117

6.2. KESEJAHTERAAN 118

6.2.1. Perkembangan Angka Kemiskinan Bali 118

6.2.2. Perkiraan Angka Kemiskinan Bali 2019 118

6.2.3. Kedalaman dan Keparahan Kemiskinan 119
6.2.4. Ketimpangan Pengeluaran Penduduk 119
6.2.5. Kesejahteraan Masyarakat Pedesaan 120
6.3. INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA 121

07

BAB VII
PROSPEK PEREKONOMIAN DAERAH 122
7.1. PROSPEK PERTUMBUHAN EKONOMI PROVINSI BALI 124
7.2. PROSPEK INFLASI BALI 130

DAFTAR ISTILAH 134

BOKS

Boks 1
STRATEGI UNTUK MENDORONG KINERJA EKSPOR BALI 20
Boks 2
STRATEGI UNTUK MENDORONG PENINGKATAN KUALITAS PARIWISATA BALI 28
Boks 3
E-COMMERCE MENDUKUNG PERTUMBUHAN EKONOMI BALI 106

DAFTAR GRAFIK

Grafik 1.1. Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Bali dan Nasional Triwulanan 2
Grafik 1.2. Pangsa Ekonomi Provinsi Bali Terhadap Nasional 2
Grafik 1. 3. Perkembangan Indeks Keyakinan Konsumen, Indeks Kondisi Ekonomi dan Indeks Ekspektasi Konsumen 5
Grafik 1.4. Pertumbuhan Penjualan Eceran 5
Grafik 1.5. Perkembangan Penjualan Kendaraan Baru 5
Grafik 1.6. Perkembangan Kredit KPR, KKB, Multiguna 6
Grafik 1.7. Perkembangan Belanja APBD Provinsi Bali 6
Grafik 1.8. Perkembangan Belanja APBN di Bali 6
Grafik 1.9. Perkembangan SBT Investasi SKDU 7
Grafik 1.10. Perkembangan Nilai Impor *Capital Goods* 7
Grafik 1.11. Realisasi Pengadaan Semen di Bali 8
Grafik 1.12. Perkembangan Penanaman Modal Asing (PMA) di Bali 8
Grafik 1.13. Pangsa Nilai Ekspor Komoditas Utama 9
Grafik 1.14. Pertumbuhan Nilai Ekspor Komoditas Utama 9
Grafik 1.15. Impor Barang Berdasarkan Jenis 9
Grafik 1.16. Impor Barang Modal Berdasarkan Jenis 9
Grafik 1.17. Pangsa Nilai Ekspor Berdasarkan Negara Tujuan Utama 10
Grafik 1.18. Pertumbuhan Nilai Ekspor Berdasarkan Negara Tujuan Utama 10
Grafik 1.19. Kunjungan Wisman ke Bali 11
Grafik 1.20. Jumlah Kedatangan Penumpang ke Provinsi Bali pada Gate Internasional Bandara Ngurah Rai 11
Grafik 1.21. *Share* Wisman Berdasarkan Negara Asal 11
Grafik 1.22. Rata-Rata Lama Menginap Hotel Bintang dan Non Bintang 12
Grafik 1.23. Kunjungan Wisman ke Provinsi Bali Triwulanan 13
Grafik 1.24. Perkembangan Kunjungan Wisman Berdasarkan Negara 13
Grafik 1.25. Perkembangan Kedatangan Penumpang di Bandara I Gusti Ngurah Rai 13
Grafik 1.26. Perkembangan Arus Penumpang di Pelabuhan 13
Grafik 1.27. Perkembangan Produksi Padi di Bali 14
Grafik 1.28. Perkembangan NTP Sub Sektor Tanaman Pangan 14
Grafik 1.29. Perkembangan Komoditas Utama Ekspor Bali 15
Grafik 1.30. Pertumbuhan Produksi Industri Manuf. Besar & Sedang (IBS) dan Industri Manuf. Mikro & Kecil (IMK) 16
Grafik 1.31. Kredit Kategori Industri 16
Grafik 1.32. Perkembangan Pengadaan Semen 16
Grafik 1.33. Perkembangan SBT Konstruksi SKDU 16
Grafik 1.34. Perkembangan Kredit KPR 17
Grafik 1.35. Perkembangan Kredit Konstruksi 17
Grafik 1.36. Perkembangan Penjualan Kelompok Komoditas 18
Grafik 1.37. Perkembangan Indeks Keyakinan Konsumen, Indeks Kondisi Ekonomi dan Indeks Ekspektasi Konsumen 18
Grafik 1.38. Perkembangan Kredit Konsumsi 18
Grafik 1.39. Perkembangan Suku Bunga Kredit Konsumsi 18
Grafik 2.1. Pangsa PAD (rasio DDF) Terhadap Total Pendapatan Daerah (Triwulan II 2018-2019) 42
Grafik 2.2. Growth PAD Triwulan II (2018-2019) 42
Grafik 2.3. Persentase Realisasi Anggaran Belanja APBD Provinsi Bali Per Triwulan (2016-2019) 45
Grafik 2.4. Perkembangan Total Belanja, Belanja Operasi dan Modal APBD Provinsi Bali (2017-2019) 45
Grafik 2.5. Struktur Belanja Operasi APBD Provinsi Bali Triwulan II 2018 46
Grafik 2.6. Struktur Belanja Operasi APBD Provinsi Bali Triwulan II 2019 46
Grafik 2.7. Persentase Realisasi Pendapatan 9 kabupaten/kota Triwulan II (2018-2019) 48
Grafik 2.8. Derajat Desentralisasi Fiskal (DDF) 9 kabupaten/kota Triwulan II (2018-2019) 48
Grafik 2.9. Persentase Realisasi Belanja 9 kabupaten/kota Triwulan II (2018-2019) 51
Grafik 3.1. Inflasi Kota di Provinsi Bali (%yoy) 56
Grafik 3.2. Perkembangan Inflasi Nasional dan Provinsi Bali (% yoy) 56
Grafik 3.3. Inflasi Triwulanan Kelompok Bahan Makanan di Provinsi Bali (%,qtq) 58
Grafik 3.4. Inflasi Tahunan Kelompok Bahan Makanan di Provinsi Bali (%,yoy) 58
Grafik 3.5. Perkembangan Cabai Rawit Merah dan Cabai Merah Besar (Rp/Kg) 58
Grafik 3.6. Perkembangan Harga Beras di Provinsi Bali (Rp/Kg) 58
Grafik 3.7. Inflasi Triwulanan Kelompok Makanan Jadi, Minuman, Rokok dan Tembakau di Provinsi Bali (%,qtq) 59
Grafik 3.8. Inflasi Tahunan Kelompok Makanan Jadi, Minuman, Rokok dan Tembakau di Provinsi Bali (%,yoy) 59

Grafik 3.9. Inflasi Triwulanan Kelompok Perumahan, Air, Listrik, Gas dan Bahan Bakar di Provinsi Bali (%,qtq) 59
Grafik 3.10. Inflasi Tahunan Kelompok Perumahan,Air, Listirk, Gas, dan Bahan Bakar di Provinsi Bali (%,yoy) 59
Grafik 3.11. Inflasi Triwulanan Kelompok Sandang di Provinsi Provinsi Bali (%,qtq) 60
Grafik 3.12. Inflasi Tahunan Kelompok Sandang di Provinsi Provinsi Bali (%,yoy) 60
Grafik 3.13. Inflasi Triwulanan Kelompok Kesehatan di Provinsi Provinsi Bali (%,qtq) 60
Grafik 3.14. Inflasi Tahunan Kelompok Kesehatan di Provinsi Provinsi Bali (%,yoy) 60
Grafik 3.15. Inflasi Triwulanan Kelompok Pendidikan, Rekreasi, dan Olahraga di Provinsi Bali (%,qtq) 61
Grafik 3.16. Inflasi Tahunan Kelompok Pendidikan, Rekreasi, dan Olahraga di Provinsi Bali (%,yoy) 61
Grafik 3.17 Inflasi Triwulanan Kelompok Transpor, Komunikasi, dan Jasa Keuangan di Provinsi Bali (%,qtq) 61
Grafik 3.18 Inflasi Tahunan Kelompok Transpor, Komunikasi, dan Jasa Keuangan di Provinsi Bali (%,yoy) 61
Grafik 3.19. Bobot Tahun Dasar (2012=100) Kelompok Pengeluaran Kota Denpasar 62
Grafik 3.20. Bobot Tahun Dasar (2012=100) Kelompok Pengeluaran Kota Singaraja 62
Grafik 3.21. Perkembangan Inflasi Berdasarkan Penyebabnya (% yoy) 64
Grafik 3.22. Perkembangan Inflasi Berdasarkan Penyebabnya (% mtm) 65
Grafik 3.23. Perkembangan Harga Jual Listrik Untuk Rumah Tangga 900 VA Di Provinsi Bali 65
Grafik 3.24. Harga Emas Internasional 66
Grafik 3.25. Ekspektasi Konsumen 66
Grafik 3.26. Perkembangan Inflasi Pedesaan (mtm) dan Nilai Tukar Petani (NTP) 66
Grafik 3.27. Perkembangan Inflasi Pedesaan (ytd) 66
Grafik 4.1. Komposisi Impor Bali 76
Grafik 4.2. Tenaga Kerja Berdasarkan Pendidikan 76
Grafik 4.3. Perkembangan Nilai Ekspor Barang LN 77
Grafik 4.4. Indeks Hasil Survei Konsumen 77
Grafik 4.5. Perkembangan Kondisi Likuiditas Keuangan Korporasi di Bali 77
Grafik 4.6. Perkembangan *Likert Scale* 77
Grafik 4.7. Komposisi Penggunaan Kredit Korporasi 78
Grafik 4.8. Pertumbuhan Kredit Korporasi 78
Grafik 4.9. NPL Kredit Korporasi 78
Grafik 4.10. Kredit Korporasi Lapangan Usaha Akmamin 79
Grafik 4.11. Kredit Korporasi Lapangan Usaha Pertanian 79
Grafik 4.12. Kredit Korporasi Lapangan Usaha Perdagangan 79
Grafik 4.13. Kredit Korporasi Lapangan Usaha Konstruksi 79
Grafik 4.14. Kontribusi Konsumsi Rumah Tangga Terhadap PDRB Bali 80
Grafik 4.15. Persepsi Rumah Tangga Provinsi Bali Terhadap Ekonomi Saat Ini 80
Grafik 4.16. Komposisi Pengeluaran Rumah Tangga Bali 80
Grafik 4.17. Komposisi DPK Perbankan Provinsi Bali (% total DPK Bali) 82
Grafik 4.18. Komposisi Perbankan DPK Provinsi Bali berdasarkan Jenis Simpanan (% total DPK Bali) 82
Grafik 4.19. Pertumbuhan DPK Perbankan Provinsi Bali (%) 82
Grafik 4.20. Pertumbuhan DPK Perseorangan (%) 82
Grafik 4.21. Komposisi Penyaluran Kredit Perbankan 83
Grafik 4.22. Komposisi Kredit Perseorangan 83
Grafik 4.23. Komposisi Kredit Konsumsi Perseorangan 84
Grafik 4.24. Pertumbuhan Kredit Konsumsi Perseorangan 84
Grafik 4.25. NPL dan Suku Bunga Kredit Rumah Tangga & Kredit Konsumsi di Bali 84
Grafik 4.26. Pertumbuhan Kredit Rumah Tangga (%) 84
Grafik 4.27. Pertumbuhan Kredit UMKM 88
Grafik 4.28. Pangsa Kredit UMKM terhadap Total Kredit 88
Grafik 4.29. Pangsa Nominal Kredit UMKM 89
Grafik 4.30. Pangsa Kredit UMKM Berdasarkan Kabupaten/Kota 89
Grafik 4.31. NPL Kredit UMKM Berdasar Kab/Kota 89
Grafik 4.32. Realisasi Kredit UMKM Berdasar Sektor Ekonomi 89
Grafik 4.33. Rasio Rekening DPK per Penduduk Bekerja 90
Grafik 4.34. Rasio Rekening Kredit per Penduduk Bekerja 90
Grafik 5.1. Pergerakan *Inflow, Outflow, Netflow,* Inflasi dan PDRB 95
Grafik 5.2. Rasio UTLE terhadap Inflow di Provinsi Bali 95
Grafik 5.3. Perkembangan Nominal Kliring di Bali 96
Grafik 5.4. Perkembangan Volume Kliring di Bali 96
Grafik 5.5. Perkembangan Nominal RTGS 96
Grafik 5.6. Perkembangan Volume RTGS 96
Grafik 5.7. Perkembangan Cek dan Bilyet Giro di Bali 97
Grafik 5.8. Perkembangan Kegiatan Kas Keliling di Bali 98

Grafik 5.9. Perkembangan Transaksi Jual – Beli Valas di Provinsi Bali 92
Grafik 5.10. Perkembangan Jumlah Kunjungan Wisman di Provinsi Bali 99
Grafik 5.11. Jumlah KUPVA BB Berizin di Provinsi Bali 99
Grafik 5.12. Perkembangan Jumlah Uang Elektronik 103
Grafik 5.13. Perkembangan Jenis Transaksi Uang Elektronik 103
Grafik 5.14. Pangsa Jenis Transaksi Uang Elektronik 103
Grafik 5.15. Perkembangan Jumlah Agen LKD di Provinsi Bali 104
Grafik 6.1. Perkembangan Tingkat Pengangguran di Provinsi Bali 112
Grafik 6.2. Pertumbuhan Jumlah Tenaga Kerja Berdasarkan Tingkat Pendidikan 114
Grafik 6.3. Komposisi Tenaga Kerja Berdasarkan Tingkat Pendidikan 114
Grafik 6.4. Pertumbuhan Jumlah Tenaga Kerja Sektor Utama 115
Grafik 6.5. Komposisi Tenaga Kerja Sektor Utama 115
Grafik 6.6. Perkembangan Penyerapan Tenaga Kerja Formal & Informal 116
Grafik 6.7. Komposisi Tenaga Kerja Formal dan Informal 116
Grafik 6.8. Hasil SKDU Triwulan I 2019 117
Grafik 6.9. Indikator Ekspektasi Konsumen 117
Grafik 6.10. Indikator Ekspektasi SKDU 118
Grafik 6.11. Perkembangan Kemiskinan di Provinsi Bali 119
Grafik 6.12. Indikator dan Keterkaitan Kemiskinan di Provinsi Bali 119
Grafik 6.13. Perkembangan Gini Ratio Provinsi Bali dan Nasional 120
Grafik 6.14. Distribusi Pendapatan Perkapita Penduduk 120
Grafik 6.15. NTP Bali, Indeks yang Diterima (IT), dan Indeks yang Dibayar (IB) 120
Grafik 6.16. Perbandingan NTP Provinsi Bali dan Nasional 121
Grafik 6.17. Perkembangan IPM Provinsi Bali 121
Grafik 6.18. Perbandingan IPM Provinsi Bali dan Nasional 121
Grafik 7.1. Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Bali Triwulan III & IV Tahun 2019 124
Grafik 7.2. Perkembangan Indeks Ekspektasi Konsumen 125
Grafik 7.3. Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Bali Tahun 2019 130

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1. Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Bali Sisi Permintaan (%, yoy) 4
Tabel 1.2. Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Bali Sisi Penawaran (%, yoy) 12
Tabel 2.1. Pagu Anggaran Belanja Pemerintah di Provinsi Bali (2018-2019) 38
Tabel 2.2. Realisasi Belanja Pemerintah di Provinsi Bali Triwulan II (2018 & 2019) 39
Tabel 2.3. Persentase Realisasi Belanja Pemerintah di Provinsi Bali Triwulan II (2018-2019) 39
Tabel 2.4. Pagu Anggaran Pendapatan Pemerintah di Provinsi Bali Triwulan II (2018-2019) 40
Tabel 2.5. Realisasi Pendapatan Pemerintah di Provinsi Bali Triwulan II (2018-2019) 40
Tabel 2.6. Persentase Realisasi Pendapatan Pemerintah di Provinsi Bali Triwulan II (2018-2019) 41
Tabel 2.7. Realisasi Pendapatan Daerah Provinsi Bali Triwulan II (2018-2019) 41
Tabel 2.8. Realisasi Belanja Daerah Provinsi Bali Triwulan II (2018-2019) 44
Tabel 2.9. Target Anggaran Pendapatan Daerah 9 Kabupaten/Kota 2018-2019 47
Tabel 2.10. Realisasi Pendapatan Daerah Gabungan Kabupaten/Kota Triwulan II (2018-2019 47
Tabel 2.11. Target Anggaran Belanja Daerah 9 Kabupaten/Kota 2018-2019 49
Tabel 2.12. Realisasi Belanja Daerah 9 Kabupaten/Kota Triwulan II (2018-2019) 50
Tabel 2.13. Realisasi Belanja APBN di Provinsi Bali Triwulan II (2018-2019) 52
Tabel 2.14. Realisasi Belanja Daerah 9 Kabupaten/Kota Triwulan I (2018-2019) 41
Tabel 2.15. Pagu Anggaran Belanja APBN di Provinsi Bali (2018-2019) 43
Tabel 2.16. Realisasi Belanja APBN di Provinsi Bali Triwulan I (2018-2019) 44
Tabel 3.1. Perkembangan Inflasi Kota Denpasar Per Kelompok Pengeluaran 62
Tabel 3. 2 Ranking Komoditas Berdasarkan Andil Inflasi/Deflasi (yoy) di Kota Denpasar Tw II 2019 63
Tabel 3. 3 Perkembangan Inflasi Kota Singaraja Per Kelompok Pengeluaran 64
Tabel 3. 4 Ranking Komoditas Berdasarkan Andil Inflasi/Deflasi di Kota Singaraja Triwulan II 2019 64
Tabel 3.5. Kegiatan TPID Triwulan I 2019 69
Tabel 4.1. Perkembangan Jumlah Bank dan Jaringan Kantor Bank di Bali 72
Tabel 4.2. Perkembangan Indikator Bank Umum di Bali 73
Tabel 4.3. Perkembangan Indikator BPR di Bali 74
Tabel 4.4. Perkembangan Indikator Bank Syariah di Bali 75
Tabel 4.5. Komposisi Pengeluaran Rumah Tangga Berdasarkan Kategori Pengeluarannya Per Bulan 81
Tabel 4.6. Dana Rumah Tangga Untuk Membayar Cicilan dan Perubahannya Berdasarkan Pendapatan 81
Tabel 4.7. Dana Rumah Tangga Untuk Menabung dan Perubahannya Berdasarkan Pendapatan 81
Tabel 4.8. Komposisi Jumlah Rekening Perseorangan Per Nilai Penempatan di Bali 83
Tabel 4.9. Penyaluran Kredit Perseorangan Secara Spasial Posisi Triwulan II 2019 85
Tabel 4.10. Pertumbuhan dan NPL KPR di Bali 85
Tabel 4.11. Pertumbuhan dan NPL KKB dan Multiguna di Bali 85
Tabel 4.12. Komposisi Kredit Multiguna Posisi Triwulan II 2019 87
Tabel 4.13. NPL Kredit Multiguna 87
Tabel 4.14. NPL Kredit UMKM berdasarkan Sektor Ekonomi 88
Tabel 5.1. Perkembangan *Inflow – Outflow* Provinsi Bali 94
Tabel 5.2. Perkembangan Indikator SKNBI di Bali 96
Tabel 5.3. Rasio Jumlah Kantor dan ATM per 100.000 Penduduk 100
Tabel 5.4. Rasio Jumlah Kantor dan ATM per 1000 km^2 101
Tabel 5.5. Indikator *Banking Penetration* 101
Tabel 5.6. Jumlah Gardu Tol Provinsi Bali Mandara 102
Tabel 6.1. Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas Menurut Jenis Kegiatan Utama 112
Tabel 6.2. Tingkat Pengangguran Terbuka menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan 113
Tabel 6.3. Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas yang Bekerja Menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan 113
Tabel 6.4. Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas yang Bekerja Menurut Jumlah Jam Kerja 114

Tabel 6.5. Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas yang Bekerja Menurut Lapangan Usaha (Ribu Orang) 115
Tabel 6.6. Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas yang Bekerja Menurut Status Pekerjaan Utama (Orang) 116
Tabel 6.7. Perkembangan Jumlah Penduduk Miskin 118
Tabel 7.1. Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Bali 2019 126
Tabel 7.2. Outlook Ekonomi Dunia dan Negara Mitra Dagang Utama Provinsi Bali 2019-2024 127

halaman ini sengaja dikosongkan

5,96 %(yoy)
Tw I 2019

2,14 %(yoy)
Tw II 2019

5,64 %(yoy)
Tw II 2019

1,85 %(yoy)
Tw I 2019

PERTUMBUHAN EKONOMI & PERKEMBANGAN INFLASI

Pertumbuhan Ekonomi Bali pada triwulan II 2019 mengalami perlambatan dibandingkan triwulan I 2019. Ekonomi Bali tercatat tumbuh sebesar 5,64% (yoy) di triwulan II 2019, lebih rendah dibanding triwulan I 2019 yang sebesar 5,96%.

Inflasi Bali pada triwulan II 2019 tercatat meningkat dibanding triwulan sebelumnya. Inflasi Bali pada triwulan II 2019 tercatat sebesar 2,14% (yoy), lebih tinggi dibanding triwulan I 2019 yang sebesar 1,85% (yoy).

KETENAGAKERJAAN & KESEJAHTERAAN

ANGKATAN KERJA (*Juta Orang)

Februari 2018	Agustus 2018	Februari 2019
2,61	2,53	2,54

KEMISKINAN

Maret 2018	September 2018	Maret 2019
4,01%	3,91%	3,79%

PENGANGGURAN TERBUKA

Februari 2018	Agustus 2018	Februari 2019
0,86%	1,37%	1,19%

GINI RATIO

Maret 2018	September 2018	Maret 2019
0,377	0,364	0,366

KEUANGAN PEMERINTAH

Serapan Realisasi Pendapatan Daerah

	APBD Provinsi Bali	Gabungan APBD Kab/Kota	Total Serapan Realisasi Pendapatan
Tw II 2018	50,48%	39,24%	41,83%
Tw II 2019	54,77%	40,48%	43,69%

Serapan Realisasi Belanja Daerah

	APBN Wilayah Bali	APBD Provinsi Bali	Gabungan APBD Kab/Kota	Total Serapan Realisasi Belanja
Tw II 2018	35,21%	33,96%	31,02%	32,62%
Tw II 2019	40,94%	28,51%	32,04%	33,77%

STABILITAS KEUANGAN DAERAH

	Tw I 2019	Tw II 2019	
Pertumbuhan Kredit Rumah Tangga	6,29 % (yoy)	8,01 % (yoy)	2,33 % (yoy) / 2,54 % (yoy) — NPL Kredit Rumah Tangga
Pertumbuhan Kredit Korporasi	5,38 % (yoy)	14,46 % (yoy)	7,95 % (yoy) / 8,63 % (yoy) — NPL Kredit Korporasi
Pertumbuhan Kredit UMKM	5,79 % (yoy)	7,51 % (yoy)	3,13 % (yoy) / 3,25 % (yoy) — NPL Kredit UMKM

Tw I 2019
Tw II 2019

PERTUMBUHAN DPK 8,01 (%, yoy) 8,93 (%, yoy)	PERTUMBUHAN DEPOSITO 5,88 (%, yoy) 10,06 (%, yoy)	PERTUMBUHAN GIRO 4,56 (%, yoy) 3,76 (%, yoy)	PERTUMBUHAN TABUNGAN 10,77 (%, yoy) 9,91 (%, yoy)
PERTUMBUHAN KREDIT 5,44 (%, yoy) 7,97 (%, yoy)	PERTUMBUHAN KREDIT MODAL KERJA 2,88 (%, yoy) 4,69 (%, yoy)	PERTUMBUHAN KREDIT INVESTASI 9,66 (%, yoy) 15,88 (%, yoy)	PERTUMBUHAN KREDIT KONSUMSI 5,53 (%, yoy) 6,63 (%, yoy)

PERKEMBANGAN SISTEM PEMBAYARAN

TUNAI	TUNAI	TUNAI	NON TUNAI	NON TUNAI	NON TUNAI	NON TUNAI
5,57 Rp Triliun Tw II 2019	6,41 Rp Triliun Tw II 2019	840 Rp Miliar Tw II 2019 Net Outflow	11,95 Rp Triliun Tw II 2019	413 Ribu Lembar Tw II 2019	9,52 Rp Triliun Tw II 2019	5.821 Lembar Tw II 2019
6,76 Rp Triliun Tw II 2018	3,51 Rp Triliun Tw II 2018	3,25 Rp Triliun Tw II 2018 Net Inflow	12,60 Rp Triliun Tw II 2018	437 Ribu Lembar Tw II 2018	3,16 Rp Triliun Tw II 2018	3.971 Lembar Tw II 2018
Inflow	Outflow	Net Inflow/ Net Outflow	Nominal Kliring	Volume Kliring	Nominal RTGS	Jumlah Warkat RTGS

PROSPEK PEREKONOMIAN BALI

Pertumbuhan Ekonomi

- 5,90%-6,30% (yoy) — Tw III 2019
- 5,60%-6,00% (yoy) — Tw IV 2019
- 5,70%-6,10% (yoy) — Tahun 2019

Inflasi

- 2,60%-3,00% (yoy) — Tw III 2019
- 2,80%-3,20% (yoy) — Tw IV 2019
- 2,80%-3,20% (yoy) — Tahun 2019

RINGKASAN EKSEKUTIF

PERTUMBUHAN EKONOMI TRIWULAN II 2019

Kinerja ekonomi Provinsi Bali pada triwulan II 2019 tumbuh sebesar 5,64% (yoy), melambat dibanding triwulan I 2019 yang sebesar 5,96% (yoy)

Kinerja perekonomian Bali pada triwulan II 2019 masih tetap tumbuh kuat, meskipun melambat dibanding triwulan sebelumnya. Perekonomian tumbuh sebesar 5,64% (yoy), lebih rendah dibanding triwulan sebelumnya yang tumbuh sebesar 5,96% (yoy) maupun triwulan yang sama tahun 2018 yang tumbuh sebesar 6,05% (yoy). Dari sisi permintaan, perlambatan bersumber dari melambatnya kinerja seluruh komponen pengeluaran yaitu komponen konsumsi rumah tangga, konsumsi pemerintah, investasi dan ekspor luar negeri. Hal yang sama terjadi pada sisi penawaran dimana lapangan usaha akomodasi makan dan minum yang sebelumnya menjadi andalan perekonomian terkait dengan banyaknya wisatawan mancanegara yang datang ke Bali, pada triwulan ini banyak menghadapi tantangan. Selain itu, perlambatan terjadi pada hampir semua lapangan usaha utama Bali kecuali pertanian. Beberapa faktor yang menjadi penahan kinerja ekonomi Bali meliputi: i). Menurunnya kinerja bidang usaha pariwisata, ii) proyek konstruksi dan infrastruktur yang tidak semasif periode yang sama tahun sebelumnya, iii) sikap *wait and see* pelaku usaha menanti kebijakan presiden terpilih,iv) prakiraan semakin dalamnya perlambatan kinerja ekonomi negara mitra dagang utama Bali.

PROSPEK EKONOMI TRIWULAN III 2019

Kinerja Ekonomi Provinsi Bali pada triwulan III 2019 diperkirakan akan mengalami akselerasi, dengan tumbuh dalam kisaran 5,90%-6,30% (yoy)

Dari berbagai *prompt* indikator yang ada dan hasil survei serta liaison yang telah dilakukan, kinerja perekonomian Provinsi Bali pada triwulan III 2019 diperkirakan akan tumbuh kuat, dengan kecenderungan meningkat (akselerasi). Perekonomian diperkirakan akan tumbuh dalam kisaran 5,90%-6,30% (yoy). Beberapa faktor yang menjadi pendorong akselerasi tersebut meliputi: i) pembayaran gaji ke 13 ASN dengan nilai yang lebih tinggi, ii) masuknya periode *high season* pariwisata, didukung oleh penambahan *direct flight* internasional dan domestik, iii) masuknya puncak panen komoditas perkebunan, dengan perkiraan produksi yang lebih tinggi, sejalan dengan kondisi cuaca yang mendukung, iv) masuknya periode puncak pengiriman ekspor barang untuk memenuhi permintaan Natal dan Tahun Baru, v) meningkatnya persentase realisasi fisik dan keuangan pengerjaan proyek konstruksi dan infrastruktur, vi) masuknya periode tahun ajaran baru, vii) penurunan harga tiket pesawat LCC rute domestik sebesar 50% dari Tarif Batas Atas (TBA) secara terbatas.

Dari sisi permintaan, perkiraan meningkatnya kinerja perekonomian di triwulan III 2019 terutama didorong oleh peningkatan pada semua komponen yang meliputi konsumsi rumah tangga, ekspor luar negeri, konsumsi pemerintah dan investasi. Sementara itu, dari sisi penawaran meningkatnya kinerja ekonomi

Provinsi Bali didorong oleh akselerasi kinerja pada lapangan usaha dengan pangsa yang dominan yaitu lapangan usaha akomodasi makan dan minum, transportasi, konstruksi, industri pengolahan serta perdagangan besar dan eceran.

PERKEMBANGAN KEUANGAN PEMERINTAH

Realisasi belanja pemerintah (APBN, tingkat Provinsi Bali dan gabungan kabupaten/kota) pada triwulan II 2019 tercatat sebesar Rp13,73 triliun atau meningkat 6,24% (yoy), lebih rendah dibanding pertumbuhan realisasi belanja pemerintah triwulan II 2018 yang sebesar 21,51% (yoy) atau tercatat Rp12,92 triliun. Melambatnya peningkatan realisasi belanja pemerintah pada triwulan II 2019, terutama disebabkan oleh rendahnya peningkatan realisasi belanja untuk kategori gabungan kabupaten/kota dan menurunnya realisasi belanja di tingkat Provinsi. Sementara itu, realisasi belanja untuk APBN tetap tumbuh lebih tinggi, sehingga dapat menahan dalamnya perlambatan realisasi belanja pemerintah. Serapan realisasi belanja pemerintah (APBD & APBN) di triwulan II 2019 tercatat sebesar 33,77%, meningkat dibandingkan serapan realisasi belanja triwulan II 2018 yang sebesar 32,62%. Kondisi ini terutama didorong oleh meningkatnya serapan realisasi belanja untuk kategori APBN dan gabungan kabupaten/kota

Realisasi belanja pemerintah pada triwulan II 2019 tercatat sebesar Rp13,73 triliun, dengan serapan realisasi belanja mencapai 33,77%%, lebih tinggi dibanding triwulan II 2018 yang serapannya sebesar 32,62% atau setara dengan nominal Rp12,92 triliun.

Pada sisi yang lain, realisasi pendapatan pemerintah (tingkat provinsi Bali dan gabungan kabupaten/kota) pada triwulan II 2019 tercatat sebesar Rp12,27 triliun atau tumbuh 8,72% (yoy), meningkat dibanding triwulan II 2018 yang sebesar 7,78% (yoy) atau Rp11,28 triliun. Kondisi ini didukung oleh peningkatan pertumbuhan realisasi pendapatan baik pada tingkat provinsi maupun gabungan 9 kabupaten/kota. Dengan kondisi tersebut, serapan realisasi pendapatan pemerintah di triwulan II 2019 mencapai sebesar 43,69%, lebih tinggi dibanding triwulan II 2018 yang sebesar 41,83%.

Realisasi pendapatan pemerintah pada triwulan II 2019 tercatat sebesar Rp12,27 triliun atau dengan serapan realisasi sebesar 43,69%, meningkat dibanding triwulan II 2018 yang serapannya sebesar 43,69% setara dengan nominal sebesar Rp11,28 triliun

PERKEMBANGAN INFLASI

Inflasi Provinsi Bali pada triwulan II 2019 tercatat sebesar 2,14% (yoy), lebih tinggi dibanding triwulan I 2019 yang sebesar 1,85% (yoy). Meskipun demikian, laju inflasi tersebut lebih rendah dibanding realisasi inflasi Nasional di periode yang sama sebesar 3,28% (yoy). Meningkatnya realisasi inflasi tersebut didorong oleh meningkatnya tekanan inflasi pada komponen inti, sedangkan inflasi komponen *administered price* dan *volatile food* melandai. Tekanan inflasi yang meningkat juga terjadi pada 4 (empat) kelompok pengeluaran yaitu kelompok makanan jadi, kelompok perumahan, kelompok sandang, serta kelompok transpor. Meskipun demikian, realisasi inflasi Bali pada triwulan II 2019 masih dalam sasaran inflasi Nasional yaitu 3,5%±1% (yoy). Masih terjaganya inflasi di Provinsi Bali tersebut, didukung oleh tetap solidnya upaya pengendalian inflasi yang dilakukan Bank Indonesia dan Pemerintah Daerah melalui forum Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID).

Inflasi Provinsi Bali triwulan II 2019 tercatat sebesar 2,14% (yoy), meningkat dibanding inflasi triwulan I 2019 yang sebesar 1,85% (yoy).

PROSPEK INFLASI TRIWULAN III 2019

Tekanan inflasi Provinsi Bali pada triwulan III 2019 diperkirakan akan meningkat dibanding triwulan II 2019, yaitu dalam kisaran 2,60%-3,00% (yoy).

Inflasi Provinsi Bali pada triwulan III 2019 diperkirakan akan meningkat dibanding triwulan II 2019, yaitu dalam kisaran 2,60% - 3,00% (yoy). Terdapat beberapa tantangan tekanan inflasi pada triwulan III 2019 seiring adanya: (i) resiko musim kemarau yang diperkirakan lebih kering dibanding tahun sebelumnya, (ii) gelombang laut yang tinggi, akan berdampak pada hasil tangkapan perikanan menurun, serta (iii) resiko kenaikan permintaan sejalan dengan masuknya periode *high season* pariwisata. Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Provinsi Bali akan terus berupaya melakukan pengendalian harga baik melalui forum koordinasi dan langkah tindak lanjut dengan OPD terkait. Program kerja TPID akan ditujukan pada keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi dan komunikasi efektif untuk mengendalikan konsumsi dan ekspektasi berlebih. Upaya stabilisasi harga melalui pelaksanaan pasar murah dan operasi pasar insidentil juga akan dilanjutkan sehingga diharapkan dapat menjadi jangkar dalam penetapan harga dan menahan laju inflasi yang dapat bersumber dari sisi permintaan, sisi penawaran, dan ekspektasi pelaku ekonomi.

PERKEMBANGAN STABILITAS SISTEM KEUANGAN

Pertumbuhan kredit perbankan mengalami akselerasi, Dana Pihak Ketiga (DPK) melambat sementara kualitas kredit tetap terjaga pada triwulan II 2019

Jumlah bank umum dan BPR yang beroperasi di Bali relatif stabil. Aset perbankan mengalami akselerasi seiring dengan peningkatan pertumbuhan kredit perbankan. Sementara itu dana pihak ketiga di perbankan mengalami perlambatan. Kualitas kredit perbankan di Bali dilihat dari NPL berada pada level yang aman. Korporasi di Bali pada triwulan II 2019 mencatatkan kinerja yang semakin baik dilihat dari penjualan baik untuk tujuan domestik maupun ekspor. Sementara itu dari sisi perbankan terhadap korporasi, meskipun proporsinya relatif kecil terhadap total kredit perbankan, namun kualitas kreditnya perlu diwaspadai. Keuangan rumah tangga pada triwulan II 2019 juga menunjukkan kinerja yang lebih baik dibanding triwulan sebelumnya. Sektor rumah tangga memerlukan perhatian khusus mengingat proporsinya yang relatif besar dalam total kredit perbankan di Bali. Akses keuangan penduduk Bali terhadap perbankan mengalami peningkatan yang signifikan baik dilihat dari dana pihak ketiga di perbankan maupun kredit perbankan.

Kredit kelompok rumah tangga pada triwulan II 2019 mengalami akselerasi, namun kualitas kredit mengalami penurunan.

Meskipun kinerja konsumsi rumah tangga (PDRB) di triwulan II 2019 tumbuh melambat, namun penyaluran kredit untuk kelompok rumah tangga (perseorangan) di periode yang sama tetap terakselerasi, yaitu sebesar 8,01% (yoy), lebih tinggi dibanding triwulan I 2019 sebesar 6,29% (yoy). Sementara itu, dari sisi kualitas kredit mengalami penurunan tercermin oleh nilai NPL yang meningkat yaitu dari 2,33% pada triwulan I 2019, menjadi 2,54% pada triwulan II 2019.

Sejalan dengan kinerja ekonomi Bali yang tetap tumbuh kuat meskipun melambat pada triwulan II 2019, pertumbuhan kredit korporasi tetap menunjukkan

akselerasi. Pada triwulan II 2019, kredit korporasi tercatat tumbuh sebesar 14,46% (yoy), lebih tinggi dibanding triwulan sebelumnya yang sebesar 5,38% (yoy). Akselerasi pertumbuhan kredit korporasi ini didorong oleh peningkatan kinerja semua komponen kredit dari sisi penggunaan, yaitu modal kerja, kredit investasi dan kredit konsumsi. Namun demikian, dari sisi kualitas kredit mengalami penurunan yaitu menjadi 8,63% pada triwulan II 2019, lebih tinggi dibanding triwulan I 2019 yang sebesar 7,95%. Kondisi ini tentunya perlu menjadi perhatian, khususnya dalam rangka mitigasi terkait dengan resiko kredit sehingga kualitas kredit dapat mengalami perbaikan.

Pertumbuhan kredit Korporasi dan UMKM mengalami akselerasi pada triwulan II 2019 dibanding triwulan sebelumnya. Namun demikian, kualitas kredit Koprorasi dan UMKM mengalami penurunan, tercermin dari peningkatan NPL.

Perkembangan kredit UMKM menunjukkan peningkatan (akselerasi) pada triwulan II 2019 dibanding triwulan sebelumnya. Kredit UMKM tercatat tumbuh sebesar 7,51% (yoy), lebih tinggi dibanding triwulan I 2019 mencapai 5,79% (yoy). Namun demikian, kualitas kredit UMKM mengalami penurunan, tercermin oleh peningkatan nilai NPL di triwulan II 2019 yang sebesar 3,25% dibanding 3,13% pada triwulan I 2019.

PERKEMBANGAN SISTEM PEMBAYARAN

Perkembangan kinerja transaksi tunai pada triwulan II 2019 di Provinsi Bali menunjukkan terjadinya *net outflow* (uang yang masuk ke Bank Indonesia melalui perbankan lebih kecil dibanding uang yang keluar) sebesar Rp840 miliar. Terjadinya *net outflow* dalam jumlah yang signifikan tersebut, didorong oleh tingginya permintaan uang kartal pada perayaan Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN), yaitu Ramadhan dan Idul Fitri.

Nilai nominal transaksi tunai pada triwulan II 2019 menunjukkan terjadinya net outflow sebesar Rp840 miliar.

Transaksi melalui SKNBI menurun dibanding triwulan sebelumnya, baik secara nominal maupun volume. Pada triwulan II 2019, volume transaksi melalui SKNBI tercatat sebanyak 413 ribu lembar atau turun 22,66% (yoy), lebih rendah dibandingkan triwulan I 2019 yang turun sebesar 18,76% (yoy). Sejalan dengan itu, nominal transaksi melalui SKNBI tercatat sebesar Rp11,95 triliun atau turun sebesar 13,68% (yoy) pada triwulan II 2019, lebih rendah dibanding triwulan I 2019 yang menurun sebesar 7,57% (yoy).

Transaksi melalui SKNBI menunjukkan penurunan, baik secara nominal dan volume pada triwulan II 2019, dibanding triwulan sebelumnya.

Perkembangan nominal transaksi penyelenggara KUPVA BB di Provinsi Bali di triwulan II 2019 mengalami penurunan sebesar 1,80% (yoy) atau dengan nilai nominal sebesar Rp9,75 triliun (beli Rp4,78 triliun, jual Rp4,96 triliun), lebih rendah dibanding triwulan I 2019 yang menurun lebih dalam sebesar 11,30% (yoy). Masih tertahannya perkembangan transaksi KUPVA di triwulan II 2019 tersebut, disebabkan oleh menurunnya jumlah kunjungan wisatawan mancanegara (wisman) yang berkunjung ke Bali, disebabkan oleh ekses negatif pelaksanaan pemilihan umum dan dampak lanjutan kebijakan *Zero Dollar Tourism*.

Transaksi penukaran valuta asing melalui KUPVA BB menunjukkan perbaikan pada triwulan II 2019 dibanding triwulan sebelumnya, meskipun tetap menurun.

PERKEMBANGAN KESEJAHTERAAN

Pada periode Februari 2019, angkatan kerja dan TPAK di Provinsi Bali menurun dibanding Februari 2018. Kondisi tersebut mendorong terjadinya peingkatan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT).

Secara umum kondisi sektor ketenagakerjaan Provinsi Bali pada Februari 2019 menunjukkan kinerja yang menurun dibandingkan Februari 2018. Jumlah angkatan kerja di Provinsi Bali pada Februari 2019 mengalami penurunan menjadi 2,54 juta orang atau menurun 2,60% (yoy), lebih rendah dibanding Februari 2018 yang tumbuh 5,60%. Kondisi ini juga diikuti oleh menurunnya Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) menjadi sebesar 76,68% di Februari 2019, lebih rendah dibanding Februari 2018 sebesar 79,83%. Penurunan angkatan kerja dan TPAK di periode Februari 2019 tersebut, berdampak pada meningkatnya Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), yaitu dari 0,89% (Februari 2018) menjadi 1,19% (Februari 2019). Prospek sektor ketenagakerjaan Provinsi Bali pada triwulan II dan III 2019 diperkirakan akan menunjukkan peningkatan kinerja, terkonfirmasi dari hasil Survei Kegiatan Dunia Usaha (SKDU) dan hasil Survei Konsumen (SK) periode triwulan I dan II 2019.

Tingkat kemiskinan di Provinsi Bali pada periode Maret 2019 menunjukkan penurunan dibanding Maret 2018, diikuti oleh penurunan rasio gini dan peningkatan NTP

Tingkat kemiskinan Provinsi Bali pada Maret 2019 mengalami penurunan menjadi sebesar 3,79%, menurun dibanding Maret 2018 yang sebesar 4,01%. Sejalan dengan kondisi tersebut, gini ratio Provinsi Bali juga mengalami penurunan dari 0,377 pada Maret 2018 menjadi 0,366 pada Maret 2019. Sementara itu, indeks Nilai Tukar Petani (NTP) Provinsi Bali yang menjadi salah satu indikator tingkat kesejahteraan petani, menunjukkan peningkatan pada triwulan II 2019 yaitu sebesar 103,49, lebih tinggi dibanding triwulan II 2018 yang sebesar 103,32. Kondisi ini mengindikasikan peningkatan kesejahteraaan masyarakat, khususnya di wilayah pedesaan.

PROSPEK EKONOMI BALI

Kinerja ekonomi Provinsi Bali pada triwulan IV 2019 diperkirakan tumbuh melambat, dengan kisaran 5,60%-6,00% (yoy)

Berdasarkan dari *prompt* indikator yang ada, pertumbuhan ekonomi Provinsi Bali pada triwulan IV 2019 diperkirakan akan tumbuh dalam kisaran 5,60%-6,00% (yoy), mengalami perlambatan dibanding triwulan III 2019. Dari sisi permintaan, melambatnya kinerja ekonomi Bali tersebut disebabkan oleh tertahannya kinerja komponen utama ekonomi Bali. Kondisi tersebut sebagai dampak *base effect* tingginya kinerja ekonomi Bali pada triwulan IV 2018, yang didukung oleh penyelenggaraan IMF-WB AM 2018. Komponen utama yang diperkirakan akan mengalami perlambatan kinerja adalah konsumsi rumah tangga, konsumsi pemerintah dan ekspor luar negeri. Dari sisi penawaran, melambatnya kinerja ekonomi Bali diperkirakan disebabkan oleh melambatnya kinerja 4 lapangan usaha utama, yaitu lapangan usaha penyediaan akomodasi makan dan minum, perdagangan besar dan eceran, transportasi dan pergudangan serta industri pengolahan.

Dengan mencermati perkembangan ekonomi, *prompt* indikator, hasil survei dan liaison terakhir, diperkirakan perekonomian Provinsi Bali pada tahun 2019 akan tetap tumbuh kuat meski dengan kecenderungan yang melambat dibandingkan pertumbuhan tahun 2018. Ekonomi Bali diperkirakan akan tumbuh dalam kisaran 5,7%-6,10% (yoy). Komponen yang menjadi motor penggerak ekonomi Bali adalah konsumsi di tengah laju investasi yang melambat. Melambatnya kinerja ekonomi Bali, dari sisi permintaan terutama disebabkan oleh perlambatan kinerja komponen ekspor luar negeri dan investasi. Sementara dari sisi penawaran, melambatnya kinerja ekonomi Bali disebabkan oleh melambatnya 4 lapangan usaha utama ekonomi Bali, yaitu lapangan usaha akomodasi makan minum, pertanian, konstruksi dan transportasi

Kinerja ekonomi Provinsi Bali tahun 2019 diperkirakan tumbuh melambat, dalam kisaran 5,70%-6,10% (yoy)

PROSPEK INFLASI BALI

Inflasi Bali pada triwulan IV 2019 diperkirakan akan meningkat dibanding triwulan sebelumnya, yaitu dalam kisaran 2,80%-3,20% (yoy). Hal ini disebabkan oleh masuknya periode *peak season* pariwisata di Bali, pelaksanaan HBKN dan dampak lanjutan musim kering yang berkepanjangan terutama di triwulan III 2019 beresiko menahan produksi pertanian. Meskipun terdapat resiko kenaikan inflasi, namun melalui koordinasi dan kerjasama dengan TPID, tingkat inflasi Bali pada triwulan IV 2019 diperkirakan dapat tetap terkendali.

Tekanan inflasi Provinsi Bali pada triwulan IV 2019 diperkirakan akan meningkat dan berada dalam kisaran 2,80%-3,20% (yoy).

Inflasi Bali tahun 2019 diperkirakan akan melandai dan berada dalam kisaran 2,80%-3,20% (yoy), lebih rendah dibanding realisasi inflasi tahun 2018 yang tercatat sebesar 3,13% (yoy). Perkiraan inflasi tersebut juga berada dalam rentang sasaran inflasi Nasional sebesar 3,5%±1% (yoy), sebagaimana tercantum dalam PMK No.93/PMK.011/2014 tentang Sasaran Inflasi. Berdasarkan disagregasinya, melandainya tekanan inflasi pada tahun 2019, terutama bersumber dari hampir semua kelompok pengeluaran, terutama kelompok bahan makanan dan kelompok makanan jadi, minuman, rokok dan tembakau serta kelompok transportasi, komunikasi dan jasa keuangan. Kecukupan pasokan komoditas strategis dan koordinasi serta langkah-langkah strategis yang dilakukan TPID berkontribusi terhadap melandainya tingkat inflasi 2019. Sejalan dengan itu, penurunan tarif batas atas angkutan udara sebesar 15% yang berlaku sejak Mei 2019 juga memberikan kontribusi terhadap terkendalinya inflasi 2019.

Inflasi Provinsi Bali pada tahun 2019 diperkirakan akan melandai dan berada dalam kisaran 2,80%-3,20% (yoy).

TABEL INDIKATOR TERPILIH

PERTUMBUHAN EKONOMI DAN INFLASI BALI

INDIKATOR		2017				2017	2018				2018	2019	
		I	II	III	IV		I	II	III	IV		I	II
Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (%, yoy)													
A.	Berdasarkan Kategori Lapangan Usaha:	6.25	5.92	6.18	4.01	5.57	5.58	6.05	6.15	7.59	6.35	5.96	5.64
	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	4.24	4.65	3.80	-1.42	2.73	5.15	4.17	4.48	6.92	5.19	1.74	5.52
	Pertambangan dan Penggalian	2.54	0.39	1.91	-10.49	-1.44	-6.26	-3.12	-4.00	3.44	-2.65	-4.10	-8.12
	Industri Pengolahan	3.58	-0.06	0.46	-0.69	0.80	1.36	5.46	6.73	9.16	5.67	9.80	7.38
	Pengadaan Listrik dan Gas	0.40	-0.16	8.40	13.50	5.48	4.90	6.52	0.50	-3.51	1.94	1.50	1.44
	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	1.82	4.86	3.05	1.16	2.72	-1.88	2.92	2.14	4.87	2.03	6.04	4.09
	Konstruksi	6.27	7.15	8.54	9.72	7.95	9.96	10.40	12.01	9.40	10.44	8.97	8.11
	Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	8.48	8.23	9.60	5.11	7.84	4.84	5.44	7.21	12.34	7.48	7.96	10.97
	Transportasi dan Pergudangan	4.89	5.44	6.37	3.28	5.00	6.78	6.07	3.15	8.79	6.15	5.04	3.87
	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	9.47	9.73	10.59	6.35	9.03	6.35	6.16	4.24	8.26	6.22	4.38	2.85
	Informasi dan Komunikasi	8.14	8.31	7.85	8.09	8.10	8.87	8.47	7.63	6.12	7.74	5.99	6.31
	Jasa Keuangan dan Asuransi	5.06	6.34	0.70	-2.01	2.43	1.00	-0.23	3.15	3.84	1.93	6.89	9.05
	Real Estate	3.67	4.28	4.50	4.92	4.34	1.43	3.20	5.38	6.44	4.14	7.86	5.27
	Jasa Perusahaan	8.56	7.66	5.90	5.65	6.91	6.94	8.40	9.00	6.83	7.79	4.10	3.97
	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	-0.11	-5.07	-1.34	0.30	-1.60	0.81	5.56	7.78	3.23	4.45	13.41	4.97
	Jasa Pendidikan	7.30	8.11	5.24	7.44	7.00	9.02	8.44	7.98	4.31	7.38	3.23	3.85
	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	9.00	7.92	7.76	9.06	8.44	9.29	9.44	9.16	6.61	8.59	6.24	6.13
	Jasa lainnya	9.57	8.26	7.52	6.18	7.85	7.03	8.77	9.08	8.97	8.47	7.07	5.64
B.	Berdasarkan Pengeluaran:	6.25	5.92	6.18	4.01	5.57	5.58	6.05	6.15	7.59	6.35	5.96	5.64
	1. Pengeluaran Konsumsi	7.02	1.94	4.22	3.97	4.22	4.50	4.53	6.17	3.77	4.74	8.35	7.05
	1. a. Konsumsi Rumah Tangga	4.77	3.71	4.44	3.19	4.02	3.19	4.52	5.36	6.90	5.00	6.26	4.96
	1. b. Konsumsi LNPRT	5.85	0.12	0.14	9.64	3.94	8.27	9.62	9.47	0.54	6.76	23.09	10.98
	1. c. Konsumsi Pemerintah	29.07	-7.01	3.59	6.47	5.28	14.23	3.94	10.03	-7.57	3.08	20.84	18.69
	2. Investasi	3.08	3.89	3.81	3.42	3.55	7.43	6.23	10.22	11.97	9.01	8.78	7.63
	2. a. PMTB	3.04	3.82	3.84	3.43	3.54	7.46	6.23	10.25	12.03	9.04	8.79	7.67
	2. b. Perubahan Inventori	9.50	19.74	-1.84	1.71	6.56	2.59	6.34	3.69	-0.43	3.02	6.71	-0.46
	3. Neraca Perdagangan Bersih	16.99	255.01	64.58	-69.37	68.28	6.66	26.36	-18.36	-1320.68	10.73	-32.77	-23.31
	3. a. Ekspor Luar Negeri	11.25	11.29	11.45	-5.03	7.09	-3.83	3.35	11.67	15.15	6.45	2.19	-6.01
	3. b. Impor Luar Negeri	14.36	32.96	21.98	2.91	17.14	12.98	7.58	27.32	49.09	24.41	9.87	9.44
	3. c. Net Ekspor Antar Daerah	8.89	-5.13	1.20	-8.17	-1.44	-12.40	-2.02	12.37	-1.25	-0.67	9.03	-8.36
C.	Ekspor												
	Nilai Ekspor Nonmigas (USD Juta)	128.49	121.79	124.75	133.74	508.76	144.11	128.20	135.76	163.38	571.46	150.78	137.73
	g Nilai Ekspor Nonmigas (%, yoy)	5.66	-5.15	17.10	6.18	5.44	12.16	5.27	8.82	22.16	12.32	4.62	7.42
	Volume Ekspor Nonmigas (ribu ton)	21.46	20.76	21.11	22.04	85.37	21.90	20.79	22.06	27.01	91.77	21.38	18.40
	g Volume Ekspor Nonmigas (%, yoy)	-75.53	-30.82	-0.56	-15.06	-18.03	2.08	0.15	4.49	22.58	-25.21	-2.37	-11.46
D.	Impor												
	Nilai Impor Nonmigas (USD Juta)	18.31	33.80	41.90	43.21	137.22	34.17	47.32	64.35	120.31	266.15	59.82	58.04
	g Nilai Impor Nonmigas (%, yoy)	-60.30	32.39	85.93	10.36	2.91	86.62	39.98	53.57	178.41	93.95	75.06	22.66
	Volume Impor Nonmigas (ribu ton)	1.58	2.15	1.42	2.15	7.30	6.17	1.45	2.03	2.05	11.70	2.32	2.38
	g Volume Impor Nonmigas (%, yoy)	-91.22	30.45	-16.27	-27.87	-71.41	291.26	-32.42	42.60	31.91	74.49	-62.38	63.45
E.	Laju Inflasi Provinsi Bali (% yoy)	4.40	4.02	2.69	3.32	3.32	3.10	3.47	3.60	3.13	3.13	1.85	2.14

PDRB PROVINSI BALI ATAS DASAR HARGA BERLAKU (ADHB)

INDIKATOR		2017				2017	2018				2018	2019	
		I	II	III	IV		I	II	III	IV		I	II
EKONOMI MAKRO REGIONAL (ATAS DASAR HARGA BERLAKU)													
Produk Domestik Regional Bruto (Rp Miliar)													
A.	Berdasarkan Kategori Lapangan Usaha:	50,405	52,809	55,256	55,080	213,550	55,605	57,775	60,205	60,845	234,431	60,292	62,308
	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	7,134	7,424	7,682	7,692	29,932	7,758	7,931	8,219	8,460	32,369	8,059	8,523
	Pertambangan dan Penggalian	530	531	535	513	2,109	541	563	564	539	2,207	524	522
	Industri Pengolahan	3,226	3,200	3,261	3,321	13,007	3,425	3,513	3,588	3,712	14,238	3,833	3,834
	Pengadaan Listrik dan Gas	118	127	133	141	518	134	141	138	140	553	139	145
	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	94	98	98	99	388	98	106	105	106	415	104	111
	Konstruksi	4,460	4,629	4,835	5,139	19,063	5,131	5,348	5,693	5,826	21,999	5,809	5,988
	Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	4,339	4,445	4,642	4,560	17,987	4,700	4,806	5,085	5,211	19,802	5,133	5,398
	Transportasi dan Pergudangan	4,684	5,068	5,452	5,108	20,312	5,231	5,508	5,749	5,790	22,278	5,721	5,895
	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	11,837	12,467	13,259	12,647	50,210	13,062	13,526	14,067	14,052	54,708	13,954	14,283
	Informasi dan Komunikasi	2,659	2,729	2,812	2,895	11,095	2,956	3,020	3,101	3,150	12,227	3,187	3,252
	Jasa Keuangan dan Asuransi	2,103	2,164	2,166	2,146	8,579	2,192	2,235	2,321	2,303	9,052	2,405	2,499
	Real Estate	2,051	2,105	2,140	2,168	8,463	2,139	2,208	2,291	2,351	8,989	2,332	2,351
	Jasa Perusahaan	539	546	557	579	2,222	593	606	619	629	2,446	628	641
	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	2,199	2,682	2,925	3,120	10,926	2,638	3,140	3,333	3,197	12,308	3,086	3,366
	Jasa Pendidikan	2,542	2,643	2,749	2,882	10,816	2,878	2,937	3,083	3,099	11,997	3,063	3,139
	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1,087	1,129	1,165	1,215	4,596	1,239	1,272	1,309	1,326	5,146	1,347	1,377
	Jasa lainnya	804	822	845	857	3,328	887	914	940	955	3,696	968	983
B.	Berdasarkan Pengeluaran:	50,405	52,809	55,256	55,080	213,550	55,605	57,775	60,205	60,845	234,431	60,292	62,308
	1. Pengeluaran Konsumsi	29,145	31,041	31,939	34,503	126,628	31,664	33,920	35,459	37,163	138,206	34,742	37,209
	1. a. Konsumsi Rumah Tangga	25,037	25,443	25,710	25,904	102,094	26,882	27,829	28,448	28,688	111,848	29,063	29,661
	1. b. Konsumsi LNPRT	601	616	648	716	2,580	665	680	698	722	2,764	821	770
	1. c. Konsumsi Pemerintah	3,506	4,983	5,581	7,884	21,954	4,117	5,411	6,313	7,753	23,594	4,858	6,779
	2. Investasi	15,362	15,789	16,126	16,667	63,944	16,930	17,380	18,538	19,445	72,293	18,679	18,927
	2. a. PMTB	15,205	15,633	15,958	16,498	63,293	16,757	17,206	18,361	19,278	71,602	18,502	18,756
	2. b. Perubahan Inventori	157	157	169	169	651	173	175	177	167	691	178	170
	3. Neraca Perdagangan Bersih	5,899	5,978	7,190	3,910	22,977	7,012	6,475	6,208	4,238	23,932	6,870	6,172
	3. a. Ekspor Luar Negeri	21,183	22,431	22,991	20,034	86,639	21,188	24,109	26,768	24,622	96,686	22,071	23,083
	3. b. Impor Luar Negeri	4,785	5,318	5,331	5,344	20,778	5,537	5,795	6,879	7,993	26,204	6,150	6,499
	3. c. Net Ekspor Antar Daerah	-10,500	-11,134	-10,469	-10,780	-42,883	-8,640	-11,839	-13,680	-12,391	-46,550	-9,050	-10,412

PDRB PROVINSI BALI ATAS DASAR HARGA KONSTAN (ADHK)

INDIKATOR		2017				2017	2018				2018	2019	
		I	II	III	IV		I	II	III	IV		I	II
EKONOMI MAKRO REGIONAL (ATAS DASAR HARGA KONSTAN)													
Produk Domestik Regional Bruto (Rp Miliar)													
A.	Berdasarkan Kategori Lapangan Usaha:	34,941	35,956	37,163	36,885	144,945	36,891	38,130	39,447	39,683	154,151	39,091	40,280
	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	4,792	4,938	5,051	5,040	19,822	5,039	5,144	5,277	5,389	20,850	5,127	5,428
	Pertambangan dan Penggalian	378	380	383	338	1,481	355	368	368	350	1,441	340	339
	Industri Pengolahan	2,317	2,274	2,286	2,301	9,178	2,348	2,398	2,440	2,512	9,698	2,578	2,575
	Pengadaan Listrik dan Gas	75	77	81	85	318	79	82	81	82	324	80	84
	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	77	79	79	78	313	75	82	81	81	319	80	85
	Konstruksi	3,300	3,406	3,535	3,670	13,911	3,629	3,760	3,959	4,015	15,364	3,955	4,065
	Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	3,241	3,286	3,407	3,320	13,254	3,397	3,465	3,653	3,730	14,245	3,668	3,845
	Transportasi dan Pergudangan	2,531	2,654	2,824	2,684	10,692	2,702	2,814	2,913	2,919	11,349	2,838	2,923
	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	7,069	7,322	7,708	7,320	29,420	7,518	7,773	8,035	7,924	31,251	7,847	7,995
	Informasi dan Komunikasi	2,441	2,490	2,554	2,620	10,106	2,657	2,701	2,749	2,781	10,888	2,816	2,872
	Jasa Keuangan dan Asuransi	1,508	1,547	1,536	1,506	6,097	1,523	1,543	1,584	1,563	6,214	1,628	1,683
	Real Estate	1,662	1,683	1,707	1,726	6,778	1,686	1,737	1,799	1,837	7,059	1,818	1,829
	Jasa Perusahaan	394	396	401	414	1,606	422	429	437	443	1,731	439	446
	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	1,844	2,054	2,131	2,196	8,225	1,859	2,168	2,297	2,266	8,590	2,108	2,276
	Jasa Pendidikan	1,915	1,950	2,023	2,097	7,985	2,088	2,114	2,185	2,187	8,574	2,155	2,196
	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	824	839	863	890	3,416	901	918	942	949	3,709	957	974
	Jasa lainnya	572	579	593	600	2,345	613	630	647	654	2,543	656	666
B.	Berdasarkan Pengeluaran:	34,941	35,956	37,163	36,885	144,945	36,891	38,130	39,447	39,683	154,151	39,091	40,280
	1. Pengeluaran Konsumsi	21,507	22,737	23,332	24,829	92,405	22,475	23,767	24,773	25,766	96,781	24,352	25,443
	1. a. Konsumsi Rumah Tangga	18,723	19,025	19,226	19,200	76,175	19,320	19,885	20,258	20,524	79,987	20,529	20,871
	1. b. Konsumsi LNPRT	409	418	437	482	1,747	443	458	479	485	1,865	546	508
	1. c. Konsumsi Pemerintah	2,374	3,294	3,669	5,147	14,483	2,712	3,424	4,037	4,757	14,929	3,277	4,064
	2. Investasi	11,308	11,630	11,837	12,087	46,863	12,148	12,355	13,047	13,534	51,084	13,214	13,297
	2. a. PMTB	11,248	11,572	11,777	12,027	46,623	12,086	12,293	12,984	13,474	50,837	13,149	13,235
	2. b. Perubahan Inventori	60	58	60	60	239	62	62	63	60	247	66	62
	3. Neraca Perdagangan Bersih	2,126	1,589	1,994	-31	5,677	2,267	2,008	1,628	383	6,286	1,524	1,540
	3. a. Ekspor Luar Negeri	13,965	14,512	14,672	12,875	56,025	13,431	14,998	16,385	14,825	59,638	13,725	14,097
	3. b. Impor Luar Negeri	3,121	3,410	3,417	3,369	13,317	3,526	3,669	4,350	5,023	16,568	3,874	4,015
	3. c. Net Ekspor Antar Daerah	-8,719	-9,513	-9,262	-9,537	-37,031	-7,637	-9,321	-10,407	-9,418	-36,784	-8,327	-8,541

PERTUMBUHAN EKONOMI KABUPATEN/KOTA

Kabupaten/Kota	Tahun						
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Jembrana (%; yoy)	6,366	6,728	7,135	7,576	8,028	8,452	8,925
Tabanan (%; yoy)	10,500	11,178	11,908	12,645	13,421	14,142	14,950
Badung (%; yoy)	24,028	25,667	27,458	29,170	31,157	33,053	35,284
Gianyar (%; yoy)	12,509	13,361	14,269	15,169	16,125	17,009	18,031
Klungkung (%; yoy)	4,036	4,280	4,536	4,813	5,116	5,388	5,684
Bangli (%; yoy)	3,097	3,281	3,472	3,686	3,916	4,125	4,352
Karangasem (%; yoy)	7,538	8,002	8,483	8,992	9,524	10,008	10,556
Buleleng (%; yoy)	15,480	16,587	17,742	18,819	19,951	21,026	22,207
Denpasar (%; yoy)	23,397	25,026	26,779	28,423	30,273	32,109	34,168

PDRB KABUPATEN/KOTA ATAS DASAR HARGA BERLAKU (ADHB)

Kabupaten/Kota	Tahun (Rp Miliar)						
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Jembrana	6.973	7.770	9.020	10.198	11.168	12.169	13.206
Tabanan	11.470	12.967	15.066	16.996	18.630	20.463	22.261
Badung	27.201	31.790	37.273	42.429	47.208	52.239	57.444
Gianyar	13.605	15.368	17.909	20.140	22.113	24.290	26.512
Klungkung	4.398	4.900	5.676	6.426	7.112	7.819	8.504
Bangli	3.363	3.779	4.382	4.946	5.457	6.022	6.536
Karangasem	8.232	9.293	10.785	12.233	13.411	14.657	15.954
Buleleng	16.927	19.144	22.355	25.170	27.690	30.463	33.098
Denpasar	25.819	29.389	34.210	38.424	42.384	47.002	51.441

PDRB KABUPATEN/KOTA ATAS DASAR HARGA KONSTAN (ADHK)

Kabupaten/Kota	Tahun (Rp Miliar)						
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Jembrana	6.973	7.770	9.020	10.198	11.168	12.169	13.206
Tabanan	11.470	12.967	15.066	16.996	18.630	20.463	22.261
Badung	27.201	31.790	37.273	42.429	47.208	52.239	57.444
Gianyar	13.605	15.368	17.909	20.140	22.113	24.290	26.512
Klungkung	4.398	4.900	5.676	6.426	7.112	7.819	8.504
Bangli	3.363	3.779	4.382	4.946	5.457	6.022	6.536
Karangasem	8.232	9.293	10.785	12.233	13.411	14.657	15.954
Buleleng	16.927	19.144	22.355	25.170	27.690	30.463	33.098
Denpasar	25.819	29.389	34.210	38.424	42.384	47.002	51.441

KREDIT RUMAH TANGGA (BANK UMUM -LOKASI PROYEK)

INDIKATOR	2018				2019	
	I	II	III	IV	I	II
Kredit RT. Total (Rp triliun)	61.31	62.27	63.43	64.37	65.16	67.13
g Kredit RT. Total (%, yoy)	6.58	5.42	6.01	6.26	6.29	8.01
KPR (Rp triliun)	9.68	9.76	10.10	10.58	10.70	10.98
RT. KPR sd 21	0.71	0.70	0.72	0.69	0.69	0.69
RT. KPR sd 70	4.43	4.45	4.69	5.10	5.25	5.50
RT. KPR 70+	4.55	4.60	4.70	4.79	4.76	4.78
KPA (Rp triliun)	0.16	0.14	0.15	0.14	0.13	0.13
RT. KPA sd 21	0.03	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02
RT. KPA sd 70	0.09	0.09	0.09	0.08	0.07	0.07
RT. KPA 70+	0.04	0.03	0.04	0.04	0.04	0.04
RT. Ruko (Rp triliun)	0.57	0.58	0.56	0.56	0.56	0.56
KKB (Rp triliun)	2.38	2.48	2.57	2.63	2.70	2.74
RT. KKB Roda 4	2.21	2.30	2.39	2.39	2.43	2.39
RT. KKB Roda 2	0.13	0.14	0.14	0.18	0.21	0.26
RT. KKB Roda 6	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.04
RT. KKB Lainnya	0.02	0.03	0.03	0.05	0.05	0.05
RT. Multiguna (Rp triliun)	16.49	16.52	16.74	16.94	16.98	17.51
NPL Kredit RT (Gross %)	3.08	2.78	2.70	2.23	2.33	2.54

KREDIT KORPORASI (BANK UMUM - LOKASI PROYEK)

INDIKATOR	2018				2019	
	I	II	III	IV	I	II
Kredit Korporasi (Rp triliun)	27.88	27.34	28.93	29.84	29.38	31.30
g Kredit Korporasi (%, yoy)	-1.15	-2.91	3.09	6.24	5.38	14.46
Modal Kerja (Rp triliun)	10.17	9.64	10.91	11.24	10.65	10.82
g Modal Kerja (%, yoy)	-4.52	-8.45	5.57	6.88	4.71	12.26
Investasi (Rp triliun)	17.66	17.68	17.99	18.57	18.70	20.44
g Investasi (%, yoy)	1.06	0.69	1.81	5.82	5.89	15.65
NPL (Gross,%)	6.33	5.22	5.60	7.11	7.95	8.63

INDIKATOR PERBANKAN - BANK UMUM (LOKASI BANK)

	2017	2018				2019	
		I	II	III	IV	I	II
Total Asset (Rp Triliun)	103.50	105.32	106.45	109.99	112.41	109.29	113.92
g Total Asset (%, yoy)	3.37	9.80	8.55	6.34	8.61	3.77	7.02
DPK (Rp Triliun) - Bank Pelapor	86.73	87.32	89.69	94.76	93.61	94.32	97.70
Giro (Rp Triliun)	13.80	14.28	15.12	16.53	14.23	14.93	15.69
Tabungan (Rp Triliun)	42.09	41.84	43.89	46.48	47.14	46.35	48.24
Deposito (Rp Triliun)	30.84	31.20	30.68	31.75	32.24	33.04	33.77
g DPK (%, yoy)	9.06	7.05	7.79	8.17	7.92	8.01	8.93
g Deposito (%, yoy)	9.87	2.88	2.53	3.59	4.52	5.88	10.06
g Giro%, yoy)	4.86	-0.91	-0.36	0.95	3.13	4.56	3.76
g Tabungan(%, yoy)	9.91	13.61	15.16	14.54	11.99	10.77	9.91
Kredit (Rp Triliun) - Lokasi Bank	73.04	73.25	73.93	75.50	76.67	77.24	79.82
Modal Kerja	28.07	28.23	28.39	28.71	29.89	29.05	29.72
Investasi	16.60	16.55	16.67	17.34	16.84	18.15	19.32
Konsumsi	28.37	28.47	28.88	29.44	29.93	30.05	30.79
g Kredit Umum (%, yoy)	5.98	5.25	3.74	5.03	4.96	5.44	7.97
g Modal Kerja (%, yoy)	4.50	5.16	2.35	4.33	6.50	2.88	4.69
g Investasi (%, yoy)	2.59	1.39	2.59	4.95	1.45	9.66	15.88
g Konsumsi (%, yoy)	9.64	7.73	5.84	5.78	5.50	5.53	6.63
Loan to Deposit Ratio (%)	84.21	83.89	82.43	79.67	81.90	81.89	81.71
NPL Gross (%)	2.98	3.40	3.08	2.98	2.56	3.03	3.01

DANA PERBANKAN BERDASARKAN KCKCP (BANK UMUM)

INDIKATOR	2017				2018				2019	
	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II
Total (Rp triliun)	81.53	89.97	93.24	86.68	87.27	89.63	94.70	93.49	94.20	97.57
Giro (Rp triliun)	14.41	15.18	16.38	13.80	14.28	15.12	16.53	14.23	14.92	15.69
Tabungan (Rp triliun)	36.80	42.89	44.02	42.06	41.81	43.85	46.44	47.07	46.28	48.16
Deposito (Rp triliun)	30.32	31.90	32.84	30.82	31.18	30.65	31.73	32.19	33.00	33.72

INDIKATOR PERBANKAN KABUPATEN/KOTA - BANK UMUM (LOKASI BANK)

Kabupaten/Kota	Indikator	2017				2018				2019	
		I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II
Jembrana	Kredit (Rp Triliun)	2.26	2.35	2.10	2.16	2.27	2.31	2.37	2.40	2.46	2.57
	DPK (Rp Triliun)	1.24	1.31	1.37	1.37	1.46	1.47	1.54	1.42	1.48	1.53
Tabanan	Kredit (Rp Triliun)	3.38	3.95	3.68	3.73	3.81	3.84	3.93	4.02	4.13	4.30
	DPK (Rp Triliun)	2.24	2.37	2.52	2.41	2.53	2.60	2.79	2.68	2.87	2.95
Badung	Kredit (Rp Triliun)	8.79	9.03	9.20	9.36	9.30	9.42	9.62	9.68	9.71	10.22
	DPK (Rp Triliun)	13.12	14.05	15.07	13.93	14.69	15.60	16.54	15.97	15.56	16.16
Gianyar	Kredit (Rp Triliun)	3.56	3.64	3.13	3.22	3.35	3.41	3.45	3.49	3.58	3.70
	DPK (Rp Triliun)	2.83	3.04	3.18	3.13	3.24	3.38	3.73	3.74	3.97	4.15
Klungkung	Kredit (Rp Triliun)	1.63	1.68	1.71	1.73	1.80	1.85	1.89	1.92	1.97	2.04
	DPK (Rp Triliun)	1.18	1.26	1.35	1.29	1.37	1.42	1.50	1.40	1.48	1.55
Bangli	Kredit (Rp Triliun)	1.65	1.68	1.70	1.73	1.79	1.82	1.85	1.87	1.91	1.98
	DPK (Rp Triliun)	0.86	0.98	1.10	1.02	1.12	1.22	1.35	1.12	1.14	1.15
Karangasem	Kredit (Rp Triliun)	2.80	2.85	3.10	3.03	3.03	3.05	3.09	3.09	3.12	3.23
	DPK (Rp Triliun)	1.62	1.68	1.80	1.95	2.00	2.07	2.17	2.13	2.25	2.36
Buleleng	Kredit (Rp Triliun)	5.05	5.23	5.90	5.99	5.98	6.04	6.14	6.10	6.19	6.46
	DPK (Rp Triliun)	3.33	3.54	3.90	3.90	3.94	4.02	4.32	4.21	4.24	4.42
Denpasar	Kredit (Rp Triliun)	39.98	40.84	41.35	42.09	41.93	42.19	43.17	44.11	44.17	45.33
	DPK (Rp Triliun)	55.16	54.98	57.32	57.74	56.98	57.91	60.81	60.94	61.33	63.43

KREDIT UMKM (LOKASI PROYEK - BANK UMUM)

Kredit UMKM	2017				2018				2019	
	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II
Kredit UMKM (Rp Triliun)	31.84	33.13	33.27	34.15	34.60	35.44	35.92	36.47	36.60	38.10
g Kredit UMKM (%,yoy)	14.20	11.18	8.43	7.30	8.66	6.96	7.95	6.81	5.79	7.51
Mikro (Triliun)	5.56	5.83	6.12	6.47	6.88	7.20	7.39	7.49	7.73	8.07
Kecil (Triliun)	12.17	12.64	12.78	13.02	13.19	13.41	13.42	1.33	13.55	14.14
Menengah (Triliun)	14.11	14.67	14.37	14.66	14.53	14.82	15.11	15.65	15.33	15.89
NPL (%)	2.38	4.01	3.03	2.82	3.56	3.56	3.89	3.28	3.13	3.25

SISTEM PEMBAYARAN (TUNAI - NON TUNAI)

INDIKATOR	2017				2018				2019	
	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II
Transaksi Tunai										
Inflow (Rp Triliun)	4.50	3.90	4.90	3.58	4.50	5.21	4.65	4.16	6.76	5.57
Outflow (Rp Triliun)	3.90	5.80	3.60	4.42	3.45	6.56	4.74	5.70	3.51	6.41
Kliring										
Nom. Kliring (Rp triliun)	16.27	13,37	15.80	15.08	13.64	13.84	15.85	14.60	12.60	11.95
Vol. Kliring (ribu lembar)	622	540	609	569	538	534	582	510	437	413
RTGS										
Nom. RTGS (Rp triliun)	3.11	3.55	3.74	3.27	3.24	4.64	3.62	4.46	3.16	9.52
Vol. RTGS (lembar)	3451	3517	3914	3740	3608	3763	4179	3748	3971	5821

BAB I

PERKEMBANGAN EKONOMI MAKRO REGIONAL

- Kinerja ekonomi Provinsi Bali pada triwulan II 2019 masih tetap tumbuh kuat, meskipun melambat dibanding triwulan sebelumnya. Ekonomi Bali tercatat tumbuh sebesar 5,64% (yoy), lebih rendah dibanding triwulan sebelumnnya sebesar 5,96% (yoy) dan juga lebih rendah dibanding triwulan II 2018 yang sebesar 6,05% (yoy).
- Pertumbuhan ekonomi Bali pada triwulan III 2019 diperkirakan menunjukkan akselerasi, tumbuh lebih tinggi dibanding triwulan sebelumnya dalam kisaran 5,90%-6,30% (yoy).

Monumen Bajra Sandhi

1.1. KONDISI UMUM

Kinerja perekonomian Bali pada triwulan II 2019 masih tetap tumbuh kuat, meskipun melambat dibanding triwulan sebelumnya. Perekonomian tumbuh sebesar 5,64% (yoy), lebih rendah dibanding triwulan sebelumnya yang tumbuh sebesar 5,96% (yoy) maupun triwulan yang sama tahun 2018 yang tumbuh sebesar 6,05% (yoy). Dari sisi permintaan, perlambatan bersumber dari melambatnya kinerja seluruh komponen pengeluaran yaitu komponen konsumsi rumah tangga, konsumsi pemerintah, investasi dan ekspor luar negeri. Hal yang sama terjadi pada sisi penawaran dimana lapangan usaha akomodasi makan dan minum (akmamin) yang sebelumnya menjadi andalan perekonomian terkait dengan banyaknya wisatawan mancanegara yang datang ke Bali, pada triwulan ini banyak menghadapi tantangan. Selain itu, perlambatan terjadi pada hampir semua lapangan usaha utama Bali kecuali pertanian. Beberapa faktor yang menjadi penahan kinerja ekonomi Bali meliputi: i). Menurunnya kinerja bidang usaha pariwisata, ii) proyek konstruksi dan infrastruktur yang tidak semasif periode sebelumnya, iii) sikap wait and see pelaku usaha menanti kebijakan presiden terpilih, iv) melambatnya kinerja ekonomi negara mitra dagang utama Bali.

1.1.1. Kinerja Perekonomian Provinsi Bali Triwulan II 2019

Perekonomian Bali pada triwulan II 2019 menunjukkan perlambatan dibanding triwulan I 2019. Produk Regional Domestik Bruto (PDRB) Bali atas dasar harga konstan mencapai Rp 40,28 triliun, tercatat tumbuh 5,64% (yoy) pada triwulan II 2019, lebih rendah dibanding triwulan I 2019 yang tumbuh 5,96% (yoy). Meskipun demikian, kinerja ini lebih tinggi dibanding pertumbuhan ekonomi nasional pada periode yang sama sebesar 5,05% (yoy).

Grafik 1.1. Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Bali dan Nasional Triwulanan

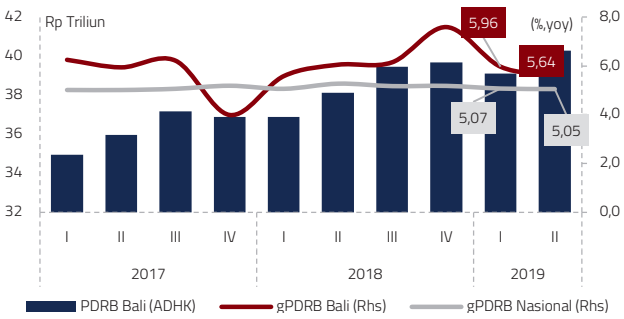

Sumber : Badan Pusat Statistik, diolah

Grafik 1.2. Pangsa Ekonomi Provinsi Bali Terhadap Nasional

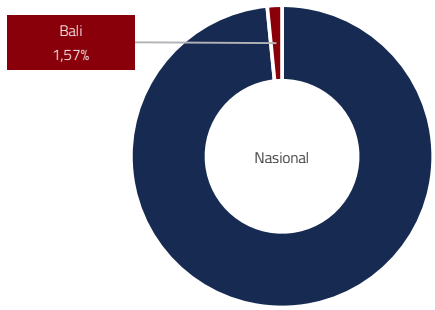

Sumber : Badan Pusat Statistik, diolah

Dari sisi permintaan, perlambatan kinerja perekonomian Bali pada triwulan laporan bersumber dari melambatnya kinerja seluruh komponen pengeluaran yaitu komponen konsumsi rumah tangga, konsumsi pemerintah, investasi, serta ekspor luar negeri. Perlambatan kinerja komponen konsumsi rumah tangga disebabkan oleh: melambatnya kinerja pariwisata sebagai dampak dari (i) masih tingginya harga tiket pesawat domestik, (ii) upaya penegakan hukum pada praktek *zero dollar tourism*, serta (iii) dikeluarkannya *travel advisory* dari beberapa negara pasar[1] bagi warganya yang ingin berkunjung ke Indonesia pasca kerusuhan Pemilihan Presiden 2019. Kinerja konsumsi pemerintah melambat disebabkan oleh adanya ketentuan baru terkait pengadaan barang oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Sementara itu, melambatnya kinerja investasi disebabkan oleh: i) sikap

1. Negara yang mengeluarkan travel advisory a.l Australia, Malaysia, Kanada, Inggris, Belanda, Singapura
2. Menurut perkiraan IMF dalam World Economic Outlook edisi Juli 2019, pertumbuhan ekonomi AS dan Tiongkok pada tahun 2019 masing-masing sebesar 2,6% (yoy) dan 6,2% (yoy), melambat dibanding tahun 2018 yang sebesar 2,9% (yoy) dan 6,65 (yoy)

wait and see pelaku usaha menanti kebijakan presiden terpilih, ii) tertahannya investasi bangunan sejalan dengan permintaan pengerjaan proyek konstruksi dan infrastruktur yang tidak sebanyak triwulan sebelumnya. Perlambatan kinerja perekonomian pada triwulan laporan yang bersumber dari kinerja komponen ekspor luar negeri disebabkan oleh dampak dari perlambatan kinerja negara mitra dagang utama Bali (AS, Australia, dan Tiongkok)[2] serta melambatnya kinerja bidang usaha pariwisata.

Dari sisi penawaran, perlambatan kinerja ekonomi Bali disebabkan oleh melambatnya kinerja sebagian besar lapangan usaha utama Bali kecuali pertanian. Lapangan usaha yang melambat adalah lapangan usaha yang memiliki pangsa cukup besar seperti akmamin (23%); konstruksi (10%); transportasi (10%) serta perdagangan besar dan eceran (9%). Perlambatan kinerja lapangan usaha akmamin seiring dengan melambatnya kinerja bidang usaha yang terkait dengan pariwisata disebabkan oleh harga tiket pesawat domestik yang tinggi, penegakan hukum pada praktek *zero dollar tourism* serta adanya *travel advisory* dari beberapa negara. Selanjutnya, perlambatan lapangan usaha konstruksi disebabkan oleh pengerjaan proyek konstruksi dan infrastruktur yang tidak semasif triwulan sebelumnya[3]. Selain itu, terdapat penundaan penyelesaian beberapa proyek yaitu di Bandara Ngurah Rai dan Pelabuhan Benoa[4]. Kinerja lapangan usaha yang terkait dengan pariwisata juga melambat sebagai dampak dari melambatnya pertumbuhan jumlah wisman. Sejalan dengan itu, kinerja lapangan usaha perdagangan besar dan eceran melambat seiring terjadinya perlambatan konsumsi rumah tangga Perlambatan kinerja perekonomian Bali tertahan oleh akselerasi kinerja lapangan usaha pertanian yang didorong oleh bergesernya puncak panen komoditas Tabama dari Maret ke April.

1.1.2. Perkiraan Kinerja Ekonomi Bali Triwulan III 2019

Kinerja perekonomian Bali **pada triwulan III 2019 diperkirakan akan menunjukkan akselerasi dibandingkan triwulan II 2019.** Dari sisi permintaan, akselerasi kinerja perekonomian Bali terutama didorong oleh akselerasi seluruh komponen pengeluaran yaitu komponen konsumsi rumah tangga, konsumsi pemerintah, investasi dan ekspor luar negeri. Dari sisi penawaran kinerja perekonomian didorong oleh akselerasi kinerja lapangan usaha utama ekonomi Bali, yaitu lapangan usaha penyediaan akomodasi makan dan minum, konstruksi serta transportasi.

Peningkatan kinerja konsumsi rumah tangga dan konsumsi pemerintah didorong oleh adanya perayaan hari keagamaan[5], liburan sekolah, akselerasi realisasi belanja pemerintah dan adanya insentif fiskal gaji ke-13 dengan nilai yang lebih tinggi dari tahun sebelumnya. Dari sisi lapangan usaha, peristiwa tersebut akan mendorong lapangan usaha industri pengolahan.

Sementara itu, kinerja ekspor luar negeri, baik ekspor jasa maupun barang diperkirakan akan meningkat pada triwulan III 2019. Faktor-faktor yang mempengaruhi peningkatannya adalah meningkatnya frekuensi penerbangan sejalan dengan adanya penambahan *direct flight* baru sepanjang triwulan III 2019[6], membaiknya proyeksi pertumbuhan ekonomi Jepang sebagai mitra dagang[7], serta masuknya periode *high season* pariwisata pada triwulan III 2019. Dari sisi lapangan usaha, peristiwa tersebut akan mendorong lapangan usaha akomodasi makan minum dan transportasi.

Kinerja sektor pertanian pada triwulan III 2019 diperkirakan melambat disebabkan oleh potensi terjadinya kekeringan panjang[8]. BMKG memprediksi musim kemarau tahun 2019 akan lebih

3. Pada periode sebelumnya, pengerjaan proyek infrastruktur dan konstruksi masif dalam rangka mendukung penyelenggaraan IMF-World Bank Annual Meeting 2018
4. Proyek perluasan Pelabuhan Benoa berupa pembangunan Marina ditunda karena permintaan Gubernur Bali untuk menghentikan reklamasi. Sementara itu, pembangunan satu dari dua Rapid Exit Taxiway (RET) yang dibangun juga ditunda penyelesaiannya dari sebelumnya yang ditargetkan selesai Oktober 2019.
5. Perayaan hari keagamaan pada triwulan III 2019 meliputi Galungan dan Idul Adha
6. Tercatat ada 3 pembukaan rute penerbangan langsung baru: Denpasar-Sydney oleh Malindo Air, Denpasar-Turki oleh Turkish Airlines, Denpasar-Banyuwangi oleh Citilink
7. Berdasarkan World Economic Outlook (WEO) IMF pada periode Juli 2019 pertumbuhan ekonomi Jepang tahun 2019 diperkirakan tumbuh 0,9% (yoy), lebih tinggi dibandingkan tahun 2018 yang sebesar 0,8% (yoy).
8. Kekeringan panjang adalah kondisi dimana hari tanpa hujan berlangsung 11-60 hari.

kering akibat fenomena El Nino yang berdampak pada kondisi kering dan berkurangnya curah hujan. Di Bali, kekeringan terjadi di wilayah Jembrana dan Buleleng dengan wilayah pertanian terdampak sebesar 198 Ha (0,27% dari total lahan). Meskipun demikian, dilakukan beberapa upaya dalam mendorong peningkatan produksi yaitu pemberian bantuan sarana produksi pertanian dan program Sapi Induk Wajib Bunting (Siwab) sehingga berpotensi menahan perlambatan kinerja pertanian di triwulan III 2019. Selain itu, beroperasinya waduk Titab berpotensi mendorong peningkatan indeks luas tanam padi[9] sehingga mendukung kinerja lapangan usaha pertanian.

Lapangan usaha konstruksi diperkirakan akan menunjukkan peningkatan kinerja pada triwulan III 2019. Akselerasi ini didorong oleh berlanjutnya pengerjaan proyek konstruksi swasta yaitu pengembangan kawasan Nusa Dua[10]. Selain itu, pengerjaan beberapa proyek infrastruktur pemerintah diperkirakan juga mendorong kinerja lapangan usaha konstruksi dan komponen investasi. Proyek infrastruktur tersebut adalah pengembangan pelabuhan Benoa dan Celukan Bawang, proyek *shortcut* jalan Singaraja-Mengwitani, pembangunan Rapid Exit Taxiway Bandara I Gusti Ngurah Rai, serta pembangunan bendungan Sidane.

Dari berbagai *prompt indicator* ekonomi regional di Wilayah Bali dan hasil survei dan liaison, terindikasi tendensi terjadi peningkatan kinerja ekonomi Bali pada triwulan III 2019. Kinerja perekonomian Bali diperkirakan akan tumbuh lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya dan berada pada kisaran 6,20% - 6,60% (yoy).

1.2. PERTUMBUHAN EKONOMI BALI TRIWULAN II 2019 SISI PERMINTAAN

Perlambatan kinerja perekonomian Bali pada triwulan II 2019 dari sisi permintaan bersumber dari melambatnya kinerja seluruh komponen pengeluaran yaitu konsumsi rumah tangga, konsumsi pemerintah, investasi dan ekspor luar negeri.

1.2.1. Konsumsi

Komponen konsumsi pada periode laporan tumbuh melambat dibanding triwulan sebelumnya. Komponen konsumsi tercatat tumbuh sebesar 7,05% (yoy), lebih rendah dibanding triwulan sebelumnya yang tumbuh sebesar 8,35% (yoy). Perlambatan ini berasal dari perlambatan seluruh komponen konsumsi, yaitu konsumsi lembaga non profit yang melayani rumah tangga (LNPRT), konsumsi pemerintah, dan konsumsi rumah tangga.

Tabel 1.1. Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Bali Sisi Permintaan (%, yoy)

Komponen	2017				2017	2018				2018	2019	
	I	II	III	IV		I	II	III	IV		I	II
Konsumsi	7.02	1.94	4.22	3.97	4.22	4.50	4.53	6.17	3.77	4.74	8.35	7.05
Kons.RT	4.77	3.71	4.44	3.19	4.02	3.19	4.52	5.36	6.90	5.00	6.26	4.96
Kons.LNPRT	5.85	0.12	0.14	9.64	3.94	8.27	9.62	9.47	0.54	6.76	23.09	10.98
Kons. Pemerintah	29.07	-7.01	3.59	6.47	5.28	14.23	3.94	10.03	-7.57	3.08	20.84	18.69
Investasi	3.08	3.89	3.81	3.42	3.55	7.43	6.23	10.22	11.97	9.01	8.78	7.63
PMTB	3.04	3.82	3.84	3.43	3.54	7.46	6.23	10.25	12.03	9.04	8.79	7.67
Perubahan Inventori	9.50	19.74	-1.84	1.71	6.56	2.59	6.34	3.69	-0.43	3.02	6.71	-0.46
Ekspor LN	11.25	11.29	11.45	-5.03	7.09	-3.83	3.35	11.67	15.15	6.45	2.19	-6.01
Impor LN	14.36	32.96	21.98	2.91	17.14	12.98	7.58	27.32	49.09	24.41	9.87	9.44
Net Ekspor antar daerah	16.99	255.01	64.58	-69.37	68.28	6.66	26.36	-18.36	-1320.68	10.73	9.03	-8.36
PDRB	6.25	5.92	6.18	4.01	5.57	5.58	6.05	6.15	7.59	6.35	5.96	5.64

Sumber : BPS Provinsi Bali, diolah

9. Dengan beroperasinya waduk Titab, indeks luas tanam padi diperkirakan meningkat dari 169% menjadi 275%.
10. Pengembangan kawasan Nusa Dua termasuk pembangunan Hotel Shangrila, awarta Villa, dan Hotel Renaissance serta komplek perkantoran CREA.

Konsumsi Swasta: Rumah Tangga & Lembaga Non Profit Rumah Tangga (LNPRT)

Kinerja konsumsi rumah tangga dan konsumsi LNPRT melambat pada periode laporan. Konsumsi rumah tangga tumbuh melambat dari sebesar 6,26% (yoy) menjadi 4,96% (yoy) pada triwulan laporan. Perlambatan kinerja konsumsi rumah tangga dipengaruhi kinerja bidang usaha pariwisata yang mengalami perlambatan pada triwulan laporan. Sementara itu, kinerja konsumsi LNPRT mengalami perlambatan dari 23,09% (yoy) menjadi 10,98% (yoy) pada triwulan laporan. Hal ini disebabkan oleh aktivitas pemilu yang telah memasuki tahap akhir pada triwulan laporan dan aktivitas kegiatan lembaga politik yang tidak setinggi periode sebelum pemilu berlangsung.

Kinerja konsumsi RT yang melambat pada triwulan laporan terkonfirmasi dari hasil Survei Konsumen (SK). Menurut hasil SK, nilai Indeks Keyakinan Konsumen, Indeks Kondisi Ekonomi, dan Indeks Ekspektasi Konsumen pada triwulan II 2019 lebih rendah dibanding triwulan sebelumnya. Walaupun indeks tersebut menurun, nilainya masih berada diatas 100 yang menunjukkan optimisme konsumen terhadap kondisi perekonomian.

Grafik 1. 3. Perkembangan Indeks Keyakinan Konsumen, Indeks Kondisi Ekonomi dan Indeks Ekspektasi Konsumen

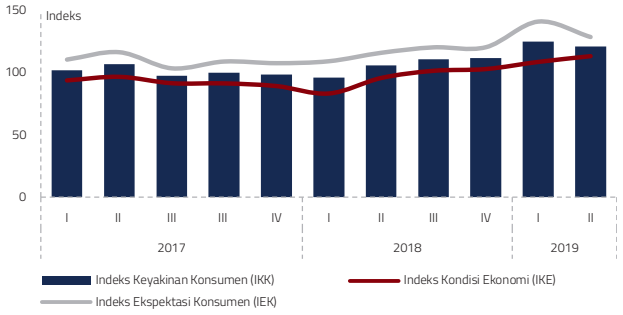

Sumber : Survei Konsumen, Bank Indonesia

Kinerja konsumsi rumah tangga yang mengalami perlambatan pada triwulan laporan juga terkonfirmasi oleh hasil Survei Penjualan Eceran (SPE), penjualan kendaraan baru, dan Indeks Tendensi Konsumen (ITK). Berdasarkan hasil SPE, pertumbuhan penjualan makanan & minuman serta penjualan pakaian jadi mengalami perlambatan pada triwulan laporan dibanding triwulan I 2019. Perlambatan kinerja konsumsi rumah tangga juga terkonfirmasi dari perlambatan pertumbuhan penjualan kendaraan baru (Mobil) yang pada triwulan laporan tercatat mengalami pertumbuhan negatif[11].

Grafik 1.4. Pertumbuhan Penjualan Eceran

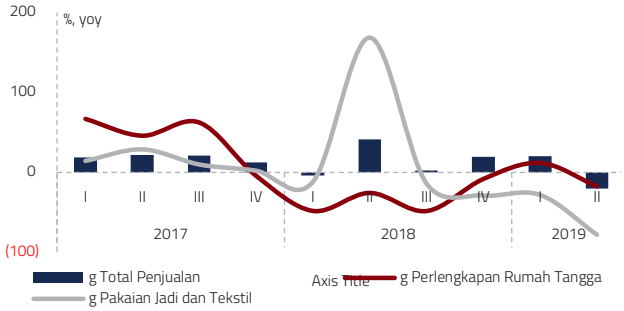

Sumber : Survei Penjualan Eceran, Bank Indonesia

Grafik 1.5. Perkembangan Penjualan Kendaraan Baru

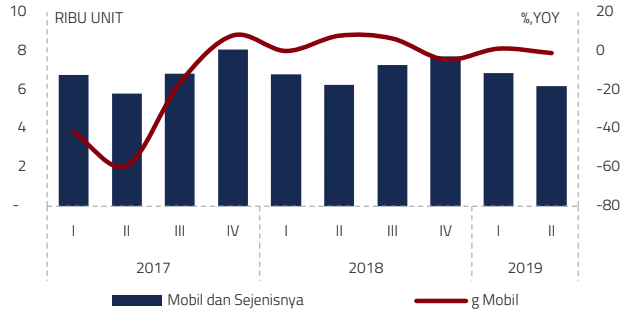

Sumber : Badan Pendapatan Daerah Prov. Bali, diolah

Perlambatan pertumbuhan kredit juga mengonfirmasi perlambatan kinerja konsumsi rumah tangga pada triwulan laporan. Pertumbuhan kredit kendaraan bermotor (KKB) mengalami perlambatan pada triwulan laporan dibanding triwulan sebelumnya[12]. Perlambatan pertumbuhan kredit KKB ini sejalan dengan perlambatan pertumbuhan penjualan kendaraan baru.

11. Total kendaraan pada triwulan I 2019 tercatat tumbuh -1,02 % (yoy), menurun dibanding triwulan I 2019 yang tumbuh 1,27% (yoy)
12. Kredit KKB tumbuh 9,80% (yoy) pada triwulan II 2019, lebih rendah dibanding triwulan sebelumnya yang tumbuh 21,51% (yoy)

Grafik 1.6. Perkembangan Kredit KPR, KKB, Multiguna

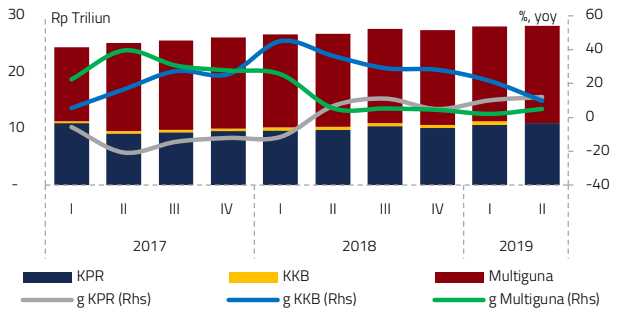

Sumber : LBU, Bank Indonesia

Perkiraan Kinerja Triwulan III 2019

Kinerja komponen konsumsi rumah tangga pada triwulan III 2019 diperkirakan meningkat, sedangkan kinerja konsumsi LNPRT diperkirakan melambat. Peningkatan kinerja konsumsi rumah tangga didorong oleh beberapa faktor, meliputi: i) Perayaan HBKN (Galungan & Idul Adha); ii) adanya insentif fiskal gaji ke-13 dengan nilai lebih tinggi; iii) Adanya liburan sekolah yang lebih ramai bertepatan dengan hari raya. Sementara itu, perlambatan kinerja LNPRT pada triwulan II 2019 terjadi karena aktivitas pada triwulan ini tidak setinggi triwulan sebelumnya yang didorong oleh aktivitas kegiatan politik yaitu Pemilu.

Konsumsi Pemerintah

Pada triwulan II 2019, kinerja konsumsi pemerintah menunjukkan perlambatan dibanding triwulan sebelumnya. Konsumsi pemerintah tercatat tumbuh 18,69% (yoy), melambat dibanding triwulan sebelumnya yang tumbuh sebesar 20,84% (yoy). Perlambatan ini sejalan dengan perlambatan persentase realisasi belanja pemerintah (APBD dan APBN).

Perlambatan kinerja konsumsi pemerintah pada triwulan laporan terutama disebabkan oleh pertumbuhan realisasi belanja pemerintah tingkat provinsi dibanding periode yang sama tahun sebelumnya. Realisasi belanja pemerintah provinsi pada triwulan II 2019 tumbuh -13,03%, lebih rendah dibanding realisasi triwulan II 2018. Penurunan realisasi belanja di tingkat provinsi disebabkan oleh adanya ketentuan baru yang dikeluarkan (pada Maret 2019) terkait adanya tambahan persyaratan administrasi dalam pencairan/penarikan anggaran (implementasi Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018), sehingga berdampak pada tertahannya realisasi belanja.

Melambatnya kinerja konsumsi pemerintah pada triwulan laporan juga disebabkan oleh melambatnya kinerja realisasi belanja APBD 9 kabupaten/kota di Bali. Realisasi belanja melalui APBD kabupaten/kota tumbuh 6,18% (yoy) pada triwulan II 2019, lebih rendah dibanding triwulan yang sama tahun sebelumnya. Perlambatan ini disebabkan oleh tertahannya kinerja bidang usaha pariwisata, sejalan dengan menurunnya jumlah kunjungan wisman.

Grafik 1.7. Perkembangan Belanja APBD Provinsi Bali

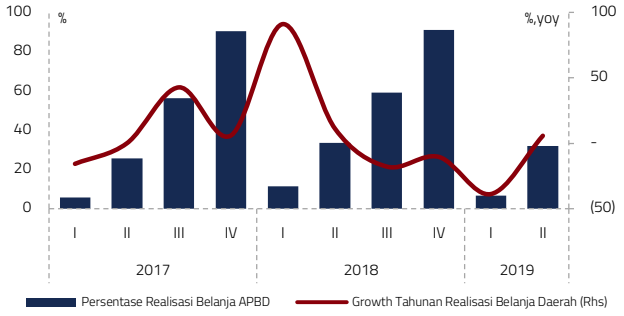

Sumber: BPKAD Prov. Bali, diolah

Grafik 1.8. Perkembangan Belanja APBN di Bali

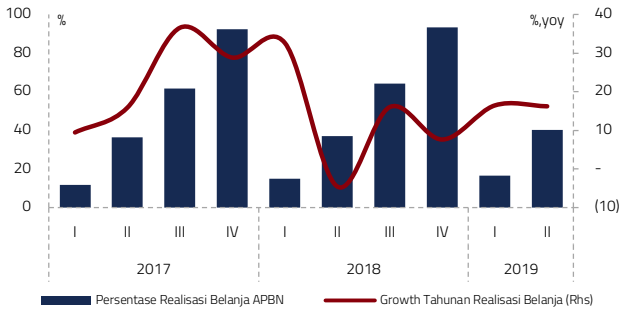

Sumber: DJPBN Wilayah Bali, diolah

Perkiraan Kinerja Triwulan III 2019

Kinerja konsumsi pemerintah pada triwulan III 2019 diperkirakan akan meningkat dibanding triwulan II 2019. Akselerasi kinerja konsumsi pemerintah di triwulan III 2019 didorong oleh upaya percepatan realisasi belanja antara lain melalui percepatan proses pengadaan. Upaya percepatan realisasi belanja ini menyebabkan peningkatan persentase pengerjaan proyek infrastruktur dan upaya akselerasi percepatan realisasi belanja oleh Kementerian dan Lembaga vertikal. Akselerasi ini dipercepat dengan pembayaran gaji ke-13 aparatur sipil negara (ASN) yang nilainya lebih tiniggi dari tahun sebelumnya.

1.2.2. Investasi

Kinerja komponen investasi pada triwulan II 2019 tercatat lebih rendah dibanding triwulan sebelumnya. Komponen investasi pada triwulan II 2019 tumbuh 7,63% (yoy), lebih rendah dibanding triwulan I 2019 yang tumbuh sebesar 8,78% (yoy). Perlambatan kinerja komponen investasi disebabkan oleh masuknya tahun politik dengan adanya pemilihan presiden dan legislatif sehingga mendorong perilaku *wait and see* pelaku usaha.

Kinerja investasi yang melambat pada triwulan laporan juga terkonfirmasi dari hasil Survei Kegiatan Dunia Usaha (SKDU). Hasil SKDU menunjukkan penurunan nilai Saldo Bersih Tertimbang (SBT) investasi, terutama disumbangkan oleh perlambatan nilai SBT pada sektor utama di Bali yaitu lapangan usaha Perdagangan Hotel dan Restoran (PHR) dan Konstruksi. Disisi lain, nilai impor barang modal pada triwulan II 2019 yang tumbuh lebih tinggi dibanding triwulan sebelumnya[13].

Grafik 1.9. Perkembangan SBT Investasi SKDU

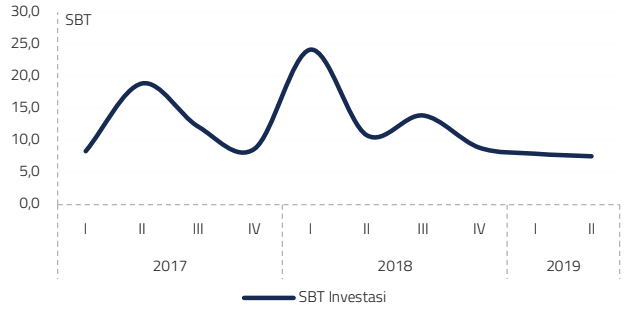

Sumber: Survei Kegiatan Dunia Usaha, Bank Indonesia

Grafik 1.10. Perkembangan Nilai Impor *Capital Goods*

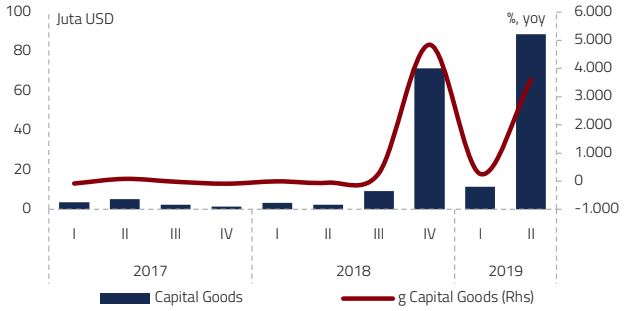

Sumber: Bea dan Cukai, diolah

Perlambatan kinerja komponen investasi pada triwulan II 2019 sejalan dengan realisasi Penanaman Modal Asing (PMA), realisasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN), dan pengadaan semen. Realisasi PMA di Bali pada triwulan laporan mengalami kontraksi semakin dalam dibanding triwulan sebelumnya[14]. Sementara itu, realisasi PMDN di Bali pada triwulan laporan tumbuh lebih lambat dibanding triwulan sebelumnya[15]. Selain itu, pengadaan semen di Bali pada triwulan II 2019 yang tumbuh melambat dibanding triwulan sebelumnya[16] juga mengonfirmasi perlambatan kinerja komponen investasi.

13. Impor barang modal pada triwulan II 2019 tumbuh 3.599,98% (yoy) , lebih rendah dibanding triwulan sebelumnya (254,25%;yoy)
14. PMA di Bali pada triwulan II 2019 tumbuh -44,74% (yoy), semakin dalam dibanding triwulan sebelumnya yang tumbuh -36,91% (yoy)
15. PMDN di Bali pada triwulan II 2019 tumbuh 268% (yoy), lebih rendah dibanding triwulan sebelumnya yang tumbuh 2204% (yoy)
16. Pengadaan semen di Bali pada triwulan II 2019 tumbuh -1,85% (yoy), lebih rendah dibanding triwulan sebelumnya yang tumbuh 17,54% (yoy)

Grafik 1.11. Realisasi Pengadaan Semen di Bali

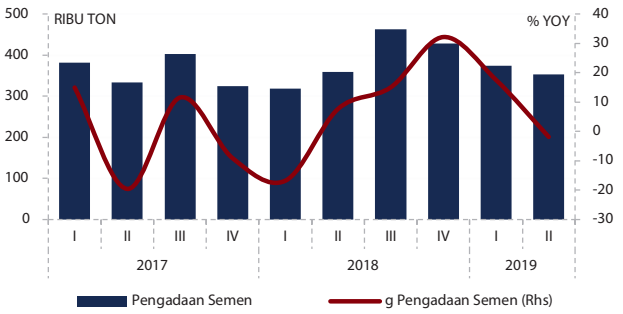

Sumber: Asosiasi Semen Indonesia, diolah

Grafik 1.12. Perkembangan Penanaman Modal Asing (PMA) di Bali

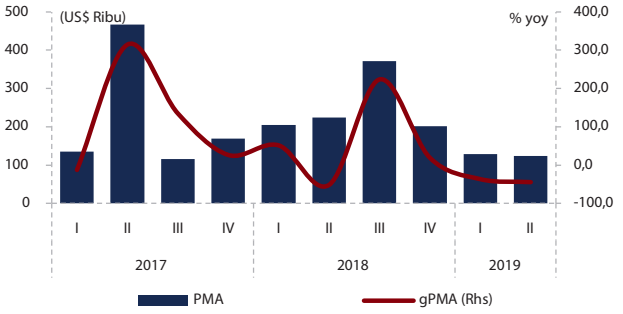

Sumber: BKPM, diolah, diolah

Perkiraan Kinerja Triwulan III 2019

Kinerja investasi pada triwulan III 2019 diperkirakan tumbuh lebih tinggi dibanding triwulan sebelumnya. Akselerasi ini didorong oleh pengerjaan proyek infrastruktur dan konstruksi antara lain pengembangan kawasan Nusa Dua, Pelabuhan Benoa dan Celukan Bawang, *Shortcut* Jalan Singaraja-Mengwitani, *Rapid Exit Taxiway* Bandara I Gusti Ngurah Rai, dan bendungan Sidane. Selain itu, percepatan realisasi belanja modal untuk APBD di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota juga berpotensi mendorong kinerja komponen investasi pada triwulan III 2019. Berlanjutnya kebijakan suku bunga kebijakan yang akomodatif dan turunnya suku bunga kredit diharapkan juga mampu mendorong kinerja investasi.

1.2.3. Ekspor & Impor

Neraca perdagangan Bali (antar daerah dan luar negeri) pada triwulan II 2019 masih mencatatkan surplus, meningkat dibanding triwulan sebelumnya. Surplus neraca perdagangan gabungan (luar negeri dan antar daerah) tercatat mengalami tercatat sebesar Rp 1,54 triliun pada triwulan II 2019, meningkat dibanding triwulan sebelumnya yang surplus Rp 1,52 miliar. Peningkatan surplus neraca perdagangan gabungan bersumber dari peningkatan ekspor luar negeri, sedangkan perdagangan antar daerah mengalami defisit.

Neraca perdagangan luar negeri Bali masih mencatatkan surplus namun pertumbuhan surplusnya melambat dibanding triwulan sebelumnya. Ekspor luar negeri Bali pada triwulan II 2019 tumbuh lebih rendah dibanding triwulan sebelumnya. Sejalan dengan itu, impor luar negeri Bali juga tumbuh lebih rendah dibanding triwulan sebelumnya. Namun penurunan pada impor tidak serendah penurunan pada ekspor.

Ekspor-Impor Antar Daerah

Defisit neraca perdagangan antar daerah Bali pada triwulan II 2019 meningkat dibanding triwulan sebelumnya. Pada triwulan laporan, neraca perdagangan antar daerah Bali mencatatkan defisit sebesar Rp8,54 triliun, lebih tinggi dibanding triwulan I 2019 yang sebesar Rp8,33 triliun. Peningkatan nilai defisit ini disebabkan oleh penurunan nilai ekspor serta peningkatan nilai impor. Ekspor daerah Bali antara lain dilakukan dengan daerah di Pulau Jawa seperti Banyuwangi yaitu untuk komoditas bawang merah. Sementara itu, Bali melakukan impor beberapa komoditas seperti beras dan cabai merah dari Surabaya dan Banyuwangi.

Ekspor-Impor Luar Negeri

Kinerja ekspor luar negeri Bali tumbuh melambat pada triwulan laporan, demikian pula impor luar negeri yang juga melambat dibanding triwulan sebelumnya. Ekspor luar negeri Bali tercatat tumbuh -6,01% (yoy) pada triwulan II 2019, lebih rendah dibanding triwulan I 2019 yang tumbuh positif 2,19% (yoy). Perlambatan pertumbuhan ini disebabkan oleh

jumlah kunjungan wisman yang mengalami kontraksi pada triwulan laporan[17]. Perlambatan pertumbuhan total ekspor luar negeri Bali yang lebih dalam tertahan oleh peningkatan ekspor barang[18]. Demikian pula, impor luar negeri Bali tumbuh 9,44% (yoy) pada triwulan laporan, lebih rendah dibanding triwulan sebelumnya yang tumbuh 9,87% (yoy).

Grafik 1.13. Pangsa Nilai Ekspor Komoditas Utama

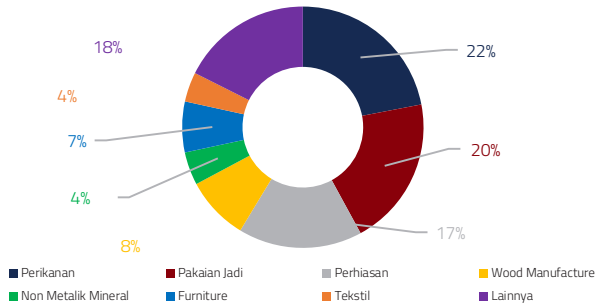

Sumber: Bea dan Cukai, diolah

Ekspor barang Bali mengalami akselerasi pada triwulan laporan dibanding triwulan sebelumnya yang didorong oleh akselerasi kinerja ekspor utama Bali seperti perikanan (pangsa 22%), pakaian jadi (20%), dan perhiasan (17%). Sementara itu terjadi pula sedikit **perlambatan pada komoditas tekstil dan *electrical machinery*.** Ekspor tekstil dengan pangsa sebesar 4% tumbuh melambat dibanding triwulan sebelumnya[19].

Grafik 1.14. Pertumbuhan Nilai Ekspor Komoditas Utama

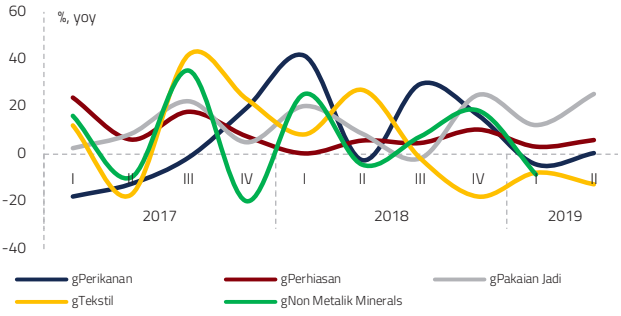

Sumber: Bea dan Cukai, diolah

Penurunan tekanan impor barang luar negeri disebabkan oleh melambatnya impor barang konsumsi pada triwulan II 2019[20]. Impor barang konsumsi yang melambat terjadi pada komoditas makanan-minuman untuk rumah tangga, barang konsumsi tahan lama, dan barang konsumsi tidak tahan lama. Sementara itu, impor barang konsumsi makanan-minuman olahan dan impor barang konsumsi *semi durable* mengalami akselerasi dibanding triwulan sebelumnya.

Grafik 1.15. Impor Barang Berdasarkan Jenis

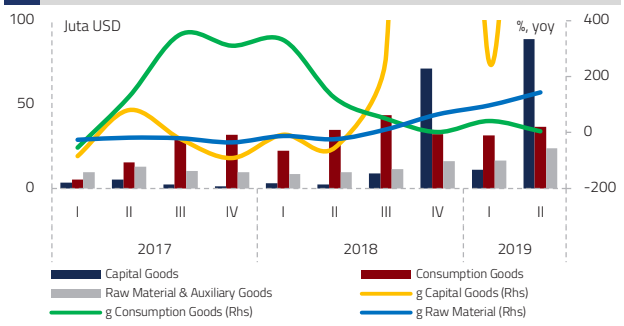

Sumber: Bea dan Cukai, diolah

Grafik 1.16. Impor Barang Modal Berdasarkan Jenis

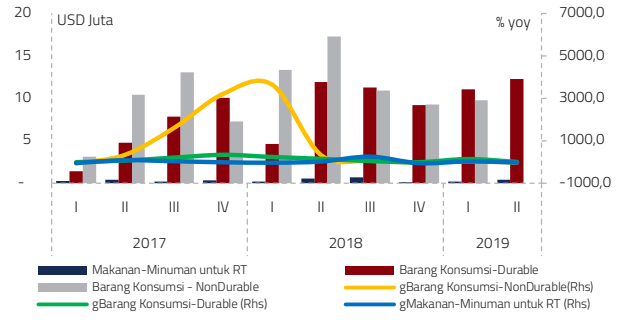

Sumber: Bea dan Cukai, diolah

Akselerasi kinerja ekspor barang luar negeri Bali disebabkan oleh membaiknya kinerja ekspor barang Bali ke beberapa negara pasar utama antara lain Jepang, dan Tiongkok[21]. Ekspor

17. Jumlah kunjungan wisman ke Bali pada triwulan II-2019 tumbuh -4,91% (yoy), lebih rendah dibanding triwulan I-2019 yang tumbuh 4,53% (yoy)
18. Ekspor barang luar negeri Bali pada triwulan II 2019 tumbuh 7,42% (yoy), lebih tinggi dibanding triwulan sebelumnya yang tumbuh 4,62% (yoy)
19. Ekspor tekstil tumbuh -12,68% (yoy), lebih rendah dibanding triwulan sebelumnya yang tumbuh -7,80% (yoy)
20. Impor barang konsumsi Bali tumbuh 4,58% (yoy) pada triwulan II 2019, lebih rendah dibanding triwulan sebelumnya (41,39%;yoy)
21. Pangsar pasar ekspor Bali berdasarkan negara tujuan pada triwulan II-2019 yaitu AS (27%), Australia (8%), Tiongkok (3%), Jepang (5%), Singapura (8%).

barang Bali ke Jepang dan Tiongkok menunjukkan pertumbuhan yang membaik dibanding triwulan sebelumnya[22]. Sementara itu, akselerasi kinerja ekspor luar negeri yang lebih tinggi tertahan oleh penurunan ekspor barang Bali ke US dan Jepang. Negara-negara pasar utama tersebut menjadi pasar untuk berbagai komoditas barang Bali, dengan rincian sebagai berikut:

1. Amerika Serikat:
   - Komoditas perikanan berupa ikan tuna, ikan lainnya dan kepiting/kerang-kerangan
   - Komoditas industri berupa olahan kayu, tekstil, barang dari logam tidak mulia, makanan olahan (coklat, olahan buah dan sayur), meubel, bahan dari plastik atau damar
2. Australia:
   - Komoditas perikanan berupa ikan dan mutiara
   - Komoditas hasil industri berupa tekstil, kayu olahan, barang dari logam tidak mulia dan olahan ikan, meubel, alas kaki
3. Tiongkok:
   - Komoditas perikanan berupa kepiting, kerang dan ikan kerapu
   - Komoditas hasil industri berupa kayu olahan, meubel, barang dari logam dan industri lainnya

Grafik 1.17. Pangsa Nilai Ekspor Berdasarkan Negara Tujuan Utama

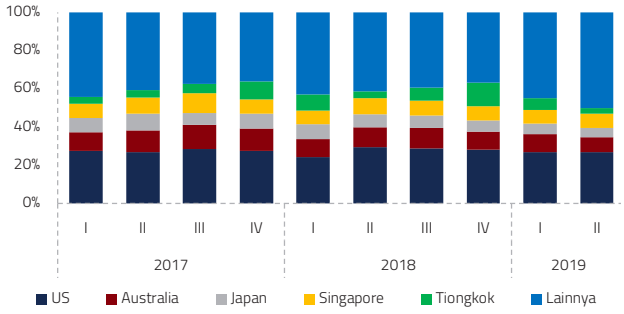

Sumber: Bea dan Cukai, diolah

Grafik 1.18. Pertumbuhan Nilai Ekspor Berdasarkan Negara Tujuan Utama

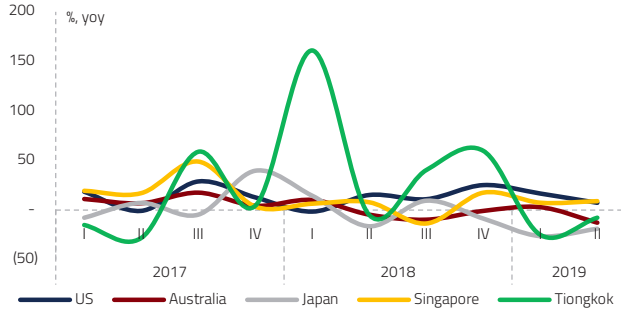

Sumber: Bea dan Cukai, diolah

Berbeda dengan ekspor barang, kinerja ekspor jasa Bali pada triwulan II 2019 tumbuh melambat dibanding triwulan sebelumnya seiring dengan jumlah kedatangan wisman yang melambat[23]. Berdasarkan hasil liason, perlambatan jumlah kunjungan wisman ke Bali dipengaruhi oleh penegakan hukum terhadap praktek *zero dollar tourism* dan adanya *travel advisory* dari berbagai negara kepada warga negaranya yang ingin berkunjung ke Indonesia. Selain itu, semakin kompetitifnya daya saing dari negara tujuan wisata tetangga seperti Malaysia, Singapura dan Thailand juga berpengaruh pada kunjungan wisman ke Bali.

Melambatnya kinerja ekspor jasa Bali terjadi seiring dari melambatnya pertumbuhan kedatangan wisman dari negara-negara pasar utama yang terkonfirmasi dari melambatnya kedatangan penumpang di Bandara Ngurah Rai. Kedatangan wisman Australia sebagai pasar utama (pangsa 21%) melambat pada triwulan laporan[24]. Sementara itu, kedatangan wisman Tiongkok mengalami kontraksi yang semakin dalam pada triwulan laporan[25]. Kedatangan wisman India yang pada triwulan I 2019 masih tumbuh positif, pada triwulan laporan mengalami kontraksi[26]. Kedatangan wisman yang melambat terkonfirmasi dari data kedatangan penumpang pada pintu kedatangan internasional di Bandara I Gusti Ngurah Rai pada triwulan II 2019[27].

22. Ekspor barang Bali ke AS dan Australia masing-masing tumbuh 7,33% (yoy) dan -12,72% (yoy) pada triwulan II 2019, lebih rendah dibanding triwulan sebelumnya yang masing-masing tumbuh 16,695 (yoy) dan 2,93% (yoy)
23. Jumlah wisman ke Bali pada triwulan II 2019 tumbuh -4,91% (yoy), lebih rendah dibanding triwulan I 2019 sebesar 4,53% (yoy)
24. Kedatangan wisman Australia pada triwulan laporan tumbuh 0,64% (yoy), lebih rendah dibanding triwulan sebelumnya yang tumbuh 15,21 (yoy)
25. Kedatangan wisman Tiongkok tercatat tumbuh -22,57% (yoy), lebih rendah dibanding triwulan sebelumnya yang tumbuh -10,83% (yoy)
26. Kedatangan wisman India tumbuh -5,84% (yoy) pada triwulan laporan, lebih rendah dibanding triwulan sebelumnya (8,65%;yoy)
27. Jumlah kedatangan penumpang pada pintu kedatangan internasional di Bandara I Gusti Ngurah Rai tumbuh 10,16% (yoy), lebih rendah dibanding triwulan sebelumnya (15,40%;yoy)

Grafik 1.19. Kunjungan Wisman ke Bali

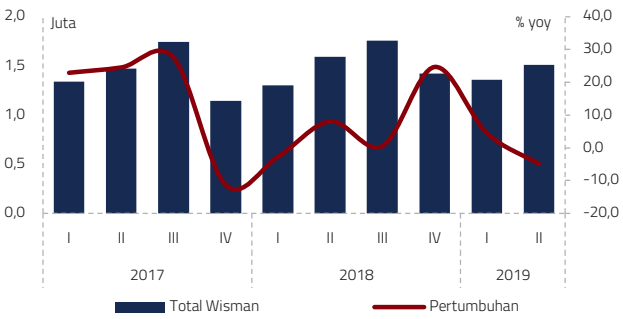

Sumber: BPS Provinsi Bali, diolah

Grafik 1.20. Jumlah Kedatangan Penumpang ke Provinsi Bali pada Gate Internasional Bandara Ngurah Rai

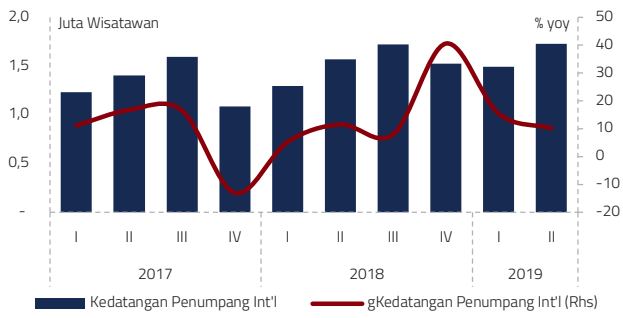

Sumber: PT. Angkasa Pura I, diolah

Grafik 1.21. *Share* Wisman Berdasarkan Negara Asal

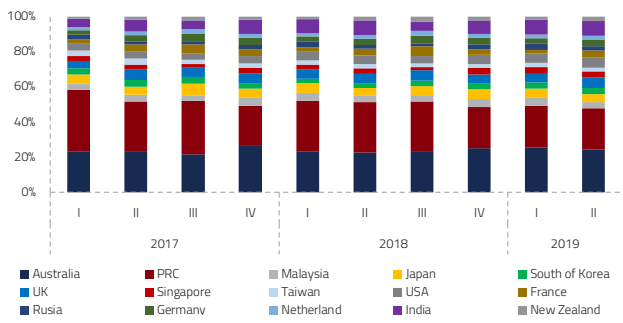

Sumber: BPS Provinsi Bali, diolah

Perkiraan Kinerja Triwulan II 2019

Kinerja ekspor luar negeri Bali pada triwulan III 2019 diperkirakan akan mengalami akselerasi, didorong oleh peningkatan kinerja ekspor jasa dan barang. Meningkatnya kinerja ekspor jasa, didorong oleh membaiknya kinerja pariwisata seiring dengan mulai masuknya periode *high season* pariwisata. Peningkatan ekspor jasa pada triwulan III 2018 juga didorong oleh pembukaan rute penerbangan langsung baru ke Bali dari beberapa negara[28] sehingga mendorong kedatangan wisman ke Bali. Sementara itu, perbaikan kinerja ekonomi negara mitra dagang utama Bali diharapkan mampu mendorong ekspor barang Bali. Salah satu negara mitra dagang utama Bali yang diproyeksi akan mengalami akselerasi pertumbuhan ekonomi adalah Jepang[29]. Jepang merupakan pasar ekspor beberapa komoditas utama Bali antara lain komoditas perikanan, *travel goods*, serta produk olahan kayu.

1.3. SISI PENAWARAN

Dari sisi penawaran, perlambatan kinerja perekonomian Bali pada triwulan II 2019 disebabkan oleh perlambatan kinerja hampir seluruh lapangan usaha utama kecuali lapangan usaha pertanian dan lapangan usaha perdagangan. Perlambatan kinerja ekonomi Bali pada triwulan laporan terutama disebabkan oleh melambatnya kinerja lapangan usaha yang terkait dengan bidang usaha pariwisata. Selain itu, perlambatan kinerja perekonomian Bali juga disebabkan oleh pengerjaan proyek infrastrktur yang tidak semasif periode-periode sebelumnya.

Struktur perekonomian Bali pada triwulan II 2019 masih didominasi 5 komponen lapangan usaha utama yaitu: (1) penyediaan akomodasi makan dan minum (pangsa 23%), (2) pertanian, kehutanan, dan perikanan (pangsa 13%), (3) konstruksi (pangsa 10%), (4) Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor (pangsa 8%), (5) industri pengolahan (pangsa 6%). Oleh karena itu maka perlambatan pada lapangan usaha tersebut sangat mempengaruhi kinerja perekonomian Bali.

28. Tercatat ada 3 pembukaan rute penerbangan langsung baru: Denpasar-Sydney oleh Malindo Air, Denpasar-Turki oleh Turkish Airlines, Denpasar-Banyuwangi oleh Citilink.
29. Menurut proyeksi IMF bulan Juli 2019, Jepang diperkirakan tumbuh 0,9% (yoy) pada tahun 2019, lebih tinggi dibanding tahun 2018 yang tumbuh 0,8% (yoy

Tabel 1.2. Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Bali Sisi Penawaran (%, yoy)

Lapangan Usaha	2017				2017	2018				2019	
	I	II	III	IV		I	II	III	IV	I	II
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	4.31	4.88	4.05	-1.37	2.88	4.71	2.95	3.72	6.92	1.74	5.52
Pertambangan dan Penggalian	2.54	0.39	1.91	-10.49	-1.44	-6.26	-3.12	-4.00	3.44	-4.10	-8.12
Industri Pengolahan	3.58	-0.05	0.65	-0.66	0.86	1.32	5.66	6.72	9.16	9.80	7.38
Pengadaan Listrik, Gas	0.40	-0.16	8.40	13.50	5.48	4.90	6.52	0.50	-3.51	1.50	1.44
Pengadaan Air	1.82	4.86	3.05	1.16	2.72	-1.88	2.92	2.14	4.87	6.04	4.09
Konstruksi	6.41	7.29	8.02	8.94	7.69	9.04	9.48	11.77	9.40	8.97	8.11
Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	8.38	8.12	9.64	5.28	7.84	5.20	6.52	7.82	12.34	7.96	10.97
Transportasi dan Pergudangan	5.24	6.10	6.00	2.65	4.99	6.72	6.10	2.96	8.79	5.04	3.87
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	9.47	9.73	11.18	6.65	9.25	6.64	6.41	4.41	8.26	4.38	2.85
Informasi dan Komunikasi	8.19	8.36	7.58	8.42	8.14	9.21	8.80	7.96	6.12	5.99	6.31
Jasa Keuangan	5.06	6.34	0.70	-2.01	2.43	1.06	-0.31	3.29	3.84	6.89	9.05
Real Estate	2.56	3.42	4.03	5.06	3.78	2.38	3.91	5.73	6.44	7.86	5.27
Jasa Perusahaan	8.56	7.66	5.90	5.65	6.91	6.94	8.40	9.00	6.83	4.10	3.97
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	-0.10	-5.06	-1.34	0.33	-1.59	0.95	6.33	8.52	3.23	13.41	4.97
Jasa Pendidikan	7.30	8.11	5.24	7.44	7.00	9.25	9.30	8.84	4.31	3.23	3.85
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	9.00	7.92	7.76	9.06	8.44	9.29	9.44	9.16	6.61	6.24	6.13
Jasa lainnya	9.57	8.26	7.52	6.68	7.98	7.53	9.29	9.59	8.97	7.07	5.64
PDRB	6.24	5.97	6.23	4.01	5.59	5.62	6.11	6.24	7.59	5.96	5.64

Sumber : BPS Provinsi Bali, diolah

1.3.1. Lapangan Usaha Penyediaan Akomodasi Makan & Minum

Pada triwulan II 2019, lapangan usaha akmamin mengalami perlambatan dibandingkan triwulan sebelumnya. Kinerja lapangan usaha akmamin pada pada triwulan laporan tercatat tumbuh sebesar 2,85% (yoy), lebih rendah dibanding triwulan I 2019 yang tumbuh 4,38% (yoy). Perlambatan kinerja lapangan usaha ini didorong oleh melambatnya kinerja bidang usaha yang terkait dengan pariwisata yang dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu (i) harga tiket pesawat domestik yang masih tinggi; (ii) penegakkan hukum terhadap praktek *zero dollar tourism*; (iii) adanya *travel advisory* dari beberapa negara terhadap warganya yang ingin berkunjung ke Indonesia pasca terjadinya kerusuhan pengumuman pemenang Pemilihan Presiden.

Perlambatan kinerja lapangan usaha akmamin terkonfirmasi dari penurunan pertumbuhan jumlah kunjungan wisatawan mancanegara. Kunjungan wisatawan mancanegara pada triwulan II 2019 ke Bali tumbuh sebesar -4,91% (yoy), lebih rendah dibanding triwulan I 2019 (4,53%;yoy). Perlambatan kedatangan wisman ini terjadi pada wisman yang berasal dari tiga negara utama yaitu Australia, Tiongkok, dan India. Kunjungan wisman Australia ke Bali melambat pada triwulan laporan, sedangkan kunjungan wisman Tiongkok mengalami kontraksi yang semakin besar pada triwulan laporan[30]. Sementara itu, kunjungan wisman India juga mengalami kontraksi pada triwulan laporan setelah mengalami pertumbuhan positif di triwulan sebelumnya[31].

Grafik 1. 22. Rata-Rata Lama Menginap Hotel Bintang dan Non Bintang

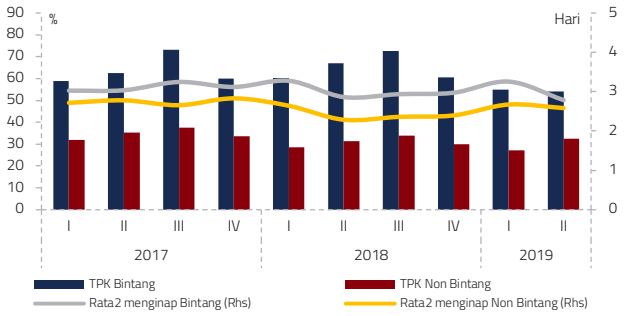

Sumber: BPS Provinsi Bali, diolah

30. Kunjungan wisman Australia dan Tiongkok masing-masing tumbuh 0,63% (yoy) dan -22,57% (yoy) pada triwulan laporan, lebih rendah dibanding triwulan sebelumnya yang masing-masing sebesar 15,21% (yoy) dan -10,83% (yoy)
31. Kunjungan wisman India turun dari 8,65% (yoy) pada triwula I 2019 menjadi -5,84% (yoy) pada triwulan II 2019

Kedatangan penumpang di Bandara I Gusti Ngurah Rai dan Pelabuhan Benoa dan Celukan Bawang juga menunjukkan adanya perlambatan. Jumlah kedatangan penumpang pada pintu kedatangan internasional Bandara I Gusti Ngurah Rai tumbuh melambat pada triwulan laporan[32]. Sejalan dengan itu, kedatangan penumpang di Pelabuhan Benoa dan Celukan Bawang masih kontraksi pada triwulan laporan[33].

Grafik 1. 23. Kunjungan Wisman ke Provinsi Bali Triwulanan

Sumber: BPS Provinsi Bali, diolah

Grafik 1. 24. Perkembangan Kunjungan Wisman Berdasarkan Negara

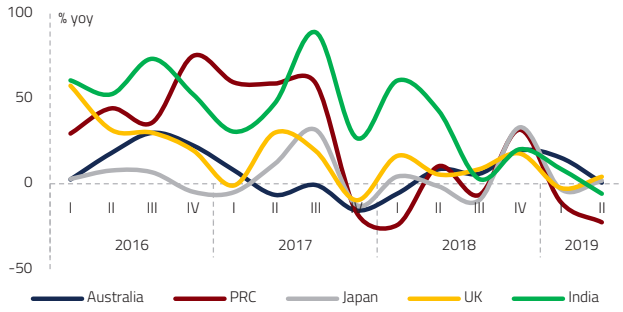

Sumber: BPS Provinsi Bali, diolah

Penurunan tingkat penghunian kamar (TPK) pada hotel bintang juga mengonfirmasi perlambatan kinerja lapangan usaha akomodasi makan dan minum. TPK pada hotel bintang menurun pada triwulan laporan[34]. Namun demikian, TPK pada hotel non bintang masih lebih tinggi pada triwulan laporan dibanding triwulan sebelumnya. Secara umum, rata-rata lama menginap baik pada hotel bintang maupun non bintang mengalami penurunan pada triwulan II 2019 dibanding triwulan sebelumnya[35].

Grafik 1. 25. Perkembangan Kedatangan Penumpang di Bandara I Gusti Ngurah Rai

Sumber: PT. Angkasa Pura I, diolah

Grafik 1. 26. Perkembangan Arus Penumpang di Pelabuhan

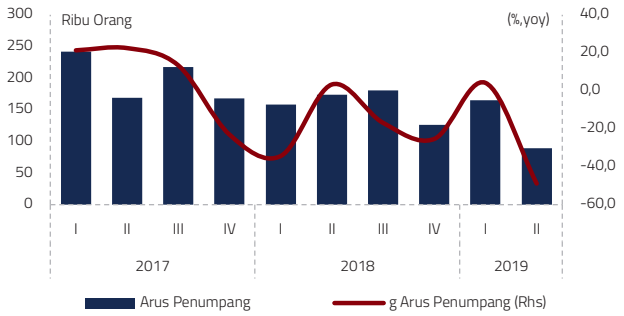

Sumber : PT. Pelindo III, diolah

Namun demikian, sejumlah upaya terus dilakukan oleh pemangku kepentingan (pemerintah dan pelaku usaha pariwisata) untuk terus mendorong kinerja pariwisata Bali. Beberapa upaya yang dilakukan untuk kinerja lapangan usaha ini pada triwulan II 2019 berdasarkan hasil survei dan liaison meliputi:

- Pengembangan pasar alternatif, termasuk dengan menjalin kerja sama dengan *travel agent* lain dan pengembangan produk melalui program Bali *and beyond*.
- Pengembangan produk dan strategi pemasaran serta upaya perbaikan pelayanan yang terus dilakukan;

32. Kedatangan penumpang melalui pintu internasional di Bandara I Gusti Ngurah Rai tumbuh 10,16% (yoy) pada triwulan II 2019, melambat dibanding triwulan sebelumnya (15,41% (yoy)
33. Arus penumpang (dalam negeri & luar negeri) melalui pelabuhan Benoa dan Celukan Bawang tumbuh -48,89% (yoy), lebih rendah dibanding triwulan sebelumnya yang tumbuh 4,14% (yoy)
34. TPK hotel bintang pada triwulan laporan sebesar 54,09 (%), lebih rendah dibanding triwulan sebelumnya yang sebesar 55,06%.
35. Rata-rata lama menginap pada hotel bintang dan non bintang masing-masing 2,78 hari dan 2,58 hari pada triwulan II 2019, lebih rendah dibanding triwulan sebelumnya yang masing-masing 3,25 hari dan 2,67 hari.

- Pengadaan promosi yang dilakukan oleh pelaku usaha untuk menarik konsumen domestik dan asing, selain itu upaya pelaku usaha untuk selalu mengikuti *event* promosi pariwisata di luar negeri di antaranya melalui kegiatan *Travel Market* dan *Trade Fair* (London), *Internationale Tourismus Borse* (ITB) Berlin dan Asia Travel Fair di Singapura;
- Penerapan strategi untuk terus menjaga kerja sama dengan *business partner* melalui program *membership*;
- Pelaksanaan kerjasama dengan mengundang travel agent luar negeri serta para Duta Besar Negara sahabat untuk bekunjung dan melihat kondisi Bali terkini.

Perkiraan Kinerja Triwulan III 2019

Memasuki periode triwulan III 2019, kinerja lapangan usaha akmamin diperkirakan akan mengalami akselerasi. Kondisi ini didorong oleh masuknya periode *high season* pariwisata di Bali pada triwulan laporan, meningkatnya frekuensi penerbangan sejalan dengan adanya penambahan *direct flight* baru sepanjang triwulan III 2019[36], serta membaiknya kinerja ekonomi negara mitra dagang utama Bali pada tahun 2019[37]. Sementara itu, jumlah wisatawan mancanegara juga diperkirakan akan terus meningkat sejalan dengan berbagai upaya inovasi dalam kegiatan promosi yang dilakukan oleh pelaku usaha pariwisata serta meneruskan upaya yang telah dilakukan pada saat ini. Selain itu, adanya penandatangan kerja sama dalam bidang pariwisata dengan berbagai negara yang dilakukan oleh Dinas Pariwisata Bali, juga berpotensi mendorong akselerasi kinerja lapangan usaha ini.

1.3.2. Lapangan Usaha Pertanian, Kehutanan dan Perikanan

Kinerja lapangan usaha pertanian, kehutanan, dan perikanan mengalami akselerasi pada triwulan laporan. Lapangan usaha pertanian tercatat tumbuh sebesar 5,52% (yoy) pada triwulan II 2019, meningkat dibanding triwulan sebelumnya yang tumbuh sebesar 1,74% (yoy). Akselerasi kinerja lapangan usaha ini disebabkan oleh bergesernya puncak panen tanaman bahan makanan (tabama) dari Maret menjadi April.

Akselerasi kinerja lapangan usaha pertanian, kehutanan, dan perikanan terkonfirmasi dari kinerja produksi padi. Pada triwulan II 2019, produksi padi tumbuh 6,99% (yoy), lebih tinggi dibanding triwulan sebelumnya yang tumbuh 3,70% (yoy). Namun demikian, NTP menunjukkan penurunan pada triwulan laporan dibanding triwulan sebelumnya[38].

Grafik 1.27. Perkembangan Produksi Padi di Bali

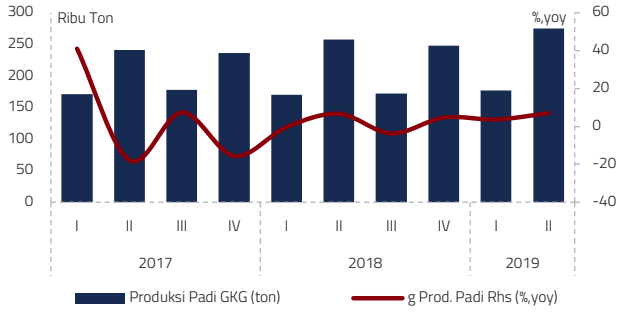

Sumber : Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan Provinsi Bali, diolah

Grafik 1.28. Perkembangan NTP Sub Sektor Tanaman Pangan

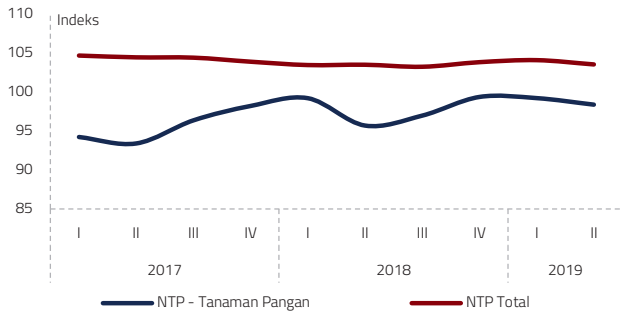

Sumber : BPS Prov. Bali, diolah

36. Tercatat ada 3 pembukaan rute penerbangan langsung baru: Denpasar-Sydney oleh Malindo Air, Denpasar-Turki oleh Turkish Airlines, Denpasar-Banyuwangi oleh Citilink.
37. Berdasarkan *World Economic Outlook* (WEO) IMF pada periode Juli 2019, kinerja ekonomi negara mitra dagang yang diperkirakan membaik adalah Jepang. Ekspor Bali ke Jepang meliputi komoditas perikanan, *travel goods*, dan wood manufacture
38. NTP Bali pada triwulan laporan sebesar 103,58, lebih rendah dibanding triwulan sebelumnya yang sebesar 104,13

Meskipun demikian, Pemerintah Daerah terus mendorong kinerja sektor pertanian lewat berbagai program baik *on farm* maupun *off farm*. Sejumlah tantangan yang dihadapi sektor pertanian Provinsi Bali antara lain (i) tingginya alih fungsi lahan dan alih komoditas, (ii) skala usaha tani yang masih kecil dan sebagai usaha sampingan, (iii) ketersedian air irigasi yang menyusut bersaing dengan air baku, dan (iv) ketidakpastian cuaca. Di tengah tantangan tersebut, pemerintah daerah Provinsi Bali melalui Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Provinsi Bali menjalankan sejumlah program *on farm* dan *off farm* untuk mendorong kinerja sektor pertanian antara lain pengembangan padi varietas khusus, pemberian insentif benih, pupuk & alat mesin pertanian, pendampingan lapangan, akses pasar, serta skema pembiayaan (PMUK)[39]. Selain itu, Pemerintah Provinsi Bali juga sudah mengeluarkan Peraturan Gubernur Nomor 99. Tahun 2018 tentang Pemasaran dan Pemanfaatan Produk Pertanian, Perikanan, dan Industri Lokal Bali yang mewajibkan pihak hotel, restoran, swalayan, dan *catering* untuk memanfaatkan produk lokal Bali.

Perkiraan Kinerja Triwulan III 2019

Kinerja lapangan usaha pertanian pada triwulan III 2019 diperkirakan melambat dibanding triwulan sebelumnya. Perlambatan kinerja lapangan usaha ini, disebabkan oleh telah berakhirnya masa panen untuk komoditas tabama pada triwulan III 2019. Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan Provinsi Bali memprakirakan produksi padi pada triwulan III mencapai 165.137 ton GKG atau tumbuh -3,85% (yoy). Perlambatan kinerja lapangan usaha ini juga berpotensi terjadi seiring dengan adanya risiko terjadinya kemarau panjang. BMKG memprediksi musim kemarau tahun 2019 akan lebih kering akibat fenomena El Nino yang berdampak pada kondisi kering dan berkurangnya curah hujan, terutama berdampak pada daerah Buleleng dan Jembrana. Meskipun demikian, beberapa upaya dalam mendorong peningkatan produksi tetap dilakukan untuk menahan potensi perlambatan kinerja lapangan usaha pertanian antara lain bantuan sarana produksi dan program Sapi Wajib Bunting

1.3.3. Lapangan Usaha Industri Pengolahan

Kinerja lapangan usaha industri pengolahan pada triwulan laporan mengalami perlambatan dibanding triwulan sebelumnya. Lapangan usaha Industri pengolahan mencatat pertumbuhan sebesar 7,38% (yoy) pada triwulan II 2019, lebih rendah dibanding triwulan sebelumnya yang tumbuh 9,80% (yoy). Perlambatan kinerja lapangan usaha ini utamanya disebabkan oleh menurunnya permintaan barang percetakan pasca Pemilihan Umum serta penurunan kinerja negara mitra dagang utama (AS, Australia, Tiongkok).

Perlambatan kinerja lapangan usaha industri pengolahan sejalan dengan melambatnya kinerja ekspor beberapa jenis barang. Sebagian besar produk ekspor barang luar negeri Bali merupakan hasil produksi industri pengolahan. Memburuknya kinerja ekspor barang tekstil dan non metalik mineral mengonfirmasi peningkatan kinerja lapangan usaha industri pengolahan[40].

Grafik 1. 29. Perkembangan Komoditas Utama Ekspor Bali

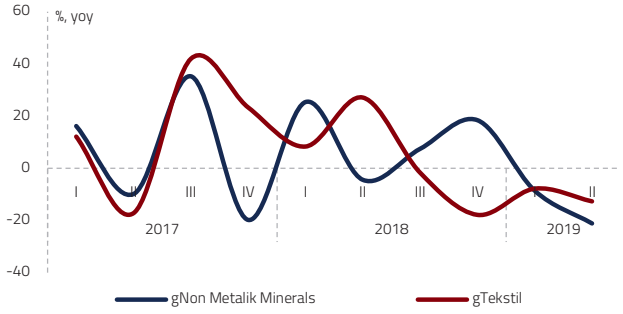

Sumber : Bea dan Cukai, diolah

39. Lewat Program Penguatan Modal Usaha Kelompok (PMUK), kelompok tani dapat mengakses dana pinjaman dengan bunga sangat murah. Dana tersebut berasar dari APBD Provinsi Bali.
40. Ekspor tekstil dan non metalik minerals masing-masing tumbuh -12,68% (yoy) dan -21,13% (yoy) pada triwulan II 2019, lebih rendah dibanding triwulan sebelumnya yang masing-masing tumbuh -7,80% (yoy) dan -8,57% (yoy)

Melambatnya kinerja industri pengolahan pada triwulan laporan terjadi pada produksi Industri Manufaktur Besar Sedang (IBS) maupun Industri Mikro dan Kecil (IMK). Pertumbuhan produksi IBS dan IMK mengalami pada triwulan II 2019 mengalami perlambatan dibanding triwulan sebelumnya[41]. Namun kredit industri masih mengalami akselerasi pada triwulan laporan[42].

Grafik 1. 30. Pertumbuhan Produksi Industri Manuf. Besar & Sedang (IBS) dan Industri Manuf. Mikro & Kecil (IMK)

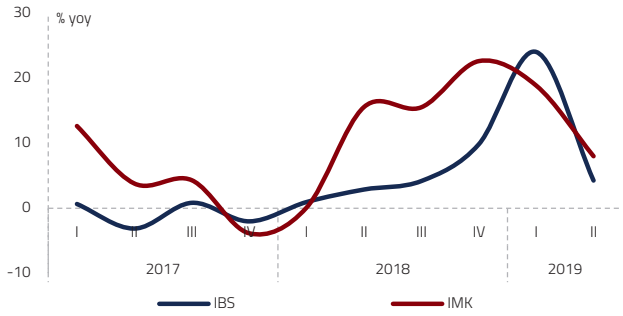

Sumber : BPS Prov. Bali, diolah

Grafik 1. 31. Kredit Kategori Industri

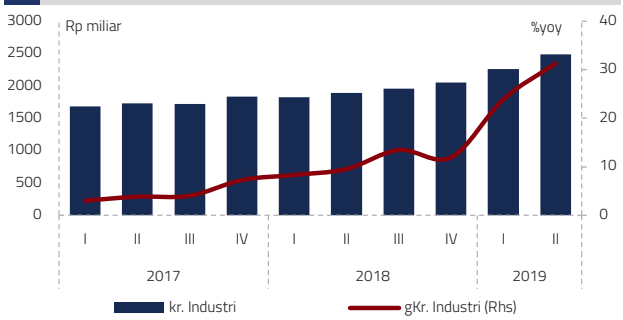

Sumber : LBU, Bank Indonesia

Perkiraan Kinerja Triwulan III 2019

Kinerja industri pengolahan pada triwulan III 2019 diperkirakan masih akan mengalami perlambatan dibanding triwulan sebelumnya. Tertahannya kinerja ekonomi negara mitra dagang utama Bali menjadi salah satu faktor risiko rendahnya permintaan terhadap industri pengolahan Bali. Selain itu, tidak adanya faktor pendorong permintaan dari domestik seperti adanya pemilu di triwulan sebelumnya juga menjadi penyebab potensi perlambatan kinerja industri pengolahan di triwulan III 2019.

1.3.4. Lapangan Usaha Konstruksi

Kinerja lapangan usaha konstruksi pada triwulan laporan menunjukkan perlambatan dibandingkan triwulan sebelumnya. Lapangan usaha konstruksi pada triwulan laporan tercatat tumbuh sebesar 8,11% (yoy), lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh sebesar 8,97% (yoy). Perlambatan kinerja lapangan usaha ini seiring dengan pengerjaan proyek konstruksi dan infrastruktur yang tidak semasif triwulan sebelumnya yang didorong oleh penyelenggaraan IMF – *World Bank Annual* Meeting 2018. Selain itu, terdapat penundaan penyelesaian beberapa proyek yaitu di Bandara Ngurah Rai dan Pelabuhan Benoa[43].

Grafik 1. 32. Perkembangan Pengadaan Semen

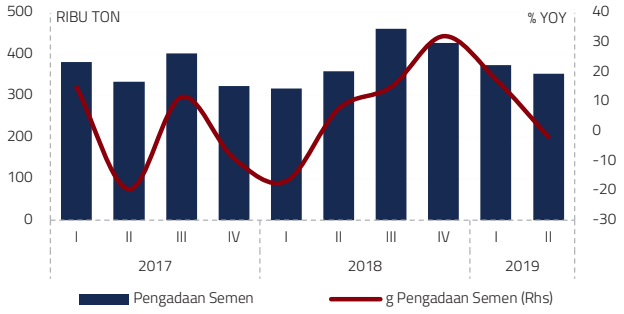

Sumber : Asosiasi Semen Indonesia, diolah

Grafik 1. 33. Perkembangan SBT Konstruksi SKDU

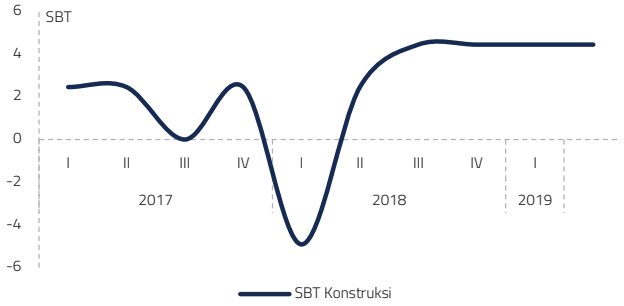

Sumber : Survei Kegiatan Dunia Usaha, Bank Indonesia

41. Pertumbuhan produksi IBS & IMK masing-masing pada triwulan II 2019 tercatat sebesar 4,28% (yoy) dan 8,03%, lebih rendah dibanding triwulan sebelumnya yang sebesar 24,12% (yoy) dan 18,94% (yoy).
42. Kredit industri tumbuh 31.31% (yoy) pada triwulan II 2019, meningkat dibanding triwulan sebelumnya yang tumbuh 23,91% (yoy)
43. Proyek perluasan Pelabuhan Benoa berupa pembangunan Marina ditunda karena permintaan Gubernur Bali untuk menghentikan reklamasi. Sementara itu, pembangunan satu dari dua Rapid Exit Taxiway (RET) yang dibangun juga ditunda penyelesaiannya dari sebelumnya yang ditargetkan selesai Oktober 2019.

Kinerja lapangan usaha konstruksi yang melambat pada triwulan II 2019 terkonfirmasi oleh Survei Kegiatan Dunia Usaha (SKDU) dan sejalan dengan pengadaan semen. Nilai SBT konstruksi pada SKDU di triwulan II 2019 menurun dibanding triwulan sebelumnya[44]. Sementara itu, perlambatan kinerja lapangan usaha konstruksi juga sejalan dengan pengadaan semen di Provinsi Bali yang tumbuh melambat pada triwulan laporan[45].

Grafik 1.34. Perkembangan Kredit KPR

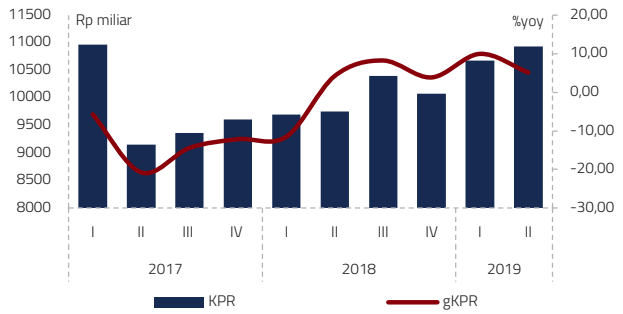

Sumber : LBU, Bank Indonesia

Grafik 1.35. Perkembangan Kredit Konstruksi

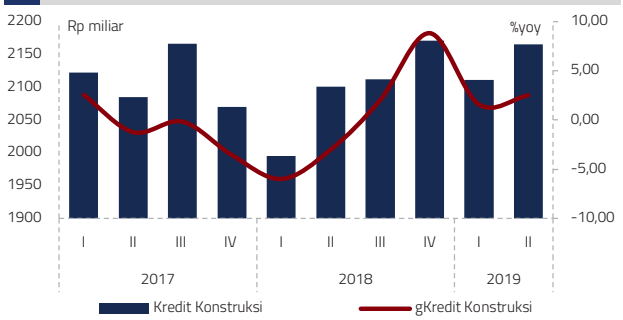

Sumber : LBU, Bank Indonesia

Perlambatan kinerja lapangan usaha konstruksi juga terkonfirmasi dari perkembangan KPR. Pada triwulan laporan, KPR tumbuh lebih rendah dibanding triwulan sebelumnya[46]. Disisi lain, kredit konstruksi masih tumbuh akselerasi pada triwulan laporan.

Perkiraan Kinerja Triwulan III 2019

Kinerja lapangan usaha konstruksi pada triwulan III 2019 diperkirakan akan mulai menunjukkan tendensi peningkatan. Hal ini didorong oleh berlanjutnya pengerjaan proyek infrastruktur pemerintah antara lain pengembangan Celukan Bawang, Shortcut jalan Singaraja-Mengwitani, Rapid Exit Taxiway Bandara I Gusti Ngurah Rai, serta Bendungan Sidan. Selain itu, juga didorong oleh proyek konstruksi swasta antara lain pengembangan kawasan Nusa Dua berupa pembangunan beberapa hotel dan kawasan perkantoran.

Selain itu, peningkatan kinerja lapangan usaha konstruksi juga akan didorong oleh percepatan realisasi belanja modal dan juga peningkatan kapasitas bisnis pelaku usaha. Peningkatan belanja modal baik yang menggunakan APBN maupun APBD sejalan dengan upaya pemerintah yang terus melakukan optimalisasi realisasi anggaran antara lain dengan efisiensi proses pengadaan dan percepatan pengerjaan proyek-proyek infrastruktur. Peningkatan kinerja lapangan usaha konstruksi juga didorong oleh peningkatan kapasitas bisnis pelaku usaha seiring dengan upaya pemerintah untuk terus meningkatkan optimisme pelaku usaha dengan melakukan deregulasi ijin usaha.

1.3.5. Lapangan Usaha Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil, dan Sepeda Motor

Lapangan usaha perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor tercatat tumbuh akselerasi pada triwulan laporan dibanding triwulan sebelumnya. Pada triwulan II 2019, lapangan usaha ini tumbuh 10,97% (yoy), lebih tinggi dibanding triwulan sebelumnya yang tumbuh sebesar 7,96% (yoy). Akselerasi ini didorong oleh diperkirakan didorong oleh meningkatnya aktivitas perdagangan seiring dengan meningkatnya pendapatan masyarakat.

44. Nilai SBT kegiatan usaha konstruksi SKDU pada triwulan II 0,00%, menurun dibanding triwulan sebelumnya yang sebesar 4,44%.
45. Pengadaan semen tumbuh sebesar -1,85% (yoy) pada triwulan II 2019, melambah dibanding triwulan sebelumnya yang tumbuh 17,54% (yoy)
46. Kredit KPR tumbuh 5,13% (yoy) pada triwulan II 2019, melambat dibanding triwulan sebelumnya yang tumbuh 9,97% (yoy).

Akselerasi kinerja lapangan usaha ini terkonfirmasi dari hasil Survei Penjualan Eceran (SPE) beberapa komoditas. Berdasarkan hasil SPE, pertumbuhan penjualan perlengkapan rumah tangga dan bahan bakar menujukkan akselerasi pada triwulan laporan dibandingkan triwulan sebelumnya[47].

Grafik 1.36. Perkembangan Penjualan Kelompok Komoditas

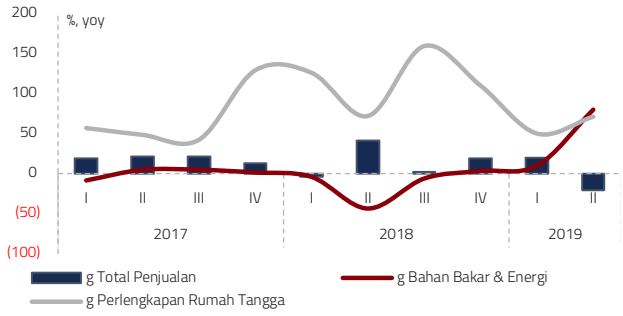

Sumber : Survei Penjualan Eceran, Bank Indonesia

Grafik 1.37. Perkembangan Indeks Keyakinan Konsumen, Indeks Kondisi Ekonomi dan Indeks Ekspektasi Konsumen

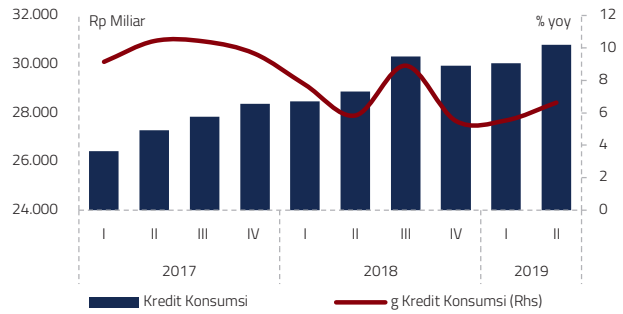

Sumber : Survei Konsumen, Bank Indonesia

Akselerasi kinerja lapangan usaha ini juga terkonfirmasi dari perkembangan kredit konsumsi dan kredit multiguna pada triwulan laporan. Kredit konsumsi pada triwulan laporan tumbuh lebih kuat dibanding triwulan sebelumnya[48]. Akselerasi kredit konsumsi ini juga sejalan dengan tingkat suku bunga kredit konsumsi yang menunjukkan penurunan. Selain itu, kredit multiguna juga menunjukkan akselerasi pada triwulan laporan.

Grafik 1.38. Perkembangan Kredit Konsumsi

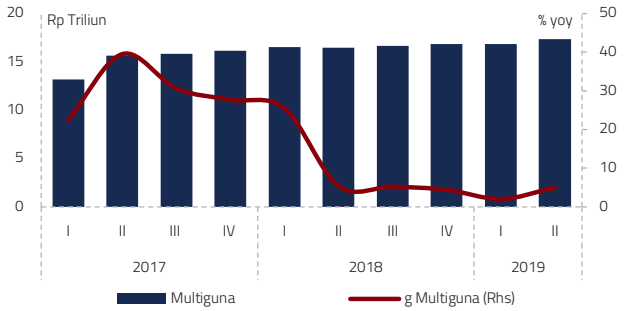

Sumber : Survei Penjualan Eceran, Bank Indonesia

Grafik 1.39. Perkembangan Suku Bunga Kredit Konsumsi

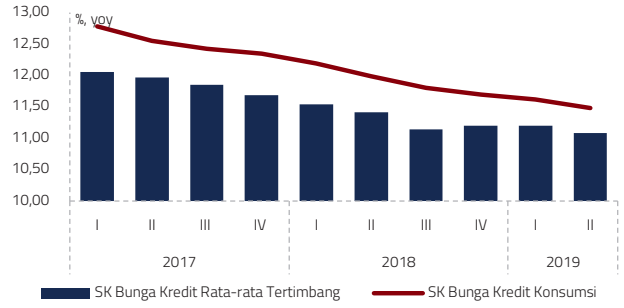

Sumber : LBU, Bank Indonesia

Perkiraan Kinerja Triwulan III 2019

Kinerja lapangan usaha perdagangan besar dan eceran pada triwulan III 2019 diperkirakan akan meningkat. Hal ini terutama didorong oleh peningkatan kinerja sektor pariwisata seiring dengan masuknya periode *high season* pariwisata. Selain itu, adanya pembukaan rute penerbangan langsung baru pada triwulan III 2019 akan meningkatkan kedatangan wisman dan berdampak pada peningkatan kinerja lapangan usaha perdagangan besar dan eceran. Pemberian insentif fiskal (Gaji ke 13 ASN) juga akan mendorong kinerja lapangan usaha ini pada triwulan III 2019.

47. Penjualan perlengkapan rumah tang tercatat tumbuh 70,96% (yoy) pada triwulan II-2019, lebih tinggi dibanding triwulan I-2018 yang sebesar 49,97% (yoy). Sementara itu, penjualan bahan bakar tumbuh 79,75% (yoy) pada triwulan II 2019, lebih tinggi dibanding triwulan sebelumnya yang tumbuh 9,805 (yoy)
48. Kredit konsumsi tumbuh sebesar 6,63% (yoy) pada triwulan laporan, lebih tingi dibanding triwulan sebelumnya yang sebesar 5,53% (yoy)Data APBD kabupaten/kota mencakup 9 kabupaten/kota yang ada di Bali. Sumber data BPKAD Provinsi Bali dan BPKAD kabupaten/kotaData APBD kabupaten/kota mencakup 9 kabupaten/kota yang ada di Bali. Sumber data BPKAD Provinsi Bali dan BPKAD kabupaten/kota

BOKS 1

STRATEGI UNTUK MENDORONG KINERJA EKSPOR BALI

Bali merupakan salah satu daerah yang konsisten mencatatkan surplus transaksi perdagangan di Indonesia (Grafik 1). Di tengah defisit transaksi berjalan yang dialami Indonesia dalam kurun waktu 8 tahun terakhir, Bali berkontribusi untuk menahan semakin dalamnya defisit tersebut. Seperti diketahui, neraca transaksi berjalan Bali sangat didominasi oleh transaksi jasa, yaitu jasa pariwisata. Mengacu pada data PDRB 2018 (atas dasar harga berlaku), pangsa ekspor jasa mencapai 89,51% terhadap total ekspor, sedangkan sisanya sebesar 10,49% merupakan ekspor barang.

Grafik 1. Transaksi Perdagangan Bali

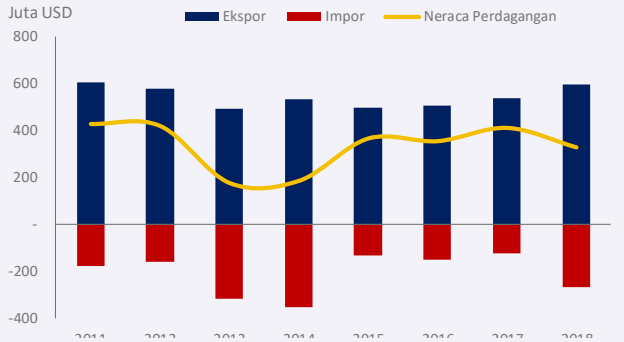

Ekspor jasa khususnya pariwisata sangat tergantung pada kedatangan wisatawan mancanegara. Kedatangan wisman tidak hanya dipengaruhi oleh faktor internal tetapi oleh faktor eksternal yang tidak dapat kita kendalikan. Dengan kondisi tersebut, Bali masih memiliki peluang untuk menghasilkan devisa melalui pengembangan ekspor barang. Ekspor barang selain berpotensi untuk menghasilkan devisa juga diharapkan dapat menjadi penyangga perekonomian Bali dan menjadi sumber pertumbuhan ekonomi baru. Dengan demikian maka pengembangan ekspor barang merupakan suatu alternatif yang tepat pada saat ini.

Berdasarkan analisis *revealed comparative advantage* (RCA) yang telah dilakukan oleh Bank Indonesia, Bali mempunyai beberapa komoditas yang memiliki daya saing dan yang memiliki permintaan dunia yang relatif tinggi, sehingga berpotensi untuk terus ditingkatkan perdagangan ekspor luar negerinya. Adapun komoditas tersebut meliputi Ikan Tuna, Kacang Mete, dan Kakao.

Tuna merupakan komoditas ekspor yang memiliki pasar yang sangat luas. Saat ini, kebutuhan tuna dunia dipenuhi oleh Meksiko, Tiongkok dan Thailand. Sedangkan Indonesia masih berada di urutan ke 5 sebagai eksportir ikan tuna terbesar di dunia. Perdagangan ekspor tuna dapat berupa tuna segar maupun tuna beku. Saat ini, kinerja ekspor tuna Bali sedang mengalami *trend* penurunan. Faktor yang menjadi penyebab penurunan tersebut adalah menurunnya hasil tangkapan tuna. Jumlah hasil tangkapan tuna Bali 2018 mencapai 15.512 ton, menurun dari 2014 yang sebesar 25.277 ton. Penurunan ini juga terkonfirmasi oleh data hasil tangkapan tuna oleh pelaku usaha yang tergabung dalam Asosiasi Tuna Longline (ATLI) di Bali yang melaporkan hal yang sama tentang terjadinya penurunan hasil tangkapan tuna. Penurunan tangkapan ikan tuna tersebut juga sejalan dengan tren penurunan jumlah kapal anggota ATLI yang beroperasi. Beberapa faktor yang menjadi penyebab tertahannya tangkapan tuna antara lain adalah adanya ketentuan berupa pembatasan ukuran kapal, larangan *transhipment* dan terhambatnya perpanjangan izin kapal akibat pemenuhan pelaporan untuk *logbook* kapal yang masih rendah dan masih adanya pengajuan yang belum memenuhi persyaratan Laporan Kegiatan Usaha (LKU) dan Laporan Kegiatan Penangkapan (LKP).

Pasar ekspor tuna Bali saat ini terkonsentrasi pada dua negara yaitu Jepang (43,04%) dan Amerika Serikat (49,37%). Untuk pasar Jepang, jenis tuna didominasi oleh tuna segar sedangkan untuk pasar AS, jenis tuna yang mendominasi adalah tuna beku. Saat ini ekspor tuna ke Jepang masih menghadapi tantangan karena Jepang mengenakan tarif yang lebih tinggi terhadap komoditas tuna segar dari Indonesia (4%) dibanding tuna segar dari Thailand dan Vietnam (0%). Tarif 0% yang didapatkan Vietnam dan Thailand, karena kedua negara tersebut memiliki perjanjian bilateral (Economic Partneship Agreement) dengan Jepang. Selain itu, Indonesia juga mendapat tarif masuk ke Uni Eropa sebesar 11-20%, lebih tinggi dari Srilanka yang hanya sebesar 5-7%.

Dari sisi potensinya, perdangan tuna di dunia pada tahun 2018 mencapai US$ 1,6 miliar, sedangkan ekspor tuna dari Bali hanya sebesar US$ 19 juta. Hal ini menujukkan bahwa Bali masih memiliki peluang yang luas dalam pengembangan pasar ekspor tuna ke depan. Selain itu, adanya perang dagang yang saat ini terjadi antara Amerika Serikat dan Tiongkok juga dapat menjadi peluang peningkatan ekspor tuna Indonesia. Sebagaimana diketahui, ikan tuna juga termasuk kedalam daftar produk Tiongkok yang dikenakan tarif tambahan oleh Amerika Serikat. Oleh karena itu, guna memanfaatkan kesempatan tersebut dapat dilakukan beberapa upaya untuk mengoptimalkan ekspor ikan tuna khususnya dari Wilayah Bali.

Diperlukan beberapa upaya untuk menjawab

tantangan yang muncul dalam ekspor tuna. Salah satu upaya tersebut adalah mempercepat proses perizinan kapal, dapat dilakukan dengan memanfaatkan teknologi *database sharing system* (DBS), sehingga penilaian kepatuhan pelaporan menjadi lebih cepat. Hal itu dimungkinkan karena dengan DBS, Sistem Informasi Perijinan Kapal Perikanan (SIPEPI) dapat membandingkan data produksi kapal menurut LKP dan *logbook* secara langsung. Upaya lainnya adalah upaya preventif dalam meningkatkan kepatuhan pelaporan (e-*logbook* & LKP/LKU) juga dapat dilakukan antara lain melalui sosialisasi dan asistensi melalui kerjasama dengan asosiasi tuna agar para pelaku usaha penangkapan tuna melakukan pelaporan dengan lengkap, jujur, dan sesuai ketentuan.

Dalam rangka memperluas ekspor, pelaku usaha juga harus didorong untuk melakukan sertifikasi Marine Stewardship Council (MSC). Sertifikasi ini akan mempermudah pembukaan pasar di Amerika Serikat dan Eropa. Studi kasus di Bali berdasarkan hasil riset Balai Besar Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan di tahun 2017, kesiapan pelaku usaha untuk melakukan kegiatan usaha sesuai dengan sertifikasi MSC tidak lebih dari 59%. Kendala yang dihadapi adalah (i) pelaku usaha kurang mendapatkan informasi pasti mengenai data ketersediaan ikan tuna karena tuna selalu bermigrasi, (ii) pelaku usaha tidak mengawal proses penangkapan ikan, melainkan hanya mendapatkan hasil produk dari nelayan, dan (iii) belum semua pelaku usaha memiliki kesadaran untuk mengikuti aturan pemerintah. Untuk mendorong pelaku usaha mendapatkan sertifikasi ini, Pemerintah melalui KKP perlu membuat regulasi teknis yang mendukung berjalannya prinsip MSC dalam praktek perikanan tangkap. Selain itu, pemerintah dapat menyediakan tenaga assessor bersertifikat internasional sehingga biaya untuk pembuatan sertifikasi ini bisa lebih murah.

Untuk meningkatkan daya saing ekspor tuna Indonesia ke Jepang, pemerintah Indonesia perlu untuk terus melakukan negosiasi dengan Jepang sehingga tuna asal Indonesia bisa mendapat tarif yang lebih rendah. Saat ini, melalui Indonesia-Japan Economic Partnership Agreement (IJEPA), sudah disepakati bahwa renegosiasi tarif tuna segar dapat dilakukan setiap dua tahun. Per Juli 2019, Indonesia dan Jepang sudah menyepakati untuk menyelesaikan General Review perjanjian IJEPA pada akhir tahun 2019. Dalam proses peninjauan kembali tersebut, Pemerintah Indonesia perlu meyakinkan Pemerintah Jepang bahwa Indonesia layak mendapatkan penurunan tarif bea masuk

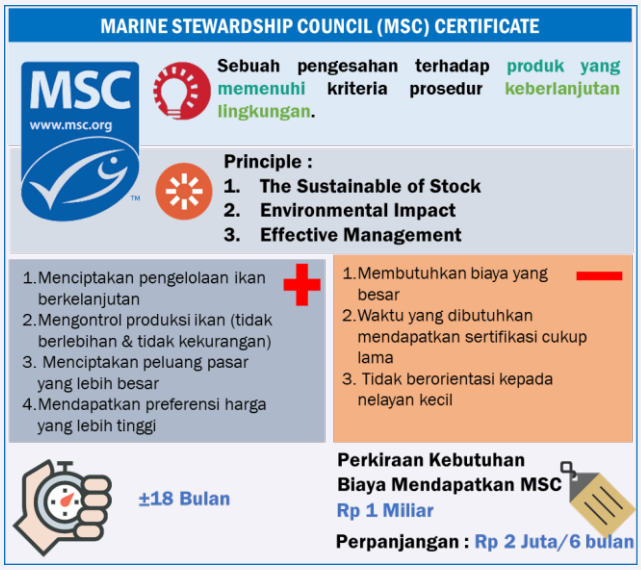

Gambar 1. Sertifikasi MSC

perikanan karena kebijakan perikanan Indonesia telah gencar dalam memerangi praktek Illegal, Unreported, Unregulated (IUU).

Kacang mete merupakan produk yang memiliki permintaan dunia yang amat luas khususnya permintaan yang datang dari India, Vietnam, Brazil dan negara negara Eropa. Kacang mete merupakan salah satu komoditas yang berpotensi untuk dikembangkan mengingat Bali berkontribusi menyumbang lebih dari 20% ekspor kacang mete Indonesia. Karangasem menjadi daerah menjadi penghasil kacang mete, namun selama ini belum dikembangkan secara khusus untuk mendorong peningkatan nilai tambah.

Hilirisasi kacang mete di Bali saat ini masih menemui beberapa tantangan antara lain keterbatasan bahan baku (kacang mete *in shell*). Bahan baku tidak bisa didapat sewaktu-waktu, karena selama satu tahun, masa panen kacang mete hanya empat bulan yakni Agustus sampai dengan November. Seringkali, suplai melimpah di masa panen tidak mampu diolah dan langsung diekspor ke luar negeri. Pengupasan biji kacang mete juga membutuhkan tenaga ahli untuk dapat menghasilkan biji yang sempurna agar memiliki nilai jual tinggi. Selain itu, pengupasan kulit kacang mete saat ini masih menggunaan alat kacip sederhana sehingga mengurangi kualitas serta kuantitas kacang mete yang dikupas dengan persentase kacang mete yang pecah lebih tinggi dibandingkan yang utuh. Mesin berteknologi yang lebih tinggi masih harus didapatkan secara impor yang saat ini masih dikenakan biaya tambahan berupa pajak impor barang modal.

Di sisi hulu, produktivitas kacang mete Bali jika dibandingkan dengan daerah lain di Indonesia pun masih bisa dioptimalkan. Produktivitas kacang mete di Bali saat ini juga memiliki kecenderungan yang menurun. Hal ini terjadi karena antara lain kondisi umur tanaman yang sudah tua (lebih dari 25 tahun) dan tidak dilakukan peremajaan tanaman karena membutuhkan waktu yang lama. Sebaran bibit unggul pun belum merata dan belum sesuai dengan karakteristik wilayah sehingga menurunkan kualiatas produksi. Selain itu, juga ditemukan organisme pengganggu tanaman (opt) pada kacang mete seperti ulat kipat dan kepik penghisap. Pengendalian opt ini masih dirasakan berat oleh petani kacang mete karena membutuhkan biaya yang tidak sedikit.

Dalam perdagangan ekspor, kacang mete Bali juga menghadapi tantangan berupa hambatan tarif dan

Gambar 2. Analisa SWOT Kacang Mete

non tarif. Untuk hambatan tarif, yang saat ini dihadapi adalah tarif sebesar 20% ke Jepang (untuk mete yang dicampur dengan coklat), 40% ke Rusia, dan 30% ke India yang menyebabkan harga mete Bali kurang bersaing di negara lain. Sedangkan untuk hambatan non tarif, lebih terkait kepada ekspor produk mete *shelled*. Negara Amerika Serikat dan Uni Eropa yang menjadi negara tujuan ekspor mete Bali, menerapkan standar yang ketat untuk kualitas dan keamanan dari hulu ke hilir, konsekuensinya, eksportir harus memiliki sistem manajemen kualitas, keamanan pangan serta secara konsisten menjaga mutu produksinya.

Apabila dilihat dari potensinya, hilirisasi kacang mete di Bali memiliki beberapa keunggulan antara lain karakter geografis dan iklim yang cocok untuk budidaya, banyaknya produk hilirisasi, serta masih tersedianya banyak lahan untuk produksi. Selain itu masih tersedia potensi pasar yang luas baik domestik maupun global, adanya budaya untuk mengkonsumsi kacang mete, serta pembebasan ppn impor kacang mete mentah yang dapat mendukung ketersedian bahan baku dalam rangka hilirisasi.

Salah satu contoh keberhasilan hilirisasi produk kacang mete di Bali adalah East Bali Cashew. Produk ini merupakan produk kacang mete siap saji dengan berbagai varian produk. Produk ini merupakan hasil inovasi dan telah memasuki pasar ekspor.

Di faktor produksi, perusahaan yang menghasilkan East Bali Cashew mengembangkan pola kerjasama dengan petani (total 500 – 600 petani) dalam rangka penyediaan supply kacang mete. Perusahaan memberikan edukasi dan pelatihan untuk meningkatkan produksi tanaman mete. Selain itu, perusahaan juga melakukan *replanting* pada tanaman mete yang sudah tua. Di tahun 2016, perusahaan telah menanam 30.000 pohon mete baru. Saat ini, Perusahaan juga tengah mempersiapkan penanaman baru di Flores (NTT) sebesar 40 ha. Selain itu, perusahaan ini juga melakukan riset untuk meningkatkan kualitas bibit. Tanaman mete yang secara rata-rata baru bisa dipanen pada umur 4 tahun, kini telah ditemukan bibit unggul dengan umur panen 2 tahun.

Di bagian hilir, perusahaan memberi edukasi kepada karyawan di bagian pengolahan. Perusahaan memiliki 4 mesin pengolah mete, di mana 2 mesin digunakan khusus untuk pelatihan. Perusahaan juga berinovasi dengan mengembangkan produk sesuai kebutuhan konsumen. Perusahan bukan hanya menjual kacang mete, melainkan juga produk lainnya dengan kacang mete hanya sebagai bahan tambahan. Hal ini juga bermanfaat untuk mensiasati keterbatasan bahan baku kacang mete (*in shell*).

Di sisi ekspor, perusahaan melakukan ekspor ke 22 negara, di antaranya yang terbesar adalah Australia, Jerman, Korea Selatan, dan Tiongkok. Target *revenue* perusahaan pada akhir tahun 2019 adalah US$ 1,5 juta. Perusahaan saat ini juga telah memiliki sertifikat Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP). Sertifikasi diperlukan untuk menjamin kualitas dan kelayakan produk sehingga dapat menembus pasar ekspor. Saat ini, perusahaan juga tengah berupaya memperoleh sertifikasi BRC (British Retail Concorcium).

Mencontoh kesuksesan produk East Bali Cashew, ke depannya pemerintah diharapkan dapat turut membantu untuk menyukseskan ekspor komoditas kacang mete ini. Diperlukan bantuan fasilitas untuk peningkatan produktivitas hulu kacang mete melalui insentif untuk riset pengembangan produk tanaman kacang mete, program *replanting*, dan perawatan lahan. Selain itu dapat juga dilakukan pembentukan pola kerjasama petani dan industri seperti yang telah dilakukan PT. East Bali Cashew. Petani melaksanakan *replanting* dan perawatan lahan dengan dukungan modal perusahaan yang selanjutnya hasil produksi akan menjadi suplai perusahaan untuk diolah lebih lanjut.

Di sisi hilirisasi, dukungan juga diperlukan dalam meningkatkan kualitas SDM agar memiliki spesialisasi keahlian di bidang pengolahan kacang mete melalui edukasi serta sertifikasi kepada tenaga kerja. Selain itu, inovasi-inovasi produk yang sesuai dengan selera masyarakat namun tidak perlu membutuhkan banyak bahan baku juga perlu dikembangkan utamanya untuk mensiasati keterbatasan bahan baku. Bukan hanya produk kacang mete saja, melainkan juga dapat dilakukan produksi produk lainnya namun dengan tambahan kacang mete.

Dari sisi regulasi, dapat juga dilakukan pengaturan ekspor karena sebagaian ekspor kacang mete masih dilakukan dalam bentuk *in shell*. Di sisi lain, industri domestik justru mengeluhkan ketersediaan bahan baku (kacang mete *in shell*). Adanya pengaturan melalui bea ekspor akan mendorong eksportir untuk mengolah kacang mete terlebih dahulu sebelum diekspor. Selain itu, insentif pajak impor mesin pengolahan juga perlu diberikan. Urgensi mesin pengolahan adalah untuk mendorong perubahan mekanisme pengolahan kacang mete dari tradisional menjadi mekanik sehingga kualitas serta kuantitas produksi yang dihasilkan juga lebih baik.

Selanjutnya, untuk penguatan ekspor, beberapa negara telah menerapkan standar ketat terhadap kualitas dan keamanan makanan. Pemerintah diharapkan dapat mengawal proses hulu ke hilir untuk perbaikan mutu produksi melalui pemberian fasilitas untuk petani ataupun pelaku industri agar memperoleh sertifikasi guna memperoleh kesempatan perdagangan yang lebih besar. Di sisi lain, diperlukan juga promosi kepada pasar ekspor potensial seperti inggris dan Uni Emirat Arab yag merupakan importir besar kacang mete. Selain itu, produk kacang mete di Indonesia juga dapat dikenalkan melalui pameran berskala internasional.

Sejalan dengan program nasional, saat ini Bali menjadi kawasan prioritas pengembangan kakao nasional. Meskipun pangsanya kecil, namun kakao Bali memiliki potensi yang tinggi sebagai komoditas ekspor yang tercermin pada harga ekspor yang lebih tinggi dari rata-rata provinsi lain di Indonesia. Sama halnya seperti kacang mete, ekspor kakao juga dapat dilakukan dalam bentuk produk mentah maupun olahan berupa produk antara. Produk olahan kakao dapat berbentuk kakao bubuk, *liquor/paste*, biji kakao, *butter/fat/oil*, dan coklat batang (*end product*). Jenis produk ekspor kakao Bali didominasi produk mentah hingga produk antara, sementara ekspor produk akhir masih sangat minim. Adapun negara utama tujuan ekspor Kakao Bali adalah Amerika, Singapura, dan Prancis.

Di sisi produksi, kakao di Bali saat ini mengalami beberapa tantangan yang menahan produksinya. Perkebunan kakao di Bali didominasi oleh perkebunan rakyat dengan pangsa 99%. Namun tingkat produktivitasnya masih rendah disebabkan oleh banyaknya lahan yang rusak, usia tanaman yang sudah tua serta teknik penanaman/pengolahan yang masih tradisional. Skala ekonomi yang rendah juga menjadi tantangan produksi kakao di Bali. Skala ekomi ekonomi usaha petani masih rendah dibandingkan dengan negara-negara kompetitor dengan rata-rata kepemilikan lahan sebesar 0,5 ha per petani. Selain itu, harga komoditas juga kurang bersaing karena kakao yang dijual petani, sebagian besar diantaranya belum melalui proses fermentasi.

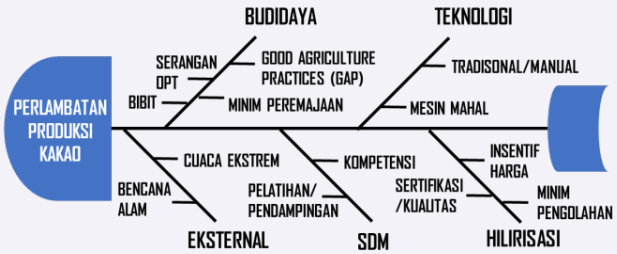

Gambar 3 Analisa Fish Bone Perlambatan Produksi Kakao

Jika dilihat dari harganya, sebenarnya kakao yang difermentasi memiliki harga jual sekitar 10-15% lebih tinggi dibandingkan dengan kakao non-fermentasi. Mutu yang dihasilkan pun lebih baik dan sesuai dengan SNI. Di sisi lain, fermentasi ini menyebabkan penurunan bobot sebesar 0,5-3,75% dan memakan waktu 12-24 jam lebih lama. Enggannya petani untuk melakukan fermentasi dikarenakan perbedaan harga jual (fermentasi dan non fermentasi) yang tidak disepakati oleh pembeli dan proses fermentasi yang rumit. Umumnya harga yang diterima petani untuk biji kakao yang difermentasi di bawah rata-rata, dikarenakan kualitas fermentasi yang dilakukan petani kurang optimal disebabkan kurangnya pengetahuan dan *skill* petani dalam fermentasi.

Di sisi regulasi, berdasarkan Putusan Nomor 70P/HUM/2013 SE Dirjen Pajak No. SE-24/PJ/2014, saat ini untuk biji kakao mentah dikenakan pengenaan pajak ekspor 0-15% (tergantung harga dunia), dan PPN 10% untuk transaksi dalam negeri. Sedangkan untuk produk olahan, baik untuk ekspor (pajak ekspor) maupun transaksi dalam negeri (PPN) dikenakan pajak 10%. Hal ini menyebabkan pelaku usaha cenderung untuk mengekspor kakao ke luar negeri dalam bentuk biji mentah, dibandingkan memenuhi kebutuhan industri dalam negeri. Akibatnya, industri cokelat dalam negeri pun menjadi kesulitan memperoleh bahan baku dari dalam negeri dan memilih untuk melakukan impor yang hanya dikenakan PPN 5%. Hal ini mengakibatkan kecenderungan peningkatan defisit kakao untuk memenuhi kebutuhan industri.

Produk kakao dan turunannya juga masih menghadapi hambatan tarif untuk transaksi ke pasar Eropa dan Amerika Serikat dengan nilai 7,7%-9,6%. Di sisi lain, negara pengekspor kakao kompetitor yakni Pantai Gading dan Ghana bebas bea masuk. Hal ini tentu perlu menjadi perhatian, mengingat konsumsi cokelat Eropa sebesar 8-9 kg per kapita setiap tahunnya. Selain itu, saat ini 7,66% impor cokelat Amerika Serikat dipenuhi oleh Indonesia, sedangkan 15,58% dipenuhi Pantai Gading, dan 3,62% dari Ghana.

Mengacu pada kondisi tersebut, maka perlu berbagai upaya untuk mengatasi beberapa tantangan tersebut. Salah satu diantaranya adalah revitalisasi atau peremajaan tanaman kakao. Kebijakan ini masih terkendala oleh tidak tersedianya anggaran untuk peremajaan tanaman di Wilayah Bali. Anggaran yang tersedia di Kementan difokuskan untuk peremajaan di Sulawesi. Untuk itu, Bali harus memiliki sumber pendanaan sendiri untuk melakukan peremajaan

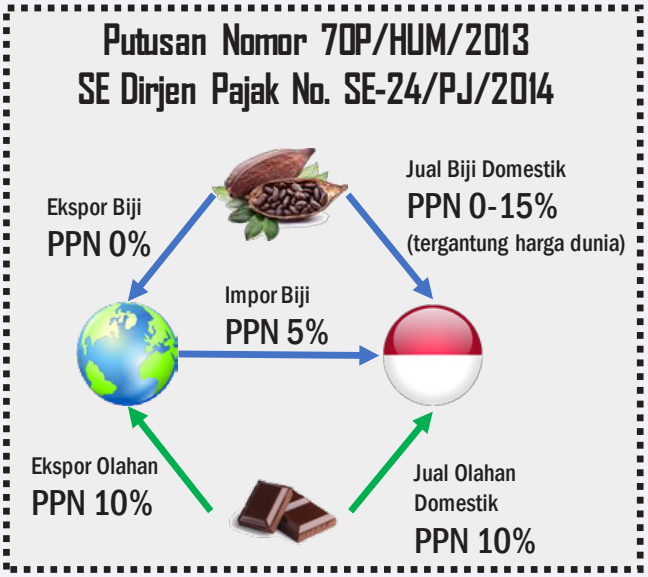

Gambar 4 Informasi Pajak Perdagangan Komoditas Kakao

tanaman. Pendanaan secara mandiri ini dapat bersumber dari: (i) pemanfaatan dana CSR dari pelaku industri atau hotel melalui skema kemitraan; dan (ii) penggunaan dana desa untuk pembangunan agrowisata kakao yang disinergikan dengan optimalisasi bantuan pemerintah (bibit unggul dan saprodi). Peremajaan tanaman membutuhan waktu selama 2 tahun, untuk menyiasati potensi penurunan pendapatan petani, proses peremajaan dapat diintegrasikan dengan pengembangan agrowisata, sehingga petani mendapatkan penghasilan tambahan dari tiket masuk wisata.

Penguatan kelembagaan juga diperlukan dalam mendorong kesuksesan petani kakao. Sebagai contoh, terdapat koperasi petani kakao Kerta Semaya Samaniya di Kabupaten Jembarana yang mampu memperoleh sertifikasi internasional untuk pertanian berkelanjutan serta sertifikasi organik. Koperasi ini berdiri sejak 2006 yang beranggotakan 609 Petani dan 41 Subak dengan luas lahan yang diolah sebesar 619 ha. Koperasi ini memiliki program yang salah satunya adalah peningkatan mutu *Good Agricurtular Practices* dan *Good Manufacturing Practices* yang sudah bersertifikasi dan mendapatkan penghargaan. Koperasi ini tidak hanya menyuplai biji kakao untuk industri cokelat domestik, tetapi juga mampu menjangkau pasar internasional. Lembaga koperasi juga dapat menjadi media edukasi dan pendampingan kepada petani untuk melakukan fermentasi guna menghasilkan nilai tambah terhadap produk kakaonya dan sekaligus meningkatkan kualitas input yang didapatkan oleh industri pengolah kakao. Bantuan sertifikasi juga dirasa akan sangat bermanfaat untuk diberikan kepada petani kakao sehingga produk yang dihasilkan juga lebih baik lagi. Fungsi pengeololaan keuangan yang bijak juga bisa didapatkan petani melalui bimbingan dari koperasi.

Kerjasama antara industri coklat domestik dengan koperasi juga perlu dikembangkan, sehingga industri tersebut juga ikut memberdayakan petani dalam wadah koperasi. Kerjasama ini juga dapat mendorong peningkatan kualitas hasil produksi kakako petani, melalui pendampingan dan pembinaan yang dilakukan. Seperti yang telah dilakukan oleh salah satu produsen cokelat di Bali. Kerjasama ini telah menjamin pasokan bahan baku bagi perusahaan, sehingga berdampak pada kesinambungan produksi. Pengembangan pasar produk cokelat juga perlu menjadi prioritas. Berkaca dari kondisi tersebut yang telah mengembangkan pasar ke hotel-hotel berbintang dan supermarket *commercial* serta pengembangan paket *tour* pembuatan coklat. Kerjasama dengan pemasok bahan baku juga menjamin sisi kualitas produksi. Kondisi ini memberikan peluang pada pengembangan pasar ekspor untuk industri coklat dan dapat bersaing dengan kualitas produk dari negara lain. Fasilitasi promosi melalui keikutsertaan dalam kegiatan pameran internasional, penyelenggaraan seminar maupun festival internasional yang dapat mengundang para pembeli luar negeri juga menjadi salah satu harapan yang dapat mendorong pengembangan penjualan pasar ekspor cokelat di Bali.

BOKS 2

STRATEGI UNTUK MENDORONG PENINGKATAN KUALITAS PARIWISATA BALI

KINERJA PARIWISATA BALI

Peran provinsi Bali sebagai barometer kinerja pariwisata nasional menghadapi tantangan dengan menurunnya pangsa kunjungan wisatawan mancanegara atau wisman ke Bali terhadap nasional dari 41% pada triwulan II 2018 menjadi 38% pada triwulan II 2019. Hal tersebut juga tercermin pada perbedaan laju pertumbuhan kunjungan wisman ke Indonesia dan ke Bali. Pada triwulan II 2019, pertumbuhan kunjungan wisman ke Indonesia (nasional) adalah sebesar 5,0% sedangkan pertumbuhan wisman yang berkunjung ke Bali sendiri melambat sebesar -4,5% (yoy).

Sementara itu, rata-rata persentase okupansi kamar hotel berbintang dan rata-rata lama waktu menginap (*length of stay*) tiap wisman di Bali mengalami penurunan pada triwulan II 2019 dibanding periode yang sama tahun 2018, yakni dari masing-masing 67% dan 2,9 malam menjadi 57% dan 2,7 malam.

Grafik 1. Perkembangan Pariwisata Bali dan Nasional

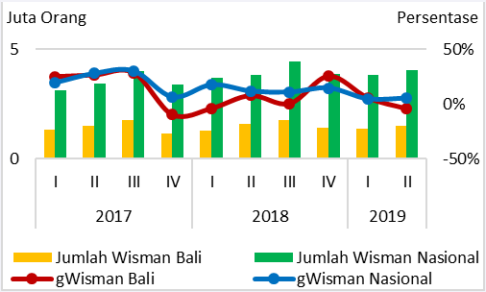

Sumber: BPS Provinsi Bali, diolah

Grafik 2. Perkembangan Okupansi Kamar Hotel Berbintang dan Length of Stay di Bali

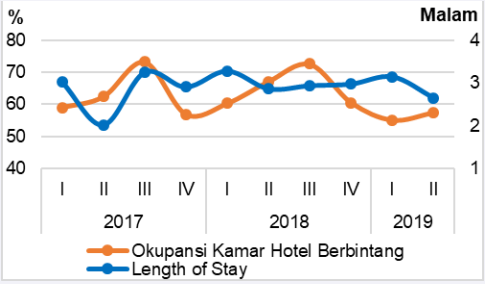

Sumber: BPS Provinsi Bali, diolah

Grafik 3. Pertumbuhan Ekonomi

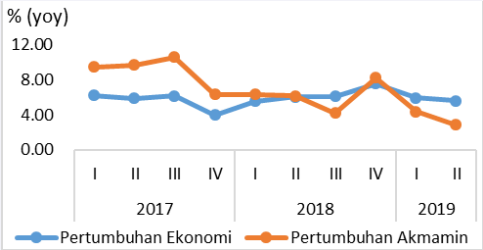

Sumber: BPS Provinsi Bali, diolah

Meskipun demikian, berdasarkan analisis dan informasi terkini, pariwisata Bali mulai membaik pada triwulan II 2019 seiring dengan mulainya periode *high season* pariwisata. Pada triwulan II 2019 jumlah wisman di Bali menunjukkan perbaikan dengan jumlah tercatat mencapai 1,51 juta jiwa, lebih tinggi dari triwulan I 2019. Sejalan dengan itu, tingkat penghunian kamar hotel berbintang pada triwulan II 2019 turut menunjukkan peningkatan dengan tercatat sebesar 57%, lebih tinggi dari triwulan sebelumnya yang tercatat sebesar 55%.

Kunjungan wisman sebagai bagian penting dalam kinerja pariwisata memberikan dampak pada pertumbuhan ekonomi di Bali khususnya pada sisi lapangan usaha Akomodasi dan Makan Minum (Akmamin). Sejalan dengan perlambatan kunjungan wisman, rata-rata pertumbuhan kinerja lapangan usaha akmamin pada triwulan II 2019 juga mengalami penurunan dari 4,38% pada triwulam I 2019 menjadi 2,85% pada triwulan II 2019. Selain itu, *share* akmamin dalam perekonomian Bali pun mengalami penurunan yakni dari 23,14% pada tahun triwulan I 2018 menjadi 22,92% pada triwulan II 2019.

Grafik 4. Struktur Ekonomi Sisi Lapangan Usaha Akomodasi dan Makan Minum (%)

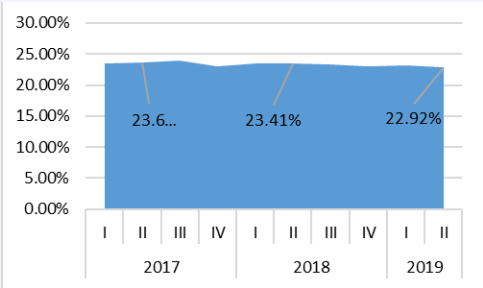

Sumber: BPS Provinsi Bali, diolah

Dengan kondisi tersebut maka apabila kita akan meningkatkan kinerja lapangan usaha terkait pariwisata, kita harus melihat faktor utama yang mempengaruhinya. Terdapat beberapa faktor yang menahan laju pertumbuhan bidang pariwisata di Bali yaitu penurunan kualitas wisman dan peningkatan persaingan destinasi pariwisata dunia.

Kualitas wisman dapat dicerminkan dari jumlah pengeluaran atau *spending rate* selama berwisata. Wisman yang paling banyak berkunjung ke Bali berasal dari Australia, Tiongkok, Jepang dan negara-negara Eropa. Dari hasil Survei Perilaku Wisatawan Mancanegara (Superwisman) yang dilakukan Bank Indonesia, *spending rate* tiap wisman dari negara-negara utama tersebut secara keseluruhan mengalami peningkatan dari tahun 2018 ke tahun 2019, yakni dari Rp 12,2 juta menjadi Rp 12,5 juta per kunjungan. Namun peningkatan tersebut dasarnya didorong oleh peningkatan *spending rate* wisman asal Australia,

Tabel 1. Perkembangan Spending Rate Wisman Dari Negara Utama (per Kunjungan)

Negara Asal	2016	2017	2018
Australia	13.880.165	13.398.000	16.651.430
China	10.046.931	9.656.074	8.814.685
Jepang	11.460.214	11.189.570	9.837.616
Eropa	17.906.600	15.745.374	14.193.473
TOTAL	13.472.426	12.165.348	12.454.047

Sumber: Superwisman, Bank Indonesia

karena *spending rate* wisman asal negara utama lainnya mengalami penurunan. Menurunnya *spending rate* wisman dari mayoritas negara utama menunjukkan adanya penurunan kualitas wisman.

Selain kualitas wisman, kinerja pariwisata juga dipengaruhi oleh persaingan destinasi wisata dunia. Berbeda dengan perkembangan kunjungan wisman ke Bali yang mengalami perlambatan, perkembangan kunjungan ke beberapa destinasi wisata di negara lain justru meningkat seperti yang dialami oleh Thailand untuk destinasi wisata Phuket, Vietnam untuk destinasi wisata Nhe Trang, dan Filipina untuk destinasi wisata Boracay. Kondisi tersebut mencerminkan bahwa kini wisman lebih tertarik untuk berkunjung ke negara-negara tersebut, khususnya wisman asal Tiongkok. Salah satu faktor penyebabnya adalah negara kompetitor menawarkan kualitas layanan yang lebih baik. Terdapat beberapa faktor yang membentuk kualitas layanan suatu destinasi wisata. Faktor pertama adalah kapabilitas untuk memenuhi harapan yang ingin dirasakan oleh wisatawan. Beberapa harapan tersebut antara lain keinginan untuk beristirahat, menemukan ide atau pengalaman baru, bahkan tidak tertutup kemungkinan ada wisatawan yang ingin menyelesaikan suatu pekerjaan maupun konflik. Faktor kedua adalah kapabilitas sumber daya manusia (SDM) untuk memberikan layanan yang terbaik untuk para wisatawan. Selanjutnya, daya tarik atraksi (obyek wisata) dan sarana pendukung secara berturut-turut merupakan faktor ketiga dan keempat dalam membentuk kualitas layanan.

STRATEGI MENDORONG *QUALITY TOURISM*

Menghadapi semakin menurunnya kualitas wisman dan semakin berkembangnya destinasi wisata di negara kompetitor, pengembangan pariwisata Bali ke depan perlu menerapkan konsep *quality tourism*. *Quality tourism* hanya dapat terwujud dengan kesetaraan kualitas antara supply and demand, antara destinasi/produk wisata dan wisatawan yang berkunjung. Dari sisi supply, diharapkan Bali mampu memberikan dan meningkatkan kualitas layanan yang ditawarkan. Sementara dari sisi demand, wisatawan khususnya wisman yang berkunjung ke Bali diharapkan minimal memenuhi syarat antara lain (1) memiliki kemampuan ekonomi tinggi yang mendatangkan kesejahteraan bagi destinasi wisata dan masyarakat di daerah tersebut, (2) memiliki sikap respect dan apresiasi terhadap lingkungan dan budaya di destinasi wisata yang dikunjungi.

Pengembangan *quality tourism* dapat dilakukan melalui strategi sebagai berikut:

1. Pengembangan wisata minat khusus

   Beberapa wisata minat khusus di Bali yang berpotensi mendorong quality *tourism* yaitu MICE *tourism* dan *Health Tourism*. Hal tersebut karena Bali sudah memiliki infrastruktur dasar untuk pengembangan jenis wisata minat khusus tersebut.

(a) MICE *Tourism*

Meeting, Incentive Travel, Conference dan Exhibition (MICE) merupakan salah satu jenis wisata minat khusus

yang diperuntukkan untuk kelompok business visitor. Menurut World *Tourism* Organisation, MICE adalah kegiatan wisata yang memberikan kontribusi signifikan terhadap Gross Domestic Bruto suatu negara dan daerah serta dapat menjadi branding suatu destinasi. Pentingnya membidik business visitor/MICE ini antara lain karena business visitor memiliki *spending rate* yang lebih besar dan tidak bergantung pada season pariwisata. Sebagai contoh, *spending rate* business visitor/MICE di Thailand tercatat 3,5 kali lebih tinggi dibanding leisure visitor.

Kementerian Pariwisata RI menetapkan 16 destinasi MICE yang tersebar di seluruh Indonesia, namun belum secara masif dikembangkan. Ke enambelas destinasi tersebut adalah: Jakarta, Bali, Surabaya, Medan, Batam, Padang, Bandung, Yogyakarta, Semarang, Makassar, Manado, Lombok, Solo, Bintan, Palembang, dan Balikpapan. Namun, dari 16 destinasi tersebut, hanya Bali dan Jakarta yang secara konsisten masuk urutan International Congress and Convention Association (ICCA). Adapun kriteria pertemuan sebagai penentu rangking: merupakan association meeting (bukan corporate meeting), dilakukan melalui bidding, minimal 50 peserta, dan pertemuan dilakukan secara berkala pada 3 negara berbeda.

Sejak tahun 2010, Bali selalu menduduki ranking teratas dibanding 15 destinasi MICE lainnya di Indonesia. Ranking tertinggi yang pernah didapatkan Bali adalah pada tahun 2012 dengan 55 pertemuan, sedangkan tahun lainnya berkisar 40 pertemuan.

Beberapa kegiatan besar MICE yang sudah dilaksanakan pada tahun 2019 diantara lain adalah Indobuiltech Bali, International Conference on Medical Medicine and Health Science, dan International Conference on Teaching Education & Learning. Sementara, yang direncakan untuk dilaksanakan dalam waktu dekat termasuk PE/IATMI Asia Pasific Oil & Gas Conference and Exhibition (SPE/IATMI Asia Pasific Oil & Gas Conference and Ex) pada Oktober 2019.

Untuk mendukung MICE, Bali telah melengkapi sarana dan fasilitas untuk pertemuan dengan skala internasional, misalnya kawasan Nusa Dua yang eksisting memiliki 2 (dua) convention, 16 hotel, 5 villa, 1 rumah sakit, 1 theater dan lainnya. Saat ini, kawasan Nusa Dua sedang terus dikembangkan dengan dibangunnya beberapa bangunan seperti:

- Crea Resort Office 75 block
- The Shangril-la 299 kamar dan 40 villa
- Awarta Villas 14 villa dan 68 Suite
- Renaissance 300 kamar dan 168 villa

Salah satu negara tujuan utama MICE adalah Singapura. Negara ini memiliki beberapa keunggulan dalam hal MICE *tourism* yaitu (i) Pilihan tempat (venue) MICE yang banyak dengan kualitas dunia; (ii) Tingginya konektivitas ke berbagai negara lain; (iii) sistem transportasi domestik yang terintegrasi; (iv) Stabilitas politik dan keamanan;(v) Ekosistem industri yang diisi oleh orang-orang berpengalaman. Keunggulan Singapura sebagai tempat MICE tidak hanya dari sisi ketersediaan venue tetapi juga infrastruktur pendukung. Singapura memiliki lebih dari 1.700 pilihan venue dengan kualitas terkini. Dari sisi infrastruktur pendukung, Singapura memiliki Bandara Changi yang terhubung ke lebih dari 400 kota di seluruh dunia. Infrastruktur pendukung lain yang dimiliki Singapura sebaga tempat MICE adalah cepat, efisien, dan terintegrasi sehingga memudahkan untuk menjangkau setiap sudut kota. Hal lain yang juga bisa ditawarkan Singapura adalah kestabilan politik dan keamanan dimana Singapura merupakan salah satu kota di dunia dengan tingkat kriminalitas rendah.

Gambar 1. Keunggal Singapura Sebagai Destinasi MICE *Tourism*

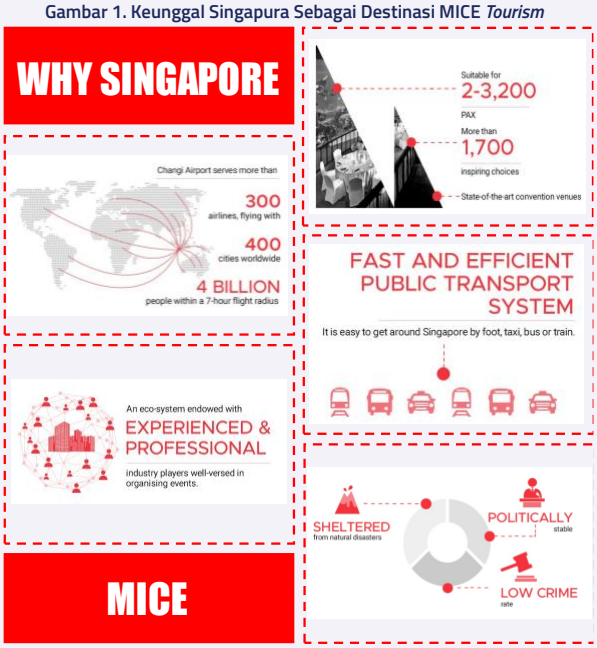

Sumber : visitsingapore.com, diolah

(b) *Health Tourism*

Health tourism dapat dibedakan menjadi dua yaitu *wellness tourism* dan *medical tourism*. Untuk *medical tourism*, Bali sudah memiliki RSUP Sanglah dimana rumah sakit ini sudah memiliki poliklinik estetika dan hiperbarik sebagai pendukung *medical tourism*. Selain itu, Bali juga memiliki rumah sakit Bali Mandara yang direncanakan untuk dikembangkan sebagai pusat pengobatan kanker. Sementara itu, *wellness tourism*, berpotensi untuk dikembangkan di Ubud. Saat ini, menurut data Dinas Kesehatan Provinsi Bali, terdapat sekitar 3.200 pusat kebugaran tradisional (spa dan pengobatan herbal). Akan tetapi baru sekitar 10% yang sudah mengikuti standar yang ditetapkan oleh Dinas Kesehatan.

Pada awal Juli 2019, Kementerian Pariwisata mengunjungi RSUP Sanglah untuk memetakan sumber daya *medical tourism* di Bali. Kementerian Pariwisata menargetkan untuk merampungkan paket *health tourism* di tahun 2019. Selain rencana pemerintah pusat ini, pemerintah daerah Bali juga sudah mulai berupaya mendukung pengembangan *health tourism*. Sejak awal tahun 2019, Pemerintah Daerah Bali sudah menyusun regulasi (Perda dan Pergub) untuk standarisasi pelayanan pengobatan tradisional. Selain itu, pemerintah daerah juga sudah menyusun program agar RSUD Bali Mandara mendapat berbagai akreditasi internasional.

Berbagai negara melakukan berbagai strategi/ kebijakan dalam mendorong *health tourism*. Singapura mendirikan *multi-agency* (*government-industry partnertship*) yang dikenal dengan SingaporeMedicine untuk mendorong Singapura sebagai *medical hub*. Sementara itu, India memiliki kategori visa khusus untuk touris *medical tourism* dan juga memberikan *tax break* bagi pelaku usaha. Selanjutnya, Malaysia memberikan insentif pajak untuk bangunan, peralatan, pelatihan, iklan, teknologi informasi untuk mendorong tercapainya akreditasi.

2. Zonasi destinasi wisata

   Hingga saat ini, pengembangan dan pembangunan pariwisata di Bali masih belum merata dengan berfokus di daerah selatan pulau Bali, meskipun daerah lain memiliki potensi yang tidak kalah tinggi. Hal tersebut ditunjukkan dari total 176 ribu kamar yang ada di Bali, 102 ribu diantara nya berada di Kabupaten Badung, Sementara itu, berdasarkan hasil superwisman setiap tahun, kemacetan dan sampah selalu menjadi faktor yang dijadikan alasan oleh wisman untuk berkunjung ke Bali. Sedangkan, apabila pariwisata hanya berfokus pada daerah tertentu, potensi timbulnya kemacetan dan sampah di daerah tersebut sangat tinggi yang dapat menyebabkan penurunan minat wisman untuk berkunjung. Untuk mengatasi hal tersebut, Gubernur Bali, I Wayan Koster menyampaikan bahwa kedepannya pengelolaan pariwisata di Bali akan disiapkan dengan konsep "*One Island-One Management*" dimana semua hal terkait pariwisata meliputi regulasi, promosi hingga anggaran akan disinergikan lintas kabupaten kota dengan satu pintu dan terpusat di Provinsi. Dengan konsep tersebut, diharapkan pariwisata di setiap

Kabupaten/Kota di Provinsi Bali akan terdorong dan berkembang secara lebih merata.

Pengembangan pariwisata disesuaikan dengan keunggulan masing-masing daerah, sehingga di provinsi Bali nantinya akan terbentuk zonasi-zonasi destinasi wisata minat khusus. Adapun pembagiannya adalah sebagai berikut:

Gambar 2. Zonasi Destinasi Wisata Minat Khusus di Provinsi Bali

Sumber: Hasil Forum Group Discussion, Bank Indonesia

Untuk daerah Badung dan Denpasar, dapat dikembangkan menjadi wisata glamour, sport, medical, dan MICE. Sementara itu, untuk Gianyar bisa dikembangkan menjadi daerah wisata budaya dan alam. Selanjutnya, untuk spiritual *tourism* dapat dikembangkan di daerah Karangasem dan Klungkung. Untuk jenis wisata alam, daerah yang potensial adalah Buleleng, Bangli, Tabanan, dan Negara.

3. Pengembangan destinasi wisata baru

   Salah satu cara untuk meningkatkan layanan dan fasilitas pariwisata guna menarik wisman yang berkualitas serta mengoptimalkan potensi daerah adalah dengan mengembangkan destinasi wisata baru. Di Provinsi Bali, pengembangan wisata baru saat ini terfokus di Bali Utara dimana akan dibangun kawasan *life-style hub*, The Menjangan, oleh WIKA dan Menjangan Group serta Amarsk Group. *Life-style hub* sendiri merupakan suatu kawasan dimana terdapat berbagai macam amenitas di satu tempat. Lokasi seluas 1.365 km2 dengan lebih dari 600 ribu orang ini dipilih karena memiliki potensi besar untuk menjadi Eco Resort utama serta menjadi tujuan wisata cruise Indonesia berikutnya karena dilewati oleh yachts dan cruise-liner. Proyek yang akan dibangun di The Menjangan berupa hotel, vila, marina yacht, hutan bakau serta infrastruktur pendukung dengan total anggaran US$ 310 juta.

4. Perbaikan sarana pendukung

   Kesuksesan pengembangan suatu destinasi wisata ditunjang oleh sarana pendukungnya. Salah satu sarana pendukung pariwisata yang vital adalah infrastruktur untuk mendukung aksesabilitas dari dan menuju destinasi tempat wisata. Beberapa pengembangan infrastruktur yang sedang berjalan di Bali meliputi:

- Pembangunan shortcut jalan (2018-2022) untuk meningkatkan konektivitas Bali Utara dan Bali Selatan serta memperpendek waktu tempuh;
- Pengembangan dermaga Benoa *Tourism* Port dan Celukan Bawang (terminal penumpang, perluasan dermaga, pengerukan alur dan dermaga marina Yacht) untuk periode 2018-2019, sehingga mampu menampung Cruise dengan kapasitas lebih besar;
- Pengembangan bandara Ngurah Rai (2019-2023) meliputi Apron, perpanjangan runway dan penambahan terminal penumpang dengan anggaran Rp 8 triliun;
- Rencana Pembangunan Bandara Bali Utara (2019-2022);
- Pembangunan 2 bendungan (Tamblang dan Sidan) untuk periode 2019-2022 dengan anggaran Rp 1,6 triliun termasuk untuk pemenuhan air baku untuk hotel-restauran serta irigasi.

Berdasarkan Indonesia *Tourism* Development Corporation (ITDC), terdapat beberapa kendala dan tantangan serta rekomendasi strategi dalam pengembangan kawasan pawisata di Bali, seperti pada Tabel 2. Tantangan kendala tersebut antara lain (i) terkait ketersediaan dan kualitas infrastruktur penunjang seperti ketersediaaan jalan, sistem transportasi, serta jaringan listri dan pengelolaan limbah; (ii) terkait regulasi penunjang seperti peraturan tata ruang.

Tabel 2. Kendala, Tantangan, dan Rekomendasi Strategi Pengembangan Pariwisata

KENDALA	TANTANGAN
1. Ketersediaan dan kualitas infrastruktur penunjang • Ketersediaan dan kualitas jalan menuju pengembangan kawasan • Ketersediaan sistem transportasi darat, laut, dan udara • Ketersediaan jaringan dan pasokan listrik • Ketersediaan sistem pengelolaan sampah • Ketersediaan sistem pengelolaan limbah 2. Tumpang tindih dan belum ada regulasi yang jelas • Peraturan zonasi, tata ruang wilayah (RTRW) dan detail tata ruang (RDTR) • Belum ada kejelasan SWRO • Belum ada kejelasan peraturan tata ruang wilayah laut (RZWP3K) • Sinkronisasi peraturan antar instansi • Panjangnya proses perizinan energy terbaharukan 3. Permasalahan tanah	1. Ketersediaan lahan untuk dikembangkan (minimal 100 Ha) 2. Status kepemilikan lahan 3. Pendudukan lahan oleh oknum yang tidak berhak 4. Komitmen pemerintah daerah 5. Ketersediaan SDM konstruksi dan pariwisata 6. Arogansi masyarakat local
STRATEGI	
1. Implementasi One Island-One Management 2. Sinergi antara BUMN, Swasta dan Pemerintah dalam pengembangan sarana pendukung pariwisata 3. Menggandeng operator internasional (hotel dan fasilitas pariwisata) dalam mendukung pengembangan kawasan 4. Menggandeng investor lokal dan internasional untuk ikut berpartisipasi 5. Mendorong pemerintah daerah dan pusat dalam pemberian insentif kepada investor dan pengembang 6. Mengedukasi masyarakat penyangga kawasan (formal & informal) 7. Menambah akses baru menuju Bali termasuk lewat pembukaan bandara baru	

Sumber: ITDC, diolah

halaman ini sengaja dikosongkan

BAB II

KEUANGAN PEMERINTAH

- Realisasi belanja pemeritah (APBN, APBD Provinsi serta APBD Gabungan Kabupaten/Kota) di triwulan II 2019 tercatat sebesar Rp13,73 triliun atau tumbuh 6,24% (yoy), melambat dibanding pertumbuhan realisasi belanja triwulan II 2018 yang tumbuh sebesar 21,51% (yoy) atau dengan nilai nominal Rp 12,92 triliun. Sementara itu, serapan realisasi belanja di triwulan II 2019 tercatat sebesar 33,77% dari target anggaran, meningkat dibanding triwulan II 2018 yang sebesar 32,62%.
- Realisasi pendapatan pemerintah (APBD) di triwulan II 2019 tercatat sebesar Rp12,27 triliun atau tumbuh sebesar 8,72% (yoy), lebih tinggi dibanding pertumbuhan realisasi pendapatan daerah triwulan II 2018 yang sebesar 7,78% (yoy) atau dengan nilai nominal Rp11,28 triliun. Bila dibandingkan dengan target anggaran, serapan realisasi pendapatan daerah telah mencapai 43,69%, meningkat dibanding triwulan II 2018 yang sebesar 41,83% (yoy).

Istana Taman Jepun

2.1. GAMBARAN UMUM

Total pagu (target) anggaran belanja pemerintah (fiskal) di Wilayah Bali, baik yang menggunakan anggaran APBD (Provinsi dan kabupaten/kota) maupun APBN pada tahun 2019 tercatat sebesar Rp40,64 triliun. Target anggaran tersebut meliputi belanja APBN Rp10,64 triliun (pangsa 26,18%), APBD Provinsi Bali sebesar Rp6,83 triliun (16,82%) dan target anggaran gabungan APBD kabupaten/kota[49] Rp23,17 triliun (57,00%). Bila dibandingkan dengan tahun 2018 (anggaran perubahan), target anggaran belanja fiskal Bali tersebut meningkat sebesar 2,61% (yoy), lebih rendah dibanding peningkatan pagu anggaran pada 2018 yang tercatat sebesar 9,48% (yoy). Rendahnya peningkatan target anggaran tersebut, terutama disebabkan oleh melambatnya pertumbuhan target anggaran APBN dan gabungan APBD Kabupaten/kota di 2019. Melambatnya pertumbuhan target gabungan APBD kabupaten/kota, disebabkan oleh rendahnya realisasi pendapatan daerah pada tahun 2018, seiring dengan melambatnya perlambatan kunjungan wisatawan mancanegara (wisman) di periode tersebut, sebagai dampak lanjutan peningkatan aktiivtas vulkanis Gunung Agung di tahun sebelumnya. Kondisi tersebut menyebabkan, beberapa daerah terutama yang Pendapatan Asli Daerah (PAD) sangat tergantung oleh aktivitas pariwisata, menyesuaikan pagu anggarannya dengan peningkatan target yang terbatas.

Realisasi belanja pemerintah (APBD & APBN) di Wilayah Bali sepanjang hingga triwulan II 2019 tercatat sebesar Rp13,73 triliun atau meningkat 6,24% (yoy), lebih rendah dibanding pertumbuhan realisasi triwulan II 2018 (Rp12,92 triliun) yang tumbuh sebesar 21,51% (yoy). Melambatnya pertumbuhan realisasi belanja pemerintah di triwulan II 2019, terutama disebabkan oleh penurunan realisasi belanja pada tingkat provinsi dan melambatnya realisasi belanja gabungan kabupaten/kota. Sementara realisasi belanja untuk kategori APBN tetap tumbuh lebih tinggi, sehingga dapat menahan dalamnya perlambatan realisasi belanja pemerintah. Melambatnya realisasi belanja pemerintah tersebut, tercermin pula dari melambatnya laju konsumsi pemerintah pada triwulan II 2019 (PDRB) yang tumbuh sebesar 18,69% (yoy), lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya yang sebesar 20,84% (yoy).

Penurunan realisasi belanja di tingkat provinsi disebabkan oleh adanya ketentuan baru yang dikeluarkan (pada Maret 2019) terkait adanya tambahan persyaratan administrasi dalam pencairan/penarikan anggaran (implementasi Peraturan Presiden No.16 tahun 2018), sehingga berdampak pada tertahannya realisasi belanja. Sementara itu, melambatnya realisasi belanja untuk kategori gabungan kabupaten/kota disebabkan oleh tertahannya kinerja bidang usaha pariwisata, sejalan dengan menurunnya jumlah kunjungan wisman. Pada sisi yang lain, realisasi belanja di kategori APBN tetap dapat tumbuh tinggi didorong oleh upaya percepatan tahapan dan proses pengadaan yang telah dimulai sejak akhir tahun 2018, untuk mendukung optimalisasi penggunaan anggaran.

Tabel 2.1. Pagu Anggaran Belanja Pemerintah di Provinsi Bali (2018-2019)

KATEGORI	PAGU BELANJA (APBD-P & APBN-P) TAHUN 2018 (Rp Miliar)	GROWTH PAGU BELANJA 2018 (%,yoy)	PAGU BELANJA (APBD-P & APBN-P) TAHUN 2019 (Rp Miliar)	GROWTH PAGU BELANJA 2019 (%,yoy)
APBN	10.481	14,42	10.641	1,53
APBD Provinsi	6.596	-2,29	6.834	3,62
APBD Kabupaten/Kota	22.533	11,17	23.167	2,81
TOTAL	39.610	9,48	40.642	2,61

Sumber: Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Bali dan kabupaten/kota
Untuk APBN bersumber dari DJPBN Provinsi Bali

49. Data APBD kabupaten/kota mencakup 9 kabupaten/kota yang ada di Bali. Sumber data BPKAD Provinsi Bali dan BPKAD kabupaten/kota

Tabel 2.2. Realisasi Belanja Pemerintah di Provinsi Bali Triwulan II (2018 & 2019)

KATEGORI	REALISASI BELANJA (APBD & APBN) TW II 2018 (Rp Miliar)	GROWTH REALISASI BELANJA TW II 2018 (%,yoy)	REALISASI BELANJA (APBD & APBN) TW II 2019 (Rp Miliar)	GROWTH REALISASI BELANJA TW II 2019 (%,yoy)
APBN	3.690	13,40	4.356	18,05
APBD Provinsi	2.240	28,00	1.948	-13,03
APBD Kabupaten/Kota	6.990	24,18	7.422	6,18
TOTAL	12.920	21,51	13.726	6,24

Sumber: Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Bali dan kabupaten/kota
Untuk APBN bersumber dari DJPBN Provinsi Bali

Meskipun realisasi belanja pemerintah tertahan, namun serapan (persentase) realisasi belanja pemerintah pada triwulan II 2019 dapat tetap lebih tinggi dibanding triwulan II 2018. Serapan realisasi belanja pemerintah tercatat sebesar 33,77% di triwulan II 2019, meningkat dibanding triwulan II 2018 yang sebesar 32,62%. Peningkatan ini terutama didorong oleh capaian serapan realisasi belanja yang meningkat untuk kategori APBN dan gabungan kabupaten/kota, sedangkan ditingkat provinsi capaian serapannya lebih rendah, sejalan dengan menurunnya realisasi belanja daerah.

Terdapat beberapa faktor yang mendorong kinerja realisasi belanja pemerintah di sepanjang triwulan II 2019, baik untuk kategori APBN, APBD provinsi maupun gabungan APBD kabupaten/kota yang meliputi:

1. Kebijakan percepatan (akselerasi) tahapan dan proses pengadaan belanja barang dan jasa serta belanja modal, khususnya untuk kategori APBN dalam rangka mendorong optimalisasi belanja.
2. Adanya realisasi pembayaran rapel kenaikan gaji ASN sebesar 5% yang dibayarkan pada triwulan II 2019, mendorong peningkatan realisasi belanja pegawai.

Sementara itu disisi lain juga muncul beberapa faktor memperlambat kinerja realisasi belanja pemerintah pada periode yang sama yaitu :

1. Adanya sejumlah pergantian pimpinan di 13 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) pada tingkat Provinsi Bali di triwulan sebelumnya, sehingga membutuhkan waktu dan penyesuaian dalam proses pengadaan barang dan jasa, sehingga berdampak terhadap realisasi belanja di triwulan laporan.
2. Tertahanya kinerja bidang usaha pariwisata, sejalan dengan penurunan jumlah kunjungan wisman pada triwulan laporan, berdampak pada melambatnya pertumbuhan realisasi pendapatan daerah khususnya di tingkat kabupaten/kota.
3. Adanya ketentuan baru yang dikeluarkan oleh pemerintah Provinsi Bali di triwulan I 2019 (sebagai tindak lanjut implementasi peraturan presiden no.16 tahun 2018 tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah), yaitu adanya penambahan dokumen administrasi dalam penarikan/pencairan anggaran.

Tabel 2.3. Persentase Realisasi Belanja Pemerintah di Bali Triwulan II (2018-2019)

KATEGORI	PERSENTASE REALISASI BELANJA (APBD & APBN) TW II 2018 (%)	PERSENTASE REALISASI BELANJA (APBD & APBN) TW II 2019 (%)
APBN	35,21	40,94
APBD Provinsi	33,96	28,51
APBD Kabupaten/Kota	31,02	32,04
TOTAL	32,62	33,77

Sumber: Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Bali dan kabupaten/kota
Untuk APBN bersumber dari DJPBN Provinsi Bali

Tabel 2.4. Pagu Anggaran Pendapatan Pemerintah di Provinsi Bali Triwulan II (2018-2019)

KATEGORI	PAGU PENDAPATAN (APBD-P) TAHUN 2018 (Rp Miliar)	GROWTH PAGU PENDAPATAN 2018 (%,yoy)	PAGU PENDAPATAN (APBD) TAHUN 2019 (Rp Miliar)	GROWTH PAGU PENDAPATAN 2019 (%,yoy)
APBD Provinsi	6.200	-0,37	6.323	1,98
APBD Kabupaten/Kota	20.779	14,67	21.754	4,69
TOTAL	26.979	10,82	28.077	4,07

Sumber: Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Prov. Bali dan kabupaten/kota

Target anggaran pendapatan pemerintah di Wilayah Bali pada 2019 mencapai Rp28,08 triliun, atau tumbuh sebesar 4,07% (yoy), lebih rendah dibanding 2018 yang tumbuh sebesar 10,82% (yoy) atau sebesar Rp26,98 triliun. Target anggaran pendapatan daerah tersebut terdiri dari target anggaran pendapatan di Provinsi Bali sebesar Rp6,32 triliun (pangsa 22,52%) dan gabungan anggaran pendapatan daerah kabupaten/kota[50] sebesar Rp21,75 triliun (pangsa 77,48%). Melambatnya target anggaran pendapatan gabungan kabupaten/kota tersebut, disebabkan oleh capaian realisasi PAD tahun 2018 yang dibawah target, karena jumlah kunjungan wisman yang melambat, sehingga berdampak pada tertahannya realisasi pendapatan daerah. Kondisi ini menyebabkan penyusunan target anggaran pendapatan tahun 2019 meningkat secara terbatas.

Hingga periode triwulan II 2019, capaian realisasi pendapatan pemerintah daerah di Wilayah Bali tercatat sebesar Rp12,27 triliun atau meningkat 8,72% (yoy), lebih tinggi dibanding peningkatan realisasi triwulan II 2018 yang sebesar 7,78% (yoy) atau dengan nominal Rp11,28 triliun. Membaiknya realisasi pendapatan pemerintah daerah tersebut, terutama didukung oleh akselerasi realisasi pendapatan di tingkat provinsi, sejalan dengan peningkatan signifikan terhadap pajak/bea kendaraan baru[51]. Sementara itu, realisasi pendapatan untuk kategori gabungan APBD kabupaten/kota melambat meskipun tetap tumbuh positif yang disebabkan oleh tertahannya pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD), sejalan dengan menurunnya pertumbuhan wisman diperiode laporan[52].

Serapan pendapatan daerah di Wilayah Bali pada triwulan II 2019 mencapai 43,69% (terhadap total pagu 2019), meningkat dibanding triwulan II 2018 yang sebesar 41,83%. Peningkatan serapan pendapatan ini terjadi di semua kategori, baik pada tingkat provinsi maupun gabungan kabupaten/kota. Peningkatan realisasi pendapatan di tingkat provinsi, bersumber dari meningkatnya realisasi komponen PAD, sejalan dengan peningkatan signifikan pajak/bea kendaraan bermotor. Sementara peningkatan serapan realisasi gabungan kabupaten/kota, didukung oleh meningkatnya serapan realisasi pendapatan daerah dari komponen PAD[53].

Tabel 2.5. Realisasi Pendapatan Pemerintah di Provinsi Bali Triwulan II (2018-2019)

KATEGORI	REALISASI PENDAPATAN (APBD) TW II 2018 (Rp Miliar)	GROWTH REALISASI PENDAPATAN TW II 2018 (%,yoy)	REALISASI PENDAPATAN (APBD) TW II 2019 (Rp Miliar)	GROWTH REALISASI PENDAPATAN TW II 2019 (%,yoy)
APBD Provinsi	3.130	2,66	3.463	10,64
APBD Kabupaten/Kota	8.154	9,89	8.805	7,98
TOTAL	11.284	7,78	12.268	8,72

Sumber: Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Prov. Bali dan kabupaten/kota

50. Data APBD kabupaten/kota mencakup 9 kabupaten/kota yang ada di Bali. Sumber data BPKAD Provinsi Bali dan BPKAD kabupaten/kota
51. KPenjualan kendaraan pada TW II 2019 tercatat 64.381 unit atau tumbuh sebesar 36,94% (yoy), lebih tinggi dibanding pertumbuhan TW II 2018 sebesar 19,95% (yoy) atau tercatat 47.015 unit
52. Jumlah kunjungan wisman pada semester I 2019 tercatat sebesar 2,87 juta orang wisman atau turun 0,66% (yoy), lebih rendah dibandingkan pertumbuhan semester I 2018 yang tumbuh sebesar 2,91% (yoy) atau sebesar 2,89 juta orang
53. Komponen PAD di pendapatan daerah gabungan kabupaten/kota pada TW II 2019 serapan realisasinya tercatat sebesar 34,63%, meningkat dibanding TW II 2018 yang sebesar 31,35%

Tabel 2.6. Persentase Realisasi Pendapatan Pemerintah di Provinsi Bali Triwulan II (2018-2019)

KATEGORI	PERSENTASE REALISASI PENDAPATAN (APBD & APBN) TW II 2018 (%)	PERSENTASE REALISASI PENDAPATAN (APBD & APBN) TW II 2019 (%)
APBD Provinsi	50,48	54,77
APBD Kabupaten/Kota	39,24	40,48
TOTAL	41,83	43,69

Sumber: Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Prov. Bali dan kabupaten/kota

2.2 APBD PROVINSI BALI

2.2.1. Realisasi Pendapatan Provinsi Bali Triwulan II 2019.

Realisasi pendapatan daerah Provinsi Bali di triwulan II 2019 tercatat mencapai Rp3,46 triliun, meningkat 10,65% (yoy) dibanding capaian triwulan II 2018 yang sebesar Rp3,13 triliun. Sejalan dengan itu, bila dibandingkan dengan pagu anggarannya, persentase realisasi pendapatan daerah tercatat mencapai 54,77%, meningkat dibanding triwulan II 2018 yang mencapai 50,48%. Peningkatan persentase realisasi ini, terutama didukung oleh meningkatnya capaian realisasi di komponen PAD dan komponen dana perimbangan. Meningkatnya persentase realisasi komponen PAD, didukung oleh pertumbuhan yang signifikan pada penerimaan pajak dan bea kendaraan bermotor. Sejalan dengan itu, meningkatnya persentase realisasi komponen dana perimbangan didukung oleh upaya percepatan pencairan anggaran komponen DAU dan DAK, melalui pemenuhan seluruh dokumen kelengkapan administrasi yang diperlukan.

Derajat Desentralisasi Fiskal (DDF) Provinsi Bali pada triwulan II tahun 2019 menunjukkan kondisi yang membaik, terkonfirmasi oleh meningkatnya pangsa PAD terhadap total pendapatan didukung oleh akselerasi kinerja komponen PAD. Pada triwulan II 2019, sejumlah 56,19% dari realisasi anggaran pendapatan daerah yang dihimpun bersumber dari komponen PAD. Capaian ini meningkat dibanding triwulan II 2018 yang sebesar 55,55% (grafik 2.1). Meningkatnya rasio DDF ditriwulan

Tabel 2.7. Realisasi Pendapatan Daerah Provinsi Bali Triwulan II (2018-2019)

KATEGORI	2018				2019			
	PAGU APBD-P (Rp Miliar)	REALISASI APBD TW II (Rp Miliar)	PERSENTASE REALISASI TW II (%)	GROWTH TAHUNAN REALISASI TW II (%;yoy)	PAGU APBD (Rp Miliar)	REALISASI APBD TW II (Rp Miliar)	PERSENTASE REALISASI TW II (%)	GROWTH TAHUNAN REALISASI TW II (%;yoy)
PENDAPATAN DAERAH	6.200	3.130	50,48	2,65	6.323	3.463	54,77	10,65
PEND. ASLI DAERAH (PAD)	3.567	1.739	48,74	7,24	3.588	1.946	54,24	11,93
- Pendapatan Pajak Daerah	3.098	1.410	45,51	7,77	3.069	1.579	51,44	11,97
- Retribusi Daerah	48	22	45,08	8,50	50	16	32,42	-26,04
- Hsl Pengelolaan. Kekayaan Daerah yg Dipisahkan	171	170	99,22	-9,37	171	171	99,94	0,55
- Lain-Lain Pendapatan Daerah yg sah	249	137	54,94	30,12	298	180	60,52	31,64
DANA PERIMBANGAN	2.586	1.368	52,89	-3,53	2.662	1.480	55,61	8,22
-Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	215	86	40,14	-23,02	186	75	40,15	-13,64
- Dana Alokasi Umum (DAU)	1.269	732	57,71	1,66	1.326	773	58,33	5,65
- Dana Alokasi Khusus (DAK)	1.102	549	49,83	-6,18	1.150	632	54,97	15,10
LAIN-LAIN PENDAPATAN YG SAH	46,39	23	50,54	132,88	74	37	50,22	58,01
- Pendapatan Hibah	5	3	55,09	4,95	5	3	52,98	4,97
- Dana Penyesuaian & otonomi khusus	42	21	50,00	176,67	68	34	50,00	64,90

Sumber: Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Prov. Bali dan kabupaten/kota

laporan, didukung oleh akselerasi realisasi komponen PAD, sejalan dengan peningkatan pajak/bea kendaraan baru. Peningkatan rasio DDF untuk APBD Provinsi Bali juga didukung oleh masih tetap kuatnya pertumbuhan ekonomi Bali pada triwulan laporan, sehingga mampu menopang peningkatan komponen PAD. Pajak daerah masih menjadi komponen terbesar dalam pencapaian realisasi PAD, dengan pangsa mencapai 81,13% (TW II 2019), sedikit lebih tinggi dibandingkan pangsa periode yang sama tahun 2018 sebesar 81,10%.

Grafik 2.1. Pangsa PAD (rasio DDF) Terhadap Total Pendapatan Daerah (Triwulan II 2018-2019)

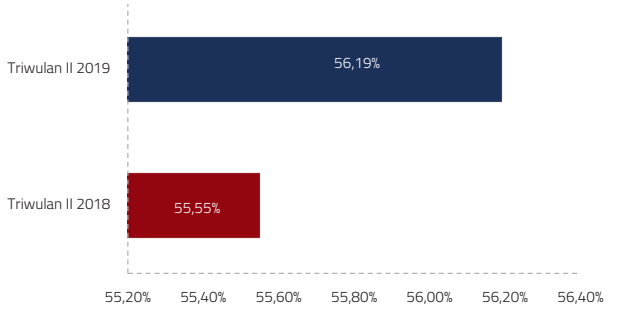

Sumber : Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Prov. Bali (diolah)

Grafik 2.2. Growth PAD Triwulan II (2018-2019)

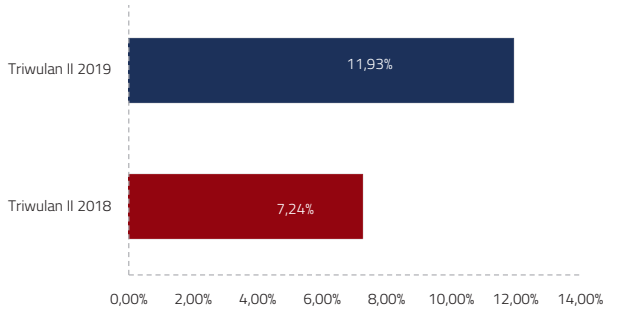

Sumber : Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Prov. Bali (diolah)

Komponen Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Realisasi PAD Provinsi Bali pada triwulan II 2019 tercatat mencapai Rp1,95 triliun atau sebesar 54,24% terhadap pagu anggaran. Capaian ini lebih tinggi dibanding realisasi triwulan II 2018 yang sebesar Rp1,74 triliun atau dengan serapan 48,74% dari target anggaran. Peningkatan realisasi PAD ini, terutama ditopang oleh peningkatan realisasi sub komponen pajak daerah. Mengacu pada strukturnya, komponen realisasi pajak daerah masih tetap mendominasi realisasi komponen PAD di periode laporan (pangsa 81,13%). Lebih lanjut lagi, sesuai dengan strukturnya komponen pendapatan pajak daerah terutama didukung oleh penerimaan pendapatan dari sub komponen Pajak Kendaraan Bermotor dan sub komponen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor. Kondisi ini sejalan dengan karakteristik Bali sebagai daerah destinasi wisata, sehingga kebutuhan akan sarana transportasi relatif tinggi.

Bila ditinjau dari sisi pertumbuhannya, realisasi PAD Bali pada triwulan II 2019 tercatat tumbuh sebesar 11,93% (yoy), lebih tinggi dibanding periode yang sama 2018 yang tumbuh sebesar 7,24% (yoy). Membaiknya pertumbuhan realisasi PAD tersebut, terutama didukung oleh peningkatan realisasi komponen utama PAD, yaitu pendapatan pajak daerah[54]. Sejalan dengan hal tersebut, pertumbuhan signifikan komponen lain-lain pendapatan daerah yang sah[55], juga menjadi faktor pendorong peningkatan realisasi PAD tersebut. Peningkatan kinerja pendapatan pajak daerah, ditopang oleh meningkatnya realisasi penerimaan pendapatan dari pajak kendaraan bermotor. Kondisi ini terkonfirmasi oleh akselerasi pertumbuhan penjualan kendaraan bermotor yang pada triwulan II 2019 tumbuh sebesar 36,94% dibanding periode yang sama 2018[56]. Selain faktor tersebut, terdapat beberapa faktor lain yang juga menjadi pendukung pertumbuhan realisasi pendapatan pajak daerah, termasuk berbagai upaya daa strategi yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Bali dalam mendorong akselerasi penerimaan pajak daerah, meliputi:

- Masuknya tahun ajaran baru pada periode triwulan II 2019, mendorong peningkatan penjualan kendaraan baru, sesuai pola historisnya
- Munculnya program promosi dan diskon

54. Realisasi Sub Komponen pendapatan pajak daerah di Bali pada TW II 2019 tercatat tumbuh sebesar 11,97% (yoy), tumbuh lebih tinggi dibanding TW II 2018 yang tumbuh sebesar 7,77% (yoy)
55. Realisasi Sub Komponen lain-lain pendapatan daerah yang saha di Bali pada TW II 2019 tercatat tumbuh sebesar 31,64% (yoy), meningkat dibanding TW II 2018 yang tumbuh sebesar 30,12% (yoy)
56. Penjualan kendaraan pada TW II 2018 sebesar 19,95% (yoy) atau tercatat 47.015 unit

serta diluncurkannya beberapa produk baru kendaraanyang mendorong peningkatan penjualan kendaraan bermotor

- Dikeluarkannya kebijakan kerjasama penghimpunan pajak kendaraan dengan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) dan Lembaga Perkreditan Desa (LPD) dalam rangka meningkatkan optimalisasi penerimaan pajak kendaraan bermotor.
- Pelaksanaan kegiatan samsat keliling secara rutin dan reguler
- Diberlakukannya kebijakan peningkatan tarif untuk pajak air permukaan yang dipergunakan untuk kegiatan wisata.
- Dikeluarkannya kebijakan Pemerintah Provinsi Bali untuk terus mendorong peningkatan efisiensi, efektivitas dan pencapaian target pengelolaan keuangan daerah, termasuk komponen pendapatan daerah melalui penerapan elektronifikasi penerimaan pajak daerah dan jenis transaksi lainnya melalui kerjasama dengan pihak perbankan.
- Tingkat implementasi elektronifikasi berdasarkan penggunaan kanal non tunai di Bali telah mencapai 71%. Bali telah menerapkan *e-Parking* (Tabanan), *e-Ticketing* (Klungkung) dan e-Retribusi Pasar di pasar Badung, Denpasar dan Jembrana.

Komponen Dana Perimbangan

Hingga periode triwulan II 2019, realisasi komponen dana perimbangan tercatat mencapai Rp1,48 triliun atau dengan serapan 55,61% terhadap pagu anggaran, meningkat dibanding realisasi triwulan II 2018 yang serapannya sebesar 52,89%. Peningkatan tersebut, terutama didukung oleh meningkatnya persentase realisasi 2 komponen utama, yaitu DAK dan DAU. Berdasarkan pangsanya, komponen DAU memberikan kontribusi terbesar terhadap realisasi penerimaan komponen dana perimbangan di periode laporan, mencapai 52,25% disusul oleh DAK (42,71%) dan Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak/Bukan Pajak (5,04%). Bila dibandingkan realisasi di triwulan II 2018, komponen DAK mengalami peningkatan pangsa sejalan dengan peningkatan persentase realisasi didukung oleh upaya percepatan pemenuhan seluruh persyaratan dokumen yang menjadi syarat pencairan DAK tersebut.

Bila ditinjau dari sisi pertumbuhan, realisasi komponen dana perimbangan di triwulan II 2019 tercatat tumbuh sebesar 8,22% (yoy), lebih tinggi (terakselerasi) dibanding realisasi triwulan II 2018 yang terkontraksi sebesar 3,53% (yoy). Capaian ini, terutama didukung oleh akselerasi kinerja komponen utama dana perimbangan, yaitu DAK dan DAU setelah di periode yang sama 2018 capaian realisasinya tertahan[57]. Beberapa faktor pendukung peningkatan capaian realisasi ini meliputi:

- Upaya percepatan realisasi pencairan DAU dan DAK melalui optimalisasi pemenuhan dokumen administrasi dan pendukung lainnya secara tepat waktu, khususnya terkait dengan dokumen perencanaan kegiatan untuk DAK fisik.
- Tidak adanya lagi dampak *base effect* pengalihan kewenangan pengelolaan gaji SMU/SMK/Sederajat yang dilaksanakan pada tahun 2017
- Pelaksanaan kegiatan perencanaan dan pengaturan program kerja serta kegiatan, khususnya yang terkait dengan investasi fisik yang dilakukan secara lebih baik dan terencana dengan lebih baik.

Anggaran DAU sangat penting bagi daerah, karena dana yang bersumber dari APBN ini merupakan bagian dari perwujudan desentralisasi daerah. Selain itu, DAU dialokasikan untuk pemerataan kemampuan keuangan antar daerah (horizontal) dalam rangka mendanai kebutuhan daerah. Pengalokasian DAU tersebut didasarkan atas *fiscal gap*[58] dan alokasi dasar[59]. Sementara itu, komponen DAK ditujukan untuk

57. Realisasi DAK dan DAU pada TW II 2019 tercatat meningkat masing-masing sebesar 5,65% (yoy) dan 15,10% (yoy), tumbuh lebih tinggi dibanding TW II 2018 yang masing-masing sebesar 1,66% (yoy) dan -6,18% (yoy)
58. Fiscal gap adalah kebutuhan fiskal, meliputi jumlah penduduk, luas wilayah, indeks kemahalan konstruksi, PDRB perkapita dan indeks pembangunan manusia dikurangi dengan kapasitas fiskal daerah (PAD dan DBH)
59. Alokasi dasar dihitung berdasarkan atas jumlah gaji pegawai negeri sipil

mengatasi ketimpangan penyediaan infrastruktur layanan publik (DAK fisik) dan dalam mendukung operasional penyelenggaraan layanan publik (DAK non fisik).

Komponen Lain-lain Pendapatan Yang Sah

Realisasi komponen Lain-lain Pendapatan Yang Sah pada triwulan I 2019 tercatat sebesar Rp37,05 miliar atau serapannya sebesar 50,22% dari target anggaran. Meskipun tercatat mengalami peningkatan namun pertumbuhan dan persentase realisasinya lebih rendah dibanding triwulan II 2018[60]. Kondisi ini terutama disebabkan oleh realisasi komponen dana hibah dan komponen dana penyesuaian-otonomi khusus capaian peningkatannya tidak setinggi periode triwulan II 2018.

2.2.2. Realisasi Belanja dan Transfer di Provinsi Bali

Realisasi belanja dan transfer di Provinsi Bali pada triwulan II 2019 tercatat sebesar Rp1,95 triliun atau dengan serapan 28,51% dari target anggaran. Realisasi tersebut lebih rendah dibanding triwulan II 2018 yang tercatat Rp 2,24 triliun atau dengan serapan 33,97% dari target anggaran. Bila dianalisis lebih lanjut, komponen belanja dan transfer dengan serapan realisasi tertinggi pada periode laporan adalah belanja operasi, yaitu mencapai 36,08% dari pagu anggaran, persentase realisasi ini sedikit menurun dibanding triwulan II 2018 (37,36%). Komponen transfer merupakan komponen dengan serapan persentase realisasi tertinggi kedua, yaitu 21,23% terhadap pagu anggaran. Realisasi tersebut menurun dibandingkan periode triwulan II 2018 yang sebesar 33,33%. Sementara itu, komponen belanja modal juga mengalami penurunan persentase realisasi, yaitu menjadi 8,13% (triwulan II 2019) dibanding triwulan II 2018 yang sebesar 11,53%.

Bila dianalisis lebih lanjut, pola realisasi belanja Pemerintah di Provinsi Bali masih memperlihatkan kecenderungan *backloading* (realisasi belanja tidak proporsional setiap triwulan), dengan persentase realisasi anggaran yang relatif rendah pada awal tahun, kemudian membesar di triwulan akhir (persentase realisasi tertinggi selalu di triwulan IV). Pola ini terus berulang setiap tahunnya, bahkan pada triwulan II 2019 realisasi belanja tidak sebaik triwulan II 2018 yang terkonfirmasi oleh persentase realisasi pada triwulan II 2019 yang lebih rendah dibanding periode yang sama tahun sebelumnya (grafik 2.3).

Tabel 2.8. Realisasi Belanja Daerah Provinsi Bali Triwulan II (2018-2019)

KATEGORI	2018				2019			
	PAGU APBD-P (Rp Miliar)	REALISASI APBD TW II (Rp Miliar)	PERSENTASE REALISASI TW II (%)	GROWTH TAHUNAN REALISASI TW II (%;yoy)	PAGU APBD (Rp Miliar)	REALISASI APBD TW IIn(Rp Miliar)	PERSENTASE REALISASI TW II (%)	GROWTH TAHUNAN REALISASI TW II (%;yoy)
BELANJA DAERAH DAN TRANSFER	6.596	2.240	33,97	28,02	6.834	1.948	28,51	-13,04
BELANJA DAERAH	4.689	1.605	34,22	8,01	4.854	1.528	31,47	-4,81
BELANJA OPERASI	4.125	1.541	37,36	13,83	4.057	1.464	36,08	-5,03
- Belanja Pegawai	1.689	661	39,12	13,43	1.752	668	38,14	1,16
- Belanja Barang dan Jasa	1.194	358	30,01	0,34	1.328	402	30,30	12,28
- Belanja Hibah	1.219	521	42,72	26,18	962	392	40,75	-24,72
- Belanja Subsidi	10	0	0,00		10	0	0,00	
- Belanja Bantuan Sosial	13	1,16	9,05	-18,14	4	0,764	18,10	-33,85
BELANJA MODAL	549	63	11,53	-52	785	64	8,13	0,86
BELANJA TAK TERDUGA	15	0,19	1,25	4	12	0,08	0,61	-60
BELANJA TRANSFER	1.907	636	33,33	141	1.981	421	21,23	-33,84
SURPLUS (DEFISIT)	-396	890	-224,71	-31,53	-511	1.515	-296,67	70,33

Sumber: BPKAD Provinsi Bali dan kabupaten/kota, diolah

60. Pertumbuhan dan persentase realisasi Komponen pendapatan lain-lain yang sah di Bali pada TW II 2019 tercatat masing-masing sebesar 31,64% (yoy) dan 60,52%, lebih meningkat dibanding TW II 2018 yang masing-masing sebesar 30,12% (yoy) dan 59,94%

Grafik 2.3. Persentase Realisasi Anggaran Belanja APBD Provinsi Bali Per Triwulan (2016-2019)

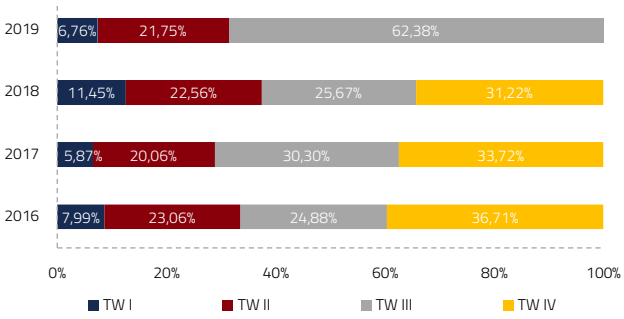

Sumber: BPKAD Provinsi Bali dan kabupaten/kota, diolah

Grafik 2.4. Perkembangan Total Belanja, Belanja Operasi dan Modal APBD Provinsi Bali (2017-2019)

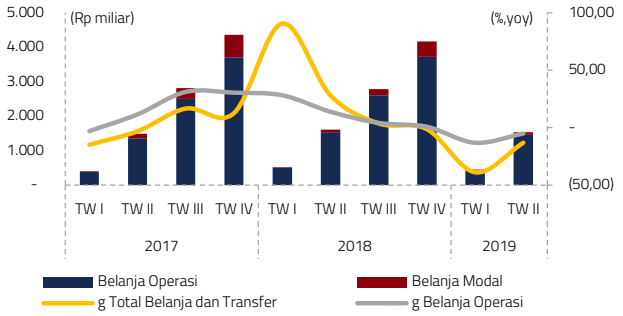

Sumber: BPKAD Provinsi Bali dan kabupaten/kota, diolah

Realisasi belanja dan transfer di Provinsi Bali pada triwulan II 2019 mengalami penurunan di bandingkan triwulan II 2018, sejalan dengan rendahnya realisasi serapan anggaran pada periode tersebut. Realisasi belanja dan transfer di triwulan II 2019 tercatat mengalami penurunan 13,04% (yoy), lebih rendah dibanding triwulan II 2018 yang tumbuh sebesar 28,02% (Tabel 2.8.). Beberapa faktor yang mempengaruhi pencapaian realisasi belanja pada triwulan II 2019 adalah dibutuhkannya waktu penyesuaian, sejalan dengan adanya pergantian pimpinan di sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang mencapai 13 OPD dan adanya kebijakan baru yang dikeluarkan oleh Provinsi Bali berupa tambahan administrasi sebagai syarat penarikan/ pencairan anggaran.

Berdasarkan komponennya, penurunan (kontraksi) terdalam terjadi pada komponen belanja transfer yakni sebesar 33,84% (yoy) dibandingkan tahun sebelumnya. Sementara itu, realisasi komponen belanja operasi (sebagai pangsa terbesar), hanya mengalami penurunan realisasi sebesar 5% saja. Penurunan komponen belanja operasi ini tidak terlepas dari penyesuaian terhadap implementasi program kerja dalam lingkungan kepemimpinan daerah yang baru serta adanya persyaratan administrasi tambahan dalam pencairan dan penarikan anggaran. Sejalan dengan itu, serapan komponen belanja transfer juga menunjukkan penurunan yang semakin dalam dibandingkan periode triwulan II 2018.

Belanja Operasi

Menurunnya serapan persentase realisasi belanja operasi pada triwulan II 2019, terutama disebabkan oleh melambatnya serapan realisasi belanja pegawai (pangsa 45,67%) dan turunnya realisasi belanja hibah (pangsa 26,79%). Sementara itu, realisasi komponen belanja barang dan jasa (pangsa 27,49%) tetap menunjukkan peningkatan serapan realisasi belanja, sehingga dapat menahan dalamnya penurunan realisasi belanja operasi diperiode laporan. Sedangkan sub komponen lainnya, yaitu belanja bantuan sosial dan belanja subsidi memiliki pangsa yang relatif kecil. Struktur komponen belanja operasi pada triwulan II 2019 relatif tidak jauh berbeda dibanding struktur triwulan II 2018 (grafik 2.5 dan 2.6).

Secara spesifik bila ditinjau dari kinerja realisasinya, belanja operasi pada riwulan II 2019 mengalami penurunan realisasi, terutama disebabkan oleh menurunnya kinerja dua komponen utama belanja operasi, yaitu belanja pegawai dan belanja hibah. Namun demikian, akselerasi kinerja komponen belanja barang dan jasa menahan dalamnya penurunan realisasi belanja operasi. penurunan realisasi belanja operasi juga tidak terlepas oleh dibutuhkannya penyesuaian sejalan dengan kepemimpinan baru disejumlah OPD dan adanya ketentuan tambahan baru yang memerlukan tambahan administrasi dalam penarikan/pencairan anggaran. Kondisi ini menyebabkan realisasi belanja operasi pada di triwulan II 2019 tidak dapat terserap secara optimal.

Grafik 2.5. Struktur Belanja Operasi APBD Provinsi Bali Triwulan II 2018

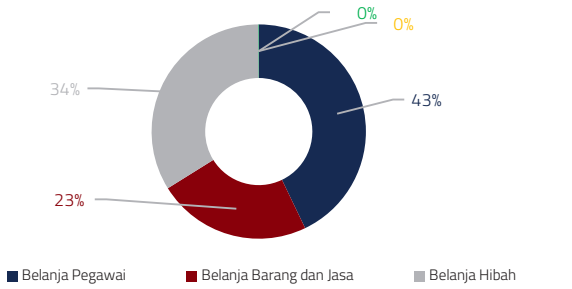

Sumber: BPKAD Provinsi Bali dan kabupaten/kota, diolah

Grafik 2.6. Struktur Belanja Operasi APBD Provinsi Bali Triwulan II 2019

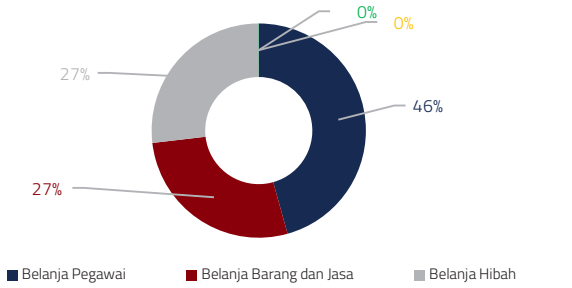

Sumber: BPKAD Provinsi Bali dan kabupaten/kota, diolah

Belanja Modal

Realisasi belanja modal pada triwulan II 2019 tercatat sebesar Rp63,80 miliar atau 8,13% dari target anggaran 2019, menurun dibanding realisasi triwulan II 2018 yang sebesar Rp63,25 miliar atau sebesar 11,53% dari target anggaran 2018. Penurunan persentase realisasi tersebut, disebabkan oleh adanya aturan ketentuan baru dari Kementerian PUPR yang terkait dengan peningkatan tarif jasa remunerasi konsultasi, sehingga menahan serapan belanja modal di periode laporan. Kondisi tersebut berdampak pada mundurnya beberapa tahapan pengadaan dan pengerjaan yang menggunakan anggaran belanja modal, sehingga menyebabkan rendahnya serapan anggaran belanja modal yang dapat direalisasikan.

2.3. GABUNGAN ANGGARAN KABUPATEN/KOTA

2.3.1. Target Anggaran Pendapatan Daerah Gabungan Kabupaten/Kota

Pagu anggaran pendapatan daerah gabungan kabupaten/kota pada 2019 tercatat sebesar Rp21,75 triliun atau meningkat sebesar 4,69% (yoy), lebih rendah dibanding peningkatan pagu pendapatan 2018 yang tercatat sebesar 14,66% (yoy) dengan nominal Rp20,78 triliun. Melambatnya peningkatan pagu pendapatan daerah tersebut, terutama disebabkan oleh capaian realisasi pendapatan daerah yang rendah di 2018, khususnya komponen PAD sebagai akibat melambatnya pertumbuhan jumlah kunjungan wisman[61]. Kondisi tersebut menyebabkan penyusunan pagu anggaran tahun 2019 tumbuh terbatas.

Secara spasial, peningkatan target pendapatan daerah tertinggi pada 2019 terjadi di Kabupaten Gianyar dengan tumbuh sebesar 12,35% (yoy), didukung oleh peningkatan komponen PAD yang signifikan, sejalan dengan target jumlah kunjungan wisatawan yang meningkat signifikan pada tahun 2019. Peningkatan target pertumbuhan jumlah kunjungan wisatawan, mendorong peningkatan pagu PHR (pangsa terbesar PAD). Bidang usaha pariwisata di Kabupaten Gianyar tengah berkembang, tercermin dari peningkatan jumlah kunjungan wisatawan serta diikuti pula oleh pertumbuhan dan berkembangnya pelaku usaha pariwisata termasuk hotel dan restauran (sumber PHR). Sejalan dengan itu, strategi dan upaya untuk menggali sumber-sumber pendapatan baru, termasuk meningkatkan kepatuhan pelaku usaha untuk membayar pajak juga menjadi faktor yang dipertimbangkan dalam penyusunan target pendapatan di tahun 2019. Sementara itu, peningkatan target pendapatan daerah terendah pada tahun 2019, dialami oleh Kabupaten Tabanan, yang hanya tumbuh sebesar 0,04% (yoy). Rendahnya

61. Jumlah kunjungan wisman pada semester I 2019 tercatat sebesar 2,87 juta orang wisman atau turun 0,66% (yoy), lebih rendah dibandingkan pertumbuhan semester I 2018 yang tumbuh sebesar 2,91% (yoy) atau sebesar 2,89 juta orang

Tabel 2.9. Target Anggaran Pendapatan Daerah 9 Kabupaten/Kota 2018-2019

Daerah Tingkat II	Pagu APBD P 2018 (Rp Miliar)				Growth 2018 (%yoy)				Pagu APBD 2019 (Rp Miliar)				Growth 2019 (%yoy)			
	PAD	Dana Perimbangan	Lain-Lain Pendapatan Yang Sah	Total Pendapatan	PAD	Dana Perimbangan	Lain-Lain Pendapatan Yang Sah	Total Pendapatan	PAD	Dana Perimbangan	Lain-Lain Pendapatan Yang Sah	Total Pendapatan	PAD	Dana Perimbangan	Lain-Lain Pendapatan Yang Sah	Total Pendapatan
Kota Denpasar	855	909	304	2.068	-8,32	0,79	43,70	1,08	873	917	331	2.120	2,04	0,92	8,84	2,55
Kabupaten Tabanan	394	1.079	476	1.949	-0,27	-5,24	25,24	1,84	390	1.091	468	1.949	-0,89	1,11	-1,63	0,04
Kabupaten Klungkung	198	681	261	1.140	34,59	2,15	-13,82	2,10	180	702	288	1.169	-9,43	3,11	10,47	2,61
Kabupaten Karangasem	234	953	375	1.562	29,86	-2,10	-4,90	0,91	276	1.013	400	1.689	18,10	6,23	6,86	8,16
Kabupaten Gianyar	806	941	305	2.052	20,84	-0,19	53,04	13,43	989	966	350	2.305	22,74	2,67	14,73	12,35
Kabupaten Badung	6.687	573	310	7.570	57,04	-8,82	47,81	48,54	6.792	610	381	7.782	1,56	6,53	22,85	2,81
Kabupaten Buleleng	376	1.270	511	2.157	-20,26	-5,88	19,05	-4,14	440	1.333	605	2.378	16,93	4,94	18,45	10,23
Kabupaten Bangli	121	706	334	1.161	2,86	-10,77	44,39	1,83	139	749	322	1.210	15,16	6,06	-3,71	4,20
Kabupaten Jemberana	130	692	298	1.120	8,70	-7,21	-11,38	-6,79	132	727	290	1.149	1,10	5,16	-2,68	2,60
Total	9.801	7.803	3.174	20.779	34,46	-4,11	17,80	14,66	10.210	8.108	3.436	21.754	4,17	3,90	8,25	4,69

Sumber: BPKAD Provinsi Bali dan kabupaten/kota, diolah

peningkatan pagu anggaran tersebut, disebabkan oleh penurunan pagu anggaran untuk komponen PAD dan komponen lain-lain pendapatan yang sah. Hal ini disebabkan oleh realisasi PAD yang rendah pada tahun 2018 sehingga berdampak pada target PAD yang disusun di 2019 lebih rendah pula.

2.3.2. Realisasi Pendapatan Daerah Gabungan Kabupaten/Kota

Realisasi gabungan pendapatan daerah kabupaten/kota di Wilayah Bali pada triwulan II 2019 tercatat sebesar Rp8,81 triliun, tumbuh 7,99% (yoy) lebih rendah (melambat) dibanding realisasi triwulan II 2018 yang tumbuh sebesar 9,88% (yoy), dengan nominal Rp8,15 triliun. Melambatnya realisasi pendapatan daerah gabungan kabupaten/kota tersebut disebabkan oleh perlambatan realisasi dua komponen pendapatan, yaitu dana perimbangan dan lain-lain pendapatan yang sah. Realisasi dana perimbangan yang melambat tersebut, bertepatan dengan adanya peraturan baru Kementerian keuangan (PMK 121/2018) yang memperbaiki mekanisme penyaluran transfer (dana perimbangan) dan dana desa ke daerah. Kondisi ini berdampak pada tertundanya realisasi dana perimbangan ke beberapa daerah, termasuk di Wilayah Bali, disebabkan belum terpenuhinya persyaratan administrasi untuk memenuhi ketentuan baru tersebut. Sementara itu, realisasi komponen PAD pada triwulan II 2019 menunjukkan pertumbuhan yang lebih tinggi (akselerasi) dibanding triwulan II 2018[62], terutama didorong oleh meningkatnya pendapatan pajak dan retribusi daerah. Hal ini sejalan dengan upaya dari pemerintah daerah untuk melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi penghimpunan PAD, termasuk melalui pembayaran pajak hotel dan restauran secara *online*, pembentukan badan pengelola destinasi wisata dan peningkatan tarif retribusi daerah wisata.

Secara spesifik, daerah dengan pertumbuhan realisasi pendapatan daerah tertinggi di triwulan II 2019 adalah Kabupaten Bangli, yaitu sebesar 23,41% (yoy) atau dengan nilai nominal Rp527 miliar, terutama ditopang oleh peningkatan realisasi pendapatan dari PAD dan komponen dana perimbangan. Realisasi PAD tercatat tumbuh sebesar 103,07% (yoy), tumbuh signifikan terutama didorong oleh kebijakan intensifikasi dan ekstensifikasi Pemerintah Kabupaten Bangli dalam penghimpunan pajak dan retribusi daerah. Upaya

Tabel 2.10. Realisasi Pendapatan Daerah Gabungan Kabupaten/Kota Triwulan II (2018-2019)

Daerah Tingkat II	Realisasi TW II 2018 (Rp Miliar)				Growth TW II 2018 (%,yoy)				Realisasi TW II 2019 (Rp Miliar)				Growth TW II 2019 (%,yoy)			
	PAD	Dana Perimbangan	Lain-Lain Pendapatan Yang Sah	Total Pendapatan	PAD	Dana Perimbangan	Lain-Lain Pendapatan Yang Sah	Total Pendapatan	PAD	Dana Perimbangan	Lain-Lain Pendapatan Yang Sah	Total Pendapatan	PAD	Dana Perimbangan	Lain-Lain Pendapatan Yang Sah	Total Pendapatan
Kota Denpasar	409	491	30	930	93,40	44,12	300,93	66,18	424	486	77	988	3,81	-1,03	157,07	6,21
Kabupaten Tabanan	175	588	152	916	-4,96	1,18	30,22	3,74	157	583	162	902	-10,51	-0,90	6,57	-1,50
Kabupaten Klungkung	76	370	96	541	13,05	2,39	2,07	3,70	104	378	99	581	37,77	2,17	3,13	7,31
Kabupaten Karangasem	97	528	129	754	1,12	5,90	-14,85	1,06	111	539	137	787	15,17	2,16	5,61	4,42
Kabupaten Gianyar	296	505	82	883	18,76	2,19	13,38	8,25	414	498	129	1.042	39,79	-1,20	57,83	18,04
Kabupaten Badung	1.779	231	130	2.140	4,46	-13,94	309,59	6,82	2.038	295	69	2.402	14,55	27,72	-46,98	12,24
Kabupaten Buleleng	158	694	166	1.018	-1,18	1,50	-5,01	-0,04	170	670	181	1.022	8,03	-3,53	9,06	0,32
Kabupaten Bangli	27	309	91	427	-4,64	15,47	159,53	28,98	54	382	90	527	103,07	23,53	-0,47	23,41
Kabupaten Jembrana	57	382	107	545	1,68	-2,20	11,50	0,62	63	391	102	555	9,96	2,46	-4,66	1,85
Total	3.073	4.098	983	8.154	11,57	5,45	26,02	9,88	3.536	4.222	1.047	8.805	15,07	3,04	6,47	7,99

Sumber: BPKAD Provinsi Bali dan kabupaten/kota, diolah

62. Realisasi PAD gabungan kabupaten/kota di Wilayah Bali pada TW II 2019 tercatat tumbuh 15,07% (yoy), lebih tinggi dibanding TW II 2018 yang tumbuh 11,57% (yoy)

ekstensifikasi dilakukan dengan memperluas cakupan sumber-sumber pemenuhan pajak dan retribusi, termasuk diantaranya pengenaan tarif retribusi untuk 3 destinasi wisata yang sedang meningkat kunjungannya, meliputi Air Terjun Tukad Cepung, Twinhill dan Tirta Sudamala. Sementara upaya intensifikasi dilakukan meliputi:

- Peningkatan tarif retribusi destinasi wisata, termasuk diantaranya kawasan wisata Kintamani
- Pembentukan badan pengelola wisata di Kintamani, untuk mendorong peningkatan penghimpunan retribusi daerah di obyek wisata
- Implementasi pembayaran pajak hotel dan restauran secara *online*
- Mengintensifkan sosialisasi dengan pelaku usaha hotel dan restauran untuk meningkatkan kesadaran wajib pajak agar dapat membayar pajak secara tepat waktu.

Seiring dengan itu, meningkatnya realisasi dana perimbangan di Kabupaten Bangli didorong oleh upaya pemenuhan persyaratan dan administrasi secara lengkap dalam tahapan pencairan maupun penarikan anggaran.

Sementara itu, daerah dengan peningkatan realisasi pendapatan daerah terendah adalah Kabupaten Tabanan, yaitu turun sebesar 1,50% (yoy). Penurunan ini disebabkan oleh turun signifikannya realisasi pendapatan asli daerah, yaitu sebesar 10,51% (yoy). Kondisi ini disebabkan oleh tertahannya realisasi retribusi daerah, disebabkan antara lain oleh sedang dilakukannya pembangunan pasar Kediri menggunakan anggaran APBN, sehingga selama proses pembangunan hingga saat penyerahan tidak dapat dilakukan pemungutan retribusi daerah. Sejalan dengan itu, masih tetap tingginya harga tiket pesawat udara sepanjang pada triwulan II 2019, menahan kunjungan wisatawan domestik ke destinasi Tanah Lot sehingga berdampak terhadap penurunan pendapatan retribusi daerah dan kinerja hotel serta restauran di Wilayah Tabanan.

Grafik 2.7. Persentase Realisasi Pendapatan 9 kabupaten/kota Triwulan II (2018-2019)

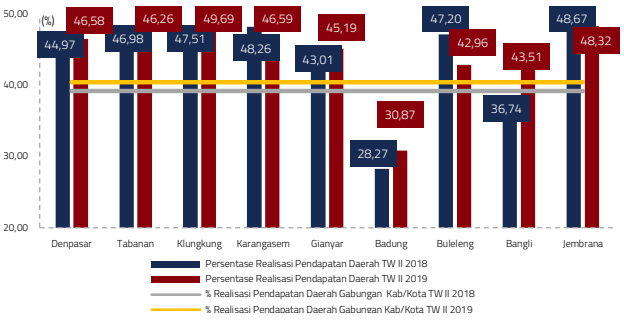

Sumber: BPKAD Provinsi Bali dan kabupaten/kota, diolah

Grafik 2.8. Derajat Desentralisasi Fiskal (DDF) 9 kabupaten/kota Triwulan II (2018-2019)

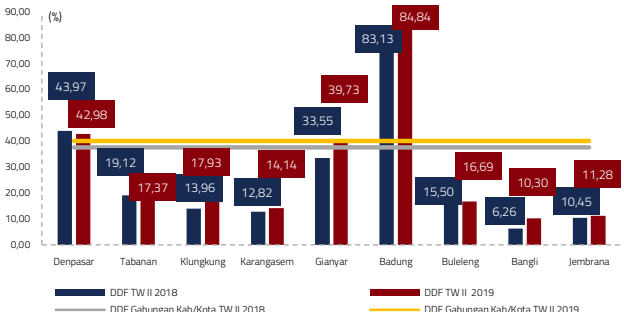

Sumber: BPKAD Provinsi Bali dan kabupaten/kota, diolah

Selanjutnya bila ditinjau dari sisi capaian serapan pendapatan daerah (realisasi pendapatan daerah dibandingkan target pendapatan daerah), serapan pendapatan daerah gabungan kabupaten/kota pada triwulan II 2019 tercatat mencapai 40,48% dari target anggaran, meningkat dibanding triwulan II 2018 yang tercatat sebesar 39,24%. Peningkatan ini terutama bersumber dari meningkatnya capaian serapan pendapatan daerah pada 5 kabupaten/kota di Wilayah Bali (grafik 2.7), ditopang oleh peningkatan capaian serapan komponen PAD. Secara spesifik, daerah dengan capaian serapan tertinggi di triwulan II 2019 adalah Kabupaten Klungkung (49,69%), meningkat dibanding triwulan II 2018 (47,51%). Capaian ini ditopang oleh tumbuh dan berkembangnya beberapa destinasi wisata di Wilayah Klungkung, khususnya di Kawasan Nusa Penida dan Nusa Lembongan, diikuti oleh meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan sehingga berdampak kepada peningkatan kinerja

hotel dan restoran di Wilayah tersebut. Sejalan dengan itu, upaya pemerintah daerah untuk terus mendorong optimalisasi pendapatan daerah dilakukan melalui:

- Implementasi program tim intensifikasi pajak daerah secara berkesinambungan
- Pelaksanaan kegiatan sosialisasi mengenai kewajiban wajib pajak secara kontinu
- Implementasi dan pengembangan transaksi *online* dalam pembayaran pajak, khususnya pajak hotel dan restauran, termasuk di kawasan pariwisata Nusalembongan dan Nusapenida

Sementara itu, kabupaten dengan capaian serapan pendapatan daerah terendah diperiode laporan (grafik 2.7) adalah Kabupaten Badung (30,87%), meskipun lebih baik dibanding serapan triwulan II 2018 (28,27%). Masih rendahnya serapan tersebut, terutama disebabkan oleh penurunan kunjungan wisman sepanjang semester I 2019, lebih rendah dibanding semester I 2018 yang tumbuh positif[63]. Sejalan dengan kondisi tersebut, masih tetap tingginya harga tiket pesawat udara berdampak pada tertahannya jumlah kunjungan wisatawan domestik, terkonfirmasi oleh penurunan kedatangan penumpang domestik di Bandara Ngurah Rai[64]. Kondisi ini memberikan dampak pada penurunan tingkat penghunian kamar hotel dan lama tinggal wisatawan di hotel berbintang[65] (terkonsentrasi di Badung), sehingga memberikan pengaruh pada tertahannya serapan PAD.

Derajat Desentralisasi Fiskal (DDF) gabungan kabupaten/kota di Wilayah Bali pada triwulan II 2019 mengalami peningkatan (grafik 2.8), tercermin oleh naiknya nilai DDF di 7 kabupaten. Sementara itu, bila dianalisis lebih lanjut hanya Kabupaten Badung yang memiliki nilai DDF lebih dari 50%, yaitu 84,84%. Daerah lain dengan nilai DDF terbesar kedua adalah Kota Denpasar (42,98%). Kondisi ini menunjukkan masih besarnya ketergantungan fiskal sebagian besar kabupaten/kota di Wilayah Bali terhadap sumber pendapatan daerah yang berasal dari Pemerintah Pusat, yaitu komponen dana perimbangan. Daerah dengan nilai DDF terendah adalah Kabupaten Bangli (10,30%).

2.3.3. Target Anggaran Belanja Daerah Gabungan Kabupaten/Kota

Target anggaran belanja gabungan kabupaten/kota di Wilayah Bali pada tahun 2019 tercatat sebesar Rp23,17 triliun atau tumbuh 2,81% (yoy), lebih rendah dibanding peningkatan target anggaran gabungan tahun 2018 yang sebesar 11,17% (yoy) atau dengan nominal Rp22,53 triliun. Melambatnya peningkatan target anggaran belanja tersebut, sejalan dengan perlambatan target anggaran pendapatan daerah diperiode yang sama. Bila dianalisis lebih lanjut, dua komponen utama yang menjadi penyebab melambatnya target anggaran belanja tersebut adalah komponen belanja operasional

Tabel 2.11. Target Anggaran Belanja Daerah 9 Kabupaten/Kota 2018-2019

Daerah Tingkat II	Pagu Belanja APBD P 2018 (Rp Miliar)				Growth Tahun 2018 (%, yoy)				Pagu Belanja APBD 2019 (Rp Miliar)				Growth Tahun 2019 (%, yoy)			
	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Transfer dan Tak Terduga	Total Belanja	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Transfer dan Tak Terduga	Total Belanja	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Transfer dan Tak Terduga	Total Belanja	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Transfer dan Tak Terduga	Total Belanja
Kota Denpasar	1.861	304	202	2.366	7,45	-6,14	-10,46	3,75	1.827	354	196	2.376	-1,82	16,47	-2,85	0,44
Kabupaten Tabanan	1.498	473	244	2.215	5,54	-9,62	0,84	1,39	1.466	483	273	2.222	-2,14	2,23	11,98	0,34
Kabupaten Klungkung	931	164	116	1.211	3,50	-22,32	1,64	-1,12	958	162	123	1.244	2,98	-0,95	6,04	2,74
Kabupaten Karangasem	1.221	187	191	1.598	3,75	-37,00	7,29	-3,18	1.344	204	213	1.761	10,09	9,27	11,72	10,19
Kabupaten Gianyar	1.578	322	261	2.161	16,18	-26,51	3,99	5,56	1.753	633	276	2.663	11,10	96,83	5,72	23,21
Kabupaten Badung	5.075	1.649	1.439	8.163	36,44	11,52	47,76	32,26	5.128	1.440	1.374	7.941	1,03	-12,70	-4,52	-2,72
Kabupaten Buleleng	1.749	238	239	2.225	5,80	-29,25	-14,45	-1,88	1.776	370	264	2.410	1,54	55,94	10,50	8,31
Kabupaten Bangli	770	221	273	1.264	5,25	-13,41	47,21	7,83	858	237	265	1.360	11,37	7,32	-2,92	7,57
Kabupaten Jemberana	803	393	135	1.330	1,10	12,16	7,62	4,79	839	213	138	1.189	4,52	-45,85	2,25	-10,58
Total	15.485	3.949	3.099	22.533	14,85	-6,23	20,40	11,17	15.948	4.096	3.122	23.167	2,99	3,73	0,74	2,81

Sumber: BPKAD Provinsi Bali dan kabupaten/kota, diolah

63. Jumlah kunjungan wisman pada semester I 2019 tercatat sebesar 2,87 juta orang wisman atau turun 0,66% (yoy), lebih rendah dibandingkan pertumbuhan semester I 2018 yang tumbuh sebesar 2,91% (yoy) atau sebesar 2,89 juta orang
64. Jumlah kedatangan penumpang di gate domestik Bandara Ngurah Rai pada semester I 2019 tercatat sebesar 2,23 juta orang atau turun 13,83% (yoy), lebih rendah dibandingkan pertumbuhan semester I 2018 yang tumbuh sebesar 11,59% (yoy) atau sejumlah 2,59 juta orang
65. Rata-rata TPK hotel berbintang dan lama tingggal wisatawan di hotel berbintang pada semester I 2019 tercatat masing-masing sebesar 54,57% dan 3,02 hari, lebih rendah dibandingkan semester I 2018 yang masing-masing sebesar 63,70% dan 3,07 hari.

dan komponen belanja transfer dan tak terduga. Sementara pagu belanja modal dapat tumbuh positif, sehingga mampu menahan dalamnya perlambatan target anggaran belanja daerah.

2.3.4. Realisasi Belanja Gabungan Kabupaten/Kota

Realisasi belanja gabungan kabupaten/kota di Wilayah Bali pada triwulan II 2019 tercatat sebesar Rp7,42 triliun, atau tumbuh 6,18% (yoy), lebih rendah dibanding triwulan II 2018 yang tumbuh sebesar 24,17% (yoy), dengan nominal Rp6,99 triliun. Perlambatan tersebut, disebabkan oleh tertahannya pertumbuhan realisasi belanja operasi dan turunnya realisasi belanja transfer. Sementara realisasi belanja modal masih tumbuh signifikan, sehingga dapat menahan dalamnya perlambatan realisasi belanja daerah. Bila dianalisis lebih lanjut, perlambatan realisasi belanja terjadi pada 6 kabupaten/kota, bahkan dua diantaranya mengalami penurunan realisasi belanja. Perlambatan realisasi belanja juga disebabkan oleh melambatnya realisasi pendapatan daerah di periode yang sama. **Melambatnya realisasi belanja daerah gabungan kabupaten/kota tersebut, menjadi salah satu penyebab tertahannya kinerja konsumsi pemerintah (PDRB) Bali pada triwulan II 2019, yang tumbuh sebesar 18,69% (yoy), lebih rendah dibanding triwulan I 2018 yang tumbuh 20,84% (yoy).**

Secara spesifik, daerah dengan peningkatan realisasi belanja tertinggi pada triwulan II 2019 adalah Kabupaten Bangli (17,98%), membaik dibanding triwulan II 2018 (17,29%). Tingginya peningkatan realisasi belanja daerah di Bangli tersebut, terkait kebijakan pemerintah daerah yang terus berupaya untuk mendorong percepatan realiasi belanja, antara lain melalui adanya unit khusus yang menangani pengadaan barang dan jasa di bawah koordinasi Sekretaris Daerah, sehingga dapat mempercepat dan mempermudah proses pengadaan barang dan jasa. Selain itu, pelaksanaan evaluasi dan *monitoring* secara kontinu dan berkala terhadap realisasi belanja pemerintah di semua OPD, juga berkontribusi dalam percepatan realisasi belanja. Peningkatan realisasi belanja yang tinggi tersebut, juga didukung oleh tumbuh signifikannya realisasi pendapatan daerah di periode yang sama. Sementara itu, daerah dengan pertumbuhan realisasi belanja terendah di triwulan II 2019 adalah Kabupaten Tabanan, yang mengalami penurunan 2,28% (yoy), jauh lebih rendah dibanding triwulan II 2018 tumbuh 2,39% (yoy). Kondisi ini disebabkan oleh menurunnya realisasi pendapatan daerah, sehingga berdampak terhadap dilakukannya penyesuaian anggaran belanja daerah, menyebabkan turunnya realisasi belanja daerah.

Berdasarkan capaian serapan belanja daerah, realisasi belanja gabungan kabupaten/kota pada triwulan II 2019 mencapai 32,04% dari target anggaran belanja, meningkat dibanding triwulan II 2018 yang sebesar 31,01%. Peningkatan ini

Tabel 2.12. Realisasi Belanja Daerah 9 Kabupaten/Kota Triwulan II (2018-2019)

Daerah Tingkat II	Triwulan II 2018 (Rp Miliar)				Growth Tahunan TW II 2018 (%,yoy)				Triwulan II 2019 (Rp Miliar)				Growth Tahunan TW II 2019 (%,yoy)			
	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Transfer dan Tak Terduga	Total Belanja	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Transfer dan Tak Terduga	Total Belanja	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Transfer dan Tak Terduga	Total Belanja	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Transfer dan Tak Terduga	Total Belanja
Kota Denpasar	608	30	95	733	102,31	#######	0,00	120,49	663	7	90	761	9,06	-75,63	-5,29	3,78
Kabupaten Tabanan	601	21	135	757	7,72	-58,60	3,18	2,39	584	8	148	740	-2,76	-64,01	9,42	-2,28
Kabupaten Klungkung	331	20	54	406	11,30	49,16	1,12	11,22	384	6	51	441	15,77	-70,19	-5,47	8,62
Kabupaten Karangasem	438	11	92	540	2,26	-82,13	6,95	-6,14	506	8	109	622	15,64	-31,20	18,54	15,17
Kabupaten Gianyar	563	66	91	720	18,00	49,20	11,31	19,37	601	36,42	118	755	6,65	-44,47	29,24	4,85
Kabupaten Badung	1.683	93	460	2.236	44,47	51	26,13	40,52	1.624	446	308	2.377	-3,55	381,72	-33,17	6,29
Kabupaten Buleleng	627	19	105	751	7,16	1,00	-18,55	2,48	662	17,97	141	821	5,49	-6,26	34,62	9,26
Kabupaten Bangli	267	22	99	388	7,24	579,82	25,68	17,29	316	30	112	458	18,54	35,49	12,53	17,98
Kabupaten Jembrana	302	83,11	74,1	459	12,39	251,86	10,96	27,89	324	38,66	86	449	7,54	-53,48	15,59	-2,21
Total	5.420	365	1.206	6.990	25,21	31,10	17,91	24,17	5.664	597	1.162	7.422	4,49	63,84	-3,66	6,18

Sumber: BPKAD Provinsi Bali dan kabupaten/kota, diolah

terutama didorong oleh meningkatnya serapan belanja pada 7 daerah, termasuk Badung dan Denpasar yang merupakan daerah dengan pagu anggaran belanja daerah terbesar untuk daerah tingkat II di Bali. Meningkatnya serapan belanja daerah, juga ditopang oleh meningkatnya serapan pendapatan daerah di periode yang sama.

Secara spesifik, kabupaten dengan capaian serapan belanja tertinggi pada triwulan II 2019 adalah Kabupaten Jembrana (37,74%), sementara yang terendah adalah Kabupaten Gianyar (28,34%). Tingginya serapan realisasi belanja Kabupaten Jembrana tersebut didukung oleh upaya percepatan tahapan dan realisasi belanja yang dilakukan oleh OPD, untuk mendorong peningkatan peran sisi fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi daerah dan optimalisasi belanja daerah. Sejalan dengan itu, kebijakan evaluasi dan *monitoring* yang dilakukan secara kontinu dan berkesinambungan oleh pemerintah kabupaten Jembrana terhadap capaian realisasi belanja, juga ikut mendukung tingginya capaian serapan tersebut. Sementara itu, rendahnya capaian serapan realisasi belanja di Kabupaten Gianyar disebabkan oleh masih relatif kecilnya serapan belanja modal, akibat mundurnya tahapan pelaksanaan beberapa pengadaan yang berdampak pada realisasi anggaran belanja yang tertahan.

Grafik 2.9. Persentase Realisasi Belanja 9 kabupaten/kota Triwulan II (2018-2019)

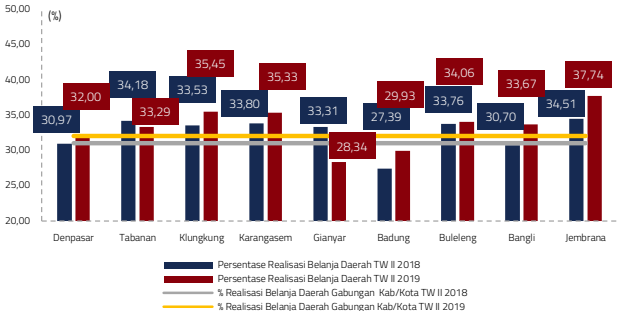

Sumber: BPKAD Provinsi Bali dan kabupaten/kota, diolah

2.4. REALISASI APBN PROVINSI BALI

2.4.1. Realisasi Belanja APBN Provinsi Bali

Realisasi belanja APBN untuk wilayah Bali pada triwulan II 2019 tercatat sebesar Rp4,36 triliun atau dengan serapan mencapai 40,94% dari target triwulan tersebut. Capaian ini meningkat dibanding realisasi belanja APBN triwulan II 2018 yang tercatat sebesar Rp3,69 triliun atau 35,20% dari target anggaran belanja. Peningkatan nominal dan persentase realisasi belanja APBN tersebut, terutama didorong oleh upaya pemerintah pusat melalui kementerian dan lembaga vertikal untuk mempercepat proses dan tahapan realisasi belanja dalam rangka mendorong peran fiskal untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, dan upaya pemerintah untuk mempercepat realisasi pembangunan infrastruktur. Percepatan ini khususnya terjadi pada institusi dan lembaga yang terkait dengan Kementerian PUPR dan Kementerian Perhubungan, yang dilakukan dengan memajukan tahapan pengadaan telah dimulai pada akhir tahun 2018. Kondisi ini tercermin dari peningkatan yang signifikan terhadap realisasi belanja modal pada triwulan II 2019 yang mencapai 53,24% (yoy), jauh lebih tinggi dibanding periode yang sama 2018 yang hanya sebesar 19,44% (yoy). *Monitoring* dan evaluasi anggaran yang dilakukan secara berkala dan kontinu secara periodik, serta memasukkan kegiatan *monitoring* dan evaluasi sebagai salah satu komponen indikator kinerja pegawai, menjadikan semua lembaga pengguna anggaran APBN berupaya untuk mempercepat tahapan dan proses realisasi belanja. Faktor ini juga berkontribusi terhadap peningkatan capaian realisasi belanja di triwulan II 2019.

Tabel 2.13. Realisasi Belanja APBN di Provinsi Bali Triwulan II (2018-2019)

Jenis Belanja	Tahun 2018			Growth Realisasi (%,yoy)	Tahun 2019			Growth Realisasi (%,yoy)
	Pagu Anggaran Perubahan (Rp Miliar)	Realisasi Anggaran TW II (Rp Miliar)	Persentase Realisasi Terhadap Pagu (%)		Pagu Anggaran (Rp Miliar)	Realisasi Anggaran TW II (Rp Miliar)	Persentase Realisasi Terhadap Pagu (%)	
Pegawai	4.187	1.926	45,99	8,64	3.978	2.079	52,26	7,96
Barang	4.397	1.374	31,26	19,04	4.103	1.680	40,94	22,21
Modal	1.885	387	20,54	19,44	2.544	593	23,32	53,24
Bantuan Sosial	12	2,48	21,03	-8,49	16	4,17	26,19	68,15
Total	10.481	3.690	35,20	13,39	10.641	4.356	40,94	18,06

Sumber: DJPBN Wilayah Bali, diolah

Bila dianalisis lebih dalam, realisasi belanja APBN pada triwulan II 2019 mengalami peningkatan sebesar 18,06% (yoy), lebih tinggi dibanding realisasi belanja triwulan II 2018 yang tercatat sebesar 13,39% (yoy). Secara spesifik, komponen dengan peningkatan tertinggi adalah komponen belanja modal dan belanja bantuan sosial yang masing-masing tumbuh sebesar 53,24% (yoy) dan 68,15% (yoy). Sedangkan komponen belanja pegawai merupakan komponen dengan pertumbuhan realisasi belanja yang terendah dan melambat dibandingkan periode triwulan II 2018, sementara itu realisasi belanja barang tetap tumbuh signifikan yang mencapai 22,21% (yoy), lebih tinggi dibanding pertumbuhan periode triwulan II 2018 sejalan dengan upaya percepatan tahapan dan proses pengadaan yang telah dimulai sejak akhir tahun 2018.

halaman ini sengaja dikosongkan

BAB III

PERKEMBANGAN INFLASI DAERAH

- Realisasi inflasi Provinsi Bali pada triwulan II 2019 tercatat sebesar 2,14% (yoy), meningkat dibanding realisasi inflasi triwulan I 2019 yang sebesar 1,85% (yoy).
- Inflasi Provinsi Bali di triwulan III 2019 diprakirakan akan meningkat dibanding triwulan II 2019, yaitu dalam kisaran 2,60%-3,00% (yoy).

Big Garden Corner

Inflasi Provinsi Bali pada triwulan II 2019 tercatat sebesar 2,14% (yoy), lebih tinggi dibanding triwulan I 2019 sebesar 1,85% (yoy) namun lebih rendah dibanding triwulan yang sama tahun sebelumnya sebesar 3,47%, (yoy). Realisasi inflasi ini juga lebih rendah dibanding inflasi nasional triwulan II 2019 (3,28%, yoy) dan berada di dalam kisaran sasaran inflasi nasional.

Terjaganya inflasi di Provinsi Bali didukung oleh semakin solidnya upaya pengendalian inflasi yang dilakukan Bank Indonesia dan Pemerintah Daerah melalui forum Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID). Namun demikian, masih terdapat beberapa potensi risiko yang berasal dari fenomena El Nino yang berdampak pada kekeringan yang pada akhirnya menghambat pada hasil panen tabama & hortikultura dan meningkatkan ketergantungan Bali pada pasokan bahan pangan dari daerah lain. Kedepan, Inflasi Bali pada triwulan III 2019 diperkirakan lebih tinggi dibanding triwulan II 2019, yaitu pada kisaran 2,60% - 3,00% (yoy). Dengan demikian, inflasi Bali tahun 2019 diperkirakan akan berada dalam kisaran sasaran inflasi nasional sebesar 3,5%±1% (yoy).

3.1. PERKEMBANGAN UMUM INFLASI

Perkembangan Inflasi Triwulan II 2019

Inflasi Provinsi Bali pada triwulan II 2019 sebesar 2,14% (yoy), lebih tinggi dibanding triwulan sebelumnya yang sebesar 1,85% (yoy) namun lebih rendah dibanding triwulan II 2018 (3,47%, yoy). Realisasi inflasi ini juga lebih rendah dibanding inflasi nasional triwulan II 2019 (3,28%, yoy). Meningkatnya tekanan inflasi Provinsi Bali pada triwulan laporan didorong oleh komponen bergejolak dan komponen inti.

Grafik 3.1. Inflasi Kota di Provinsi Bali (%yoy)

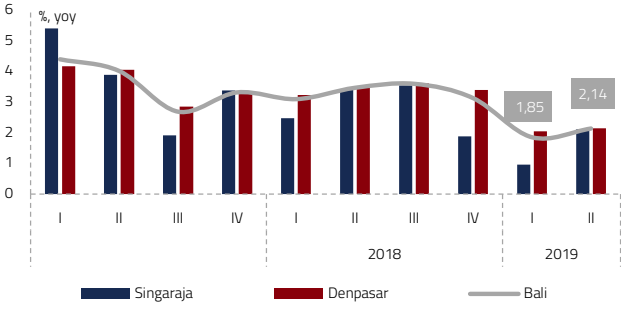

Sumber : Badan Pusat Statistik, diolah

Grafik 3.2. Perkembangan Inflasi Nasional dan Provinsi Bali (% yoy)

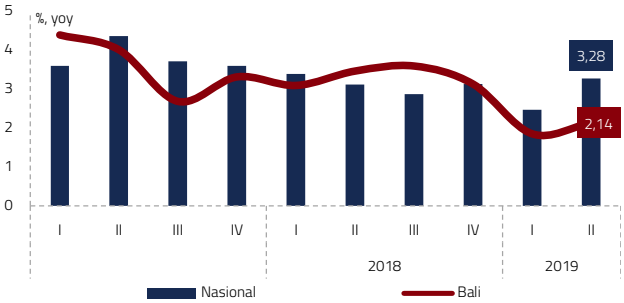

Sumber : Badan Pusat Statistik, diolah

Meningkatnya tekanan inflasi Bali pada periode laporan terjadi kelompok makanan jadi, kelompok perumahan, kelompok sandang, serta kelompok transpor. Sementara berdasarkan kota pembentuknya, peningkatan tekanan inflasi terjadi pada kedua kota yaitu Denpasar dan Singaraja, masing-masing dari 2,05% (yoy) dan 0,97% (yoy) di triwulan I 2019 menjadi 2,15% (yoy) dan 2,11% (yoy) di triwulan II 2019.

Perkiraan Inflasi Triwulan III 2019

Pada Juli 2019, Provinsi Bali mengalami inflasi sebesar 0,67% (mtm) lebih tinggi dibanding inflasi nasional yang sebesar 0,31% (mtm). Meskipun demikian, secara tahunan inflasi bulan Juli tercatat sebesar 2,35% (yoy), lebih rendah dibandingkan dengan nasional yang sebesar 3,32% (yoy). Hal ini disebabkan pada bulan Juli terjadi deflasi pada komoditas daging ayam ras, angkutan udara, salak, angkutan antar kota dan bawang merah. Sementara itu, masih terjadi tekanan harga pada komoditas cabai merah, cabai rawit, tarif air minum PAM, emas perhiasan, dan apel. Secara spasial, inflasi yang terjadi di Bali bersumber dari inflasi yang terjadi pada kedua kota sampel perhitungan inflasi. Kota Denpasar mencatat inflasi 0,60% (mtm) atau 2,27% (yoy),

sedangkan kota Singaraja mencatat inflasi 1,03% (mtm) atau 2,73% (yoy). Dibanding kota sampel lainya di Indonesia, inflasi yang terjadi di Kota Denpasar dan Singaraja berada pada level yang moderat. Komoditas penyumbang terjadinya inflasi di Denpasar adalah cabai rawit, tarif air minum PAM, cabai merah, emas perhiasan, serta obat dengan resep. Sementara itu, komoditas yang menahan inflasi atau mengalami deflasi antara lain masalah angkutan udara, daging ayam ras, salak, telur ayam ras, dan angkutan antar kota. Di Singaraja, inflasi disumbangkan oleh komoditas cabai rawit, pisang, rokok kretek filter, tarif air minum PAM, dan makanan ringan. Sementara, komoditas menahan atau yang mengalami deflasi di Singaraja antara lain adalah pasir, bawang merah, daging ayam ras, angkutan antar kota, dan bawang putih.

Inflasi Bali pada triwulan III 2019 diperkirakan lebih tinggi dibanding triwulan II 2019, yaitu pada kisaran 2,60% - 3,00% (yoy). Terdapat beberapa tantangan tekanan inflasi pada triwulan III 2019 yaitu : (i) potensi musim kemarau yang diperkirakan lebih kering dibanding tahun sebelumnya, (ii) gelombang laut yang tinggi sehingga menghambat hasil tangkapan perikanan, serta (iii) Potensi kenaikan permintaan sejalan dengan masuknya periode high season pariwisata. Menyikapi adanya risiko dan tantangan tersebut, Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Provinsi Bali akan terus berupaya melakukan pengendalian harga baik melalui forum koordinasi maupun dengan melakukan langkah tindak lanjut dengan OPD terkait. Program kerja TPID akan difokuskan pada keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi dan komunikasi efektif untuk mengendalikan konsumsi dan ekspektasi berlebih. Upaya stabilisasi harga melalui pelaksanaan pasar murah dan operasi pasar insidentil juga akan dilanjutkan sehingga diharapkan dapat menjadi jangkar dalam penetapan harga. Pada prinsipnya, upaya dilakukan untuk menahan laju inflasi baik yang bersumber dari sisi permintaan, sisi penawaran, maupun dari sisi ekspektasi pelaku ekonomi.

3.2 ANALISIS PERKEMBANGAN INFLASI

3.2.1. Inflasi Menurut Kelompok Barang dan Jasa

Peningkatan tekanan inflasi Bali pada triwulan II 2019 terjadi pada sebagian kelompok pengeluaran, yaitu kelompok makanan jadi, kelompok perumahan, kelompok sandang, serta kelompok transport.

a) Kelompok Bahan Makanan

Secara tahunan, kenaikan harga kelompok bahan makanan pada periode laporan tercatat sebesar 0,38% (yoy), lebih rendah dibanding triwulan sebelumnya yang sebesar 0,41% (yoy). Sementara secara triwulanan, kelompok bahan makanan mengalami penurunan harga sebesar 0,24% (qtq) pada triwulan II 2019, berbeda dibanding triwulan sebelumnya yang mengalami kenaikan harga sebesar 0,11% (qtq). Penurunan tekanan inflasi pada kelompok bahan makanan terutama dipengaruhi oleh penurunan tekanan inflasi sub kelompok daging, sub kelompok ikan yang diawetkan, sub kelompok telor & susu, serta sub kelompok lemak & minyak. Hal ini disebabkan oleh tidak terdapatnya tambahan permintaan yang signifikan pada periode Ramadhan pada tahun 2019 di Bali. Tekanan harga pada kelompok bahan makanan hanya terjadi pada sub kelompok ikan segar, bumbu-bumbuan, sayur-sayuran. Peningkatan tekanan inflasi sub kelompok ikan segar terutama disebabkan oleh adanya gelombang tinggi (2,5m – 4,0 m) terutama di bulan Juni 2019. Sementara itu, peningkatan tekanan inflasi sub kelompok bumbu-bumbuan terjadi pada komoditas bawang putih. Secara nasional, harga komoditas bawang putih mengalami pergerakan naik sejak Februari 2019 akibat terbatasnya pasokan sebagai akibat terlambatnya keluar izin impor[66]. Namun demikian, tekanan inflasi bawang putih sudah menurun sejak kembali melakukan impor.

66. Sejak awal tahun 2019, harga bawang putih kembali melonjak akibat impor bawang putih oleh swasta terhambat akibat belum keluarnya Rekomendasi Impor Produk Hortikultura (RIPH) dari Kementerian Pertanian. RIPH sebagai persyaratan izin impor bawang putih seharusnya sudah keluar di Desember 2018 terlambat keluar karena ketentuan wajib tanam yang harus diselesaikan oleh importir.

Penurunan harga komoditas daging di Bali juga terkonfirmasi dari hasil pemantauan harga di SiGapura[67]. Berdasarkan pemantauan di Denpasar, rata-rata harga daging ayam ras pada triwulan I 2019 sebesar Rp37.476/kg, kemudian turun menjadi rata-rata sebesar Rp35.867/kg di triwulan II 2019. Tren penurunan harga daging ayam ras juga terjadi di kota Singaraja, yaitu dari harga rata-rata Rp39.901/kg pada triwulan I 2019 menjadi rata-rata sebesar Rp37.181/kg di triwulan II 2019. Sementara itu, harga bumbu-bumbuan terpantau sedikit meningkat yang salah satunya adalah cabai merah besar. Rata-rata harga cabai merah besar di Denpasar pada triwulan I 2019 sebesar Rp18.176/Kg, meningkat menjadi sebesar Rp28.683/Kg. Tren peningkatan harga cabai merah besar ini juga terpantau di Singaraja dimana pada triwulan I 2019 rata-rata sebesar Rp18.079/Kg, menjadi sebesar Rp29.700/Kg .

Grafik 3.3. Inflasi Triwulanan Kelompok Bahan Makanan di Provinsi Bali (%,qtq)

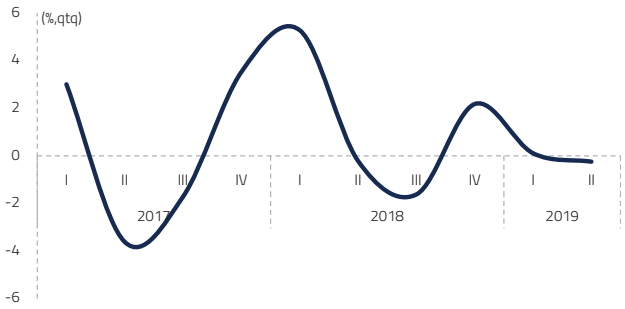

Sumber : Badan Pusat Statistik, diolah

Grafik 3.4. Inflasi Tahunan Kelompok Bahan Makanan di Provinsi Bali (%,yoy)

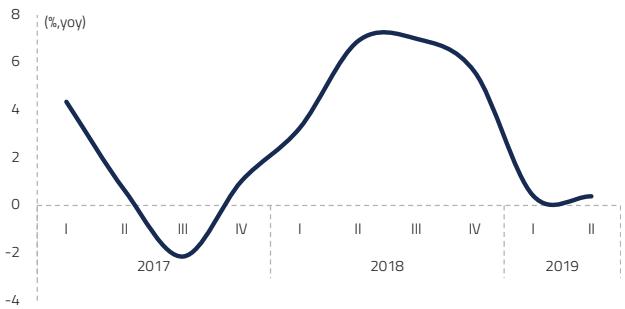

Sumber : Badan Pusat Statistik, diolah

Grafik 3.5. Perkembangan Harga Daging Ayam Ras (Rp/Kg)

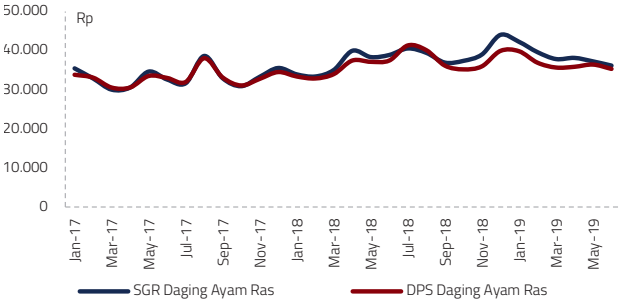

Sumber : www.Sigapura.org, diolah

Grafik 3.6. Perkembangan Harga Cabai Merah Besar (Rp/Kg)

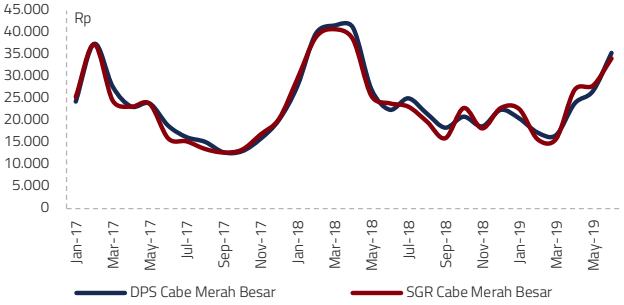

Sumber : www.Sigapura.org, diolah

b) Kelompok Makanan Jadi, Minuman, Rokok dan Tembakau

Pada triwulan II 2019, kenaikan harga kelompok makanan jadi, minuman, rokok, dan tembakau tercatat sebesar 3,63% (yoy), lebih tinggi dibanding triwulan sebelumnya yang sebesar 3,46% (yoy). Sementara itu, secara triwulanan, tekanan harga kelompok ini mengalami penurunan dari 2,01% (qtq) pada triwulan I 2019 menjadi 0,69% (qtq) pada triwulan laporan. Peningkatan tekanan harga kelompok makanan jadi, minuman, rokok, dan tembakau terjadi hanya pada sub kelompok makanan jadi. Peningkatan tekanan harga sub kelompok makanan jadi seiring dengan meningkatnya harga ikan segar, bumbu-bumbuan dan sayur-sayuran.

67. Sistem Informasi Harga Pangan Utama dan Komoditas Strategis. Dapat diakses melalui www.sigapura.org

Grafik 3.7. Inflasi Triwulanan Kelompok Makanan Jadi, Minuman, Rokok dan Tembakau di Provinsi Bali (%,qtq)

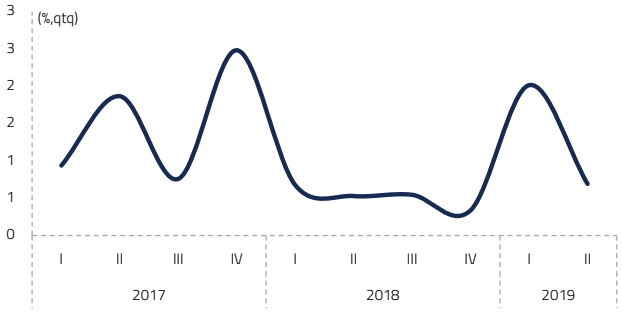

Sumber : Badan Pusat Statistik, diolah

Grafik 3.8. Inflasi Tahunan Kelompok Makanan Jadi, Minuman, Rokok dan Tembakau di Provinsi Bali (%,yoy)

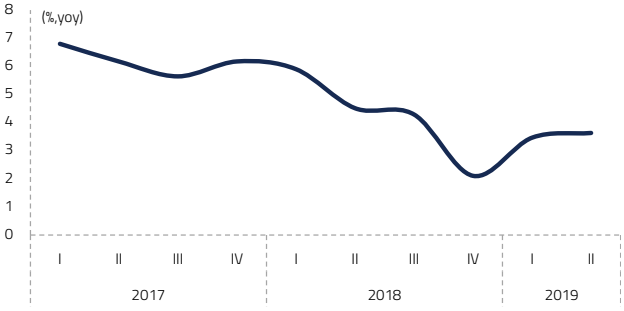

Sumber : Badan Pusat Statistik, diolah

Grafik 3.9. Inflasi Triwulanan Kelompok Perumahan, Air, Listrik, Gas dan Bahan Bakar di Provinsi Bali (%,qtq)

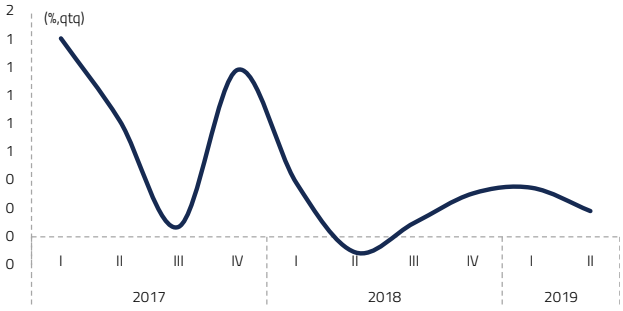

Sumber : Badan Pusat Statistik, diolah

Grafik 3.10. Inflasi Tahunan Kelompok Perumahan,Air, Listirk, Gas, dan Bahan Bakar di Provinsi Bali (%,yoy)

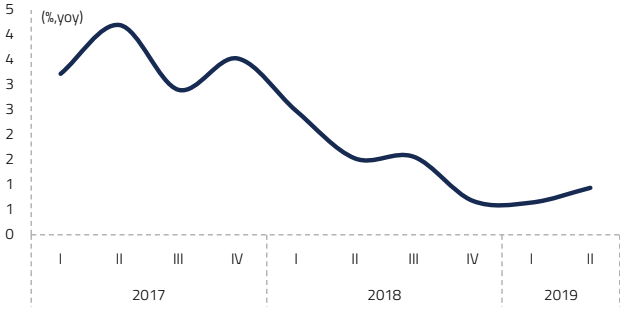

Sumber : Badan Pusat Statistik, diolah

c) Kelompok Perumahan, Air, Listrik, Gas dan Bahan Bakar

Secara tahunan, tekanan harga pada kelompok perumahan, air, listrik, dan gas meningkat dari 0,65% (yoy) pada triwulan sebelumnya menjadi 0,94% (yoy) pada triwulan laporan. Sementara itu, secara triwulanan kelompok perumahan, air, listrik, dan gas pada triwulan II 2019 mengalami kenaikan harga sebesar 0,18% (qtq), melandai dibanding triwulan sebelumnya yang inflasi 0,35% (qtq). Meningkatnya tekanan harga pada kelompok ini secara tahunan didorong oleh menurunnya tekanan inflasi di sub-kelompok biaya tempat tinggal serta sub-kelompok penyelenggaraan rumah tangga. Peningkatan tekanan harga sub kelompok biaya tempat tinggal terutama didorong oleh kenaikan harga sewa rumah.

d) Kelompok Sandang

Pada triwulan laporan, secara tahunan tekanan harga kelompok sandang meningkat dari 2,28% (yoy) menjadi 2,30% (yoy) pada triwulan laporan. Sejalan dengan itu, secara triwulanan tekanan harga kelompok ini juga mengalami peningkatan dari 0,67% (qtq) menjadi 0,87% (qtq) pada triwulan II 2019. Meningkatnya tekanan harga kelompok sandang secara tahunan disebabkan oleh peningkatan tekanan harga di sub-kelompok sandang wanita dan sub kelompok sandang anak-anak. Peningkatan tekanan tekanan harga ini sejalan dengan meningkatnya permintaan untuk pakaian menjelang Lebaran.

Grafik 3.11. Inflasi Triwulanan Kelompok Sandang di Provinsi Provinsi Bali (%,qtq)

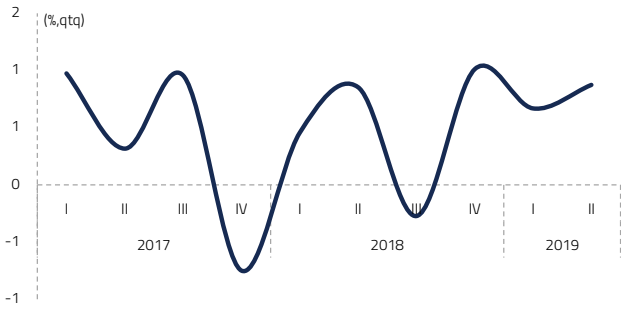

Sumber : Badan Pusat Statistik, diolah

Grafik 3.12. Inflasi Tahunan Kelompok Sandang di Provinsi Provinsi Bali (%,yoy)

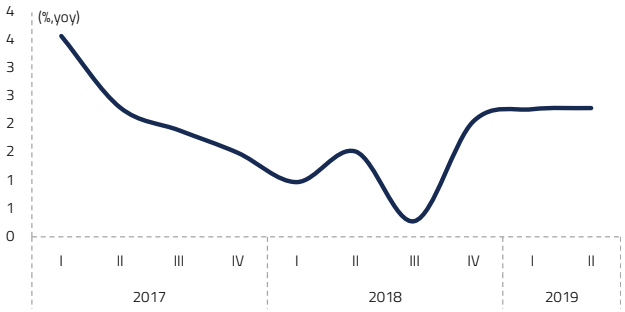

Sumber : Badan Pusat Statistik, diolah

Grafik 3.13. Inflasi Triwulanan Kelompok Kesehatan di Provinsi Provinsi Bali (%,qtq)

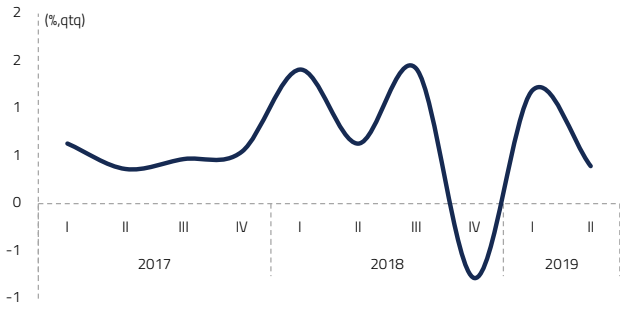

Sumber : Badan Pusat Statistik, diolah

Grafik 3.14. Inflasi Tahunan Kelompok Kesehatan di Provinsi Provinsi Bali (%,yoy)

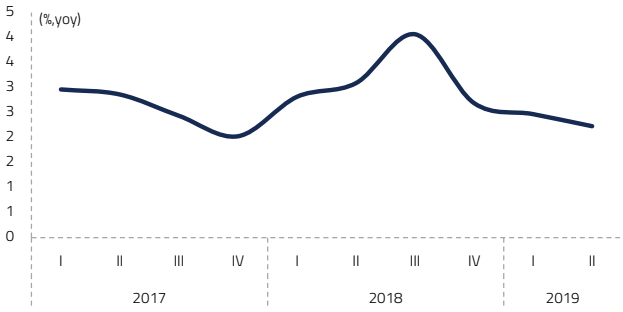

Sumber : Badan Pusat Statistik, diolah

e) Kelompok Kesehatan

Pada triwulan II 2019, kenaikan harga kelompok kesehatan tercatat sebesar 2,23% (yoy), melandai dibanding triwulan sebelumnya yang sebesar 2,47% (yoy). Penurunan ini didorong oleh turunnya tekanan harga sub-kelompok perawatan jasmani dan kosmetika. Penurunan tekanan harga kelompok ini tertahan oleh peningkatan tekanan harga sub-kelompok obat-obatan. Sejalan dengan itu, kenaikan harga kelompok kesehatan secara triwulanan tercatat sebesar 0,39% (qtq), lebih rendah dibanding triwulan sebelumnya yang sebesar 1,19% (qtq).

f) Kelompok Pendidikan, Rekreasi dan Olah Raga

Secara tahunan, tekanan harga kelompok pendidikan, rekreasi, dan olahraga pada triwulan II 2019 melandai menjadi 3,69% (yoy) dari triwulan sebelumnya yang sebesar 4,84% (yoy). Disisi lain, secara triwulanan tekanan harga kelompok ini mengalami peningkatan dari 0,10% (qtq) pada triwulan I 2019 menjadi 0,42% (qtq) pada triwulan II 2019. Penurunan tekanan harga kelompok ini secara tahunan didorong oleh penurunan tekanan harga pada sub-kelompok perlengkapan/peralatan pendidikan dan sub-kelompok rekreasi. Penurunan tekanan harga ini tertahan oleh peningkatan tekanan harga pada sub-kelompok kursus/pelatihan dan olahraga.

Grafik 3.15. Inflasi Triwulanan Kelompok Pendidikan, Rekreasi, dan Olahraga di Provinsi Bali (%,qtq)

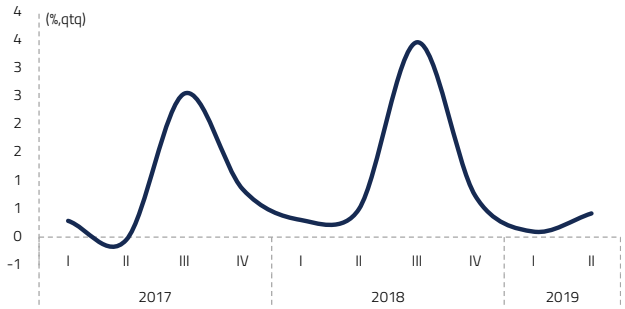

Sumber : Badan Pusat Statistik, diolah

Grafik 3.16. Inflasi Tahunan Kelompok Pendidikan, Rekreasi, dan Olahraga di Provinsi Bali (%,yoy)

Sumber : Badan Pusat Statistik, diolah

Grafik 3.17 Inflasi Triwulanan Kelompok Transpor, Komunikasi, dan Jasa Keuangan di Provinsi Bali (%,qtq)

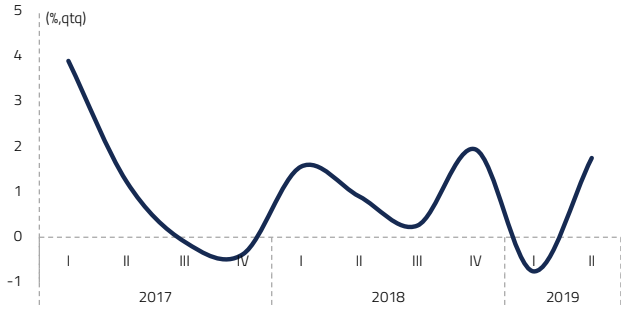

Sumber : Badan Pusat Statistik, diolah

Grafik 3.18 Inflasi Tahunan Kelompok Transpor, Komunikasi, dan Jasa Keuangan di Provinsi Bali (%,yoy)

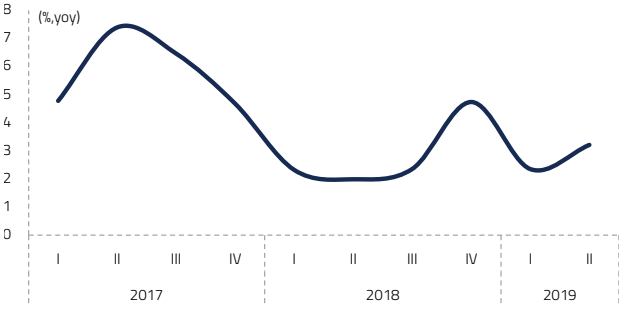

Sumber : Badan Pusat Statistik, diolah

g) Kelompok Transpor, Komunikasi dan Jasa Keuangan

Tekanan harga kelompok transpor, komunikasi, dan jasa keuangan secara tahunan meningkat dari 2,35% (yoy) menjadi 3,21% (yoy) pada triwulan II 2019, didorong oleh peningkatan tekanan harga pada hampir semua sub-kelompok yaitu sub kelompok transport, sub kelompok komunikasi dan pengiriman, serta sub kelompok sarana dan penunjang transpor. Komoditas yang mengalami peningkatan tekanan harga yang signifikan adalah pemeliharaan/*service* untuk kendaraan. Peningkatan ini sejalan dengan meningkatnya kebutuhan transportasi (umum dan pribadi) untuk mudik menjelang Lebaran.

3.2.2 Inflasi Menurut Kota

Sejak 1 Januari 2014 terdapat penambahan cakupan kota perhitungan inflasi di Bali menjadi 2 (dua) kota sampel inflasi, yaitu Denpasar dan Singaraja. Berdasarkan SBH 2012, bobot Kota Denpasar terhadap inflasi nasional adalah 1,78%, sedangkan bobot Kota Singaraja adalah 0,58%. Karakteristik inflasi Kota Denpasar maupun Singaraja terutama dipengaruhi oleh kelompok pengeluaran bahan makanan, makanan jadi dan perumahan sebagaimana tercermin pada dominannya bobot kelompok pengeluaran tersebut dalam keranjang IHK Kota Denpasar maupun Singaraja.

Grafik 3.19. Bobot Tahun Dasar (2012=100) Kelompok Pengeluaran Kota Denpasar

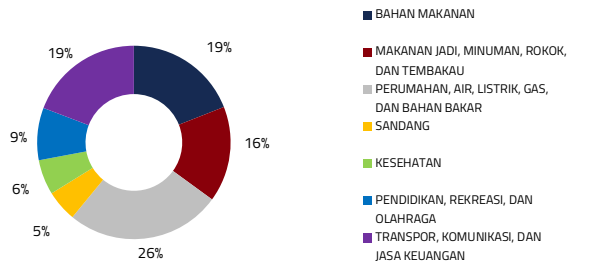

Sumber : Badan Pusat Statistik, diolah

Grafik 3.20. Bobot Tahun Dasar (2012=100) Kelompok Pengeluaran Kota Singaraja

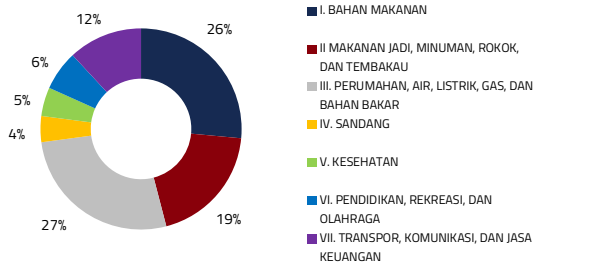

Sumber : Badan Pusat Statistik, diolah

a) Kota Denpasar

Berdasarkan tren perkembangan inflasi Kota Denpasar, inflasi pada triwulan II 2019 meningkat dari 2,05% (yoy) pada triwulan I 2019 menjadi 2,15% (yoy) pada triwulan II 2019. Peningkatan tekanan harga terjadi di beberapa kelompok yaitu kelompok makanan jadi, minuman & tembakau; kelompok perumahan, air, listrik; kelompok pendidikan, rekreasi, & olahraga; serta kelompok transport, komunikasi & jasa keuangan. Peningkatan tekanan harga sub kelompok makanan jadi seiring dengan meningkatnya harga ikan segar, bumbu-bumbuan dan sayur-sayuran. Sementara itu, peningkatan tekanan harga yang lebih tinggi tertahan oleh penurunan tekanan harga pada kelompok bahan makanan, kelompok sandang, dan kelompok kesehatan. Untuk tekanan harga kelompok bahan makan yang mengalami penurunan dibanding triwulan sebelumnya menunjukkan terjaganya pasokan bahan makanan di Bali ditengah meningkatnya permintaan menjelang lebaran.

Secara bulanan, beberapa komoditas yang menyumbang inflasi triwulan II 2019 di Denpasar baik berasal dari komponen *volatile food* (VF), komponen *administered price* (AP), maupun komponen inti (CI). Beberapa komoditas VF yang menjadi penyumbang utama inflasi bulanan pada triwulan II 2019 antara lain komoditas bawang merah, bawang putih, cabai merah, ikan tongkol, apel, jeruk. Sumbangan inflasi VF di triwulan II terjadi karena panen yang terlambat untuk sejumlah komoditas yaitu cabai maupun bawang merah. Selain itu, inflasi VF untuk komoditas bawang putih disebabkan oleh berkurangnya pasokan karena terlambat melakukan impor sebagai dampak dari ketentuan pengeluaran izin impor. Namun demikian, tekanan inflasi bawang putih telah berkurang seiring dengan telah dilakukannya impor bawang putih.

Tabel 3.1. Perkembangan Inflasi Kota Denpasar Per Kelompok Pengeluaran

No	Kelompok Barang	2018												2019					
		TW I			TW II			TW III			TW IV			TW I			TW II		
		mtm	ytd	yoy	mtm	ytd	yoy	mtm	ytd	yoy	mtm	ytd	yoy	mtm	ytd	yoy	mtm	ytd	yoy
1	Bahan Makanan	0,38	5,26	4,27	0,38	2,18	7,36	(2,70)	3,55	7,04	2,69	5,86	5,86	0,73	(0,05)	0,52	(0,23)	(0,62)	(0,15)
2	Makanan Jadi, Minuman, Rokok dan Tembakau	(0,12)	0,82	6,82	1,25	5,36	5,14	0,06	2,00	4,94	(0,01)	2,39	2,39	0,27	2,22	3,82	0,26	2,96	4,01
3	Perumahan, Air, Listrik, Gas dan Bahan Bakar	(0,03)	0,67	1,84	(0,06)	1,36	1,24	0,24	1,22	1,70	0,28	1,56	1,56	(0,09)	0,29	1,17	0,08	0,50	1,35
4	Sandang	0,67	0,22	(0,35)	0,24	0,70	0,79	(0,81)	0,62	(0,65)	(0,61)	1,47	1,47	(0,13)	0,57	1,83	0,82	1,36	1,68
5	Kesehatan	1,12	1,44	2,35	(0,21)	1,15	2,93	0,41	3,80	4,39	0,19	2,69	2,69	0,29	1,25	2,50	0,13	1,59	2,13
6	Pendidikan, Rekreasi dan Olah Raga	0,08	0,23	2,75	-	2,15	3,31	0,56	3,10	4,12	0,02	3,89	3,89	(0,08)	0,19	3,85	(0,12)	0,73	3,91
7	Transpor, Komunikasi dan Jasa Keuangan	(0,05)	1,67	2,39	(0,07)	0,71	2,06	(0,40)	2,77	2,29	1,05	4,86	4,86	0,34	(0,73)	2,39	(0,10)	1,18	3,38
	UMUM	0,15	1,75	3,23	0,51	2,62	3,48	(0,52)	2,37	3,61	0,77	3,40	3,40	0,24	0,42	2,05	0,04	0,94	2,15

Sumber : Badan Pusat Statistik, diolah

Tabel 3. 2 Ranking Komoditas Berdasarkan Andil Inflasi/Deflasi (yoy) di Kota Denpasar Tw II 2019

No	Komoditas	No	Komoditas
April			
	Inflasi		Deflasi
1	Bawang Merah	1	Daging Ayam Ras
2	Bawang Putih	2	Beras
3	Tarif Angkutan Udara	3	Ikan Tongkol Pindang
4	Sepeda Motor	4	Minyak Goreng
5	Biaya Bimbingan Belajar	5	Semen
Mei			
	Inflasi		Deflasi
1	Biaya Pemeliharaan	1	Bawang Merah
2	Tarif Angkutan Antar Kota	2	Daging Ayam Ras
3	Air Kemasan	3	Bayam
4	Jeruk	4	Ikan Tongkol
5	Pepaya	5	Ikan Tongkol Pindang
Juni			
	Inflasi		Deflasi
1	Cabai Merah	1	Beras
2	Ika Tongkol	2	Bawang Merah
3	Apel	3	Bawang Putih
4	Kue Basah	4	Cabai Rawit
5	Jeruk	5	Daging Babi

Sumber : Badan Pusat Statistik, diolah

Inflasi kelompok *administered prices*, terutama disebabkan oleh peningkatan tekanan harga tarif angkutan udara . Kenaikan ini didorong oleh kebijakan dari maskapai terutama maskapai *low cost carrier* (LCC) yang tidak lagi menjual tiket dengan tarif mendekati batas bawah serta kebijakan bagasi berbayar.

Pada kelompok inti, tekanan inflasi Denpasar bersumber dari kelompok transpor, komunikasi, dan jasa keuangan yaitu biaya pemeliharaan dan tarif angkutan antar kota. Hal ini didorong oleh meningkatnya permintaan akan transportasi (umum dan pribadi) untuk kebutuhan mudik disaat Lebaran.

b) Kota Singaraja

Sebagaimana tren inflasi di Denpasar, Inflasi di Singaraja juga meningkat dari 0,97% (yoy) pada triwulan I 2019 menjadi 2,11% (yoy) pada triwulan II 2019, seiring meningkatnya tekanan harga pada semua kelompok, kecuali kelompok pendidikan, rekreasi, dan olah raga. Peningkatan tekanan harga terbesar terjadi pada kelompok bahan makanan. Peningkatan tekanan harga bahan makanan didorong oleh peningkatan harga beras yang pada triwulan I 2019 sempat mengalami deflasi.

Di Singaraja, komoditas yang menjadi penyumbang utama inflasi bulanan pada triwulan II 2019 didominasi kelompok *volatile food*, seperti sub-kelompok bumbu-bumbuan (bawang merah dan bawang putih), sub kelompok sayur-sayuran (bayam, tomat sayur), sub-kelompok buah-buahan (apel), daging ayam ras, serta telur ayam ras. Tidak ada komoditas kelompok *administered price* yang menjadi penyumbang utama inflasi bulanan pada triwulan II 2019 di Singaraja. Sementara itu, dari kelompok inflasi inti yang menjadi penyumbang utama inflasi bulanan di triwulan IV 2018 adalah angkutan antar kota dan makanan ringan.

Tabel 3. 3 Perkembangan Inflasi Kota Singaraja Per Kelompok Pengeluaran

No	Kelompok Barang	2018												2019					
		TW I			TW II			TW III			TW IV			TW I			TW II		
		mtm	ytd	yoy	mtm	ytd	yoy	mtm	ytd	yoy	mtm	ytd	yoy	mtm	ytd	yoy	mtm	ytd	yoy
1	Bahan Makanan	2,00	5,39	(1,49)	0,16	1,05	4,65	(2,24)	2,37	6,79	2,97	4,33	4,33	1,06	0,90	(0,12)	(0,08)	2,30	3,06
2	Makanan Jadi, Minuman, Rokok dan Tembakau	(0,01)	0,01	1,79	0,34	3,55	1,66	-	0,67	1,34	(0,06)	0,77	0,77	0,46	1,04	1,80	0,20	1,60	1,87
3	Perumahan, Air, Listrik, Gas dan Bahan Bakar	(0,95)	(0,83)	5,38	0,15	0,51	2,86	(0,51)	(3,27)	0,93	(0,01)	(3,07)	(3,07)	(0,14)	0,62	(1,65)	0,01	0,69	(0,86)
4	Sandang	0,33	1,40	6,61	(0,11)	(1,55)	4,52	0,50	2,73	4,13	0,38	4,42	4,42	0,23	1,04	4,05	0,46	2,27	4,74
5	Kesehatan	0,45	1,26	5,40	0,21	1,95	3,95	0,08	1,92	2,35	0,23	2,67	2,67	0,11	0,92	2,32	0,06	1,62	2,76
6	Pendidikan, Rekreasi dan Olah Raga	0,24	0,66	8,31	0,18	1,52	8,87	0,03	9,87	10,09	0,23	10,51	10,51	(0,08)	(0,30)	9,45	(0,08)	(0,43)	8,71
7	Transpor, Komunikasi dan Jasa Keuangan	0,41	1,05	1,97	0,12	1,22	1,68	0,14	2,62	2,68	0,08	4,16	4,16	(0,16)	(0,87)	2,19	(0,18)	0,04	2,37
	UMUM	0,38	1,50	2,48	0,33	1,78	3,43	(0,71)	0,97	3,54	0,84	1,88	1,88	0,35	0,59	0,97	0,02	1,29	2,11

Sumber : Badan Pusat Statistik, diolah

Tabel 3. 4 Ranking Komoditas Berdasarkan Andil Inflasi/Deflasi di Kota Singaraja Triwulan II 2019

No	Komoditas	No	Komoditas
April			
	Inflasi		Deflasi
1	Bawang Merah	1	Beras
2	Tomat Sayur	2	Tauge
3	Telur Ayam Ras	3	Daging Ayam Ras
4	Apel	4	Ikan Layang
5	Bawang Putih	5	Kentang
Mei			
	Inflasi		Deflasi
1	Bawang MErah	1	Beras
2	Angkutan Antar Kota	2	Cabai Rawit
3	Daging Ayam Ras	3	Makanan Ringan
4	Apel	4	Ikan Tongkol
5	Bawang Putih	5	Tepung Terigu
Juni			
	Inflasi		Deflasi
1	Ketela Pohon	1	Cabai Rawit
2	Udang Basah	2	Daging Ayam Ras
3	Cumi-Cumi	3	Teri Segar
4	Bayam	4	Buncis
5	Makanan Ringan	5	Telur Ayam Ras

Sumber : Badan Pusat Statistik, diolah

3.3. DISAGREGASI INFLASI

Berdasarkan disagregasi inflasi, meningkatnya tekanan inflasi tahunan pada triwulan II 2019 dikontribusikan dari komponen disagregasi *volatile food* dan *core*, namun tertahan oleh penurunan tekanan inflasi dari komponen *administered price*.

Grafik 3.21. Perkembangan Inflasi Berdasarkan Penyebabnya (% yoy)

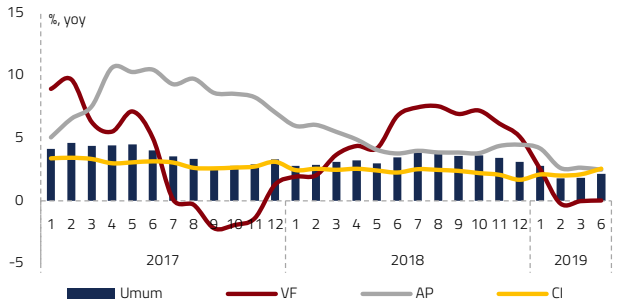

Sumber : Badan Pusat Statistik, diolah

Grafik 3.22. Perkembangan Inflasi Berdasarkan Penyebabnya (% mtm)

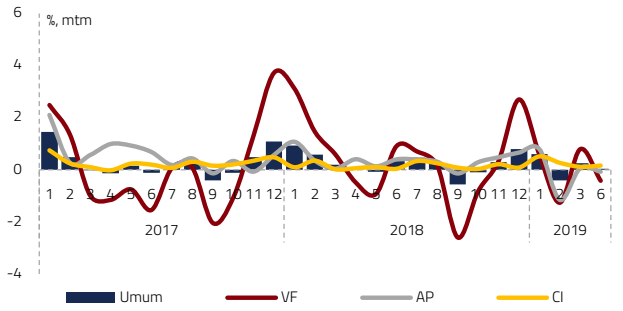

Sumber : Badan Pusat Statistik, diolah

Grafik 3.23. Perkembangan Harga Minyak Mentah

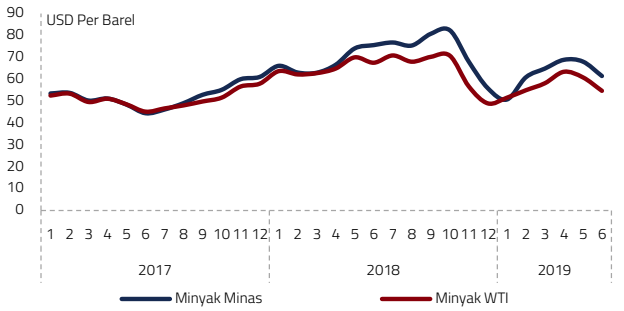

Sumber : Bloomberg

a) *Volatile Food*

Tekanan inflasi kelompok *volatile food* pada triwulan II 2019 meningkat dari -0,02% (yoy) pada triwulan I 2019 menjadi 0,03% (yoy). Peningkatan tersebut terutama didorong oleh peningkatan sumbangan komoditas bawang merah akibat terbatasnya pasokan karena mundurnya masa panen ditengah meningkatnya permintaan saat Ramadhan dan Idul Fitri. Namun peningkatan tekanan inflasi *volatile food* lebih lanjut tertahan oleh komoditas beras dan daging ayam ras yang mengalami penurunan harga pada triwulan laporan.

b) *Administered Prices*

Inflasi kelompok administered price (AP) pada triwulan II 2019 di Provinsi Bali tercatat sebesar 2,49% (yoy), lebih rendah dibanding triwulan sebelumnya yang sebesar 2,65% (yoy). Rendahnya inflasi AP ini disebabkan oleh dampak lanjutan dari penurunan tarif listrik seiring adanya kebijakan PLN yang menurunkan tarif listrik untuk pelanggan 900 VA (Rumah Tangga Mampu) per 1 Maret 2019 dari Rp1.352 per kWh menjadi Rp1.300 per kWh. Selain itu, tekanan inflasi AP yang menurun juga disebabkan oleh tidak adanya kenaikan baik harga BBM Subsidi maupun BBM Non Subsidi seiring dengan tren harga minyak dunia yang pada triwulan II cenderung menurun.

Penurunan tekanan inflasi lebih lanjut pada kelompok *administered price* tertahan oleh kenaikan tekanan inflasi komoditas angkutan udara. Hal ini disebabkan oleh kebijakan dari maskapai penerbangan yang tidak lagi menjual tiket dengan tarif mendekati batas bawah.

c) *Core Inflation*

Inflasi inti pada triwulan II 2019 mengalami peningkatan, yaitu dari 2,12% (yoy) menjadi 2,57% (yoy) yang dipengaruhi oleh peningkatan permintaan saat Ramadhan dan Idul Fitri. Harga emas perhiasan menjadi salah satu pendorong peningkatan tekanan inflasi inti. Peningkatan kenaikan harga emas perhiasan sejalan dengan harga emas internasional yang menunjukkan tren peningkatan pada triwulan II 2019. Meskipun terjadi peningkatan tekanan inflasi inti pada triwulan laporan, ekspektasi konsumen masih terjaga. Hal ini tergambar dari hasil survei konsumen Bank Indonesia pada triwulan laporan yang menunjukkan kecenderungan ekspektasi penurunan harga.

Grafik 3.24. Harga Emas Internasional

Sumber : Bloomberg

Grafik 3.25. Ekspektasi Konsumen

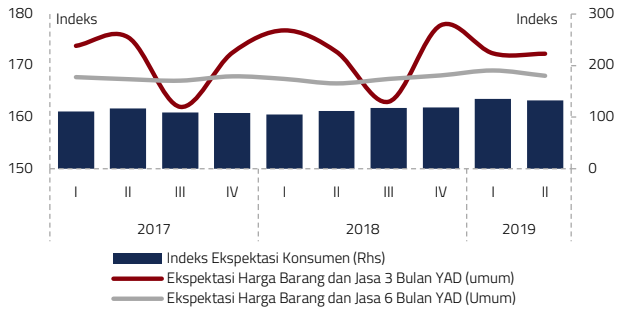

Sumber : Bloomberg

Grafik 3.26. Perkembangan Inflasi Pedesaan (mtm) dan Nilai Tukar Petani (NTP)

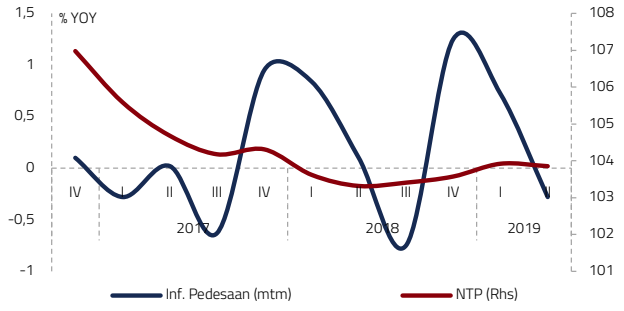

Sumber : Bloomberg

Grafik 3.27. Perkembangan Inflasi Pedesaan (ytd)

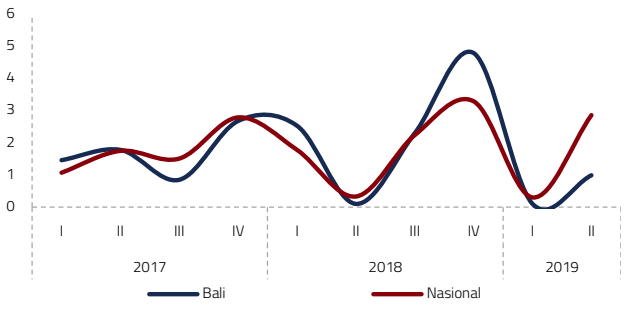

Sumber : Bloomberg

3.4. INFLASI PERDESAAN

Sebagaimana IHK yang menunjukkan kenaikan harga secara umum di perkotaan, Inflasi Perdesaan terdiri dari tujuh kelompok pengeluaran, yaitu kelompok bahan makanan, kelompok makanan jadi, kelompok perumahan, kelompok sandang, kelompok kesehatan, kelompok pendidikan, rekreasi dan olahraga, serta kelompok transportasi dan komunikasi. Inflasi perdesaan Bali di triwulan II 2019 secara bulanan mengalami deflasi sebesar -0,28% (mtm), lebih rendah dibanding triwulan sebelumnya yang inflasi 0,72% (mtm), namun lebih tinggi dibanding nasional yang inflasi 0,57% (mtm). Sementara itu, tingkat inflasi perdesaan Bali secara kumulatif pada triwulan laporan adalah sebesar 0,26% (ytd), lebih rendah dibanding inflasi perdesaan nasional yang sebesar 0,57% (ytd).

3.5. KOORDINASI PENGENDALIAN INFLASI

Dalam rangka pengendalian inflasi provinsi Bali, TPID Provinsi Bali dan TPID Kabupaten/Kota terus meningkatkan koordinasi secara intensif. TPID di Provinsi Bali baik di tingkat provinsi maupun Kabupaten/kota telah berkoordinasi untuk menyusun program pengendalian inflasi tahun 2019 dalam sebuah *Roadmap* Pengendalian Inflasi Tahun 2019. Program kerja TPID akan ditujukan pada seluruh aspek mencakup produksi, distribusi, serta menjaga ekspektasi masyarakat melalui sosialisasi dan publikasi serta memberikan himbauan (*moral suasion*) kepada masyarakat terkait upaya menjaga stabilitas harga. Upaya stabilisasi harga melalui pelaksanaan pasar murah dan operasi pasar insidentil juga dilanjutkan sehingga dapat menjadi jangkar dalam penetapan harga dan menahan laju inflasi yang bersumber dari sisi permintaan, sisi penawaran, dan ekspektasi pelaku ekonomi.

Roadmap pengendalian inflasi Provinsi Bali tahun 2019-2021 terbagi atas *key strategies* 4K, yaitu keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi dan komunikasi efektif. Dalam hal menjaga keterjangkauan harga, program yang dilakukan antara lain:

1. Stabilisasi Harga, yang dilakukan melalui optimalisasi peran pasar murah / operasi pasar, penertiban penerapan batas HET (harga eceran tertinggi), himbuan kepada supermarket dan distributor untuk menerapkan program diskon pada waktu tertentu serta *monitoring* harga melalui komunikasi dan koordinasi termasuk melalui pemanfaatan SiGapura

2. Mengelola Permintaan yang dilakukan melalui program penganekaragaman konsumsi pangan masyarakat, himbauan belanja bijak pada saat hari besar keagamaan, sosialisasi terkait komoditas pangan substitusi dari komoditas yang ada (seperti daging ayam beku sebagai pengganti daging ayam segar) serta sinergi dengan sektor pariwisata dalam rangka pemasaran dan pemanfaatan produk pertanian, perikanan dan peternakan lokal Bali

Upaya dalam menjaga ketersediaan pasokan dilakukan dengan program memperkuat produksi, cadangan pangan pemerintah, dan pengelolaan impor-ekspor pangan serta program kelembagaan dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Peningkatan produksi, yang dilakukan melalui peningkatan produktivitas dan perluasan areal dengan optimalisasi bantuan sarana produksi, pengembangan pertanian organik, pengembangan ternak unggulan lokal Bali, pengembangan Teknologi sistem SALIBU (Tanam Sekali Panen Berkali-kali), pengembangan SRI (*System Rice Intensification*) dan pengembangan Pertanian *Hidroponic* Perkotaan (*Urban Farming*)
2. Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya
3. Penguatan cadangan pangan yang dilakukan dengan menjaga level CBP (Cadangan Beras Pemerintah) dan mendukung penguatan mekanisme peningkatan CBP ke level 1-1,5 juta ton
4. Program kelembagaan yang dilakukan melalui pengembangan agribisnis pertanian, perluasan implementasi Asuransi Usaha Pertanian (AUTP), pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan dan pengembangan kelembagaan Subak sebagai Koperasi Tani

Untuk menjaga kelancaran distribusi, akan dilakukan program kerjasama antar daerah dan peningkatan infrastruktur perdagangan. Dalam rangka mendorong kerja sama perdagangan antar daerah, langkah-langkah yang akan dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Pengembangan model bisnis kerja sama perdagangan antar daerah dan fasilitasi kerja sama antar daerah, antara lain dengan mengoptimalkan peran swasta dan BUMD
2. Optimalisasi pemanfaatan pasar lelang *forward* untuk pemenuhan komoditas pangan strategis serta pemasaran produk unggulan daerah
3. Kerjasama antar Kabupaten/Kota yang mengalami surplus dan defisit di Provinsi Bali untuk pemenuhan komoditas pangan strategis

Sementara untuk meningkatkan infrastruktur perdagangan, langkah-langkah yang akan dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Mendorong pemanfaatan Sub Terminal Agribisnis (STA) sebagai salah satu upaya distribusi komoditas pangan
2. Pengembangan pasar dengan menerapkan sistem pasar lelang *online*
3. Pembangunan/revitalisasi pasar pasar tradisional di Kabupaten/Kota di provinsi Bali

Sementara itu komunikasi efektif dilakukan melalui perbaikan kualitas data dan memperkuat koordinasi pusat dan daerah. Perbaikan kualitas data dilakukan

dengan penyusunan kebijakan satu peta lahan pertanian, penguatan data PIHPS yang terintegrasi dari konsumen, produsen dan pedagang besar, serta penggunaan kajian sebagai dasar pembuatan kebijakan. Sementara untuk memperkuat koordinasi pusat dan daerah akan dilakukan melalui *capacity building* anggota TPID (termasuk studi banding dan rapat koordinasi) serta penyusunan rekomendasi dalam hal pengaturan kebijakan harga *administered prices* bersama dengan instansi lain yang mendukung tercapainya sasaran inflasi IHK. Salah satu rekomendasinya adalah menjaga tarif angkutan udara pada batas atas dan batas bawah.

Sepanjang triwulan II 2019, TPID di Bali melakukan sejumlah kegiatan dalam rangka pengendalian inflasi. Pada 9 April 2019, TPID Kabupaten Badung menyelenggarakan Rapat Koordinasi yang dipimpin oleh Asisten II Bidang Perekonomian, bersama perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali. Dalam rapat ini perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali menyampaikan langkah-langkah pengendalian inflasi sebagaimana dalam *roadmap* pengendalian inflasi Bali. Dalam kesepatan ini juga hadir narasumber dari BPS yang menyampaikan perkembangan inflasi terkini. Pada kesempatan ini juga dibahas upaya-upaya persiapan mengikuti penilaiann TPID Award 2019. Dalam kesepatan ini juga hadir narasumber dari BPS yang menyampaikan perkembangan inflasi terkini. Pada rapat ini, sejumlah OPD yang hadir antara lain Perumda Pasar, Dinas Perindustrian, Dinas Pertanian, Dinas Perhubungan dan Kapolresta Bali. Selain itu, dalam rangka persiapan menghadapi bulan puasa dan Idul Fitri, pada tanggal 25 April 2019 TPID Provinsi Bali bersama perwakilan Kementerian Perdagangan melaksanakan rapat koordinasi stabilisasi harga dan ketersediaan pasokan. Rapat tersebut dipimpin oleh Staf Ahli Bidang Perdagangan Jasa Kementerian Perdagangan (Kemendag) di Ruang Rapat Dinas Perdagangan dan Perindustrian Provinsi Bali. Hadir dalam rapat dimaksud Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali, Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Provinsi Bali, Kanit IV Subdit I Ditreskrimsus Polda Bali, Kepala Bulog Divre Bali, OPD terkait, Dinas Perdagangan Kab/Kota se Provinsi Bali, swalayan/ritel modern, pedagang distributor dan PD Pasar. Dalam rapat dimaksud, dibahas langkah-langkah untuk menjaga ketersediaan pasokan barang kebutuhan pokok menjelang puasa dan Idul Fitri.

Tabel 3.5. Kegiatan TPID Triwulan II 2019

No	TPID/KEGIATAN	TANGGAL	AGENDA	KETERANGAN
Rapat Koordinasi				
1	TPID Kabupaten Badung	09-Apr-19	High Level Meeting dalam rangka penyiapan dokumen penialain TPID Award 2019	Dipimpin oleh Asisten II Bidang Perekonomian bersama perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali, dihadiri oleh narasumber dari BPS dengan peserta OPD terkait antara lain Perumda Pasar, Dinas Perindustrian, Dinas Pertanian, Dinas Perhubungan, Kalpoersta Bali
2	Rapat Koordinasi TPID Provinsi	25-Apr-19	Stabilisasi Harga dan Ketersediaan Pasokan Barang Kebutuhan Pokok Menjelang Puasa & Idul Fitri	Dipimpin Staf Ahli Bidang Perdagangan, Kementerian Perdagangan, bersama perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali, dihadiri Dinas Perdagangan & Perindustrian Provinsi Bali, Bulog Divre Bali, Pedagang Distributor dan PD Pasar
3	HLM TPID Kabupaten Badung	5 Mei 2019	Upaya Pengendalian Harga Saat HBKN	Dipimpin Bupati Badung
4	HLM TPID Kota Denpasar	9 Mei 2019	Upaya Pengendalian Harga Saat HBKN	Dipimpin Sekda Kota Denpasar
5	HLM TPID Kabupaten Jembrana	14 Mei 2019	Upaya Pengendalian Harga Saat HBKN	Dipimpin Sekda Kabupaten Jembrana
6	HLM TPID Kabupaten Gianyar	17 Mei 2019	Upaya Pengendalian Harga Saat HBKN	Dipimpin Sekda Kabupaten Gianyar
7	HLM TPID Kabupaten Karangasem	23 Mei 2019	Upaya Pengendalian Harga Saat HBKN	Dipimpin Sekda Kabupaten Karangasem
Pasar Murah, Operasi Pasar, Pemantauan Harga dan Sosialisasi Pengendalian Inflasi				
1	Pasar Kreneng	26-Apr-19	Pasar Murah	Disperindag Provinsi Bali
2	Pasar Kreneng	2-9 Mei 2019	Pasar Murah	Bulog Divre Bali
3	Pasar Badung	3,6,8,13,17,22 Mei 2019	Pasar Murah	Bulog Divre Bali
4	Pasar Gn. Agung	3-9,13-16,22-23 Mei 2019	Pasar Murah	Bulog Divre Bali
5	Desa Wanasari	7 Mei 2019	Pasar Murah	TPID Kota Denpasar
6	Pasar Banyuasri	12 Mei 2019	Pasar Murah	TPID Kab. Buleleng
7	Pasar Anyar	13 Mei 2019	Pasar Murah	TPID Kab. Buleleng
8	Desa Taman Abian Semal	13 Mei 2019	Pasar Murah	TPID Kab. Buleleng
9	Banjar Dinas Banutan, Desa Banutan	14 Mei 2019	Pasar Murah	TPID Kab. Karangasem
10	Pasar Murah Wantilan BR Tegal Baler	16 Juni 2019	Pasar Murah	TPID Kota Denpasar
11	Pasmur Tabanan	21 Juni 2019	Pasar Murah	Polres Tabanan

BAB IV

STABILITAS KEUANGAN DAERAH, PENGEMBANGAN AKSES KEUANGAN DAN UMKM

- Sejalan dengan masih tumbuh kuatnya pertumbuhan ekonomi Bali, pertumbuhan kredit menunjukkan akselerasi pada triwulan II 2019 dengan tumbuh sebesar 7,97%, meningkat dibanding pertumbuhan triwulan sebelumnya yang sebesar 5,44% (yoy). Sejalan dengan kondisi tersebut, kualitas kredit relatif terjaga.
- DPK perbankan juga menunjukkan akselerasi pada triwulan II 2019 dengan tumbuh sebesar 8,93% (yoy), meningkat dibandingkan triwulan I 2019 yang tercatat sebesar 8,01% (yoy).
- Pertumbuhan kredit korporasi, rumah tangga dan UMKM pada triwulan II 2019 menunjukkan akselerasi dibanding triwulan sebelumnya. Sementara kualitas kredit rumah tangga dan UMKM dapat tetap terjaga, namun kualitas kredit korporasi mengalami penurunan tercermin dari peningkatan NPL.

7,97% (yoy) triwulan II 2019	8,93% (yoy) triwulan II 2019	81,71% (yoy) triwulan II 2019	3,01% triwulan II 2019	14,46% (yoy) 8,63% triwulan II 2019	8,01% (yoy) 2,54% triwulan II 2019	7,51% (yoy) 3,25% triwulan II 2019
Pertumbuhan Kredit Bank Umum 5,44% (yoy) triwulan I 2019	Pertumbuhan DPK Bank Umum 8,01% (yoy) triwulan I 2019	LDR Bank Umum 81,89% (yoy) triwulan I 2019	NPL Bank Umum 3,03% (yoy) triwulan I 2019	Pertumbuhan Kredit Korporasi 5,38% (yoy) NPL Kredit Korporasi 7,95% triwulan I 2019	Pertumbuhan Kredit RT 6,29% (yoy) NPL Kredit Kredit RT 2,33% triwulan I 2019	Pertumbuhan Kredit UMKM 5,79% (yoy) NPL Kredit UMKM 3,13% triwulan I 2019

Jumlah bank umum dan BPR yang beroperasi di Bali relatif stabil. Aset perbankan mengalami akselerasi seiring dengan peningkatan pertumbuhan kredit perbankan. Sementara itu dana pihak ketiga di perbankan mengalami perlambatan. Kualitas kredit perbankan di Bali dilihat dari NPL berada pada level yang aman. Korporasi di Bali pada triwulan II 2019 mencatatkan kinerja yang semakin baik dilihat dari penjualan baik untuk tujuan domestik maupun ekspor. Sementara itu dari sisi perbankan terhadap korporasi, meskipun proporsinya relatif kecil terhadap total kredit perbankan, namun kualitas kreditnya perlu diwaspadai. Keuangan rumah tangga pada triwulan II 2019 juga menunjukkan kinerja yang lebih baik dibanding triwulan sebelumnya. Sektor rumah tangga memerlukan perhatian khusus mengingat proporsinya yang relatif besar dalam total kredit perbankan di Bali. Akses keuangan penduduk Bali terhadap perbankan mengalami peningkatan yang signifikan baik dilihat dari dana pihak ketiga di perbankan maupun kredit perbankan.

4.1. ASESMEN INTERMEDIASI PERBANKAN

4.1.1. Jaringan Kantor dan Kinerja Perbankan

Pada triwulan II 2019, bank umum dan BPR yang beroperasi di Bali berjumlah 55 bank umum dan 136 BPR. Sementara itu jumlah kantor bank umum adalah sebanyak 653 kantor bank. Total aset perbankan (bank umum dan BPR) di Bali pada triwulan II 2019 sebesar Rp130,2 triliun, lebih tinggi dibanding triwulan I 2019 (Rp125,06 triliun). Aset perbankan tersebut terakselerasi dari 4,50% (yoy) pada triwulan I 2019 menjadi 7,64% (yoy) pada triwulan II 2019. Total kredit perbankan (bank umum dan BPR) terakselerasi dari triwulan sebelumnya yaitu dari 5,93% (yoy) dengan nominal Rp87,93 triliun menjadi 8,28% (yoy) pada triwulan II 2019 dengan nominal Rp90,86 triliun. Namun demikian, pertumbuhan total DPK (bank umum dan BPR) melambat dibandingkan triwulan lalu dari tumbuh 8,84% (yoy) atau sebesar Rp105,65 triliun menjadi tumbuh 8,75% (yoy) pada triwulan laporan (nominal Rp109,43 triliun). Dari sisi kualitas kredit, NPL perbankan (bank umum dan BPR) pada triwulan II 2019 masih dalam batas aman pada level 3,77%, relatif sama dengan level pada triwulan I 2019 yang sebesar 3,73%.

4.1.2. Kinerja Bank Umum

Secara umum, perkembangan kinerja bank umum di Bali pada triwulan II 2019 menunjukkan peningkatan. Pertumbuhan aset bank umum di Bali pada triwulan II 2019 terakselerasi menjadi 7,02% (yoy) dengan nominal Rp113,92 triliun, dari sebelumnya 3,77% (yoy) dengan nominal Rp109,29 triliun pada triwulan I 2019. Penghimpunan dana dan penyaluran kredit bank umum terakselerasi dibanding triwulan lalu. Kualitas kredit juga menunjukkan perbaikan pada triwulan laporan.

4.1.2.1 Dana Pihak Ketiga

Dana Pihak Ketiga (DPK) yang berhasil dihimpun oleh bank umum pada triwulan II 2019 mengalami akselerasi dibanding periode sebelumnya, yaitu dari 8,01% (yoy) di triwulan I 2019 menjadi 8,93% (yoy) di triwulan II 2019 dengan nominal sebesar Rp97,7 triliun. Akselerasi kinerja tersebut bersumber dari akselerasi pertumbuhan deposito, namun tertahan oleh perlambatan pertumbuhan tabungan dan giro.

Tabel 4.1. Perkembangan Jumlah Bank dan Jaringan Kantor Bank di Bali

KATEGORI	2017	2018				2019	
		I	II	III	IV	I	II
Bank Umum	55	55	55	55	55	55	55
Jumlah Kantor	702	701	700	697	656	657	653
BPR	136	136	136	136	136	136	136
Jumlah Kantor	323	324	324	325	329	329	329
Total Bank Umum & BPR	191	191	191	191	191	191	191
Total Jumlah Kantor	1025	1025	1024	1022	985	986	982

Sumber: LBU dan LBBR Bank Indonesia, diolah

Tabel 4.2. Perkembangan Indikator Bank Umum di Bali

Indikator Bank Umum	2017	2018				2019	
		I	II	III	IV	I	II
Aset (Rp milyar)	103502	105319	106450	109992	112409	109293	113918
g Asset (%, yoy)	3,37	9,80	8,55	6,34	8,61	3,77	7,02
Kredit Umum (Rp milyar)	73041	73253	73932	75499	76667	77238	79824
Modal Kerja (Rp milyar)	28069	28235	28386	28715	29894	29046	29717
Investasi (Rp milyar)	16599	16547	16668	17342	16841	18146	19315
Konsumsi (Rp milyar)	28372	28471	28878	29441	29933	30046	30793
g Kredit Umum (%, yoy)	5,98	5,25	3,74	5,03	4,96	5,44	7,97
g Modal Kerja (%, yoy)	4,50	5,16	2,35	4,33	6,50	2,88	4,69
g Investasi (%, yoy)	2,59	1,39	2,59	4,95	1,45	9,66	15,88
g Konsumsi (%, yoy)	9,64	7,73	5,84	5,78	5,50	5,53	6,63
Jumlah Rekening Kredit Umum	571127	581473	592693	605631	608900	614402	624688
Modal Kerja	238870	247181	249001	256255	316917	260862	266973
Investasi	103685	105495	108413	111972	55852	117950	121598
Konsumsi	228572	228797	235279	237403	236130	235589	236116
NPL Kredit (%)	2,98	3,40	3,08	2,98	2,56	3,03	3,01
NPL Modal Kerja%)	3,47	4,04	4,15	4,05	3,44	4,23	4,51
NPL Investasi (%)	5,00	5,76	3,88	3,46	3,02	2,70	2,81
NPL Konsumsi (%)	1,30	1,41	1,57	1,64	1,43	2,06	1,70
Dana Pihak Ketiga (Rp milyar)	86735	87322	89689	94762	93605	94316	97696
Deposito (Rp milyar)	30843	31203	30679	31753	32236	33038	33765
Giro (Rp milyar)	13803	14275	15124	16532	14234	14926	15693
Tabungan (Rp milyar)	42089	41844	43887	46476	47135	46352	48238
g DPK (%, yoy)	9,06	7,05	7,79	8,17	7,92	8,01	8,93
g Deposito (%, yoy)	9,87	2,88	2,53	3,59	4,52	5,88	10,06
g Giro%, yoy)	4,86	-0,91	-0,36	0,95	3,13	4,56	3,76
g Tabungan(%, yoy)	9,91	13,61	15,16	14,54	11,99	10,77	9,91
Jumlah Rekening DPK	4512531	4622404	4737575	4887943	5058352	5177676	5321030
Deposito	73471	74473	75333	76447	76793	77978	79434
Giro	4328016	4433906	4546892	4692361	4860203	4975386	5114947
Tabungan	111044	114025	115350	119135	121356	124312	126649
NPL (%)	2,98	3,40	3,08	2,98	2,56	3,03	3,01
LDR	84,21	83,89	82,43	79,67	81,90	81,89	81,71

Sumber: LBU Bank Indonesia, diolah

Pada periode laporan, simpanan dalam bentuk deposito terakselerasi menjadi 10,06% (yoy) dibanding triwulan lalu yang sebesar 5,88% (yoy) didorong oleh peningkatan suku bunga deposito dari 6,30% per tahun di triwulan I 2019 menjadi 6,31% per tahun pada triwulan II 2019. Sementara itu, giro mengalami perlambatan dari sebelumnya tumbuh 4,56% (yoy) pada triwulan I 2019 menjadi 3,76% (yoy). Pertumbuhan tabungan pada triwulan I 2019 juga melambat dari 10,77% (yoy) di triwulan lalu menjadi 9,91% (yoy).

4.1.2.2 Penyaluran Kredit

Sejalan dengan kinerja penghimpunan dana, fungsi penyaluran kredit perbankan oleh bank umum juga mengalami akselerasi dibanding triwulan sebelumnya. Pada triwulan II 2019, kredit bank umum tumbuh 7,97% (yoy), lebih tinggi dibanding triwulan lalu (5,44%, yoy). Secara nominal, kredit perbankan yang disalurkan sampai dengan triwulan II 2019 mencapai Rp79,82 triliun. Akselerasi penyaluran kredit tersebut terjadi pada semua jenis penggunaan. Kredit modal kerja pada triwulan II 2019 tumbuh 4,69% (yoy), lebih tinggi dibanding triwulan lalu (2,88%, yoy). Kredit

investasi tercatat 15,88% (yoy) pada triwulan II 2019, tumbuh tinggi dibanding triwulan lalu (9,66%, yoy). Sementara kredit konsumsi tumbuh 6,63% (yoy), meningkat dibanding triwulan lalu (5,53%, yoy). Akselerasi kredit ini selaras dengan akselerasi kinerja lapangan usaha perdagangan besar dan eceran (PDRB) pada triwulan II 2019[68].

4.1.2.3 LDR dan NPL

Kinerja intermediasi perbankan yang diindikasikan oleh *Loan to Deposit Ratio* (LDR) menunjukkan sedikit penurunan dibanding periode sebelumnya. Pada triwulan II 2019 LDR bank umum di Bali mencapai 81,71%, relatif stabil dibanding triwulan sebelumnya yang sebesar 81,89%. Demikian pula kualitas kredit perbankan yang relatif stabil yang tercermin dari indikator *Non Performing Loans* (NPLs) Gross yang menunjukkan level 3,03% pada triwulan I 2019 dan 3,01% pada triwulan II 2019.

4.1.3. Kinerja Bank Perkreditan Rakyat (BPR)

Kinerja BPR pada triwulan II 2019 masih mencatatkan kinerja yang relatif stabil. Pada triwulan II 2019, penyaluran kredit BPR tumbuh 10,55% (yoy), lebih tinggi dibanding triwulan I 2019 yang tumbuh 9,65% (yoy). Demikian halnya aset BPR yang tumbuh sebesar 12,22% (yoy) dengan nominal Rp16,28 triliun, terakselerasi dibanding periode sebelumnya yang tumbuh sebesar 9,85% (yoy). Namun demikian, pertumbuhan DPK yang dihimpun BPR melambat dari 16,32% (yoy) pada triwulan I 2019 menjadi 7,32% (yoy) pada triwulan II 2019. Kualitas kredit juga mengalami penurunan yang tercermin oleh peningkatan NPL dari 8,82% pada triwulan lalu menjadi 9,23% pada triwulan laporan.

Tabel 4.3. Perkembangan Indikator BPR di Bali

Indikator BPR	2017	2018				2019	
		I	II	III	IV	I	II
Aset (Rp milyar)	14078	14350	14511	14993	15571	15763	16285
g Asset (%, yoy)	7,67	10,83	9,75	8,30	10,61	9,85	12,22
Kredit Umum (Rp milyar)	9633	9749	9985	10118	10431	10690	11039
Modal Kerja (Rp milyar)	4700	4773	4908	4929	5051	5110	5295
Investasi (Rp milyar)	1402	1405	1443	1478	1490	1576	1645
Konsumsi (Rp milyar)	3532	3571	3634	3711	3890	4003	4099
g Kredit Umum (%, yoy)	6,66	5,86	6,14	6,67	8,29	9,65	10,55
g Modal Kerja (%, yoy)	4,70	4,81	6,53	6,75	7,48	7,08	7,89
g Investasi (%, yoy)	18,53	8,95	7,88	6,65	6,28	12,15	13,99
g Konsumsi (%, yoy)	5,11	6,09	4,95	6,57	10,15	12,09	12,78
Jumlah Rekening Kredit	80822	80168	79847	79456	79834	79670	79752
Modal Kerja	21956	21591	21356	20967	20733	20183	20087
Investasi	6021	5954	5905	5784	5763	5665	5666
Konsumsi	52845	52623	52586	52705	53338	53822	53999
Dana Pihak Ketiga (Rp milyar)	9368	9746	10935	10435	10921	11336	11734
Deposito (Rp milyar)	6925	7209	8303	7634	8149	8471	8769
Tabungan (Rp milyar)	2443	2536	2632	2800	2772	2864	2965
g DPK (%, yoy)	12,13	15,13	25,33	13,04	16,58	16,32	7,32
g Deposito (%, yoy)	11,82	13,88	27,46	12,61	17,69	17,51	5,62
g Tabungan(%, yoy)	13,02	18,82	19,07	14,25	13,45	12,94	12,67
Jumlah Rekening DPK	721183	724437	724706	738481	734907	730784	658494
Deposito	663134	664468	664622	676594	672132	666626	658494
Tabungan	58049	59969	60084	61887	62775	64158	65104
NPL (%)	6,77	7,81	8,57	9,23	8,11	8,82	9,23
LDR	71,40	71,47	72,41	71,49	69,49	71,69	72,26

Sumber: LBU Bank Indonesia, diolah

68. LU Perdagangan pada triwulan II 2019 tumbuh 10,97% (yoy), terakselerasi dibanding triwulan lalu (7,96%, yoy)

Tabel 4.4. Perkembangan Indikator Bank Syariah di Bali

Indikator Bank Syariah	2017	2018				2019	
		I	II	III	IV	I	II
Aset (Rp milyar)	2010	1991	2066	2080	2040	2093	2413
g Aset (%, yoy)	6,23	-2,19	-1,09	0,57	-2,70	5,16	16,77
Pembiayaan (Rp milyar)	1656	1623	1617	1675	1721	1727	1987
g Pembiayaan (%, yoy)	-3,04	-12,84	-14,03	-9,83	-6,32	6,41	22,87
Modal Kerja (Rp milyar)	383	348	328	326	353	345	387
g Modal Kerja (%, yoy)	-33,95	-41,97	-45,81	-43,34	-35,13	-0,76	18,01
Investasi (Rp milyar)	273	282	291	285	268	250	435
g Investasi (%, yoy)	28,42	7,97	4,96	2,09	-4,26	-11,26	49,76
Konsumsi (Rp milyar)	1000	993	999	1063	1099	1132	1165
g Konsumsi (%, yoy)	9,20	-0,83	-0,04	6,10	8,61	13,94	16,64
Dana Pihak Ketiga (Rp milyar)	1094	1142	1184	1219	1258	1283	1290
g DPK (%, yoy)	29,31	22,49	26,70	26,18	23,47	12,35	8,98
Giro (Rp milyar)	94	92	97	112	126	113	106
g Giro (%, yoy)	27,48	2,02	10,50	28,81	53,03	22,42	9,53
Tabungan (Rp milyar)	483	506	511	555	602	604	607
g Tabungan (%, yoy)	27,72	16,52	18,85	29,61	35,80	19,28	18,85
Deposito (Rp milyar)	517	544	577	525	568	567	577
g Deposito (%, yoy)	31,17	33,39	38,18	16,53	15,00	4,18	0,16
NPF (%)	3,87	5,62	7,96	8,05	5,85	7,13	6,63

Sumber: LBU Bank Indonesia, diolah

4.1.4. Kinerja Bank Syariah

Kinerja Bank Syariah di Provinsi Bali pada triwulan II 2019 menunjukkan peningkatan dari sisi penyaluran pembiayaan dan kualitas kreditnya. Aset bank syariah pada triwulan laporan terakselerasi dari 5,16% (yoy) pada triwulan lalu menjadi 16,77% (yoy) triwulan laporan Penyaluran pembiayaan juga tumbuh tinggi dari 6,41% pada triwulan I 2019 menjadi 22,87% (yoy), yang bersumber dari akselerasi pada semua jenis penggunaan. Dari sisi kualitas pembiayaan terjadi peningkatan kualitas yang tercermin pada penurunan NPF dari 7,13% pada triwulan I 2019 menjadi 6,63%. Walaupun kualitas kreditnya membaik, NPF kredit Bank Syariah di Bali ini masih perlu mendapatkan perhatian khusus mengingat angkanya masih berada di atas *threshold* 5%.

Sementara itu, penghimpunan dana Bank Syariah pada triwulan laporan melambat dari 12,35% (yoy) pada triwulan lalu menjadi hanya 8,98% (yoy). Perlambatan DPK Bank Syariah ini bersumber dari perlambatan penghimpunan dana pada semua jenis dana.

4.2. ASESMEN SEKTOR KORPORASI

Korporasi di Bali pada triwulan II 2019 mencatatkan kinerja yang semakin baik dilihat dari penjualan baik untuk tujuan domestik maupun ekspor. Meskipun demikian kinerja ini perlu mendapat perhatian mengingat sektor korporasi memiliki kerentanan terhadap perekonomian. Sementara itu dari sisi perbankan, meskipun proporsinya relatif kecil terhadap total kredit perbankan, namun kualitas kreditnya perlu diwaspadai.

4.2.1. Sumber Kerentanan Sektor Korporasi

Sumber kerentanan sektor korporasi berasal dari faktor eksternal maupun domestik. Beberapa kondisi yang diindikasikan menjadi sumber kerentanan korporasi di Bali antara lain:

1. Ketergantungan Industri Terhadap Bahan Baku Impor

   Ketergantungan industri di Bali terhadap bahan baku impor cukup tinggi. Pada triwulan II 2019, impor bahan baku Bali mencapai 26,4% dari total impor senilai 24 ribu USD. Sementara itu

Grafik 4.1. Komposisi Impor Bali

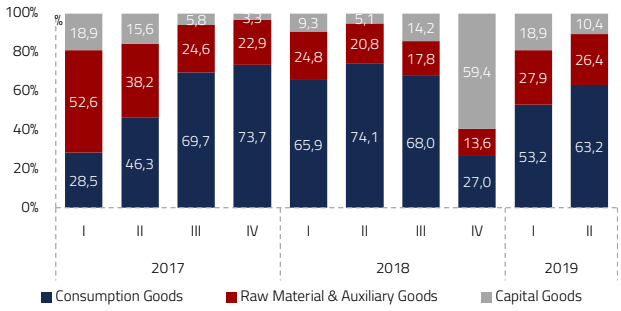

Sumber: Bea Cukai, diolah

Grafik 4.2. Tenaga Kerja Berdasarkan Pendidikan

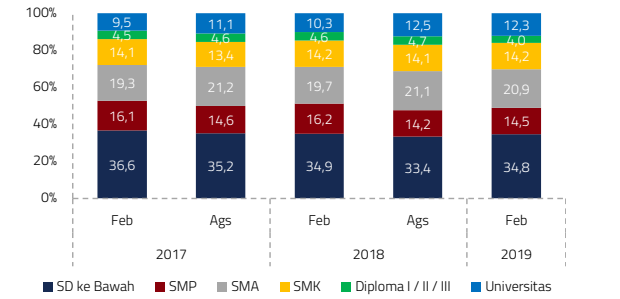

Sumber:BPS Provinsi Bali, diolah

komponen impor dalam proses produksi korporasi di Bali cukup tinggi. Hal ini dapat menjadi sumber kerentanan industri apabila produk yang bahan bakunya berasal dari impor tersebut justru dijual di pasar domestik.

Pergerakan harga bahan baku yang disebabkan baik oleh kenaikan harga internasional maupun fluktuasi nilai tukar Rupiah tidak akan serta merta dapat ditransmisikan ke harga jual apabila barang dipasarkan di pasar domestik. Lebih lanjut, ketergantungan terhadap bahan baku impor juga dapat mengganggu kinerja industri apabila terjadi depresiasi nilai tukar yang cukup dalam, kenaikan harga komoditas internasional, serta penurunan permintaan negara mitra dagang.

2. Struktur Biaya Korporasi

   Struktur biaya terbesar industri masih didominasi oleh biaya bahan baku dan biaya tenaga kerja. Berdasarkan hasil liaison ke beberapa korporasi di Bali, penggunaan mesin dan teknologi secara masif belum menjadi pilihan utama karena tingginya ketersediaan tenaga kerja serta karakteristik beberapa industri yang masih bersifat padat karya. Kondisi ini dapat menjadi sumber kerentanan industri apabila tenaga kerja yang diperoleh tidak sesuai dengan spesifikasi yang dibutuhkan sehingga produktifitas menjadi rendah. Hal ini diperkuat pula dengan struktur tenaga kerja Bali yang mayoritas SD ke bawah (lulusan SD atau lebih rendah). Produktivitas yang rendah dapat memengaruhi profitabilitas dan kinerja keuangan perusahaan.

4.2.2. Kinerja Korporasi

Korporasi di Bali pada triwulan II 2019 mencatatkan kinerja yang semakin baik. Hal ini tercermin pada hasil liaison Bank Indonesia Provinsi Bali yang menunjukkan peningkatan dalam skala *likert* penjualan domestik dan ekspor pada triwulan ini dibandingkan triwulan lalu. Pada triwulan II 2019, skala *likert* penjualan domestik tercatat sebesar 1,19 poin, lebih tinggi dibanding triwulan I 2019 yang hanya sebesar 1,14 poin. Demikian halnya dengan skala *likert* penjualan ekspor yang pada triwulan II 2019 tercatat sebesar 0,63 poin, lebih tinggi dibanding triwulan I 2019 yang hanya sebesar 0,18 poin. Peningkatan skala *likert* penjualan ekspor dibanding triwulan lalu sejalan dengan akselerasi pertumbuhan nilai ekspor barang provinsi Bali ke luar negeri yang pada triwulan laporan tercatat tumbuh 7,43% (yoy), lebih tinggi dibanding triwulan lalu sebesar 4,61%, yoy. Sementara itu, peningkatan penjualan domestik sejalan dengan peningkatan indeks keyakinan konsumen (IKK) dan indeks keadaan ekonomi (IKE) pada triwulan II 2019 yang masing-masing sebesar 123,33 dan 114,15, lebih tinggi dibanding triwulan I 2019 yang masing-masing sebesar 120,39 dan105,68.

Grafik 4.3. Perkembangan Nilai Ekspor Barang LN

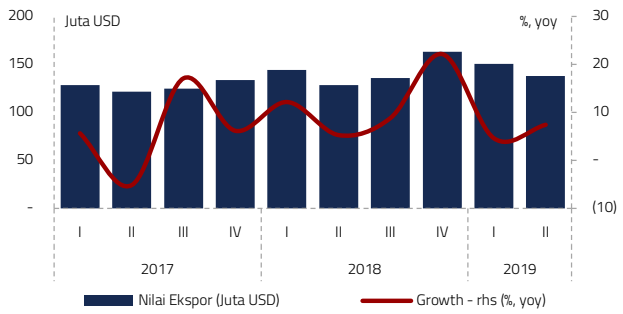

Sumber: Bea Cukai, diolah

Grafik 4.4. Indeks Hasil Survei Konsumen

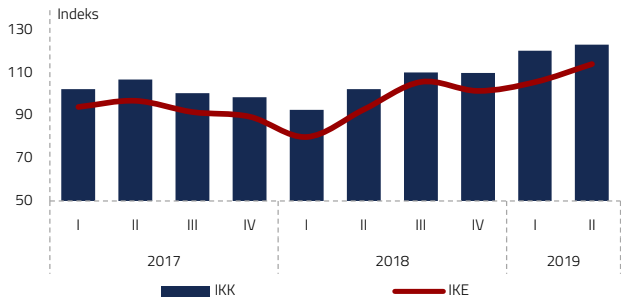

Sumber: Bank Indonesia

Grafik 4.5. Perkembangan Kondisi Likuiditas Keuangan Korporasi di Bali

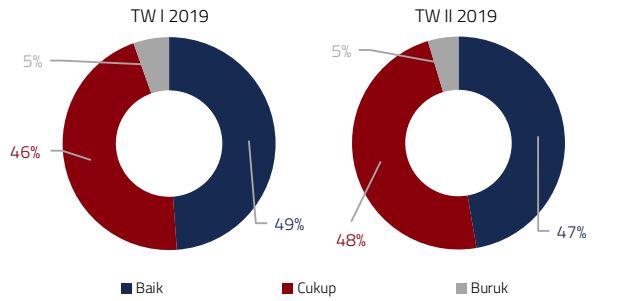

Sumber: SKDU KPw BI Prov. Bali, diolah

Grafik 4.6. Perkembangan *Likert Scale*

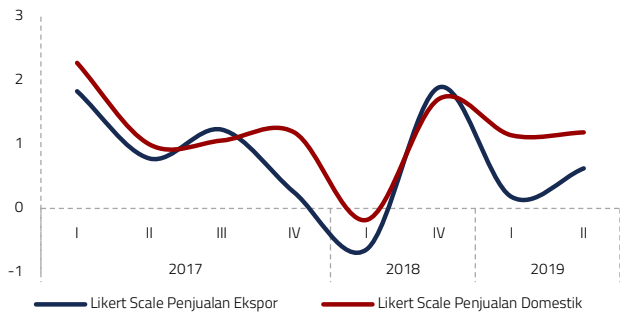

Sumber: Liaison KPw BI Prov. Bali, diolah

Kinerja penjualan domestik dan ekspor korporasi pada triwulan II 2019 meningkat. Berdasarkan hasil liaison, peningkatan tersebut didorong oleh adanya faktor musiman atau periode *high season* pariwisata pada triwulan laporan; masuknya periode panen khususnya untuk komoditas tanaman pangan (padi); pulihnya kondisi pariwisata pasca erupsi Gunung Agung; perluasan akses pasar melalui peningkatan kerjasama dengan beberapa *travel agent* baik *offline* maupun *online*; serta meningkatnya optimisme pelaku usaha dan investor terhadap perkembangan ekonomi ke depan.

Kondisi Likuiditas Keuangan Korporasi

Secara umum, kondisi keuangan korporasi dari sisi likuiditas pada triwulan II 2019 menunjukkan penurunan dibanding triwulan lalu. Berdasarkan hasil Survei Kegiatan Dunia Usaha (SKDU), pangsa korporasi yang memiliki kondisi likuiditas baik tercatat sebesar 47,29%, menurun dibanding triwulan sebelumnya yang sebesar 48,84% dari total responden korporasi di Bali.

4.2.3. Eksposur Perbankan Pada Korporasi

Perbankan di Bali menyalurkan sebagian besar kreditnya kepada sektor rumah tangga. Meskipun eksposur kredit perbankan pada korporasi hanya sebesar 31,02%, kerentanan yang terjadi pada sektor korporasi tetap perlu diwaspadai. Kewaspadaan tersebut mempertimbangkan kondisi keuangan sektor rumah tangga yang menjadi eksposur dominan kredit perbankan di Bali juga dipengaruhi oleh kinerja sektor korporasi. Sektor korporasi dapat menentukan kinerja sektor rumah tangga sisi penghasilan dan penyerapan tenaga kerja.

Kredit perbankan pada sektor korporasi di Bali pada triwulan II 2019 mencapai Rp31,29 triliun atau tumbuh 14,46% (yoy), meningkat dibanding triwulan sebelumnya yang tumbuh 5,38% (yoy). Akselerasi tersebut terutama bersumber dari peningkatan kredit pada semua jenis penggunaan. Pada triwulan laporan, kredit modal kerja tumbuh 12,26% (yoy), lebih tinggi

dibanding triwulan sebelumnya yang tumbuh 4,71% (yoy). Kredit konsumsi juga meningkat dari -34,77% (yoy) di triwulan I 2019 menjadi tumbuh 20,10% (yoy). Demikian halnya dengan kredit investasi korporasi mengalami akselerasi dari tumbuh 5,89% (yoy) pada triwulan I 2019 menjadi 15,65% pada triwulan II 2019.

Grafik 4.7. Komposisi Penggunaan Kredit Korporasi

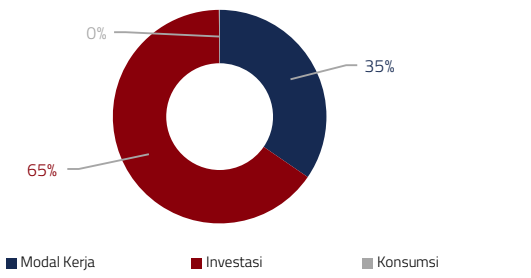

Sumber: LBU, diolah

Grafik 4.8. Pertumbuhan Kredit Korporasi

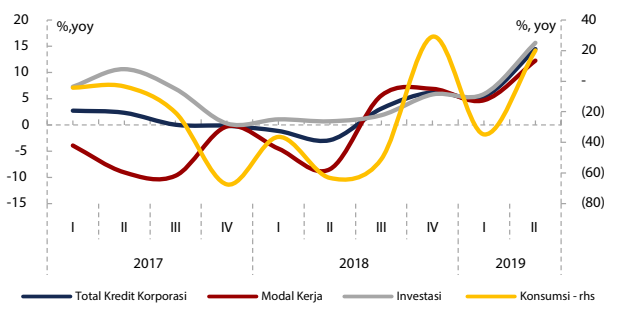

Sumber: LBU, diolah

Grafik 4.9. NPL Kredit Korporasi

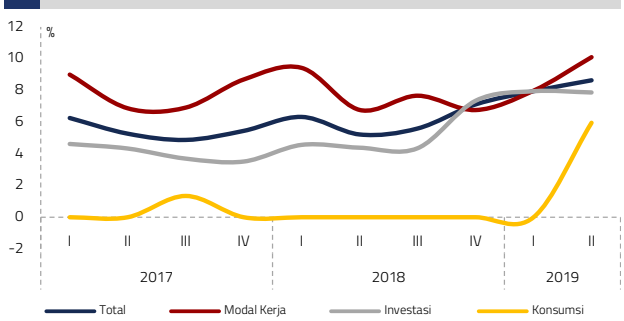

Sumber: LBU, diolah

Meskipun terjadi kenaikan kinerja kredit korporasi, namun akselerasi tersebut diiringi oleh penurunan kualitas kredit yang tercermin dari peningkatan NPL dari 7,95% pada triwulan I 2019 menjadi 8,63% pada triwulan II 2019. Peningkatan NPL terjadi pada jenis penggunaan modal kerja dan konsumsi. NPL kredit modal kerja korporasi meningkat dari 7,98% pada triwulan lalu menjadi 10,09%. Sedangkan NPL kredit konsumsi meningkat dari 0,00% pada triwulan lalu menjadi 5,96%. Peningkatan NPL kredit korporasi perlu mendapatkan perhatian khusus mengingat telah melebihi nilai *threshold* NPL sebesar 5%.

Dilihat dari sisi sektoral, penyaluran kredit lapangan usaha akomodasi dan makan minum (akmamin) meningkat tajam walaupun kinerja dalam PDRB nya melambat. Kredit korporasi pada lapangan usaha akmamin tumbuh 20,42% (yoy) pada triwulan II 2019, tumbuh jauh lebih tinggi dibanding triwulan lalu (7,23%, yoy). Sayangnya peningkatan kredit tersebut diiringi dengan menurunnya kualitas kredit korporasi yang tercermin dari peningkatan NPL dari 4,68% pada triwulan sebelumnya menjadi 4,98% di triwulan laporan. Lapangan usaha akomodasi makan dan minum (akmamin) memiliki pangsa terbesar dalam PDRB Bali, yaitu sebesar 23,28% pada triwulan I 2019.

Dilihat dari sisi sektoral, lapangan usaha pertanian (pangsa terbesar kedua dalam PDRB Bali yaitu sebesar 13,68% pada triwulan laporan) mengalami perbaikan pertumbuhan penyaluran kredit seiring dengan kinerja pertanian dalam PDRB yang terakselerasi. Kredit korporasi pada lapangan usaha pertanian meningkat dari -40,97% (yoy) pada triwulan I 2019 menjadi 27,45% (yoy). Penyaluran kredit pertanian yang membaik ini diiringi kualitas kredit korporasi yang masih terjaga pada level 0%.

Grafik 4.10. Kredit Korporasi Lapangan Usaha Akmamin

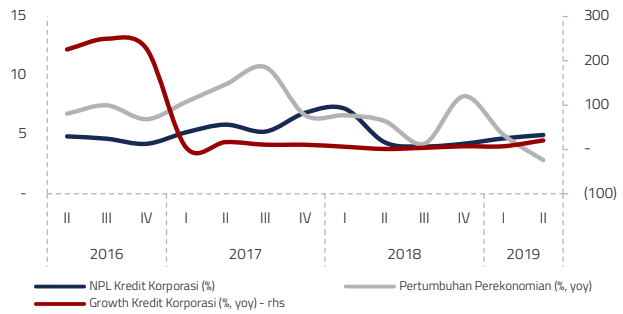

Sumber: LBU, diolah

Grafik 4.11. Kredit Korporasi Lapangan Usaha Pertanian

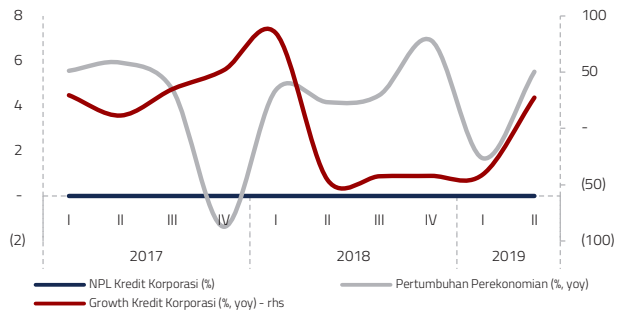

Sumber: LBU, diolah

Grafik 4.12. Kredit Korporasi Lapangan Usaha Perdagangan

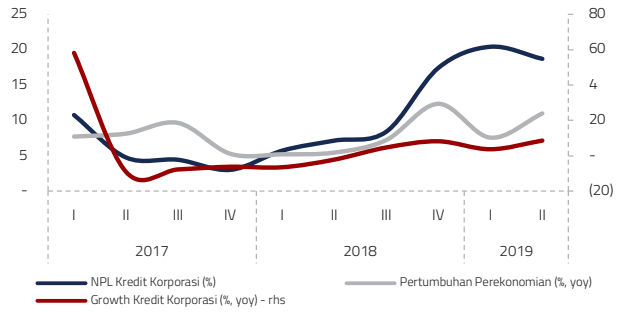

Sumber: LBU, diolah

Grafik 4.13. Kredit Korporasi Lapangan Usaha Konstruksi

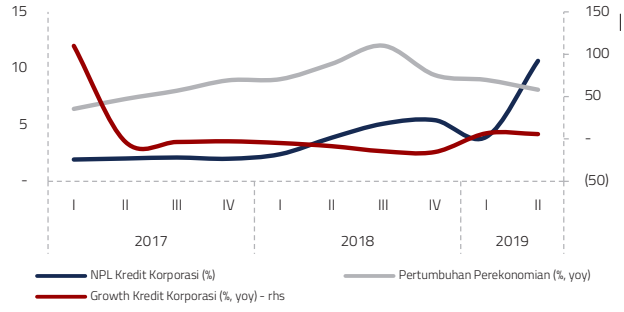

Sumber: LBU, diolah

Sejalan dengan akselerasi kinerja lapangan usaha perdagangan pada PDRB, penyaluran kredit korporasi lapangan usaha ini turut menunjukkan peningkatan dari 3,67% (yoy) pada triwulan lalu menjadi 8,57% (yoy). Akselerasi penyaluran kredit tersebut diiringi dengan peningkatan kualitas kredit yang tercermin pada penurunan NPL pada triwulan laporan sebesar 18,71% (yoy), lebih rendah dibanding triwulan lalu (20,41%).

Sementara itu kredit lapangan usaha konstruksi menunjukkan peningkatan penyaluran kredit korporasi sejalan dengan akselerasi kinerjanya dalam PDRB di triwulan berjalan. Penyaluran kredit korporasi lapangan usaha konstruksi pada triwulan II 2019 tumbuh sebesar 5,74% (yoy), terakselerasi dibanding triwulan lalu (6,73% yoy). Namun demikian, kualitas kredit lapangan usaha ini menurun yang tercermin pada peningkatan NPL dari 3,94% pada triwulan I 2019 menjadi 10,66% pada triwulan II 2019.

4.3. ASESMEN SEKTOR RUMAH TANGGA

Keuangan rumah tangga pada triwulan II 2019 menunjukkan kinerja yang lebih baik dibanding triwulan sebelumnya. Mekipun demikian, sektor rumah tangga memerlukan perhatian karena sektor ini memiliki kerentanan terhadap perekonomian.

4.3.1. Sumber Kerentanan dan Kondisi Sektor Rumah Tangga

Beberapa faktor yang dapat memberikan tekanan pada kinerja sektor rumah tangga di Provinsi Bali antara lain:

1. Tingkat Pendapatan dan Kinerja Konsumsi Rumah Tangga (RT) Provinsi Bali

   Pada triwulan II 2019, konsumsi rumah tangga di Bali tumbuh 4,96% (yoy), melambat dibanding triwulan I 2019 (6,26%, yoy). Perlambatan tersebut dipengaruhi oleh menurunnya kinerja bidang usaha pariwisata yang merupakan sumber penghasilan utama penduduk Bali dan penurunan harga gabah[69] yang menekan pendapatan petani. Meskipun melambat, konsumsi rumah tangga

69. Harga gabah kering panen (GKP) di tingkat petani pada triwulan II 2019 (rata-rata) turun menjadi Rp4.178,88 dari triwulan sebelumnya sebesar Rp4.662,11. Demikian harga GKP di tingkat penggilingan turun menjadi Rp4.268,51 dari triwulan sebelumnya sebesar Rp4.668,46.)

pada triwulan II 2019 masih tumbuh tinggi dibandingkan rata-rata pertumbuhan selama 2 tahun terakhir yang hanya 4,51% (yoy). Tendensi optimisme rumah tangga ini tercermin pada hasil Survei Konsumen (SK) Bank Indonesia. Rata-rata Indeks Keyakinan Konsumen (IKK), Indeks Kondisi Ekonomi Saat Ini (IKE) triwulan I 2019 yang berada di atas nilai 100 (optimis), yaitu masing-masing sebesar 123,33 dan 114,15. Nilai IKK dan IKE pada triwulan II 2019 lebih tinggi dibanding triwulan lalu yang masing-masing sebesar 120,39 dan 105,68. Hal ini didorong oleh optimisme kondisi penghasilan saat ini dengan nilai indeks sebesar 109,62, lebih tinggi dibanding triwulan lalu yang sebesar 105,12.

2. Tingkat Inflasi

   Tingkat inflasi dapat mendorong atau menahan laju konsumsi masyarakat. Inflasi Bali pada triwulan II 2019 sebesar 2,14% (yoy), lebih tinggi dibanding triwulan sebelumnya (1,85%, yoy). Naiknya tekanan inflasi tahunan pada triwulan II 2019 dikontribusikan oleh kelompok makanan jadi, perumahan dan transportasi. Kelompok makanan jadi ini merupakan jenis konsumsi primer masyarakat, sehingga walaupun terdapat kenaikan harga, sektor RT akan tetap mengalokasikan pendapatan untuk membelinya. Akibatnya, apabila terjadi kenaikan harga, akan terdapat perubahan alokasi pengeluaran sektor RT untuk komponen lainnya yaitu tabungan dan pembayaran angsuran kredit, sehingga dapat mengganggu stabilitas dan ketahanan sektor RT.

Grafik 4.14. Kontribusi Konsumsi Rumah Tangga Terhadap PDRB Bali

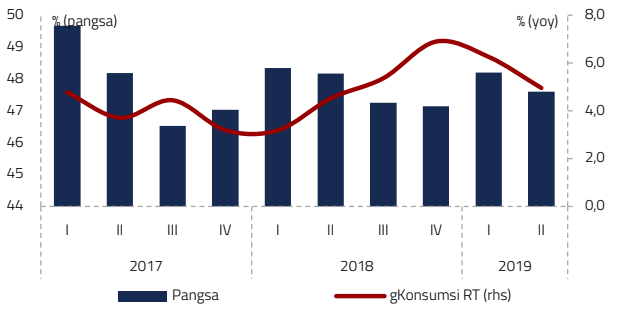

Sumber: BPS Provinsi Bali, diolah

Grafik 4.15. Persepsi Rumah Tangga Provinsi Bali Terhadap Ekonomi Saat Ini

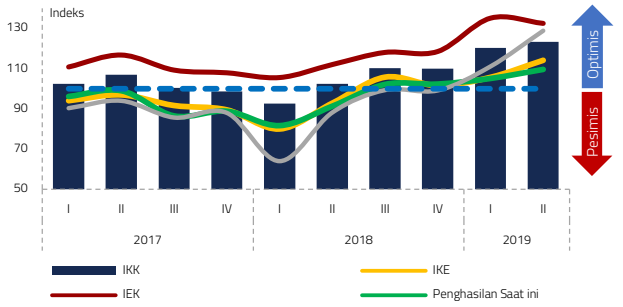

Sumber: Survei Konsumen KPw BI Bali, diolah

4.3.2. Kinerja Keuangan Rumah Tangga

Keuangan rumah tangga pada triwulan II 2019 menunjukkan kinerja yang lebih baik dibanding triwulan sebelumnya. Seperti periode sebelumnya, penggunaan keuangan rumah tangga pada triwulan II 2019 masih didominasi oleh konsumsi dengan pangsa 66,78%, lebih tinggi dibanding triwulan lalu (59,76%). **Kondisi ini terjadi seiring dengan perayaan Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Ramadhan dan Idul Fitri yang memicu peningkatan konsumsi.** Meskipun demikian, proporsi pendapatan yang dialokasikan untuk tabungan dari total pengeluaran relatif stabil yaitu 17,74% pada triwulan I 2019 menjadi 16,41%. **Dengan demikian, pada triwulan II 2019 rumah tangga cenderung menahan tabungan dan menambah proporsi konsumsinya.**

Grafik 4.16. Komposisi Pengeluaran Rumah Tangga Bali

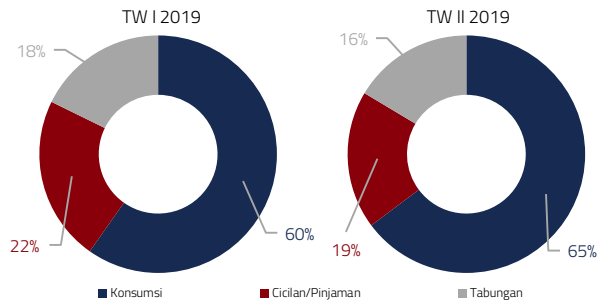

Sumber: Survei Konsumen KPw BI Bali, diolah

Proporsi pendapatan RT untuk pembayaran cicilan utang menurun dari 22,50% pada triwulan I 2019 menjadi 18,81%. Peningkatan preferensi rumah tangga dalam menggunakan penghasilannya untuk cicilan/ pinjaman diiringi dengan peningkatan risiko kredit RT, terutama tercermin pada peningkatan jumlah rumah tangga yang memiliki *debt service ratio* lebih dari 30% (DSR>30%). Pada triwulan I 2019, jumlah rumah tangga dengan DSR>30% sebesar 23,8% atau naik 0,5% (qtq) dibanding triwulan sebelumnya (23,3%).

Tabel 4.5. Komposisi Pengeluaran Rumah Tangga Berdasarkan Kategori Pengeluarannya Per Bulan

Triwulan I 2019									
Penggunaan	Pengeluaran per Bulan								
	Rp1 - 2 jt	Rp2,1 - 3 jt	Rp3,1 - 4 jt	Rp4,1 - 5 jt	Rp5,1 - 6 jt	Rp6,1 - 7 jt	Rp7,1 - 8 jt	>Rp8 jt	Rata-rata
Konsumsi	62,23	62,96	60,07	58,82	63,26	59,69	55,83	55,22	59,76
Cicilan/Pinjaman	21,25	20,89	23,51	23,92	18,43	23,44	25,42	23,13	22,50
Tabungan	16,52	16,14	16,41	17,25	18,30	16,88	18,75	21,65	17,74
Total	100	100	100	100	100	100	100	100	100

Triwulan II 2019									
Penggunaan	Pengeluaran per Bulan								
	Rp1 - 2 jt	Rp2,1 - 3 jt	Rp3,1 - 4 jt	Rp4,1 - 5 jt	Rp5,1 - 6 jt	Rp6,1 - 7 jt	Rp7,1 - 8 jt	>Rp8 jt	Rata-rata
Konsumsi	64,92	65,85	66,19	65,13	65,36	65,53	63,57	61,67	64,78
Cicilan/Pinjaman	14,66	16,98	17,97	19,19	14,17	17,06	27,14	23,33	18,81
Tabungan	20,42	17,17	15,84	15,68	20,48	17,41	9,29	15,00	16,41
Total	100	100	100	100	100	100	100	100	100

Sumber: Survei Konsumen KPw BI Bali, diolah

Tabel 4.6. Dana Rumah Tangga Untuk Membayar Cicilan dan Perubahannya Berdasarkan Pendapatan

Pengeluaran/ bln	Triwulan II 2019			
	Debt Service Ratio (DSR)			
	0%-10%	10%-20%	20%-30%	>30%
Rp1 - 2 jt	12,3%	1,8%	1,2%	4,3%
Rp2,1 - 3 jt	17,2%	3,8%	5,5%	5,7%
Rp3,1 - 4 jt	12,8%	3,3%	3,0%	4,7%
Rp4,1 - 5 jt	5,2%	2,2%	1,7%	2,3%
>Rp5 jt	6,7%	1,8%	2,2%	2,3%
Total	54,2%	13,0%	13,5%	19,3%

Pengeluaran/ bln	Perubahan Debt Service Ratio (DSR)*			
	0%-10%	10%-20%	20%-30%	>30%
Rp1 - 2 jt	4,2%	-0,2%	-2,5%	-0,5%
Rp2,1 - 3 jt	4,2%	-0,8%	-2,8%	-0,8%
Rp3,1 - 4 jt	4,3%	-0,5%	-1,5%	-1,5%
Rp4,1 - 5 jt	2,8%	-0,7%	0,7%	0,0%
>Rp5 jt	-1,8%	0,0%	-0,8%	-1,7%
Total	13,7%	-2,2%	-7,0%	-4,5%

** Perubahan triwulan I 2019 dibandingkan triwulan II 2019*
Sumber: Survei Konsumen KPw BI Bali, diolah

Tabel 4.7. Dana Rumah Tangga Untuk Menabung dan Perubahannya Berdasarkan Pendapatan

Pengeluaran/ bln	Triwulan II 2019					
	Total	Tabungan				
		0%-10%	10%-20%	20%-30%	>30%	TMB
Rp1 - 2 jt	19,7%	7,8%	4,3%	4,3%	3,2%	0,0%
Rp2,1 - 3 jt	32,2%	15,3%	6,5%	7,3%	3,0%	0,0%
Rp3,1 - 4 jt	23,8%	12,0%	5,8%	4,0%	2,0%	0,0%
Rp4,1 - 5 jt	11,3%	6,5%	3,0%	0,7%	1,2%	0,0%
>Rp5 jt	13,0%	5,2%	3,3%	3,7%	0,8%	0,0%
Total	100,0%	46,8%	23,0%	20,0%	10,2%	0,0%

Pengeluaran/ bln	Perubahan Tabungan*					
	Total	0%-10%	10%-20%	20%-30%	>30%	TMB
Rp1 - 2 jt	1,0%	-1,8%	0,8%	1,0%	1,0%	0,0%
Rp2,1 - 3 jt	-0,3%	-0,5%	-3,0%	3,7%	-0,5%	0,0%
Rp3,1 - 4 jt	0,8%	-0,2%	2,3%	-1,0%	-0,3%	0,0%
Rp4,1 - 5 jt	2,8%	2,5%	0,7%	-0,7%	0,3%	0,0%
>Rp5 jt	-4,3%	-2,7%	-0,8%	0,7%	-1,5%	0,0%
Total	0,0%	-2,7%	0,0%	3,7%	-1,0%	0,0%

** Perubahan triwulan I 2019 dibandingkan triwulan II 2019*
Sumber: Survei Konsumen KPw BI Bali, diolah

Peningkatan risiko rumah tangga dengan DSR>30% terutama terjadi pada kelompok pengeluaran Rp1–2 juta. Institusi keuangan menilai bahwa rumah tangga dengan DSR>30% memiliki risiko yang tinggi dan dapat menjadi penyebab naik *non performing loan*.

4.3.3. Dana Pihak Ketiga Perseorangan (Di Perbankan)

Pada triwulan II 2019, proporsi DPK sektor RT tercatat sebesar 68%, lebih tinggi dibanding triwulan sebelumnya yang sebesar 67%. Peningkatan proporsi DPK perseorangan terutama didorong oleh peningkatan simpanan perseorangan dalam bentuk tabungan dan giro (masing-masing naik dari 41,2% dan 3,1% pada triwulan sebelumnya menjadi 41,4% dan 3,2%). Sementara proporsi simpanan RT dalam bentuk deposito mengalami penurunan dari 23,1% menjadi 22,9%.

Grafik 4.17. Komposisi DPK Perbankan Provinsi Bali (% total DPK Bali)

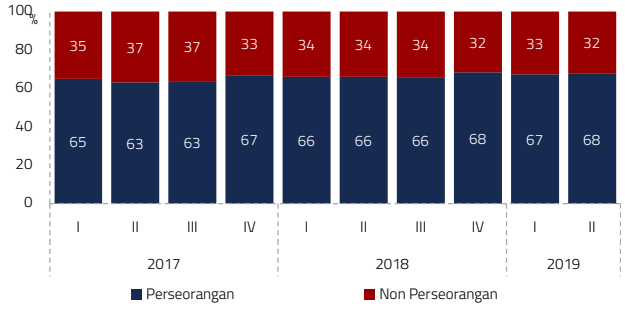

Sumber: LBU Bank Indonesia (lokasi KC/KCP), diolah

Grafik 4.18. Komposisi Perbankan DPK Provinsi Bali berdasarkan Jenis Simpanan (% total DPK Bali)

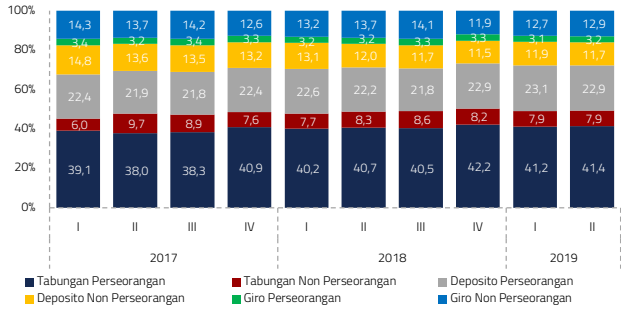

Sumber: LBU Bank Indonesia (lokasi KC/KCP), diolah

Grafik 4.19. Pertumbuhan DPK Perbankan Provinsi Bali (%)

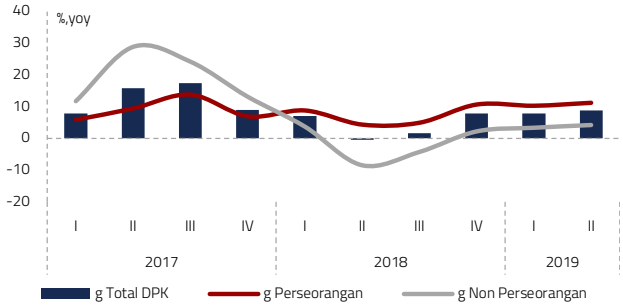

Sumber: LBU Bank Indonesia (lokasi KC/KCP), diolah

Grafik 4.20. Pertumbuhan DPK Perseorangan (%)

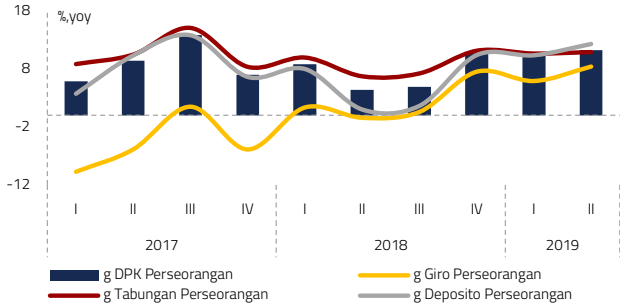

Sumber: LBU Bank Indonesia (lokasi KC/KCP), diolah

Seiring peningkatan proporsi, pertumbuhan DPK perseorangan pada triwulan laporan juga terakselerasi dari 10,30% (yoy) pada triwulan I 2019 menjadi 11,23% (yoy). Dilihat dari jenis simpanannya, akselerasi DPK perseorangan didorong oleh akselerasi pada semua jenis simpanan. Tabungan perseorangan tumbuh 10,89% (yoy) pada triwulan II 2019, meningkat dibanding triwulan sebelumnya (10,64% yoy). Deposito perseorangan pada triwulan II 2019 tumbuh 12,28% (yoy), lebih tinggi dari triwulan sebelumnya (10,34%, yoy). Demikian juga giro perseorangan yang mengalami akselerasi menjadi 8,39% (yoy) pada triwulan II 2019, dibanding triwulan lalu yang tumbuh 5,90% (yoy).

Dilihat dari jumlah rekening DPK perseorangan, pada triwulan II 2019 terdapat penambahan jumlah rekening sebesar 2,68% dibanding triwulan sebelumnya, didorong oleh peningkatan jumlah rekening pada kategori nilai simpanan <Rp500juta dan Rp1-10M. Secara spasial, seluruh daerah mengalami pertumbuhan jumlah rekening simpanan. Persentase penambahan jumlah rekening terbanyak terjadi di Kabupaten Buleleng.

4.3.4. Kredit Perbankan Pada Sektor Rumah Tangga

Dari sisi penyaluran kredit perbankan, proporsi kredit rumah tangga di Bali masih mendominasi. Pada triwulan II 2019, pangsa kredit untuk perseorangan mencapai 66,5% dibanding keseluruhan kredit, lebih rendah dibanding triwulan lalu (67,1%). Sebagian besar kredit perseorangan digunakan untuk konsumsi, yaitu 51,9%, sedangkan sisanya digunakan untuk kegiatan produktif yaitu modal kerja dan investasi masing-masing sebesar 31,9% dan 16,2%.

Grafik 4.21. Komposisi Penyaluran Kredit Perbankan

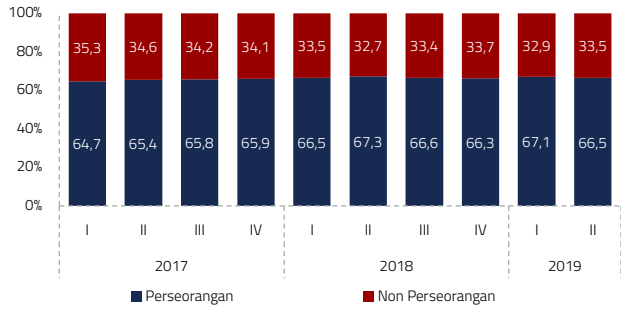

Sumber: LBU Bank Indonesia, diolah

Grafik 4.22. Komposisi Kredit Perseorangan

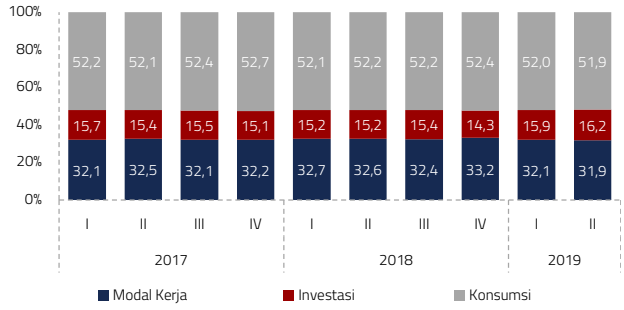

Sumber: LBU Bank Indonesia, diolah

Tabel 4.8. Komposisi Jumlah Rekening Perseorangan Per Nilai Penempatan di Bali

DAERAH		Jumlah	<10 JT	>10 JT - 100 JT	>100JT - 500JT	>500JT - 1 M	>1 M - 2 M	>2 M - 5M	>5M - 10M	>10M - 15M	>15M - 20M	>20M
Kab. Buleleng	Rek	564.049	512.928	44.762	5.773	336	131	75	5	1	-	1
	Δ%	6,26	6,19	7,52	3,31	5,66	-3,68	0,00	25,00	0,00		0,00
Kab. Jembrana	Rek	250.609	225.846	21.764	2.788	131	48	30	2	-	-	-
	Δ%	4,75	4,73	5,41	1,71	9,17	-21,31	25,00	-50,00			
Kab. Tabanan	Rek	335.523	287.744	40.969	6.260	316	146	78	3	6	1	-
	Δ%	2,66	2,00	6,98	6,55	4,29	-7,01	6,85	50,00	50,00		
Kab. Badung	Rek	792.524	663.943	102.214	22.906	1.932	960	492	50	10	-	5
	Δ%	2,79	2,29	5,93	4,10	-3,50	3,00	11,56	2,04	-33,33		0,00
Kab. Gianyar	Rek	373.705	314.555	48.720	9.275	626	318	182	20	3	2	4
	Δ%	3,07	2,68	5,49	3,63	4,16	7,80	-0,55	150,00	#DIV/0!	-33,33	-20,00
Kab. Klungkung	Rek	152.987	131.959	17.827	2.936	152	85	26	1	1	-	-
	Δ%	2,19	1,41	7,96	4,00	4,11	-1,16	4,00				
Kab. Bangli	Rek	131.989	116.374	13.606	1.924	43	37	5	-	-	-	-
	Δ%	3,32	2,20	13,10	12,25	-57,00	8,82	-16,67				
Kab.Karangasem	Rek	269.386	239.599	25.648	3.912	123	61	41	2	-	-	-
	Δ%	2,00	1,35	7,73	6,51	13,89	15,09	-12,77	100,00			
Kota Denpasar	Rek	2.174.215	1.845.667	260.285	59.229	4.959	2.238	1.553	183	19	6	14
	Δ%	1,54	1,22	3,56	2,75	0,24	2,10	12,45	26,21	-69,35	20,00	16,67
Provinsi Bali	Rek	5.044.987	4.338.615	575.795	115.003	8.618	4.024	2.482	266	40	9	24
	Δ%	2,68	2,32	5,28	3,60	-0,31	1,98	10,07	24,88	-51,81	-10,00	4,35

Sumber: LBU Bank Indonesia (lokasi KC/KCP), diolah
Rek = Jumlah rekening; % = Perubahan jumlah rekening pada triwulan II 2019 dibandingkan dengan triwulan I 2019

Dari sisi pertumbuhan, kredit perseorangan tumbuh 8,01% (yoy) pada triwulan II 2019, terakselerasi dibanding triwulan I 2019 (6,29%, yoy). Akselerasi pertumbuhan kredit perseorangan bersumber dari semua jenis penggunaan. Pertumbuhan kredit investasi meningkat dari 11,26% (yoy) pada triwulan I 2019 menjadi 13,69% (yoy) pada triwulan laporan. Kredit konsumsi meningkat dari 6,12% (yoy) pada triwulan I 2019 menjadi 7,41% (yoy). Demikian halnya dengan kredit modal kerja yang terakselerasi dari 4,26% (yoy) menjadi 6,28% (yoy).

Hampir di setiap periode, kredit perseorangan didominasi oleh kredit konsumsi yang digunakan untuk membeli berbagai keperluan seperti rumah, apartemen, kendaraan dan konsumsi lainnya. Berdasarkan proporsinya, kredit konsumsi paling besar adalah kredit multiguna dengan pangsa 50,25% (naik dari 50,09% pada triwulan I 2019). Sementara proporsi kredit kepemilikan rumah (KPR) sebesar 31,51% (sedikit turun dari 31,55% pada triwulan I 2019) dan kredit kepemilikan kendaraan bermotor (KKB) sebesar 7,86% (turun dari 7,97% pada triwulan I 2019).

Grafik 4.23. Komposisi Kredit Konsumsi Perseorangan

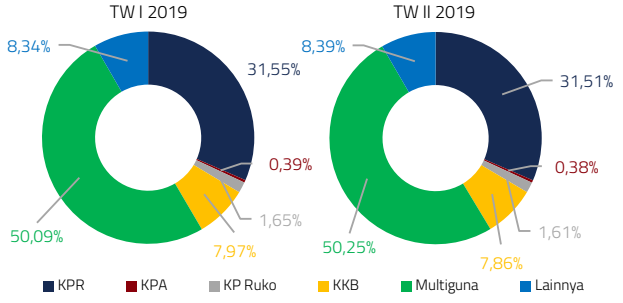

Sumber: LBU Bank Indonesia, diolah

Grafik 4.24. Pertumbuhan Kredit Konsumsi Perseorangan

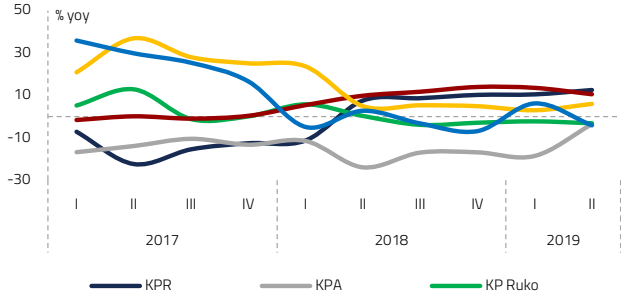

Sumber: LBU Bank Indonesia, diolah

Grafik 4.25. NPL dan Suku Bunga Kredit Rumah Tangga & Kredit Konsumsi di Bali

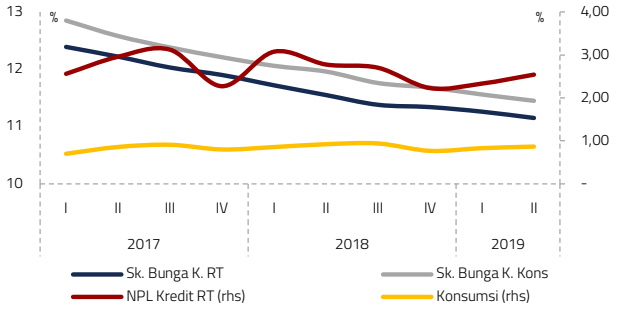

Sumber: LBU Bank Indonesia, diolah

Grafik 4.26. Pertumbuhan Kredit Rumah Tangga (%)

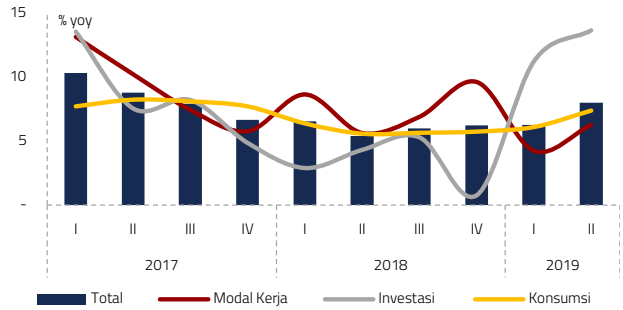

Sumber: LBU Bank Indonesia, diolah

Dilihat dari sisi suku bunga, suku bunga kredit perseorangan cenderung semakin rendah. Pada triwulan II 2019, suku bunga tertimbang kredit perseorangan di Bali kembali menunjukkan penurunan menjadi 11,15% per tahun, dari triwulan sebelumnya yang sebesar 11,26% per tahun. Dari sisi risiko, risiko kredit rumah tangga di triwulan II 2019 mengalami peningkatan, tercermin dari NPL kredit perseorangan yang lebih tinggi dari triwulan sebelumnya Namun masih dalam batas yang wajar. Peningkatan NPL kredit perseorangan berasal dari peningkatan NPL pada semua jenis penggunaan. NPL kredit konsumsi naik dari 0,83% menjadi 0,87% pada triwulan II 2019. NPL kredit modal kerja naik dari 1,17% pada triwulan I 2019 menjadi 1,33%. Sementara itu, NPL kredit investasi meningkat dari 0,33% pada triwulan I 2019 menjadi 0,34%.

Secara spasial, kredit perseorangan masih terkonsentrasi di daerah Bali Selatan, yaitu Kota Denpasar, dengan pangsa sebesar 36%, diikuti oleh

Tabel 4.9. Penyaluran Kredit Perseorangan Secara Spasial Posisi Triwulan II 2019

Daerah	Kredit (Rp Miliar)	Pangsa %	Jumlah Akun (Rekening)					
			KPR	KPA	Ruko	KKB	Multiguna	Lainnya
Kab. Buleleng	7.833	12	7.814	31	16	4.542	21.121	4.989
Kab. Jembrana	3.256	5	1.578	5	3	1.696	10.542	1.216
Kab. Tabanan	6.617	10	5.107	7	44	3.644	18.286	3.775
Kab. Badung	10.974	16	5.100	134	82	7.414	24.186	23.505
Kab. Gianyar	6.026	9	1.462	10	7	4.412	13.098	5.523
Kab. Klungkung	2.348	3	312	3	5	847	6.760	614
Kab. Bangli	2.317	3	835	17	2	783	5.875	364
Kab. Karangasem	3.421	5	1.501	3	3	1.520	10.660	790
Kota Denpasar	24.341	36	12.650	118	312	28.946	51.233	63.552
PROVINSI BALI	67.132	100	36.359	328	474	53.804	161.761	104.328

Sumber: LBU Bank Indonesia, diolah

Kabupaten Badung dengan pangsa sebesar 16%. Sejalan dengan konsentrasi jumlah kredit, jumlah rekening di dua daerah tersebut juga cukup besar dibanding daerah lainnya.

4.3.4.1 Kredit Kepemilikan Rumah dan Apartemen

Kinerja perkembangan kredit pemilikan rumah (KPR) dan kredit kepemilikan apartemen (KPA) di triwulan laporan mengalami perbaikan. Penyaluran KPR pada triwulan laporan tumbuh 13,27% (yoy), lebih tinggi dibanding triwulan lalu (10,48%, yoy). Dari jenis kreditnya, akselerasi KPR didorong oleh tipe kecil (s.d. 21) dan tipe sedang (s.d. 70). Akselerasi pertumbuhan KPR terkonfirmasi dengan hasil Survei Penjualan Eceran (SPE) KPwBI Provinsi Bali. **Berdasarkan hasil SPE, pertumbuhan penjualan bahan konstruksi pada triwulan II 2019 terakselerasi menjadi 6,57% (yoy), lebih tinggi dibanding triwulan lalu (3,49%, yoy).**

Tabel 4.10. Pertumbuhan dan NPL KPR di Bali

Jenis KPR, KPA, Ruko	Pangsa %	Growth (%,yoy)			NPL (%)		
		Tw II 2018	Tw I 2019	Tw II 2019	Tw II 2018	Tw I 2019	Tw II 2019
KPR	31,51	7,56	10,48	13,27	2,70	2,89	3,00
RT. KPR sd 21	1,99	19,16	-2,89	-1,11	1,78	0,80	1,11
RT. KPR sd 70	15,79	10,28	18,58	24,58	2,01	1,90	1,88
RT. KPR 70+	13,73	3,55	4,69	4,56	3,51	4,28	4,57
KPA	0,38	-23,93	-18,57	-5,21	24,50	18,89	17,23
RT. KPA sd 21	0,07	-33,34	-37,14	-3,25	34,37	33,04	27,56
RT. KPA sd 70	0,21	-17,47	-20,02	-13,78	27,74	23,29	21,69
RT. KPA 70+	0,10	-31,70	1,86	17,11	7,27	2,08	1,45
RUKO	1,61	5,78	-2,25	-1,69	1,13	2,37	2,85

**Lokasi Proyek*
Sumber: LBU Bank Indonesia, diolah

Tabel 4.11. Pertumbuhan dan NPL KKB dan Multiguna di Bali

Jenis KKB	Pangsa %	Growth (%,yoy)			NPL (%)		
		Tw II 2018	Tw I 2019	Tw II 2019	Tw II 2018	Tw I 2019	Tw II 2019
KKB	7,86	9,84	13,56	11,43	0,93	0,54	0,64
Mobil	6,87	8,90	9,88	4,84	0,88	0,48	0,53
Sepeda Motor	0,74	44,67	57,17	86,35	1,53	0,66	0,73
Truk	0,10	-56,68	-35,56	190,90	3,47	1,84	2,66
Lainnya	0,16	33,75	163,16	107,66	0,72	2,42	3,70
RT. Multiguna	50,25	28,16	3,00	5,87	1,00	0,77	0,72

**Lokasi Proyek*
Sumber: LBU Bank Indonesia, diolah

Sejalan dengan KPR, pertumbuhan kredit kepemilikan apartemen (KPA) pada triwulan I 2019 mengalami perbaikan dengan angka pertumbuhan negatif yang semakin kecil yaitu dari -18,57% (yoy) pada triwulan I 2019 menjadi -5,21% (yoy). Membaiknya penyaluran KPA didorong oleh semua tipe. KPA tipe kecil (s.d. 21) membaik dari -37,14% (yoy) di triwulan lalu menjadi -5,21% (yoy). KPA tipe sedang (s.d. 70) juga menunjukkan perbaikan dari -20,02% (yoy) pada triwulan I 2019 menjadi -13,78% (yoy). Sedangkan KPA tipe besar (70+) mengalami akselerasi menjadi tumbuh 17,11% (yoy) di triwulan laporan, lebih tinggi dibanding triwulan lalu (1,86%, yoy). Sementara itu, pertumbuhan kredit kepemilikan ruko pada triwulan II 2019 mengalami perbaikan, yaitu dari -2,25% (yoy) pada triwulan I 2019 menjadi -1,69% (yoy).

Dari sisi risiko kredit KPR, perilaku rumah tangga dalam melakukan pembayaran cicilan rumah mengalami penurunan kualitas. Pada triwulan II 2019, NPL gross KPR sebesar 3,00%, meningkat dibanding triwulan sebelumnya yang sebesar 2,89%. Peningkatan risiko ini juga terjadi pada kredit kepemilikan ruko. NPL kredit kepemilikan ruko di triwulan II 2019 sebesar 2,85%, lebih tinggi dibanding triwulan lalu yang sebesar 2,37%. Sementara itu, KPA mengalami peningkatan kualitas kredit yang tercermin pada penurunan NPL dari 18,89% di triwulan lalu menjadi 17,23%. Meskipun menurun, NPL pada KPA memerlukan perhatian khusus karena masih diatas 5%. Namun demikian, pangsa KPA masih sangat kecil yaitu 0,38% dari total kredit KPR.

4.3.4.2 Kredit Kepemilikan Kendaraan Bermotor

Terjadi perubahan dalam kondisi perekonomian mempengaruhi perilaku konsumen dalam mengajukan kredit kendaraan bermotor. Pertumbuhan kredit kendaraan bermotor (KKB) di Bali pada triwulan II 2019 melambat menjadi 11,43% (yoy), lebih rendah dibanding triwulan sebelumnya yang tumbuh sebesar 13,56% (yoy). Melambatnya pertumbuhan kredit KKB bersumber dari pertumbuhan kredit mobil yang hanya tumbuh 4,84% (yoy), lebih rendah dibanding triwulan sebelumnya yang tumbuh 9,88% (yoy). Namun demikian, perlambatan lebih dalam tertahan oleh akselerasi kredit kendaraan roda dua (sepeda motor) dan perbaikan kredit kendaraan jenis truk yang masing-masing tumbuh dari 57,17% (yoy) dan -35,56% (yoy) pada triwulan sebelumnya menjadi 86,35% (yoy) dan 190,90% (yoy).

Dilihat dari sisi risiko kredit, perlambatan KKB pada triwulan II 2019 diiringi dengan penurunan kualitas kredit seiring naiknya NPL pada semua jenis kendaraan. NPL kredit kendaraan roda empat (mobil) dan truk masing-masing sebesar 0,53% dan 2,66% pada triwulan berjalan, lebih tinggi dibanding triwulan lalu (0,48% dan 1,84%). NPL kredit kendaraan roda dua (sepeda motor) juga meningkat dari 0,66% pada triwulan lalu menjadi 0,73%.

4.3.4.3 Kredit Multiguna

Pangsa kredit konsumsi perseorangan secara multiguna masih mendominasi, yaitu sebesar 50,25%. Hal ini menunjukkan bahwa kebutuhan pembiayaan rumah tangga masih cukup besar, di luar kebutuhan untuk memiliki rumah dan kendaraan bermotor maupun peralatan rumah tangga. Hal ini didorong oleh pengajuan kredit multiguna yang relatif mudah. Selain itu, dana yang diterima dapat secara leluasa digunakan untuk melakukan aktivitas konsumsi seperti renovasi rumah, biaya pernikahan, biaya pendidikan, biaya pengobatan, maupun pembelian barang berharga/ elektronik, dan bahkan dapat digunakan untuk modal usaha.

Pada triwulan II 2019, kredit multiguna tumbuh 5,78% (yoy), akselerasi dibanding triwulan sebelumnya yang sebesar 3,00% (yoy). Dilihat dari pangsa berdasarkan kelompok besar pinjaman dan jangka waktu kreditnya, kredit multiguna masih didominasi oleh kelompok pinjaman >Rp100 juta s.d. Rp500 juta dengan jangka waktu lebih dari 5 tahun yang mencapai 72,47% dari keseluruhan kredit multiguna jangka waktu >5 tahun. Demikian halnya berdasarkan jumlah rekening, pangsa

terbesar berada pada kelompok pinjaman >Rp100 juta s.d. Rp500 juta dengan jangka waktu lebih dari 5 tahun yaitu 60,36%.

Dari sisi risikonya, kredit rumah tangga untuk fasilitas multiguna relatif stabil. Pada triwulan II 2019, NPL kredit multiguna sebesar 0,72%, sedikit meningkat dibanding triwulan sebelumnya (0,73%). Kredit multiguna dengan risiko kredit terbesar berada pada pembiayaan dengan nominal di bawah Rp10 juta dan jangka waktu >4-5tahun dengan NPL sebesar 17,93%. Meskipun demikian, karena dari sisi nominal pangsanya hanya sebesar 0,06% dari total keseluruhan kredit multiguna, risiko kredit dari kelompok ini masih berdampak minor terhadap institusi keuangan maupun pada sistem keuangan di Bali.

4.4. AKSES KEUANGAN DAN UMKM

4.4.1. Akses Keuangan Kepada UMKM

Pertumbuhan kredit UMKM pada triwulan II 2019 mengalami akselerasi, dari tumbuh 5,79% (yoy) pada triwulan I 2019 menjadi 7,51% (yoy). Peningkatan penyaluran kredit UMKM terjadi di semua lapangan usaha kecuali LGA (listrik, gas dan air) serta pengangkutan dan komunikasi. Lapangan usaha perdagangan, hotel, dan restoran (PHR) yang merupakan sektor dengan pangsa kredit UMKM terbesar (69,12%) mengalami akselerasi penyaluran kredit UMKM dari 5,98% (yoy) pada triwulan I 2019 menjadi 6,46% (yoy). Sektor pertanian dengan pangsa 6,71% (terbesar kedua) juga mengalami peningkatan penyaluran kredit menjadi 21,60% (yoy) dari sebelumnya 11,62% (yoy) di triwulan I 2019. Penyaluran kredit UMKM ke lapangan usaha industri pengolahan juga meningkat dari sebelumnya 28,36% (yoy) di triwulan lalu menjadi 30,68% (yoy). Namun demikian, akselerasi kredit UMKM tertahan oleh perlambatan kredit pada sektor pengangkutan dan komunikasi. Kredit UMKM pada sektor pengangkutan dan komunikasi hanya tumbuh 2,96% (yoy), jauh lebih rendah dibanding triwulan lalu (30,71%, yoy).

Tabel 4.12. Komposisi Kredit Multiguna Posisi Triwulan II 2019

Besar Pinjaman	Berdasarkan Nominal (% pangsa)						Berdasarkan Jumlah Rekening (% pangsa)					
	Jangka Waktu						Jangka Waktu					
	<1 tahun	1-3 tahun	>3-4 tahun	>4-5 tahun	>5 tahun	Jumlah	<1 tahun	1-3 tahun	>3-4 tahun	>4-5 tahun	>5 tahun	Jumlah
<10 JT	14,06	4,54	1,58	0,54	0,18	0,46	65,03	25,55	11,26	6,33	2,96	8,79
>10 JT - 50 JT	35,35	40,40	32,60	20,88	2,01	6,75	27,98	58,13	57,04	53,87	11,68	31,02
>50 JT - 100 JT	18,74	21,35	32,15	21,56	10,84	12,68	4,92	12,11	21,10	26,07	23,16	20,43
>100JT - 500JT	18,38	15,10	28,21	22,21	72,47	63,68	1,91	3,84	10,41	12,37	60,36	38,42
>500JT - 1 M	3,81	4,69	2,61	5,36	5,07	4,98	0,08	0,21	0,13	0,57	1,23	0,84
>1 M	9,65	13,91	2,85	29,45	9,43	11,45	0,07	0,16	0,07	0,79	0,61	0,51
Jumlah	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100

Sumber: LBU Bank Indonesia, diolah

Tabel 4.13. NPL Kredit Multiguna

Besar Pinjaman	Berdasarkan NPL (%)					
	Jangka Waktu					
	<1 tahun	1-3 tahun	>3-4 tahun	>4-5 tahun	>5 tahun	Jumlah
<10 JT	0,26	8,61	13,41	18,02	18,36	11,53
>10 JT - 50 JT	0,05	0,75	0,77	0,39	0,28	0,45
>50 JT - 100 JT	0,00	0,30	0,37	0,41	0,22	0,26
>100JT - 500JT	0,46	1,26	0,25	0,61	0,38	0,40
>500JT - 1 M	0,00	0,00	0,00	1,75	2,69	2,47
>1 M	0,00	0,00	0,00	2,05	2,15	2,04
Jumlah	0,14	0,95	0,65	1,10	0,68	0,72

Sumber: LBU Bank Indonesia, diolah

Tabel 4.14. NPL Kredit UMKM berdasarkan Sektor Ekonomi

NPL UMKM Sektoral (%)	2017				2018				2019	
	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II
Pertanian	1,79	2,21	2,64	3,03	3,78	4,18	4,73	3,89	3,79	3,77
Pertambangan	10,52	7,18	4,60	6,74	4,57	1,02	0,51	1,63	1,65	4,18
Industri	3,03	3,79	3,53	3,51	4,25	4,45	3,44	3,35	2,46	2,12
LGA	6,59	7,85	7,55	2,42	2,34	1,13	0,01	0,00	0,39	0,24
Konstruksi	4,93	4,88	4,80	6,54	9,28	5,12	5,96	6,65	4,55	4,58
PHR	3,86	4,77	3,39	3,05	3,79	3,92	3,97	3,24	3,18	3,21
Pengangkutan & Komunikasi	2,44	2,26	1,46	1,23	3,56	1,00	9,05	8,32	8,45	8,05
Keuangan, Jasa Perush.	0,85	1,01	1,11	0,83	1,32	1,79	3,93	3,60	3,84	5,06
Jasa-Jasa	1,37	1,37	1,38	1,30	1,49	1,34	1,47	0,98	0,82	1,43
TOTAL	3,29	4,01	3,03	2,82	3,56	3,56	3,89	3,28	3,13	3,25

Sumber: LBU Bank Indonesia, diolah

Akselerasi pertumbuhan kredit UMKM pada periode laporan diiringi dengan peningkatan NPL menjadi 3,25% dari sebelumnya 3,13% di triwulan I 2019. Peningkatan NPL kredit UMKM disebabkan oleh penurunan kualitas kredit pada lapangan usaha pertambangan, konstruksi, PHR, keuangan dan jasa-jasa. PHR dengan pangsa kredit terbesar mencatatkan peningkatan NPL menjadi 3,21% di triwulan laporan, lebih tinggi dibanding triwulan lalu (3,18%). Sektor pengangkutan dan komunikasi masih mencatat NPL paling tinggi yaitu 8,05%, lebih rendah dibanding triwulan lalu (8,45%). Namun demikian, pangsa sektor pengangkutan dan komunikasi hanya sebesar 1,57%, sehingga memberikan pengaruh yang relatif kecil terhadap kinerja kredit UMKM.

Grafik 4.27. Pertumbuhan Kredit UMKM

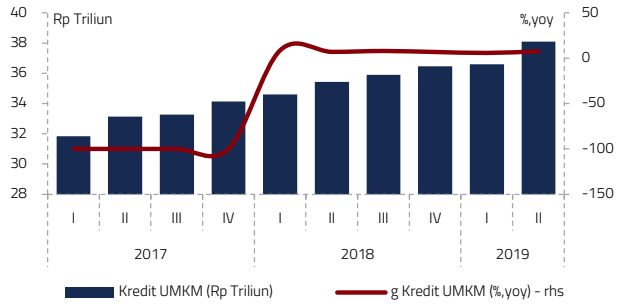

Sumber: LBU Bank Indonesia, diolah

Grafik 4.28. Pangsa Kredit UMKM terhadap Total Kredit

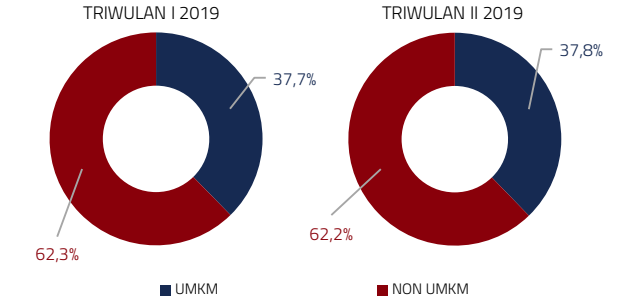

Sumber: LBU Bank Indonesia, diolah

Berdasarkan data, pangsa kredit UMKM terhadap total kredit pada periode laporan mengalami sedikit peningkatan dari 37,7% pada triwulan sebelumnya menjadi 37,8%. Rasio penyaluran kredit UMKM di Bali tersebut telah melebihi kewajiban pemberian kredit/pembiayaan UMKM minimal 20% seperti yang tertuang dalam Peraturan Bank Indonesia No.17/12/PBI/2015.

Sementara berdasarkan nominal kreditnya, realisasi kredit UMKM terbesar masih berada pada rentang nominal >Rp100 juta s.d. Rp500 juta, dengan pangsa sebesar 30,24% dari total kredit UMKM yang ada di Bali. Berdasarkan sebaran wilayahnya, konsentrasi realisasi kredit UMKM terbesar masih berada di Kota Denpasar dengan pangsa 33%, diikuti Kabupaten Badung (18%) dan Kabupaten Gianyar (12%). Dari sisi kualitas kredit, nominal NPL terbesar dicatat oleh

Kota Denpasar dengan pangsa 30% pada triwulan II 2019. Sedangkan nominal NPL terkecil dicatat oleh Kabupaten Klungkung dengan pangsa 1,84% di triwulan laporan. Dilihat dari level NPL nya, Kabupaten Buleleng memiliki NPL tertinggi yaitu sebesar 5,43%. Sementara itu, Kabupaten Gianyar memiliki NPL terendah yaitu sebesar 1,17%.

Berdasarkan sektor ekonominya, realisasi kredit UMKM masih terkonsentrasi di sektor PHR dengan pangsa sebesar 69,12%, diikuti sektor jasa-jasa, pertanian, keuangan dan industri pengolahan dengan pangsa masing-masing sebesar 8,57%; 6,71%; 5,96% dan 5,43%. Sementara itu, sektor ekonomi lainnya memiliki pangsa relatif rendah (dibawah 3%).

Grafik 4.29. Pangsa Nominal Kredit UMKM

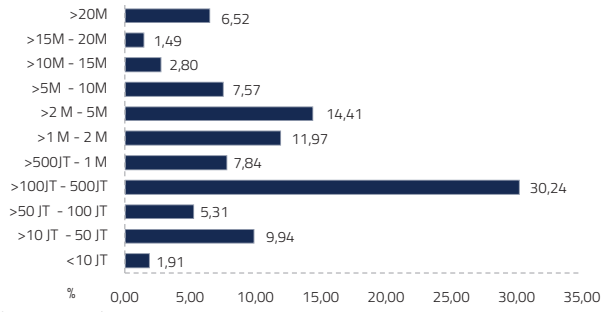

Sumber: LBU Bank Indonesia, diolah

Grafik 4.30. Pangsa Kredit UMKM Berdasarkan Kabupaten/Kota

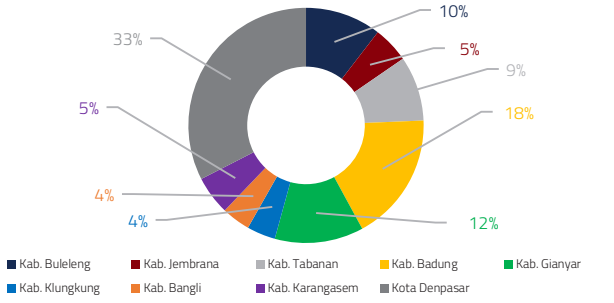

Sumber: LBU Bank Indonesia, diolah

Grafik 4.31. NPL Kredit UMKM Berdasar Kab/Kota

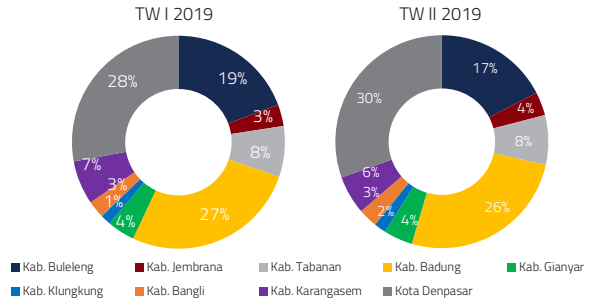

Sumber: LBU Bank Indonesia, diolah

Grafik 4.32. Realisasi Kredit UMKM Berdasar Sektor Ekonomi

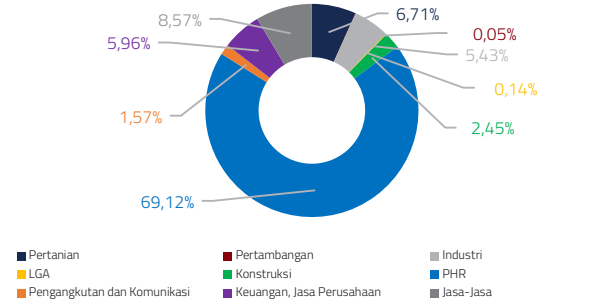

Sumber: LBU Bank Indonesia, diolah

4.4.2. Akses Keuangan Kepada Penduduk

Rasio jumlah rekening DPK terhadap penduduk angkatan kerja di Bali menunjukkan tren peningkatan. Pada bulan Februari 2019, rasio jumlah rekening DPK terhadap penduduk angkatan kerja di Bali tercatat sebesar 201,15%, lebih tinggi dibanding bulan Februari 2018 (176,58%) dan bulan Agustus 2018 (191,01%). Dalam jangka panjang telah terjadi peningkatan yang signifikan mengingat rasio ini baru menunjukkan angka 120% di tahun 2015. Rasio yang lebih besar dari 100% menunjukkan bahwa terdapat penduduk angkatan kerja di Bali yang memiliki rekening simpanan lebih dari satu. Selain itu rasio lebih dari 100% juga mengindikasikan adanya penduduk bukan angkatan kerja yang juga memiliki rekening seperti pelajar dan mahasiswa.

Selaras dengan rasio DPK, rasio jumlah rekening kredit terhadap penduduk angkatan kerja di Bali juga menunjukkan peningkatan menjadi 29,53% di

bulan Februari 2019, lebih tinggi dibanding Februari 2018 (27,56%), namun lebih rendah dibandingkan bulan Agustus 2018 (29,66%). Namun dalam jangka panjang telah terjadi tren peningkatan mengingat rasio ini menunjukkan angka 23% di tahu 2015. Masih rendahnya rasio rekening kredit menunjukkan terbatasnya penggunaan fasilitas pembiayaan oleh masyarakat Bali dan masih terdapat ruang untuk meningkatkan penyaluran kredit di masa yang akan datang.

Grafik 4.33. Rasio Rekening DPK per Penduduk Bekerja

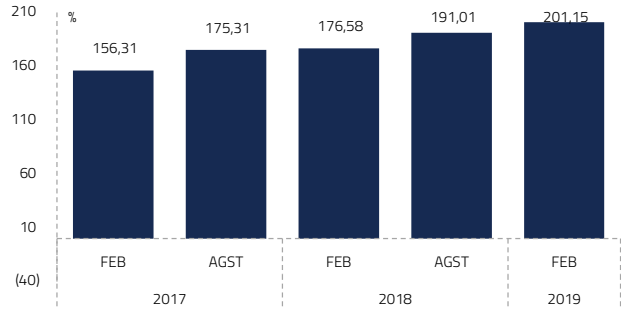

Sumber: LBU Bank Indonesia, BPS, diolah

Grafik 4.34. Rasio Rekening Kredit per Penduduk Bekerja

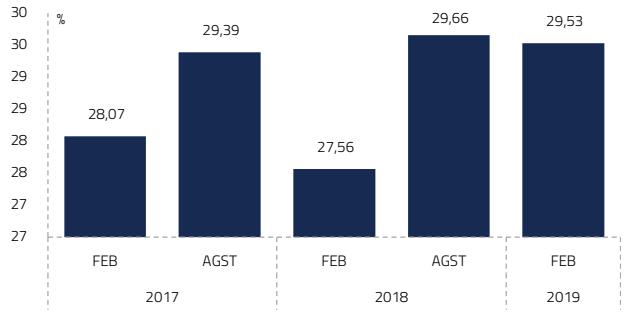

Sumber: LBU Bank Indonesia, BPS, diolah

halaman ini sengaja dikosongkan

BAB V

PENYELENGGARAAN SISTEM PEMBAYARAN DAN PENGELOLAAN UANG RUPIAH

- Kinerja transaksi tunai pada triwulan II 2019 di Bali menunjukkan terjadinya *net outflow* sebesar Rp840 miliar sejalan dengan meningkatnya frekuensi HBKN, sementara triwulan sebelumnya mengalami *net inflow* sebesar Rp3,25 triliun.
- Nominal transaksi kliring mengalami penurunan pada triwulan II 2019 sebesar 13,68% (yoy), lebih rendah dibanding triwulan sebelumnya yang hanya turun 7,57% (yoy).
- Seiring dengan masuknya periode pariwisata di Bali, pertumbuhan nominal transaksi KUPVA BB pada triwulan II 2019 juga menunjukkan perbaikan, meskipun masih menurun menjadi 1,80% (yoy), membaik dibanding triwulan sebelumnya yang turun sebesar 11,30% (yoy).

Hutan Mangrove

5.1. PERKEMBANGAN SISTEM PEMBAYARAN DI BALI

Sistem pembayaran di Indonesia baik sistem pembayaran tunai maupun non-tunai pada triwulan II 2019 dapat memenuhi kebutuhan masyarakat dengan baik. Pelaksanaan kegiatan sistem pembayaran tunai dapat memenuhi kebutuhan uang Rupiah kepada masyarakat dalam jumlah nominal yang cukup, jenis pecahan yang sesuai dan dalam kondisi yang layak edar serta tepat waktu. Sementara itu, sistem pembayaran non tunai telah dapat menyediakan sistem dan infrastruktur yang handal dan aman dalam rangka mendukung aktivitas perekonomian. Transaksi pembayaran tunai pada triwulan II 2019 mengalami perlambatan dari sisi *inflow* maupun *outflow*. Di sisi lain transaksi pembayaran non tunai yang dilakukan melalui SKNBI mengalami perlambatan sedangkan yang dilakukan melalui RTGS mengalami peningkatan. Aktivitas transaksi KUPVA pada triwulan laporan mengalami perlambatan seiring dengan masih rendahnya arus wisatawan mancanegara. Disisi keuangan inklusif, pada triwulan II 2019, rasio jumlah kantor layanan bank per 100.000 penduduk di Provinsi Bali rata rata mencapai 33 dengan rasio tertinggi berada di kabupaten Badung. Dari sisi keuangan digital, terjadi peningkatan penggunaan uang elektronik secara signifikan seiring dengan masifnya penggunaan sistem elektronifikasi pembayaran di berbagai aspek. Di Bali, transaksi keuangan elektronik tidak hanya digunakan untuk pembayaran pajak, parkir dan retribusi melainkan juga untuk penyaluran dana bantuan sosial melalui Layanan Keuangan Digital (LKD).

5.1.1. Transaksi Sistem Pembayaran Tunai

Transaksi pembayaran tunai di Bank Indonesia dapat diketahui melalui beberapa indikator, yaitu jumlah aliran uang keluar dari Bank Indonesia ke perbankan (*outflow*), jumlah aliran uang masuk dari perbankan ke Bank Indonesia (*inflow*), serta kegiatan pemusnahan Uang Tidak Layak Edar (UTLE) dan uang yang tidak sesuai dengan ciri-ciri keaslian uang Rupiah.

5.1.1.1. Aliran Uang Masuk/Keluar (*Inflow/Outflow*)

Sesuai dengan pola historisnya, perkembangan kinerja transaksi tunai pada triwulan II 2019 di Provinsi Bali menunjukkan terjadinya *net* ouflow (aliran uang yang keluar dari Bank Indonesia melalui perbankan lebih besar dibanding uang yang masuk) sebesar Rp840 miliar seiring dengan tingginya permintaan uang kartal pada perayaan **Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) yaitu Ramadhan dan Idul Fitri.**

Secara triwulanan, nominal *inflow* pada triwulan II 2019 mencapai Rp5,57 triliun atau tumbuh 6,96% (yoy), lebih rendah dibanding triwulan I 2019 (50,18%, yoy). Sedangkan nominal *outflow* pada triwulan laporan tercatat sebesar Rp6,41 triliun atau terkontraksi 2,27% (yoy), lebih rendah dibanding triwulan sebelumnya yang tumbuh 1,84% (yoy). Melambatnya inflow pada triwulan laporan sejalan dengan perlambatan DPK perbankan. Diperkirakan hal ini antara lain dipengaruhi oleh penurunan proporsi penghasilan masyarakat yang digunakan untuk menabung (hasil Survei Konsumen Bank Indonesia)[70]. Sementara terkontraksinya *outflow* mencerminkan penurunan permintaan penukaran

Tabel 5.1. Perkembangan *Inflow – Outflow* Provinsi Bali

Indikator	2017				2018				2019	
	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II
Inflow (Rp Miliar)	4.575	3.876	4.929	3.582	4.502	5.207	4.654	4.160	6.762	5.569
Outflow (Rp Miliar)	3.974	5.822	3.601	4.425	3.448	6.558	4.745	5.703	3.512	6.409
Net Inflow/(Outflow) - Rp Miliar	601	(1.946)	1.328	(843)	1.054	(1.352)	(91)	(1.543)	3.250	(840)
Penukaran (Rp Miliar)	20	18	15	18	22	22	31	26	30,22	36,07
Temuan Uang Palsu (Lembar)	1.055	1.509	1.406	759	1.241	656	775	910	1.007	713
Frekuensi Kas Keliling (Kali) - rhs	24	21	15	34	17	14	24	25	14	14
Nominal Kas keliling (Juta Rp)	13.261	30.684	2.944	6.135	4.641	17.842	5.262	8.213	5.992	8.425

Sumber: Bank Indonesia

uang kertas hasil cetak sempurna (HCS) pada periode Idul Fitri 2019 dibandingkan periode Idul Fitri 2018.

Melambatnya arus uang tunai keluar dari Bank Indonesia ke masyarakat melalui perbankan di triwulan II 2019, sejalan dengan melambatnya konsumsi rumah tangga pada PDRB Provinsi Bali di triwulan laporan[71]. Kondisi ini juga dipengaruhi oleh peningkatan inflasi Bali pada triwulan laporan yang membuat masyarakat menahan konsumsinya.

Grafik 5.1. Pergerakan *Inflow, Outflow, Netflow,* Inflasi dan PDRB

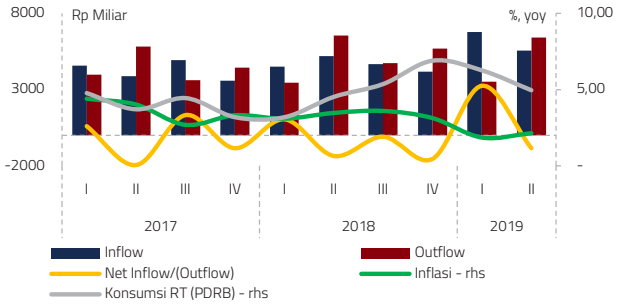

Sumber: Bank Indonesia

5.1.1.2. Uang Tidak Layak Edar (UTLE)

Selain pengelolaan aliran uang kartal yang masuk dan keluar (*inflow* dan *outflow*), Bank Indonesia juga memiliki tugas memelihara kualitas uang kartal yang diedarkan kepada masyarakat atau dikenal dengan *Clean Money Policy*, diantaranya melalui pemusnahan Uang Tidak Layak Edar (UTLE). UTLE yang dimusnahkan Kantor Perwakilan Bank Indonesia (KPw BI) Provinsi Bali pada triwulan II 2019 tercatat 29,88 juta lembar. Rasio jumlah UTLE terhadap inflow pada triwulan II 2019 mencapai 17,6%, lebih rendah dibanding triwulan sebelumnya yang mencapai 24%. **Hal ini mencerminkan peningkatan kualitas uang rupiah yang beredar di masyakarat sehingga menurunkan jumlah UTLE yang harus dimusnahkan.**

Grafik 5.2. Rasio UTLE terhadap Inflow di Provinsi Bali

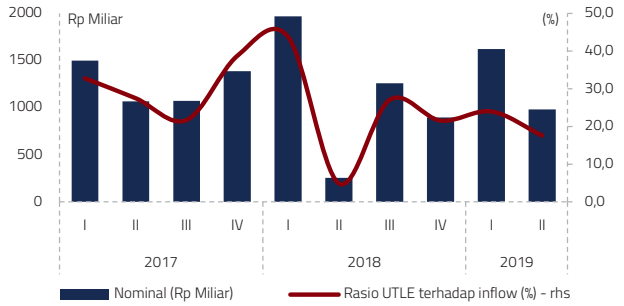

Sumber: Bank Indonesia

5.1.2. Transaksi Sistem Pembayaran Non Tunai

5.1.2.1. Transaksi Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia (SKNBI)

SKNBI merupakan salah satu sarana transfer dana non tunai secara ritel selain RTGS, dengan mekanisme pertukaran warkat debet antar bank yang diselenggarakan melalui kliring. Di Provinsi Bali, koordinator penukaran warkat debet kliring dilaksanakan di KPw BI Provinsi Bali untuk Kota Denpasar dan di Bank yang ditunjuk oleh Bank Indonesia dalam hal ini Bank Mandiri untuk wilayah Kabupaten Singaraja.

Transaksi non tunai melalui Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia (SKNBI) menunjukkan penurunan. Pada triwulan II 2019, volume transaksi melalui SKNBI tercatat sebanyak 412.785 lembar atau terkontraksi 22,66% (yoy), lebih dalam dibanding triwulan lalu yang terkontraksi 18,76% (yoy). Sejalan dengan itu, nominal transaksi melalui SKNBI tercatat sebesar Rp11,95 triliun atau terkontraksi 13,68% (yoy), lebih dalam dibanding triwulan lalu (-7,57%, yoy). Di sisi lain, transaksi Bank Indonesia *Real Time Gross Settlement* (BI-RTGS) pada triwulan laporan mengalami peningkatan. Pada triwulan II 2019, nominal RTGS tercatat sebesar Rp9,52 triliun atau tumbuh 104,97% (yoy), jauh lebih tinggi dibanding triwulan sebelumnya (-2,38%, yoy). Dilihat dari volumenya, transaksi RTGS tercatat sebanyak 5.821 lembar atau tumbuh 54,69% (yoy), terakselerasi

70. Pada triwulan II 2019, proporsi penghasilan masyarakat yang digunakan untuk menabung turun menjadi 16,41%, lebih rendah dibanding triwulan I 2019 (17,74%).
71. Komponen konsumsi rumah tangga tumbuh 4,96% (yoy) pada triwulan II 2019, melambat dibanding triwulan sebelumnya (6,26%, yoy)

Tabel 5.2. Perkembangan Indikator SKNBI di Bali

Indikator	2017				2018				2019	
	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II
PERPUTARAN KLIRING										
Volume Kliring (ribu)	622,00	540,00	608,54	568,65	538,49	533,72	582,38	510,11	437,48	412,785
- Rata-rata lembar per hari (ribu)	10,20	10,19	9,82	9,32	8,83	9,88	9,39	8,36	7,41	7,51
Nominal Kliring (Rp Miliar)	16.270,00	13.370,00	15.804,40	15.077,89	13.635,43	13.842,34	15.845,75	14.602,60	12.603,80	11.948,76
- Rata-rata nominal per hari (Rp Miliar)	266,72	252,26	254,91	247,18	223,53	256,34	255,58	239,39	213,62	217,25
TOLAKAN CEK/BG										
Lembar (ribu)	7,91	7,45	6,06	5,63	5,91	5,35	4,72	4,62	4,141	3,846
- Rata-rata lembar per hari (ribu)	0,13	0,14	0,10	0,09	0,10	0,10	0,08	0,23	0,21	0,21
Nominal Cek/BG (Rp Miliar)	423,00	202,00	186,95	196,68	168,87	174,93	162,94	167,45	146,04	141,32
- Rata-rata nominal per hari (Rp Miliar)	6,93	3,81	3,02	3,22	2,77	3,24	2,63	8,35	7,42	7,65
PERTUMBUHAN PERPUTARAN KLIRING										
- Lembar (yoy, %)	(1,74)	(20,35)	(4,47)	(15,25)	(13,43)	(1,16)	(4,30)	(10,29)	(18,76)	(22,66)
- Nominal Kliring (yoy, %)	(18,10)	(37,61)	(12,22)	(17,26)	(16,19)	3,53	0,26	(3,15)	(7,57)	(13,68)
PERTUMBUHAN TOLAKAN CEK/BG										
- Lembar (yoy, %)	(4,15)	(5,22)	(17,28)	(24,27)	(25,28)	(28,17)	(21,98)	(17,87)	(29,92)	(28,13)
- Nominal Kliring (yoy, %)	(1,63)	(52,13)	(30,24)	(26,88)	(16,40)	(6,43)	(17,15)	(14,86)	(13,52)	(19,21)

Sumber: Bank Indonesia

dibanding triwulan lalu (10,06%, yoy). **Penurunan transaksi kliring di tengah peningkatan transaksi RTGS mencerminkan preferensi masyarakat untuk menggunakan fasilitas RTGS untuk transaksi yang bernilai besar.**

Grafik 5.3. Perkembangan Nominal Kliring di Bali

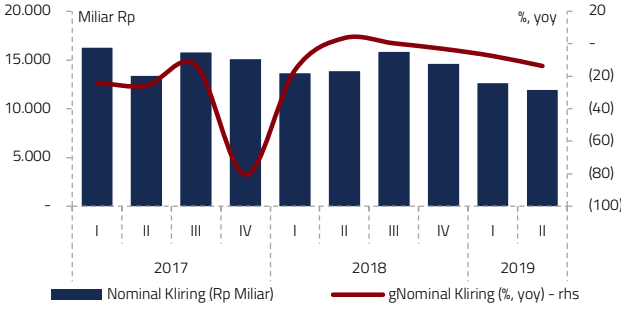

Sumber: Bank Indonesia

Grafik 5.4. Perkembangan Volume Kliring di Bali

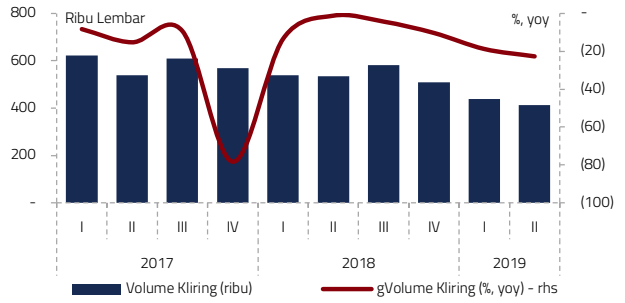

Sumber: Bank Indonesia

Grafik 5.5. Perkembangan Nominal RTGS

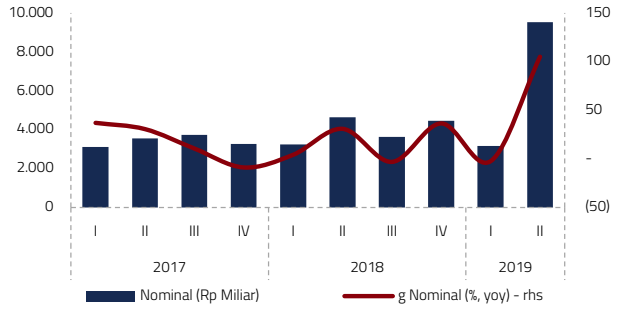

Sumber: Bank Indonesia

Grafik 5.6. Perkembangan Volume RTGS

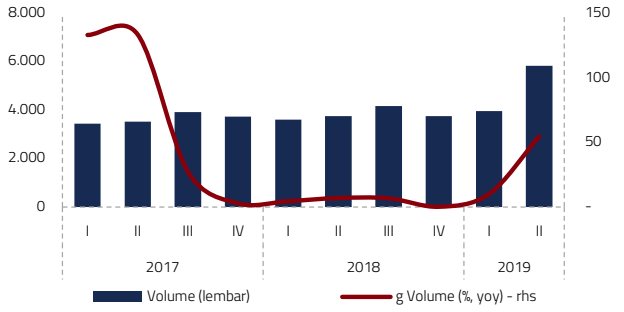

Sumber: Bank Indonesia

5.1.2.2. Perkembangan Tolakan Transaksi Cek/BG

Perkembangan nominal tolakan cek/bilyet giro pada triwulan laporan mengalami penurunan. Pada triwulan II 2019, volume tolakan cek/bilyet giro terkontraksi

28,1% (yoy) dengan jumlah 3.846 lembar, berkurang dibanding triwulan I 2019 yang terkontraksi 29,9% (yoy). Dilihat dari nominalnya, tolakan cek/bilyet giro pada triwulan laporan tercatat sebesar Rp141,32 miliar atau terkontraksi 19,2% (yoy), lebih dalam dibanding triwulan lalu yang terkontraksi 13,5% (yoy). Masih terkontraksinya pertumbuhan nominal dan volume cek/BG sejak tahun 2017 terjadi seiring diberlakukannya Peraturan Bank Indonesia No.18/41/PBI/2016 tanggal 21 November 2016 tentang Bilyet Giro, menunjukkan upaya perbankan dalam mematuhi peraturan dimaksud dan menunjukkan peran perbankan dalam mensosialisasikan penggunaan bilyet giro kepada masyarakat telah berjalan dengan baik.

Grafik 5.7. Perkembangan Cek dan Bilyet Giro di Bali

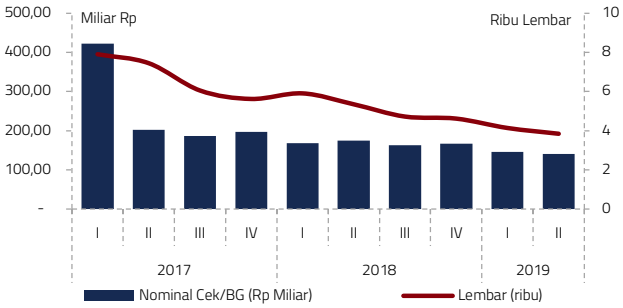

Sumber: Bank Indonesia

5.2. UPAYA MENJAGA KELANCARAN SISTEM PEMBAYARAN

5.2.1. Penyediaan Uang Layak Edar dan Penanganan Uang Tidak Asli

Bank Indonesia selalu berupaya meningkatkan kualitas uang Rupiah (*soil level*) di masyarakat. Secara umum, terdapat dua jenis layanan kas yang dilakukan Bank Indonesia untuk implementasi *Clean Money Policy*, yaitu melalui layanan kas di dalam kantor dan layanan kas di luar kantor. Kedua layanan kas ini dilakukan oleh Kantor Pusat Bank Indonesia dan 45 Kantor Perwakilan Bank Indonesia Dalam Negeri yang tersebar di seluruh Indonesia.

Layanan kas di dalam kantor Bank Indonesia dilakukan kepada bank umum (penyetoran dan pembayaran), maupun penukaran uang langsung kepada masyarakat dengan jadwal tertentu. Selain menukarkan uang langsung ke KPw BI Provinsi Bali di kota Denpasar, masyarakat juga dapat menukar di bank umum. Layanan kas dilakukan untuk memenuhi kebutuhan uang Rupiah di masyarakat dalam jumlah nominal yang cukup, jenis pecahan yang sesuai dan dalam kondisi yang layak edar serta tepat waktu. Sepanjang bank memiliki persediaan uang Rupiah layak edar yang dibutuhkan oleh masyarakat, maka bank tidak diperbolehkan menolak permintaan penukaran dari masyarakat. Kondisi geografis Bali menjadi tantangan agar masyarakat di daerah terpencil tetap dapat memperoleh uang dalam kualitas baik dan pecahan yang sesuai. Berkaitan dengan itu, Bank Indonesia membuka layanan kas di luar kantor, yang terbagi menjadi dua, yaitu:

1. Kas Titipan

   Kas Titipan adalah salah satu bentuk layanan Bank Indonesia dalam penyediaan Uang Layak Edar (ULE) kepada masyarakat yang berlokasi jauh dari Kantor Bank Indonesia melalui kerjasama dengan Bank Umum sebagai Bank Pengelola. Bank dapat melakukan penarikan/penyetoran tunai ke Bank Indonesia melalui Kas Titipan tanpa harus mendatangi Kantor Bank Indonesia. Selain itu, Kas Titipan dimaksud untuk memenuhi kebutuhan bank akan uang kartal kepada masyarakat termasuk melalui mekanisme penukaran. Salah satu tujuan dari Kas Titipan ini adalah percepatan penarikan Uang Tidak Layak Edar (UTLE) dari masyarakat. Kegiatan ini mulai dilaksanakan pada bulan Juni 2016 di wilayah Kabupaten Singaraja, guna meningkatkan kualitas uang layak edar, dan pelaksanaan kas titipan diikuti oleh 8 anggota bank peserta dan 1 bank pengelola yang juga merangkap anggota di wilayah Kabupaten Singaraja.

2. Kas Keliling

   Layanan kas ini dilaksanakan Bank Indonesia melalui mekanisme penukaran langsung di beberapa tempat yang menjadi pusat keramaian masyarakat (seperti pasar dan pusat perbelanjaan)

baik dalam kota maupun luar kota. Hal ini dilakukan untuk melayani kebutuhan Uang Layak Edar bagi masyarakat, termasuk di wilayah yang sulit dijangkau (*remote area*). KPw BI Provinsi Bali juga melayani kas keliling ke daerah terpencil, yaitu di Pulau Nusa Penida, Nusa Lembongan dan Nusa Ceningan. Frekuensi pelaksanaan kegiatan kas keliling pada triwulan II 2019 di Provinsi Bali tercatat sebanyak 14 kali, sama dengan triwulan sebelumnya. Namun demikian, dari sisi nominal mengalami penurunan dari 29,10% (yoy) pada triwulan I 2019 menjadi -52,78% (yoy) pada triwulan laporan. Selain sebagai sarana penukaran uang, kas keliling juga dimanfaatkan untuk melakukan edukasi dan sosialisasi ciri-ciri keaslian uang Rupiah.

Grafik 5.8. Perkembangan Kegiatan Kas Keliling di Bali

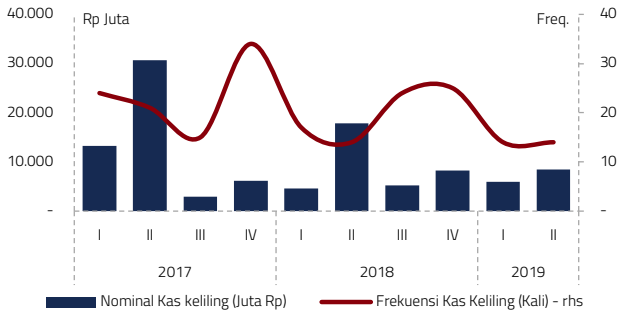

Sumber: Bank Indonesia

Selain layanan kas, KPw BI Provinsi Bali juga berupaya mempermudah operasional antar bank untuk mendapatkan akses Uang Layak Edar (ULE), yang dilakukan melalui program Transaksi Uang Kartal Antar Bank (TUKAB) khususnya di wilayah Denpasar. Sejak tahun 2012, perbankan yang membutuhkan uang layak edar tidak harus mengambil ULE ke Bank Indonesia karena telah difasilitasi melalui sistem TUKAB. Melalui sistem ini, bank dapat bertransaksi dengan bank lain yang memiliki ketersediaan ULE yang cukup. Dalam upaya untuk menjamin pengedaran uang Rupiah yang berkualitas, Bank Indonesia juga mengoptimalkan peran perbankan dalam menjaga kualitas pengelolaan uang Rupiah termasuk memastikan uang yang diberikan kepada nasabah dalam kondisi layak edar. Berkaitan dengan upaya tersebut, telah dilakukan pelatihan standar tata cara sortasi uang kertas kepada *teller* perbankan dan koordinasi serta evaluasi layanan kas perbankan secara berkesinambungan.

5.2.2. Perkembangan Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing Bukan Bank (KUPVA BB) di Provinsi Bali

Nominal transaksi penyelenggara KUPVA BB di Provinsi Bali pada triwulan II 2019 mengalami perbaikan walaupun masih terkontraksi, yaitu dari -11,3% (yoy) di triwulan lalu menjadi -1,8% (yoy). Nominal transaksi jual-beli valas pada triwulan laporan mencapai Rp9,75 triliun, terdiri dari transaksi pembelian sebesar Rp4,78 triliun dan transaksi penjualan sebesar Rp4,96 triliun.

Masih terkontraksinya pertumbuhan transaksi KUPVA pada triwulan II 2019 sejalan dengan masih rendahnya kunjungan wisatawan mancanegara (wisman). Pada triwulan II 2019, jumlah wisman yang berkunjung ke Bali mengalami penurunan, yaitu hanya

Grafik 5.9. Perkembangan Transaksi Jual – Beli Valas di Provinsi Bali

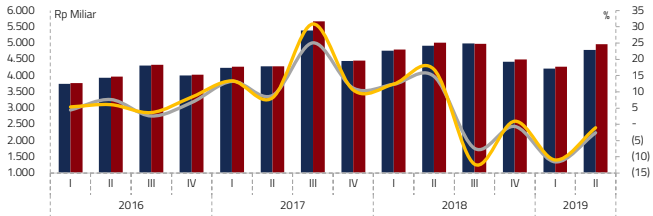

	I 2016	II 2016	III 2016	IV 2016	I 2017	II 2017	III 2017	IV 2017	I 2018	II 2018	III 2018	IV 2018	I 2019	II 2019
Pembelian UKA & TC	3.746	3.937	4.307	4.004	4.242	4.286	5.386	4.451	4.765	4.918	4.989	4.422	4.215	4.791
Penjualan UKA & TC	3.765	3.965	4.331	4.032	4.268	4.289	5.669	4.458	4.796	5.013	4.975	4.501	4.270	4.961
Growth Pembelian (%, yoy) - rhs	4,4	7,6	2,6	6,7	13,2	8,9	25,1	11,1	12,3	14,8	(7,4)	(0,6)	(11,5)	(2,6)
Growth Penjualan (%, yoy) - rhs	5,4	6,1	3,6	8,4	13,4	8,2	30,9	10,6	12,4	16,9	(12,2)	1,0	(11,0)	(1,0)

Sumber: LKPBUv2, diolah

1,51 juta orang atau terkontraksi 4,91% (yoy), lebih rendah dibanding triwulan lalu yang tumbuh 3,09% (yoy). Namun demikian, membaiknya perkembangan transaksi KUPVA di tengah jumlah kunjungan wisman yang terkontraksi lebih dalam pada triwulan II 2019 menunjukkan kualitas wisman yang semakin berkualitas.

Grafik 5.10. Perkembangan Jumlah Kunjungan Wisman di Provinsi Bali

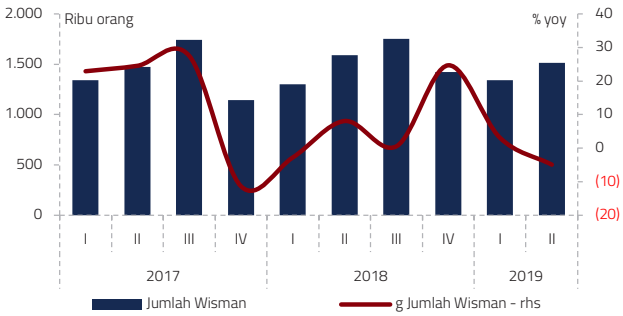

Sumber: BPS Provinsi Bali, diolah

Berdasarkan data yang dihimpun, jumlah jaringan kantor KUPVA BB Berizin pada triwulan II 2019 sebanyak 625 kantor, terdiri dari 127 Kantor Pusat (KP) dan 498 Kantor Cabang (KC). Secara tahunan, jumlah tersebut relatif stabil dibanding triwulan I 2019. Dalam rangka membangun industri KUPVA BB yang sehat dan efisien, Bank Indonesia melakukan fungsi pengaturan dan pengawasan untuk mencegah pemanfaatan KUPVA BB dalam pencucian uang, pendanaan terorisme, atau kejahatan lainnya.

Grafik 5.11. Jumlah KUPVA BB Berizin di Provinsi Bali

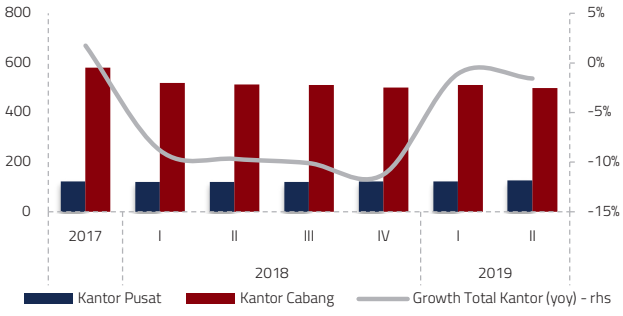

Sumber: BISKOMVA, diolah

5.2.3. Perkembangan Inklusi Keuangan Provinsi Bali

Keuangan inklusif merupakan salah satu upaya Bank Indonesia dalam rangka mendukung efektivitas fungsi dan tugas Bank Indonesia baik dari sisi stabilitas sistem keuangan/makroprudensial, moneter, maupun sistem pembayaran. Dari sisi stabilitas sistem keuangan, keuangan inklusif dapat membantu menurunkan tekanan risiko likuiditas (*liquidity risk*) dan risiko kredit (*credit risk*) di sektor perbankan. Dari sisi likuiditas, perbankan berupaya meningkatkan porsi penghimpunan dananya dari segmen ritel karena segmen ini relatif lebih stabil meskipun dalam kondisi *shock*. Sementara itu pada sisi kredit, terbukanya segmen ritel baru yaitu kredit mikro dan kecil menjadi salah satu strategi diversifikasi portofolio dan diversifikasi risiko kredit. Guna mendukung keuangan inklusif, BI juga melaksanakan berbagai program pengembangan keuangan inklusif berupa edukasi keuangan dan perlindungan konsumen untuk meningkatkan kapabilitas masyarakat yang diharapkan dapat menumbuhkan *responsible finance* bagi masyarakat.

Dari sisi kebijakan moneter, program pengembangan keuangan inklusif diharapkan dapat meningkatkan efektivitas transmisi *policy rate*, mengingat transmisi *policy rate* dilakukan melalui perbankan. Berkembangnya keuangan inklusif di masyarakat akan membantu efektivitas kebijakan moneter dan diharapkan tidak ada lagi masyarakat yang terkena *second round effect*[72] dari kebijakan tersebut.

Sementara itu dari sisi sistem pembayaran, pengembangan keuangan inklusif akan mendukung semakin luas dan lancarnya jangkauan sistem pembayaran ke seluruh pelosok daerah sehingga dapat digunakan oleh seluruh penduduk di manapun berada. Di samping itu, program keuangan inklusif

72. Second round effect adalah dampak lanjutan dari kebijakan moneter yang telah ditetapkan oleh Bank Indonesia

juga membantu terwujudnya program *less cash society* sehingga dapat memberikan nilai tambah bagi masyarakat dan perekonomian.

Bank Indonesia memiliki parameter yang digunakan untuk mengukur tingkat inklusifitas keuangan pada suatu daerah atau wilayah, yaitu Indeks Keuangan Inklusif (IKI)[73]. Pengukuran IKI dilakukan Bank Indonesia untuk mengkombinasikan berbagai indikator yang tersedia di sektor perbankan. IKI menggabungkan beberapa informasi mengenai berbagai dimensi dari sebuah sistem keuangan inklusif meliputi: akses (*access*), penggunaan (*usage*) dan kualitas (*quality*) dari layanan perbankan.

Dimensi Akses[74]

Beberapa indikator yang dipergunakan dalam mengukur dimensi akses untuk IKI meliputi:

1. Jumlah kantor bank per 100.000 penduduk dewasa[75].
2. Jumlah Anjungan Tunai Mandiri (ATM) per 100.000 penduduk dewasa.
3. Jumlah kantor bank[76] per 1.000 km^2.
4. Jumlah ATM per 1.000 km^2.

Pada triwulan II 2019, rasio jumlah kantor layanan bank per 100.000 penduduk di Provinsi Bali mencapai 33, masih sama dengan rasio pada triwulan I 2019. Demikian halnya rasio jumlah ATM per 100.000 penduduk di Provinsi Bali pada triwulan I 2019 masih sama dengan triwulan sebelumnya, yaitu sebesar 102[77]. Bila dianalisis lebih lanjut secara spasial, Kabupaten Bangli masih menjadi daerah dengan rasio jumlah kantor layanan dan ATM terendah dengan pangsa jumlah penduduk dewasa sebesar 10%. Di sisi lain, Kabupaten Gianyar dengan jumlah penduduk terendah (pangsa 4%) memiliki rasio jumlah kantor layanan tertinggi. Hal ini mengingat walaupun luas wilayah Kabupaten Gianyar relatif kecil, tetapi menjadi pusat daerah pariwisata Bali selain Kabupaten Badung. Sementara itu rasio jumlah ATM tertinggi dicatat oleh Kabupaten Badung. Pada triwulan berjalan, terdapat penurunan jumlah kantor layanan bank di wilayah Denpasar sebanyak 1 kantor dan Gianyar sebanyak 3 kantor seiring dengan upaya efisiensi operasional perbankan. Sejalan dengan hal tersebut, jumlah ATM juga berkurang 1 unit pada triwulan laporan.

Ditinjau dari cakupan luas wilayahnya, rasio jumlah ATM per 1000 km2 di Provinsi Bali sama dengan triwulan sebelumnya yaitu sebesar 534. Namun demikian, rasio jumlah kantor layanan bank per 1000 km2 mengalami penurunan dari 175 di triwulan lalu menjadi 174. Secara spasial, penurunan rasio jumlah kantor layanan bank di Provinsi Bali tersebut

Tabel 5.3. Rasio Jumlah Kantor dan ATM per 100.000 Penduduk

	Jumlah Layanan Bank	Jumlah ATM	Rasio Jumlah Kantor Layanan	Rasio Jumlah ATM
Provinsi Bali	982	3011	33	102
Kota Denpasar	294	1214	46	190
Kab. Badung	251	995	72	285
Kab. Bangli	25	31	9	11
Kab. Buleleng	80	139	42	73
Kab. Gianyar	117	294	96	240
Kab. Jembrana	40	69	13	23
Kab. Karangasem	45	77	10	17
Kab. Klungkung	30	49	19	32
Kab. Tabanan	100	143	22	32

Sumber: Bank Indonesia

73. IKI adalah salah satu alternatif cara dalam pengukuran keuangan inklusif yang menggunakan indeks multi-dimensional berdasarkan data makroekonomi, terutama pada jangkauan layanan sektor perbankan
74. Dimensi Akses adalah dimensi yang digunakan untuk mengukur kemampuan penggunaan jasa keuangan formal, sehingga dapat dilihat terjadinya potensi hambatan untuk membuka dan mempergunakan rekening bank, seperti biaya atau keterjangkauan fisik layanan jasa keuangan (kantor bank, ATM, dan lain-lain)
75. Penduduk dewasa adalah semua penduduk di suatu negara atau provinsi atau kabupaten/kota yang berusia di atas 15 tahun
76. Kantor Bank adalah sebagai seluruh jaringan/unit kantor bank umum dan BPR yang tercatat dapat memberikan layanan keuangan kepada nasabah secara fisik dengan kantor utamanya, antara lain meliputi: Kantor Cabang (KC), Kantor Cabang Pembantu (KCP), Kantor Kas, Unit Usaha Syariah, Kas Mobil, Payment Point, Agency, dan Deposit Taking Company (DTC).
77. Berarti terdapat 33 kantor layanan bank dan 102 jaringan ATM yang siap untuk melayani 100.000 penduduk dewasa di Bali.

Tabel 5.4. Rasio Jumlah Kantor dan ATM per 1000 km²

	Jumlah Layanan Bank	Jumlah ATM	Rasio Jumlah Kantor Layanan	Rasio Jumlah ATM
Prov. Bali	982	3011	174	534
Kota Denpasar	294	1214	2301	9501
Kab. Badung	251	995	600	2377
Kab. Bangli	25	31	48	60
Kab. Buleleng	80	139	59	102
Kab. Gianyar	117	294	318	799
Kab. Jembrana	40	69	48	82
Kab. Karangasem	45	77	54	92
Kab. Klungkung	30	49	95	156
Kab. Tabanan	100	143	119	170

Sumber: Bank Indonesia

disebabkan oleh penurunan jumlah kantor layanan di Kota Denpasar dan Kabupaten Gianyar. Kabupaten Jembrana dan Bangli masih tercatat sebagai wilayah dengan rasio jumlah kantor layanan per 1000 km2 terendah. Kabupaten Bangli juga tercatat sebagai wilayah dengan rasio jumlah ATM per 1000 km2 terendah pada triwulan laporan. Sementara itu, Kota Denpasar tercatat memiliki rasio jumlah kantor layanan dan ATM per 1000 km2 tertinggi seiring dengan luas wilayah yang paling kecil (pangsa 2%) namun menjadi pusat pemerintahan dan pusat operasional perbankan di Bali.

Dimensi Penggunaan[78]

Beberapa indikator yang dipergunakan dalam mengukur dimensi penggunaan meliputi:

1. Jumlah rekening dana pihak ketiga (deposito, giro, tabungan) per 1.000 penduduk dewasa.
2. Jumlah rekening kredit per 1.000 penduduk dewasa.

Berdasarkan data yang dihimpun pada triwulan II 2019, rasio jumlah rekening simpanan (giro, tabungan dan deposito) per 1.000 penduduk dewasa di Provinsi Bali sebesar 1.765, meningkat dibanding triwulan I 2019 (1.720). Kondisi ini menunjukkan bahwa secara umum terjadi peningkatan jumlah rekening simpanan yang dimiliki penduduk dewasa di bank sepanjang triwulan II 2019. Nilai rasio lebih dari 1.000 menandakan keberadaan penduduk dewasa yang memiliki lebih dari satu rekening simpanan[79]. Secara spasial, seluruh kabupaten/kota di Provinsi Bali mengalami peningkatan rasio jumlah rekening simpanan dengan peningkatan

Tabel 5.5. Indikator *Banking Penetration*

	Rasio Jumlah Rekening Kredit		Rasio Jumlah Rekening Simpanan	
	Tw I 2019	Tw II 2019	Tw I 2019	Tw II 2019
Provinsi Bali	208	212	1720	1765
Kab. Buleleng	343	354	2854	3033
Kab. Jembrana	138	141	805	842
Kab. Tabanan	121	124	761	780
Kab. Badung	151	154	2318	2382
Kab. Gianyar	383	390	3079	3170
Kab. Klungkung	162	165	999	1019
Kab. Bangli	85	87	467	482
Kab. Karangasem	98	100	605	616
Kota Denpasar	406	409	3432	3484

Sumber: Bank Indonesia

78. Dimensi penggunaan adalah dimensi yang digunakan untuk mengukur kemampuan penggunaan aktual produk dan jasa keuangan, antara lain terkait keteraturan, frekuensi dan lama penggunaan
79. Contohnya Provinsi Bali memiliki penduduk dewasa berjumlah 3,25 juta dengan jumlah rekening simpanan sebanyak 4,5 juta. Rasio jumlah simpanan=4,5juta / 3,25juta x 1000=1383

rasio terbesar terjadi di Kabupaten Buleleng, yaitu dari 2.854 pada triwulan I 2019 menjadi 3.033 pada triwulan II 2019.

Sejalan dengan simpanan, rasio jumlah rekening kredit pada triwulan II 2019 turut mengalami peningkatan, dari 208 pada triwulan I 2019 menjadi 212. Secara spasial, seluruh wilayah di Bali mengalami peningkatan rasio jumlah rekening kredit. Peningkatan jumlah rekening kredit terbesar terjadi di Kabupaten Buleleng dari 343 pada triwulan I 2019 menjadi 354 pada triwulan II 2019.

5.2.4. Pengembangan Layanan Keuangan Nontunai dan Elektronifikasi

Bank Indonesia terus berupaya meningkatkan elektronifikasi transaksi pembayaran dan peningkatan infrastruktur sistem pembayaran di seluruh wilayah Indonesia. Salah satu upaya yang dilakukan adalah penerapan elektronifikasi jalan tol 100% pada Oktober 2017. Upaya ini sesuai amanat Presiden RI yang dituangkan dalam regulasi Peraturan Menteri PUPR No.16/PRT/M/2017 tanggal 12 September 2017 tentang Transaksi Tol Nontunai di Jalan Tol.

Sejak tanggal 1 Oktober 2017, pembayaran di Tol Bali Mandara sudah sepenuhnya menerapkan non-tunai (100% non-tunai). Jalan Tol Bali Mandara memiliki 3 pintu gerbang, yakni Gerbang Tol Benoa, Gerbang Tol Nusa Dua dan Gerbang Tol Ngurah Rai. Jumlah Gardu Tol yang beroperasi di Jalan Tol Bali Mandara sebanyak 20 unit Gardu Tol. Selain itu, pada Maret 2018 telah dioperasikan layanan *drive thru* penjualan dan isi ulang uang elektronik di pintu tol Benoa untuk mengurangi kemacetan yang seringkali terjadi di pintu tol. Dengan adanya *drive thru* tersebut, pengguna tol dapat melakukan *top up* saldo uang elektronik ataupun membeli uang elektronik. Layanan *drive thru* penjualan dan isi ulang uang elektronik di Jalan Tol Bali Mandara ini adalah yang pertama di Indonesia.

Pada triwulan II 2019, jumlah uang elektronik di Provinsi Bali tercatat sebesar 314.440 unit atau tumbuh 523,48% (yoy), terakselerasi dibanding triwulan sebelumnya (455,75%, yoy). Jumlah uang elektronik di triwulan laporan tumbuh sangat tinggi dibandingkan rata-rata 2 tahun terakhir sejak elektronifikasi mulai efektif digunakan secara massal di Bali pada 2017. Hal ini didorong oleh masifnya perluasan program elektronifikasi di Provinsi Bali dan tingkat penerimaan masyarakat yang tinggi karena sudah umum digunakan.

Berdasarkan jenis penggunaannya, transaksi isi ulang mendominasi pada triwulan II 2019 dengan pangsa 45%, lebih tinggi dibanding triwulan lalu (38%). Dilihat dari nominalnya, transaksi isi ulang tercatat sebesar Rp113,98 miliar atau tumbuh 13.405% (yoy), terakselerasi dibanding triwulan I 2019 yang tumbuh 9.862% (yoy) dengan nilai Rp25,76 miliar. Sejalan dengan isi ulang, penggunaan uang elektronik untuk transaksi pembayaran juga mengalami akselerasi dari 810% (yoy) menjadi 13.164% (yoy) pada triwulan laporan. Pangsa transaksi pembayaran pada triwulan laporan sebesar 38% (nominal Rp95,95 miliar), menurun dibanding triwulan sebelumnya 48% (Rp33,14 miliar).

Tabel 5.6. Jumlah Gardu Tol Provinsi Bali Mandara

No	Nama Gerbang Tol	Jumlah Gardu Tol		
		Mobil	Sepeda Motor	Total
1	Gerbang Tol Benoa	4	3	7
2	Gerbang Tol Nusa Dua	4	4	8
3	Gerbang Tol Ngurah Rai	4	3	7
TOTAL		12	8	22

Sumber: PT. Jasa Marga Provinsi Bali Tol, Tbk

Grafik 5.12. Perkembangan Jumlah Uang Elektronik

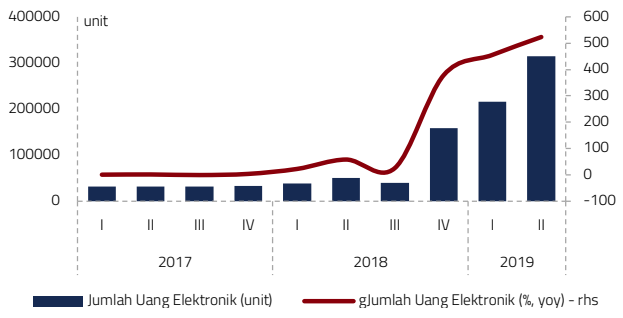

Sumber: Bank Indonesia

Grafik 5.13. Perkembangan Jenis Transaksi Uang Elektronik

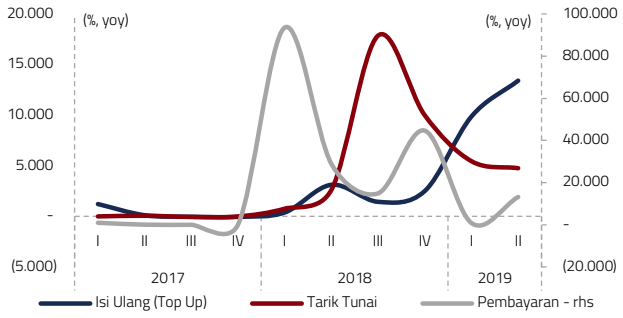

Sumber: Bank Indonesia

Grafik 5.14. Pangsa Jenis Transaksi Uang Elektronik

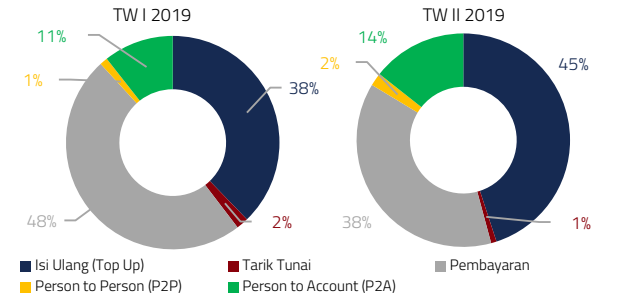

Sumber: Bank Indonesia

Selain penerapan 100% non-tunai di jalan tol, upaya mendorong perluasan elektronifikasi juga dilakukan melalui kerja sama dengan beberapa *stakeholder* dalam menjajaki beberapa program elektronifikasi. **KPw BI Provinsi Bali bekerjasama memfasilitasi dan mendukung implementasi elektronifikasi parkir (*e-parking*) kendaraan bermotor, obyek wisata, retribusi daerah, SPBU dan parkir bandara.** Kerjasama dengan PT Angkasa Pura dilakukan untuk mewujudkan program elektronikasi pada pembayaran parkir kendaraan bermotor di Bandara I Gusti Ngurah Rai yang dikemas dalam "Bali Card". Selain itu, program elektronifikasi juga telah dilakukan pada pembayaran tiket penyeberangan di Pelabuhan Gilimanuk dan Pelabuhan Benoa (*e-Port Card*). Di Pelabuhan Gilimanuk telah dilakukan uji coba sejak 15 Agustus 2018. Hingga saat ini, untuk loket masuk penumpang dan loket masuk sepeda motor telah implementasi non tunai 100%, sedangkan untuk loket masuk kendaraan roda empat masih menggunakan sistem *Hybrid* (tunai dan non tunai). Dalam bidang transportasi, program elektronifikasi dilakukan dengan menyasar salah satu penyedia jasa transportasi, yaitu Blue Bird Group Bali. KPw BI Provinsi Bali juga mendorong elektronifikasi pembayaran tiket masuk obyek wisata khususnya di Kabupaten Tabanan dan kawasan wisata Pantai Pandawa serta pembayaran parkir kendaraan di pusat perbelanjaan.

Di Kabupaten Tabanan telah terdapat 14 terminal parkir elektronik (TPE) on street dengan rata-rata jumlah transaksi 63ribu kali/bulan dan rata-rata nominal transaksi Rp187juta/bulan. Selain itu juga terdapat 1 TPE *off street* dengan rata-rata jumlah transaksi 17ribu kali/bulan dan rata-rata nominal transaksi Rp46juta/bulan. Implementasi *e-ticketing* telah dilaksanakan di penyeberangan Nusa Penida, Kab. Klungkung.

Selain kerjasama dan kolaborasi dengan berbagai stakeholder, implementasi pembayaran non-tunai di pemerintahan daerah provinsi Bali juga terus dikembangkan, baik untuk penerimaan maupun pengeluaran. Dari sisi penerimaan daerah, penerapan non-tunai telah dilaksanakan pada pajak daerah, khususnya Pajak/Retribusi Daerah, PBB, BPHTB, dan industri perhotelan, hiburan dan restoran (PHR). Sementara pengeluaran daerah Provinsi Bali juga telah diterapkan elektronifikasi, yaitu menggunakan transfer atau pemindahbukuan pada rekening bank untuk pembayaran dan transaksi daerah. Pemprov Bali juga telah menerapkan komputerisasi yang tersambung secara *online* untuk pengelolaan APBD, sehingga

pembuatan laporan keuangan seperti neraca dapat dilakukan seketika. Implementasi e-Retribusi di 2019 telah dilaksanakan di Pasar Umum Beringkit (Kab. Badung), Pasar Agung (Desa Peninjoan) dan Pasar Jembrana.

Sesuai dengan arahan Presiden RI mengenai transformasi penyaluran bansos secara non tunai, Bank Indonesia juga telah menerjemahkan hal tersebut ke dalam suatu model bisnis, berkoordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait. Kebijakan penyaluran bansos non tunai baik dalam bentuk program keluarga harapan (PKH), program Indonesia pintar (PIP), bantuan pangan, pupuk dan dana desa, dinilai lebih efisien dibanding bansos tunai. Bansos non-tunai khususnya PKH (Program Keluarga Harapan) telah disalurkan di seluruh Kabupaten/Kota di Provinsi Bali. Penyaluran dilakukan oleh HIMBARA (Himpunan Bank-Bank Negara) dengan pembagian wilayah penyaluran yang telah ditentukan. Sementara itu, penyaluran Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) murni atau non-irisan baru mulai disalurkan pada 2019.

Penyaluran bantuan sosial dalam bentuk non tunai/ elektronik dapat dilakukan melalui mekanisme LKD, agen bank, atau *e-warong*. LKD merupakan pembayaran dan jasa keuangan yang bekerja sama dengan pihak ketiga (agen) dan menggunakan teknologi *mobile* dan berbasis daring (dalam jaringan *online*). Layanan ini mendukung perkembangan keuangan inklusif dan distribusi yang efektif dari dana bantuan pemerintah ke masyarakat (G2P). Mulai pertengahan tahun 2016, atau tepatnya pada penyaluran PKH tahap III, LKD digunakan sebagai salah satu sistem distribusi bantuan untuk Program Keluarga Harapan (PKH) kepada KPM. Hal ini juga ditujukan sebagai bagian dari usaha untuk mendukung program Gerakan Nasional Non Tunai (GNNT), mendorong efisiensi distribusi bantuan dan meminimalisir kebocoran atau kecurangan. Elektronik warung gotong royong (*e-warong*) adalah agen bank, pedagang dan/atau pihak lain yang telah bekerja sama dengan Bank Penyalur dan berperan sebagai tempat penarikan/pembelian Bantuan Sosial oleh Penerima Bantuan Sosial bersama Bank Penyalur. Ke depan, Bank Indonesia akan terus berkoordinasi dengan HIMBARA sebagai penyalur BPNT untuk menambah jumlah *E-Warong* yang melayani penerimaan KPM BPNT.

Menindaklanjuti hal tersebut dan sebagai salah satu upaya dalam mengembangkan layanan keuangan non tunai dan elektronifikasi di Provinsi Bali, pada tahun 2018 telah dilakukan sosialisasi dan edukasi penyaluran bantuan sosial non tunai, *training of trainers* (ToT) penyaluran program bantuan sosial secara non tunai di Kabupaten Karangasem, Kabupaten Buleleng dan Kabupaten Negara, terutama kepada pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) dan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) serta pejabat Dinas Sosial. Selain itu, kegiatan edukasi penyaluran bantuan sosial non-tunai diikuti oleh Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dan agen bank.

Berdasarkan data yang dihimpun Bank Indonesia, pada triwulan II 2019 jumlah agen LKD di Provinsi Bali sebanyak 25.173 agen atau tumbuh 173% (yoy), terakselerasi dibanding triwulan I 2019 (127%,yoy). Akselerasi jumlah agen LKD ini sejalan dengan semakin pesatnya perkembangan elektronifikasi di Provinsi Bali.

Grafik 5.15. Perkembangan Jumlah Agen LKD di Provinsi Bali

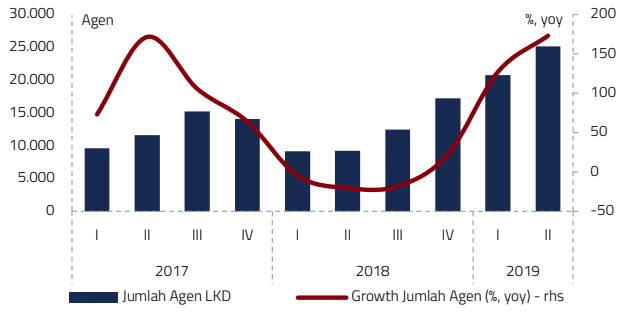

Sumber: Bank Indonesia

Sebagai pedoman implementasi *Quick Response Code Indonesian Standard* (QRIS), Bank Indonesia (BI) menerbitkan Peraturan Anggota Dewan Gubernur (PADG) No.21/18/PADG/2019 tentang Implementasi Standar Nasional *Quick Response Code* untuk Pembayaran pada 16 Agustus 2019. Penerbitan ketentuan bertujuan untuk memastikan penyelenggaraan layanan pembayaran yang menggunakan QRIS di Indonesia dapat berjalan dengan baik. Implementasi QRIS secara nasional efektif berlaku mulai 1 Januari 2020, guna memberikan masa transisi persiapan bagi Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran (PJSP).

Bank Indonesia meluncurkan standar *Quick Response* (QR) *Code* untuk pembayaran melalui aplikasi uang elektronik *server based*, dompet elektronik, atau *mobile banking* yang disebut QR *Code Indonesian Standard* (QRIS), bertepatan dengan Hari Ulang Tahun (HUT) ke–74 Kemerdekaan RI, pada 17 Agustus 2019 di Jakarta. Peluncuran QRIS merupakan salah satu implementasi Visi Sistem Pembayaran Indonesia (SPI) 2025, yang telah dicanangkan pada Mei 2019 lalu.

Pengembangan QRIS ini mengusung semangat Unggul yaitu, universal yang berarti penggunaan QRIS bersifat inklusif untuk seluruh lapisan masyarakat dan dapat digunakan untuk transaksi pembayaran di domestik dan luar negeri. Gampang berarti masyarakat dapat bertransaksi dengan mudah dan aman dalam satu genggaman ponsel. Untung memiliki arti transaksi dengan QRIS menguntungkan pembeli dan penjual karena transaksi berlangsung efisien melalui satu kode QR yang dapat digunakan untuk semua aplikasi pembayaran pada ponsel. Langsung berarti transaksi dengan QRIS langsung terjadi, karena prosesnya cepat dan seketika sehingga mendukung kelancaran sistem pembayaran.

QRIS disusun dan dikembangkan oleh Bank Indonesia dan Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia (ASPI) dengan menggunakan standar internasional EMV Co.1 untuk mendukung interkoneksi instrumen sistem pembayaran yang lebih luas dan mengakomodasi kebutuhan spesifik negara sehingga memudahkan interoperabilitas antar penyelenggara, antar instrumen, termasuk antar negara. Untuk tahap awal, QRIS fokus pada penerapan QR *Code Payment* model *Merchant Presented Mode* (MPM) dimana penjual (*merchant*) yang akan menampilkan QR *Code* pembayaran untuk dipindai oleh pembeli (*customer*) ketika melakukan transaksi pembayaran.

BOKS 3

E-COMMERCE MENDUKUNG PERTUMBUHAN EKONOMI BALI

Presiden secara resmi telah mengumumkan Peta Jalan Sistem Perdagangan Nasional Berbasis Elektronik (SPNBE) atau *Roadmap* E-commerce 2017-2019 dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 74 Tahun 2017. Perpres ini merupakan bukti keseriusan pemerintah dalam mendorong pencapaian ekonomi digital senilai USD 130 miliar pada tahun 2020 mendatang. Hal tersebut dapat menjadikan Indonesia sebagai negara dengan ekonomi digital terkuat di Asia Tenggara. Secara garis besar program dari *Road Map E-commerce* tersebut adalah (1) Optimalisasi pendanaan untuk UMKM digital dan start up *e-commerce* (2) Penyederhanaan kewajiban dan persamaan perlakuan pajak (3) Perlindungan konsumen dan pelaku industri dengan regulasi (4) Edukasi ekosistem *e-commerce* dan pengambilan kebijakan (5) Peningkatan infrastruktur komunikasi sebagai pondasi *e-commerce* (6) Peningkatan efisiensi logistik *e-commerce* dengan Sistem Logistik Nasional (7) Penguatan sistem keamanan cyber untuk meningkatkan keamanan transaksi online.

Gambar 1. Peta Jalan E-commerce Indonesia 2017-2019

Perkembangan E-commerce Bali

Jumlah transaksi e-commerce di Bali mengalami peningkatan yang sangat signifikan. Pada triwulan II 2019 nominal transaksi *e-commerce* di Provinsi Bali sebanyak Rp 1,1 triliun atau tumbuh 208,96% (yoy), jauh lebih tinggi dibandingkan dengan triwulan I 2019 yang tumbuh sebesar 133,79%, dengan nilai transaksi sebesar Rp 649,45 milyar.

Grafik 2. Perkembangan Jumlah Nominal Transaksi E-commerce

Bila dianalisis lebih lanjut dari jenis pembayarannya, metode pembayaran yang paling banyak digunakan oleh masyarakat Bali dalam transaksi *e-commerce* melalui transfer bank, yaitu dengan pangsa sebesar 42,09% pada triwulan II 2019, lebih rendah dibanding triwulan I 2019 (58,77%). Sementara itu, pembayaran menggunakan uang elektronik meningkat dari sebelumnya memiliki pangsa hanya 18,12% di triwulan I 2019 menjadi 41,12% di triwulan II 2019. Jumlah ini hampir menyamai metode transfer bank. Berdasarkan jenis kelaminnya, pelaku *e-commerce* di Provinsi Bali didominasi oleh laki-laki (pangsa 52%). Sedangkan dilihat dari usia, penduduk usia 22-29 tahun mendominasi dengan pangsa 11%. Adapun produk yang dominan ditransaksikan adalah fashion.

Grafik 3. Perkembangan Pangsa Produk E-commerce

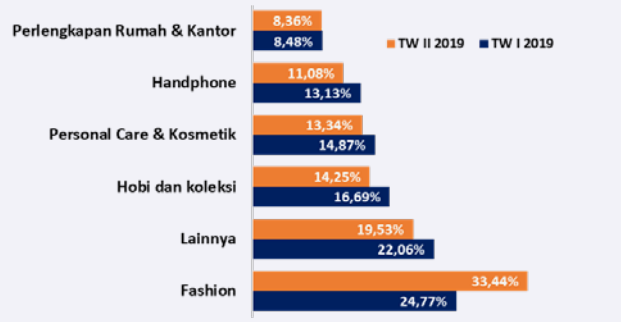

Penetrasi *e-commerce* di Provinsi Bali tumbuh pesat. Hal ini tercermin pada akselerasi jumlah penjual *e-commerce* yang sangat tinggi. Pada triwulan II 2019, jumlah penjual tumbuh 259,17% (yoy) atau sebanyak 95,61 ribu orang penjual, jauh lebih tinggi dibanding triwulan I 2019 (114,31%, yoy). Seiring dengan akselerasi jumlah penjual, jumlah pembeli di *e-commerce* juga meningkat. Jumlah pembeli di triwulan II 2019 tumbuh 61,61% (yoy) atau sebanyak 896,11 ribu orang pembeli, terakselerasi dibanding triwulan I 2019 (56,09%, yoy).

Grafik 4. Perkembangan Jumlah Pembeli dan Penjual *E-commerce*

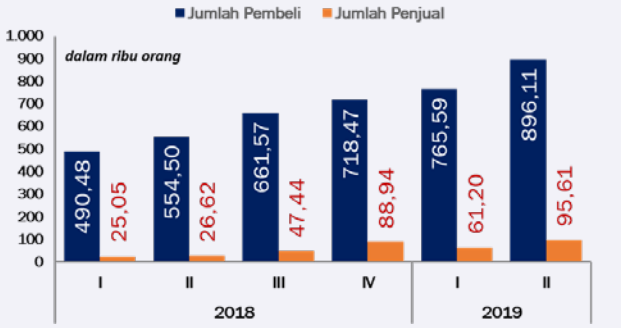

Dampak Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Bali

Pesatnya perkembangan *e-commerce* di Provinsi Bali dapat mendorong pertumbuhan ekonomi ke depan. Pada gilirannya juga dapat berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dan penurunan angka pengangguran seiring dengan mudahnya pelaku usaha dalam mengakses pasar global melalui *e-commerce*. Hal ini terkonfirmasi oleh akselerasi kinerja lapangan usaha perdagangan (PDRB) di triwulan II 2019 yang tumbuh 10,97% (yoy), lebih tinggi dibanding triwulan I 2019 (7,96%, yoy). Berdasarkan hasil Survei Penjualan Eceran Bank Indonesia, penjualan barang kerajinan dan pakaian jadi di triwulan I 2019 juga meningkat dari -24,78% (yoy) di triwulan I 2019 menjadi -23,61% (yoy) di triwulan II 2019.

Seiring dengan pesatnya pengguna internet di Indonesia, *e-commerce* menawarkan peluang yang sangat besar dalam pengembangan bisnis UMKM di Provinsi Bali. Dalam rangka menjemput peluang ini, maka pelaku usaha khususnya pelaku UMKM (pangsa terbesar di Bali) sebagai penghasil produk perlu bersiap diri, baik dari sisi kompetensi maupun kualitas produk yang dihasilkan, agar dapat memanfaatkan momentum perkembangan *e-commerce*.

Tantangan dan Strategi

Infrastruktur. *E-commerce* membutuhkan dukungan infrastruktur internet yang stabil dengan kecepatan tinggi. Hal ini tentunya sangat mudah dipenuhi untuk wilayah pusat kota. Namun demikian, tidak semua daerah (khususnya pedesaan) di Bali terjangkau internet yang stabil dan mumpuni. Dalam hal ini diharapkan program perluasan penyediaan internet bagi masyarakat oleh Pemerintah Daerah dapat diprioritaskan pada wilayah pedesaan.

Selain itu, dalam hal distribusi/logistik, proses bisnis *e-commerce* perlu didukung dengan infrastruktur jalan yang memadai dan terjangkau oleh penyedia jasa kurir. Dalam hal ini beberapa negara berkembang memanfaatkan jaringan layanan kantor pos yang telah menjangkau pelosok daerah.

Kompetensi. Tantangan utama dalam perluasan *e-commerce* pada UMKM di Provinsi Bali adalah aspek *awareness* UMKM terhadap pentingnya *e-commerce*. Dalam hal ini, perlu dilakukan sosialisasi/edukasi oleh Pemerintah Daerah bekerja sama dengan pelaku bisnis *e-commerce* tentang cara kerja, manfaat dan strategi agar dapat sukses meningkatkan omset penjualan secara online. Dalam kegiatan dimaksud juga perlu adanya simulasi penggunaan portal *e-commerce*, mulai dari bagaimana cara mendaftar di *marketplace* hingga layanan *after sales*.

Bergabung dengan *e-commerce* saja belum cukup meningkatkan penjualan, tetapi UMKM perlu memahami tren penjualan melalui data-data yang dianalisis oleh marketplace. Pelaku UMKM perlu dibekali dengan pelatihan atau riset terkait pemahaman selera pasar karena seringkali pelaku UMKM hanya membuat produk yang disukai tanpa mengetahui kebutuhan pasar. Hal tersebut penting disampaikan kepada UMKM agar semakin mengerti potensi pasar yang begitu besar.

Keamanan Transaksi. Gagasan transaksi elektronik belum mendapatkan kepercayaan penuh dari masyarakat. Pelanggan masih memiliki rasa khawatir terhadap transaksi yang tidak aman dan praktek peretasan data. Untuk mengatasi masalah ini, bank dan lembaga keuangan lainnya harus memastikan bahwa telah menerapkan tindakan pengamanan yang sesuai. Penyedia jasa keuangan perlu melakukan sosialisasi dan edukasi kepada pelaku UMKM dan masyarakat untuk memberikan pemahaman tentang keamanan transaksi pembayaran secara online.

Pembiayaan. Pengembangan skala bisnis UMKM tidak terlepas dari dukungan pembiayaan. Dalam menjalankan usaha melalui *e-commerce*, UMKM tidak diharuskan memiliki aset fisik seperti toko/kantor,

oleh karena itu dalam mengajukan pembiayaan memungkinkan untuk tanpa agunan. Hal ini juga berpengaruh pada nilai pembiayaan yang tidak sebesar kebutuhan usaha konvensional. Dengan demikian, diharapkan perbankan turut memberikan stimulasi inisiatif berupa kebijakan mempermudah proses pinjaman bagi pengusaha *e-commerce*.

Sumber Daya Manusia. *E-commerce* sangat identik dengan kaum milenial. Dalam rangka menjaga sustainabilitas pelaku usaha *e-commerce* di masa depan, Pemerintah dapat memasukkan konsep *e-commerce* dalam kurikulum sekolah untuk memunculkan *entrepreneur* muda sejak dini.

BAB VI

KETENAGAKERJAAN DAN KESEJAHTERAAN

- Jumlah angkatan kerja di Bali pada Februari 2019 tercatat mengalami penurunan dibanding Februari 2018, sejalan dengan kondisi tersebut Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) diperiode yang sama menunjukkan peningkatan menjadi 1,19%, lebih tinggi dibanding Februari 2018 yang sebesar 0,86%.
- Angka kemiskinan di Bali pada Maret 2019 tercatat sebesar 3,79%, menurun dibanding Maret 2018 yang sebesar 4,01%. Sejalan dengan kondisi tersebut Gini Ratio mengalami penurunan sedangkan NTP menunjukkan peningkatan.

2,54 juta orang Februari 2019	76,68% Februari 2019	1,19% Februari 2019	3,79% Maret 2019	0,366 Maret 2019	103,49 triwulan II 2019	74,77 2018
Jumlah Angkatan Kerja 2,61 juta orang Februari 2018	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja 79,83% Februari 2018	Tingkat Pengangguran Tebuka 0,86% Februari 2018	Angka Kemiskinan 4,01% Maret 2018	Gini Ratio 0,377 Maret 2018	Nilai Tukar Petani (NTP) 103,32 triwulan I 2019	Indeks Pembangunan Manusia 74,30 2017

Lapangan Puputan Margarana

Kondisi ketenagakerjaan di Provinsi Bali ditandai oleh Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 1,19%. Angka ini dihasilkan dari perbandingan jumlah penduduk yang tidak bekerja dan jumlah angkatan kerja dimana pada tahun 2019 jumlah angkatan kerja mengalami penurunan sehingga angka pembaginya lebih rendah. Tingkat pengangguran tertinggi berada pada tenaga kerja lulusan diploma dan SMK. Angka kemiskinan Bali pada Maret 2019 tercatat sebesar 3,79%, dengan jumlah penduduk sekitar 163 ribu orang. Angka ini membaik yang ditopang oleh meningkatnya tingkat kesejahteraan petani dan penurunan tingkat ketimpangan. Indeks pembangunan manusia (IPM) Provinsi Bali tercatat 74,77, relatif stabil dibandingkan dengan IPM sebelumnya.

6.1. KETENAGAKERJAAN

6.1.1. Kondisi Ketenagakerjaan Di Bali

Kondisi ketenagakerjaan di Provinsi Bali pada Februari 2019 ditandai dengan menurunnya jumlah angkatan kerja. Penurunan jumlah angkatan kerja disebabkan oleh menurunnya jumlah penduduk usia kerja yang mencari kerja di Bali. Penduduk usia kerja di Bali tercatat sebanyak 3,31 juta orang di Februari 2019, atau meningkat sebesar 1,41% (yoy), dibanding kondisi bulan Februari 2018 sebanyak 3,26 juta. Sementara itu, jumlah angkatan kerja di Bali pada Februari 2019 tercatat sebesar 2,54 juta orang, turun 2,60% (yoy) dibanding Februari 2018 yang berjumlah 2,6 juta orang. Faktor-faktor yang menyebabkan menurunnya jumlah angkatan kerja per bulan Februari 2019 dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2018 disebabkan oleh:

1. Terbukanya lapangan pekerjaan yang bersifat individu, virtual dan online di era digitalisasi sehingga tidak terdefinisi sebagai angkatan kerja.
2. Tersedianya pilihan bagi penduduk usia kerja yang mencari kerja di luar Bali seperti lowongan bekerja di luar negeri di kapal pesiar.

Grafik 6.1. Perkembangan Tingkat Pengangguran di Provinsi Bali

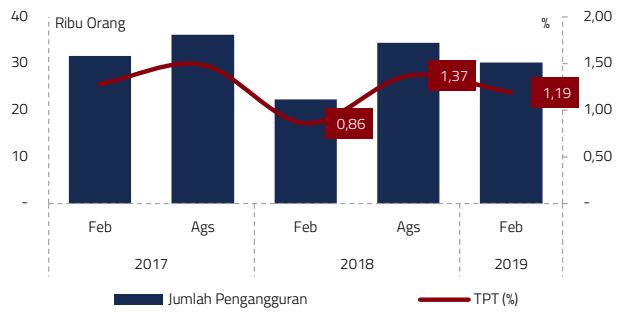

Sumber : BPS Provinsi Bali, diolah

Penurunan kondisi sektor ketenagakerjaan di periode Februari 2019 juga tercermin oleh meningkatnya Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT). Jumlah angkatan kerja yang bekerja pada Februari 2019 tercatat sebesar 2,51 juta orang, lebih rendah dibanding Februari 2018 sebesar 2,58 juta. Sejalan dengan kondisi tersebut, TPT Bali pada Februari 2019 tercatat sebesar 1,19%, lebih tinggi dibanding pada periode yang sama di 2018 sebesar 0,86%. Meningkatnya tingkat pengangguran terbuka ini selain disebabkan oleh menurunnya jumlah penduduk bekerja juga disebabkan oleh menurunnya jumlah angkatan kerja sehingga angka pembaginya menjadi semakin tinggi. Angka TPT Provinsi Bali pada

Tabel 6.1. Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas Menurut Jenis Kegiatan Utama

KEGIATAN UTAMA	2017		2018		2019
	Feb	Ags	Feb	Ags	Feb
Penduduk Usia 15+ (Ribu Orang)	3.212	3.236	3.266	3.289	3.312
Angkatan Kerja (Ribu Orang)	2.469	2.434	2.607	2.525	2.540
Bekerja (Ribu Orang)	2.437	2.398	2.585	2.491	2.509
Pengangguran (Ribu Orang)	32	36	22	34	30
Bukan Angkatan Kerja (Ribu Orang)	743	801	659	764	772
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (%)	76,87	75,24	79,83	76,78	76,68
Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	1,28	1,48	0,86	1,37	1,19
Pekerja Tidak Penuh (Ribu Orang)	635	551	607	584	588

Sumber: BPS Provinsi Bali, diolah

Tabel 6.2. Tingkat Pengangguran Terbuka Menurut Pendidikan Tertinggi Utama yang Ditamatkan

Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan	2017		2018		2019
	Februari	Agustus	Februari	Agustus	Februari
SMP ke bawah (%)	1,06	0,77	0,37	0,52	0,56
SMA (%)	1,28	1,78	1,66	1,41	1,55
SMK (%)	1,06	2,69	1,19	3,14	2,01
Diploma I / II / III (%)	1,34	1,76	0,90	2,58	2,86
Universitas (%)	2,78	2,51	1,25	1,67	1,58
TOTAL	1,28	1,48	0,86	1,37	1,19

Sumber: BPS Provinsi Bali, diolah

Februari 2019 mencerminkan bahwa dari 100 orang angkatan kerja, sekitar 1 orang di antaranya tidak bekerja atau sedang mencari pekerjaan ataupun sedang mempersiapkan usaha.

Berdasarkan jenjang pendidikannya, penduduk yang paling banyak menganggur adalah lulusan setingkat diploma, tercatat sebesar 2,86%. Kemudian disusul oleh penduduk dengan lulusan pendidikan setingkat SMK sebesar 2,01% dan penduduk dengan lulusan level pendidikan universitas sebesar 1,58%. Sementara TPT terendah terjadi pada penduduk yang berpendidikan SMP ke bawah (0,56%). Gambaran kondisi TPT ini menunjukkan sulitnya penduduk untuk lulusan level pendidikan tinggi untuk memperoleh pekerjaan yang sesuai dengan kompetensi dan kualifikasi mereka. Kondisi ini juga menunjukkan keterkaitan (*linkage*) dan sinergi dunia pendidikan dengan dunia usaha, sebagai salah satu pihak yang akan menyerap lulusan perguruan tinggi tersebut perlu ditingkatkan. Lulusan pendidikan tinggi tidak sepenuhnya terserap dengan dunia usaha. Berdasarkan pola historisnya, TPT pada periode Februari relatif lebih rendah dibandingkan dengan periode Agustus setiap tahunnya. **Kondisi tersebut terjadi karena periode Agustus terdapat periode kelulusan, sehingga banyak penduduk dengan jenjang pendidikan menengah dan tinggi yang baru lulus dan mencari pekerjaan di periode tersebut.**

Tingkat Partisipasi Angkatan kerja (TPAK) Provinsi Bali pada Februari 2019 menunjukkan penurunan dibanding periode yang sama tahun sebelumnya, dapat dilihat pada Februari 2018 tercatat sebesar 79,83% mengalami penurunan menjadi 76,68% pada Februari 2019. TPAK merupakan indikator yang menggambarkan besarnya persentase penduduk usia kerja yang aktif secara ekonomi. Secara umum sesuai dengan pola historisnya, mayoritas penduduk usia kerja yang bekerja di Bali pada Februari 2019 merupakan pekerja dengan tingkat pendidikan SD ke bawah (pangsa 34,8%), menurun dibanding Februari 2018 yang sebesar 34,9%. Seiring dengan itu, pangsa pekerja dengan jenjang pendidikan lulusan SMA dan Universitas juga meningkat di Februari 2019 dibandingkan periode yang sama tahun 2018. Pekerja lulusan SMA pada Februari 2018 tercatat sebesar 19,7%, meningkat menjadi 20,9% di Februari 2019. Lulusan Universitas juga meningkat, yaitu dari 10,3% menjadi 12,3% pada Februari 2019.

Tabel 6.3. Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas yang Bekerja Menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan

Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan	2017		2018		2019
	Feb	Ags	Feb	Ags	Feb
< SD ke bawah (orang)	890.927	844.455	903.376	833.132	867.499
SMP (orang)	392.097	350.330	419.033	352.504	361.098
SMA (orang)	469.762	507.370	509.748	526.395	521.608
SMK (orang)	344.514	320.617	367.301	350.877	354.471
Diploma I / II / III (orang)	108.491	110.239	119.259	117.516	99.133
Universitas (orang)	231.703	265.296	266.226	310.446	305.507
TOTAL	2.437.494	2.398.307	2.584.943	2.490.870	2.509.316

Sumber: BPS Provinsi Bali, diolah

Apabila dianalisis lebih lanjut khususnya bila ditinjau dari sisi pertumbuhannya, semua jenjang lulusan mengalami penurunan/perlambatan pertumbuhan. Peningkatan tertinggi terjadi pada lulusan universitas, yaitu menjadi 14,75% (yoy) di Februari 2019 dari 14,90% (yoy) pada Februari 2018. Sementara itu, penurunan terendah terjadi pada jenjang tamatan Diploma yaitu turun sebesar 16,88% (yoy) dari sebelumnya di Februari 2018 tercatat tumbuh sebesar 9,93% (yoy). Mengacu pada kondisi tersebut, diperlukan adanya sinergi dan koordinasi yang erat antara Pemerintah Daerah dengan pelaku usaha untuk membangun sinergi dan kerjasama yang kuat dan intensif dalam rangka meningkatkan penyerapan tenaga kerja khususnya lulusan Diploma, SMA, SMK dan Universitas dalam dunia kerja. Kegiatan ini antara lain dilakukan melalui: i) keterlibatan pelaku usaha dalam penyusunan materi pendidikan; ii) pelaku usaha juga menjadi salah satu pengajar tamu; iii) meninjau kembali materi pengajaran saat ini agar dapat disesuaikan dengan perkembangan saat ini dan juga disesuaikan dengan kebutuhan pelaku usaha.

Grafik 6.2. Pertumbuhan Jumlah Tenaga Kerja Berdasarkan Tingkat Pendidikan

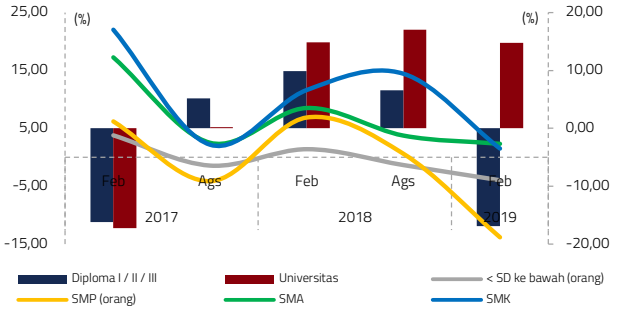

Sumber : BPS Provinsi Bali, diolah

Grafik 6.3. Komposisi Tenaga Kerja Berdasarkan Tingkat Pendidikan

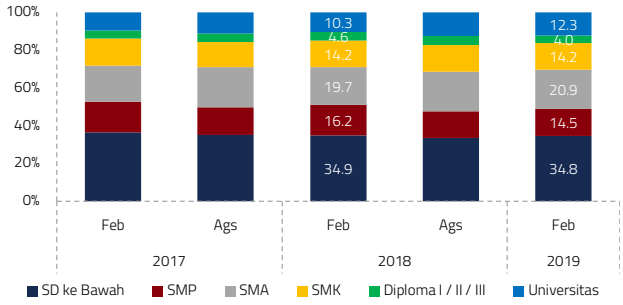

Sumber : BPS Provinsi Bali, diolah

Berdasarkan jumlah jam kerja per minggu, jumlah pekerja penuh waktu (35 jam atau lebih per minggu) di Bali pada Februari 2019 tercatat sebanyak 1,92 juta orang, menurun sebesar 2,85% (yoy), lebih rendah dibanding periode yang sama 2018 yang tumbuh sebesar 9,76% (yoy). Dari keseluruhan penduduk usia 15 tahun ke atas yang bekerja, tercatat sebesar 76,58% merupakan pekerja penuh waktu, sementara sisanya sebesar 23,42% merupakan pekerja tidak penuh (antara 1-34 jam per minggu).

Struktur lapangan kerja secara umum tidak mengalami perubahan. Sektor perdagangan, hotel dan restoran (PHR) yang terkait secara langsung dengan industri pariwisata, masih menjadi penyumbang terbesar dalam penyerapan tenaga kerja di Provinsi Bali. Pada Februari 2019, lapangan usaha tersebut menyerap tenaga kerja terbanyak, yaitu tercatat sebesar 781 ribu orang, atau sebesar 31,1% dari total penduduk yang bekerja, mengalami penurunan dari periode Februari 2018 yang tercatat sebesar 853 ribu orang atau sebesar 33,2% dari jumlah penduduk

Tabel 6.4. Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas yang Bekerja Menurut Jumlah Jam Kerja

PENDUDUK YANG BEKERJA	2017		2018		2019
	FEBRUARI	AGUSTUS	FEBRUARI	AGUSTUS	FEBRUARI
Pekerja Tidak Penuh					
Jumlah (orang)	635.294	550.541	606.812	583.676	587.624
%	26,06	22,96	23,47	23,43	23,42
Pekerja Penuh					
Jumlah (orang)	1.802.200	1.847.766	1.978.131	1.907.194	1.921.692
%	73,94	77,04	76,53	76,57	76,58
TOTAL	2.437.494	2.398.307	2.584.943	2.490.870	2.509.316

Sumber: BPS Provinsi Bali, diolah

Tabel 6.5. Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas yang Bekerja Menurut Lapangan Usaha (Ribu Orang)

LAPANGAN PEKERJAAN UTAMA	2017		2018		2019
	Feb	Ags	Feb	Ags	Feb
Pertanian	468	466	470	501	543
Industri	413	362	440	365	400
Konstruksi	195	179	165	158	172
PHR	766	781	853	821	781
Transkom	72	77	73	80	79
Keuangan	106	118	114	122	139
Jasa - Jasa	410	398	456	426	394
TOTAL	2.428	2.381	2.572	2.473	2.509

Sumber: BPS Provinsi Bali, diolah

yang bekerja. Lapangan usaha pertanian, menempati posisi kedua, yang menyerap tenaga kerja sebesar 543 ribu orang atau 21,6% dari total penduduk yang bekerja, meningkat dibanding periode sebelumnya yang tercatat sebesar 470 ribu orang atau dengan pangsa 18,3%. Sementara itu lapangan usaha industri menempati posisi ketiga, dengan menyerap 400 ribu orang atau dengan pangsa 15,9%, mengalami penurunan dibanding Februari 2018 yang tercatat sebesar 440 ribu orang atau dengan pangsa 17,1%.

Struktur distribusi angkatan kerja secara sektoral sejalan dengan distribusi PDRB Bali dari sisi lapangan usaha. Berdasarkan PDRB triwulan I 2019, lapangan usaha penyediaan akomodasi makan dan minum dan perdagangan besar dan eceran masih menjadi lapangan usaha utama dalam struktur perekonomian di Bali. Apabila dianalisis lebih lanjut, sejumlah 31,1% angkatan kerja di Bali yang bekerja di lapangan usaha penyediaan akomodasi makan dan minum. Sementara itu, lapangan usaha dengan pangsa

Grafik 6.4. Pertumbuhan Jumlah Tenaga Kerja Sektor Utama

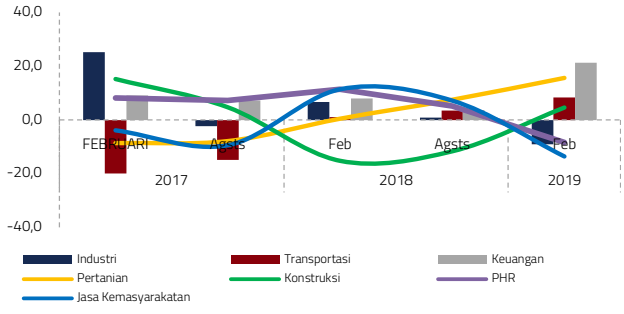

Sumber : BPS Provinsi Bali, diolah

terbesar kedua di PDRB Bali pada triwulan I 2019, yaitu lapangan usaha pertanian mampu menyerap tenaga kerja sebanyak 21,6% dari total penduduk bekerja. Sedangkan lapangan usaha industri pengolahan dapat menyerap tenaga kerja sebesar 15,9%.

Grafik 6.5. Komposisi Tenaga Kerja Sektor Utama

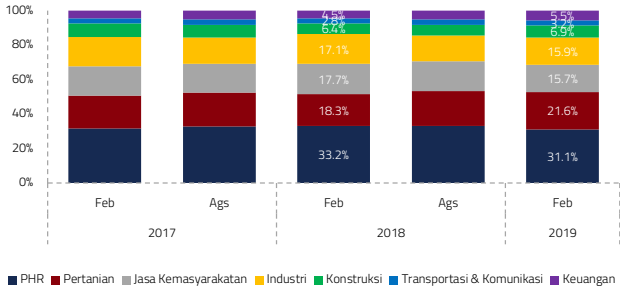

Sumber : BPS Provinsi Bali, diolah

Mengacu pada kinerja dalam lapangan usaha akomodasi makan dan minum serta perdagangan besar dan eceran yang pada triwulan I 2019 tumbuh melambat, berdampak pada pertumbuhan penyerapan tenaga kerja pada kedua lapangan usaha tersebut. Pada Februari 2019, penyerapan tenaga kerja pada sektor PHR tercatat terkontraksi 8,39% (yoy), lebih rendah dibanding Februari 2018 yang tercatat sebesar 11,41% (yoy). Seiring dengan tetap tumbuh positifnya lapangan usaha pertanian, penyerapan tenaga kerja di lapangan usaha ini juga menunjukkan perbaikan dari sebelumnya yang tercatat sebesar 0,43% (yoy) pada Februari 2018 mengalami peningkatan signifikan sebesar 15,62% (yoy). Selain itu, jumlah pekerja di

lapangan usaha konstruksi juga menunjukan kondisi yang semakin membaik yaitu dari -15,23% (yoy) pada Februari 2018 mengalami peningkatan menjadi 4,60% (yoy), sejalan dengan tumbuh kuatnya kinerja lapangan usaha konstruksi (PDRB) pada triwulan I 2019. Di sisi lain, terjadi penurunan penyerapan tenaga kerja pada lapangan usaha jasa kemasyarakatan dari 11,39% pada Februari 2018 menjadi sebesar -13,61% (yoy) di Februari 2019. **Kondisi ini mengindikasikan bahwa adanya pergeseran tenaga kerja dari lapangan usaha jasa kemasyarakatan beralih ke lapangan usaha lainnya.**

Jenis pekerjaan yang dominan pada Februari 2019 adalah kelompok orang yang bekerja pada kegiatan informal. Kondisi ini tidak jauh berbeda dibanding Februari 2018. Penduduk yang bekerja pada kegiatan informal sebanyak 1,29 juta jiwa atau 34,7% dari total penduduk yang bekerja. Jumlah tersebut turun -3,64% (yoy) dibanding Februari 2018 yang tercatat sebanyak 1,34 juta orang. Sedangkan orang yang bekerja pada kegiatan formal tercatat sebanyak 1,21 juta jiwa atau 32,7% dari total penduduk yang bekerja, atau mengalami penurunan sebesar -2,16% (yoy) dibanding Februari 2018 yang tercatat sebesar 1,24 juta orang. Tingginya kelompok orang yang bekerja pada kegiatan informal di Februari 2019 mengindikasikan bahwa sektor informal lebih memudahkan tenaga kerja di Bali dalam mencari pekerjaan, karena sektor informal pada umumnya tidak mensyaratkan secara ketat terkait dengan latar belakang pendidikan dan jenis keterampilan tertentu.

Grafik 6.6. Perkembangan Penyerapan Tenaga Kerja Formal & Informal

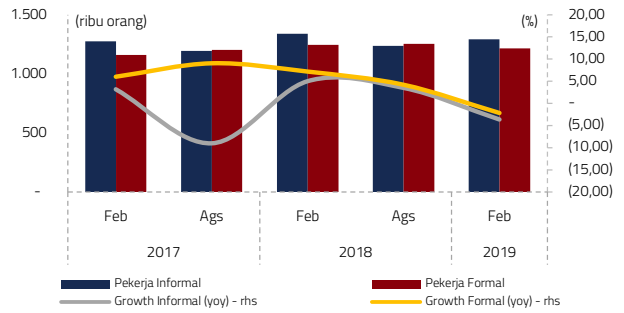

Sumber : BPS Provinsi Bali, diolah

Grafik 6.7. Komposisi Tenaga Kerja Formal dan Informal

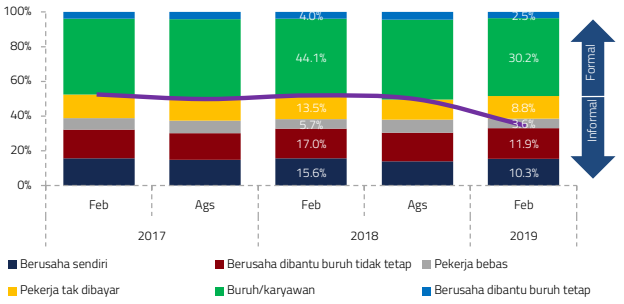

Sumber : BPS Provinsi Bali, diolah

Sejalan dengan kinerja perekonomian Bali di TW I 2019 yang tumbuh lebih tinggi dibanding triwulan I 2018, perkembangan ketenagakerjaan di Bali juga menunjukkan perbaikan. **Berdasarkan hasil Survei Kegiatan Dunia Usaha (SKDU) di triwulan I 2019, penggunaan tenaga kerja oleh pelaku usaha di Bali secara umum menunjukkan perbaikan dibanding triwulan I 2018. Kondisi ini tercermin dari nilai Saldo Bersih Tertimbang (SBT) penggunaan tenaga kerja pada triwulan I 2019 yang tercatat 15,17%, lebih tinggi dibanding TW I 2018 yang**

Tabel 6.6. Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas yang Bekerja Menurut Status Pekerjaan Utama (Orang)

STATUS PEKERJAAN UTAMA	2017		2018		2019
	FEBRUARI	AGUSTUS	FEBRUARI	AGUSTUS	FEBRUARI
Berusaha Sendiri	379.281	353.830	404.270	349.431	385.089
Berusaha Dibantu Buruh	408.027	371.848	439.548	406.506	443.255
Pekerja Bebas	158.761	167.900	147.238	186.976	135.603
Pekerja Tak Dibayar	330.970	300.863	350.081	293.380	328.426
Pekerja Informal	1.277.039	1.194.441	1.341.137	1.236.293	1.292.373
Berusaha Dibantu Buruh	93.007	100.341	103.381	109.851	91.514
Buruh/karyawan	1.067.448	1.103.525	1.140.488	1.144.726	1.125.429
Pekerja Formal	1.160.455	1.203.866	1.243.869	1.254.577	1.216.943
TOTAL	2.437.494	2.398.307	2.585.006	2.490.870	3.726.259

Sumber: BPS Provinsi Bali, diolah

sebesar 3,55%. Peningkatan penggunaan tenaga kerja terjadi pada seluruh sektor usaha, kecuali industri listrik gas dan air bersih serta industri pengangkutan dan komunikasi. **Membaiknya penggunaan tenaga kerja tersebut, terkonfirmasi oleh meningkatnya nilai SBT penggunaan tenaga kerja untuk sektor bangunan, yaitu dari 0,00% pada triwulan I 2018 menjadi 4,44% di TW I 2019.**

Grafik 6.8. Hasil SKDU Triwulan I 2019

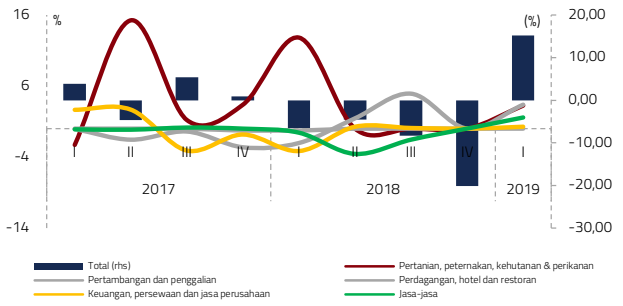

Sumber : SKDU, Bank Indonesia

6.1.2. Prospek Ketenagakerjaan Triwulan II 2019 dan Triwulan III 2019

Perkembangan ketenagakerjaan di Bali pada triwulan II 2019 diperkirakan akan mengalami peningkatan kinerja dibanding triwulan I 2018, Perkiraan meningkatnya kondisi ketenagakerjaan tersebut juga terindikasi dari hasil Survei Konsumen (SK) di Bali. Berdasarkan hasil SK, indeks ekspektasi ketersediaan lapangan kerja pada triwulan II 2019 mengalami peningkatan yaitu menjadi 138,64 dibanding triwulan II 2018 (109,17). Sejalan dengan itu, indeks ekspektasi penghasilan juga mengalami peningkatan diperiode yang sama, yaitu menjadi 125,87 pada triwulan II 2019 dibanding triwulan II 2018 sebesar 113,67. Demikian halnya dengan Indeks Ekspektasi Konsumen (IEK) triwulan II 2019 yang tercatat sebesar 132,51 lebih tinggi dibanding triwulan II 2018 (112,06). Perkiraan meningkatnya kinerja keternagakerjaan juga terindikasi dari peningkatan prospek penggunaan tenaga kerja (SKDU) di triwulan II 2019, dengan nilai SBT perkiraan yang tercatat sebesar 4,54, meningkat dibanding realisasi triwulan II 2018 yaitu -1,19. Dilihat dari sektoralnya, yang mengalami peningkatan signifikan adalah sektor pengangkutan dan komunikasi, yaitu dari -1,56 (triwulan II 2018) menjadi 0,91 (triwulan II 2019). Beberapa faktor yang dapat mendorong peningkatan penyerapan tenaga kerja di Bali pada periode tersebut, meliputi masuknya periode *high season* pariwisata di Bali, masuknya puncak panen komoditas tabama dan mulai masuknya periode panen untuk komoditas perkebunan, dimulainya pengerjaan beberapa proyek konstruksi dan infrastruktur serta berlanjutnya pengerjaan beberapa proyek konstruksi dengan persentase fisik yang meningkat, sehingga membutuhkan peningkatan jumlah penyerapan tenaga kerja.

Perkembangan ketenagakerjaan di Bali pada triwulan III 2019 diperkirakan akan melanjutkan perbaikan seperti di triwulan II 2019. Membaiknya kondisi ketenagakerjaan di triwulan III 2019 juga didorong oleh perkiraan akselerasi kinerja ekonomi Bali sejalan dengan masuknya periode *high season* pariwisata. Kondisi ini diharapkan akan mendorong peningkatan jumlah tenaga kerja yang terserap oleh bidang usaha pariwisata, sehingga berpotensi menurunkan tingkat pengangguran.

Grafik 6.9. Indikator Ekspektasi Konsumen

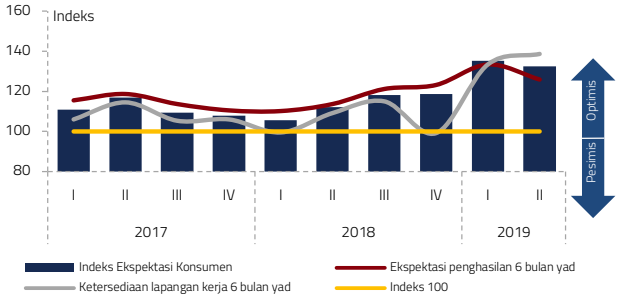

Sumber : Survei Konsumen, Bank Indonesia
II) bulan April & Mei 2019*

Grafik 6.10. Indikator Ekspektasi SKDU

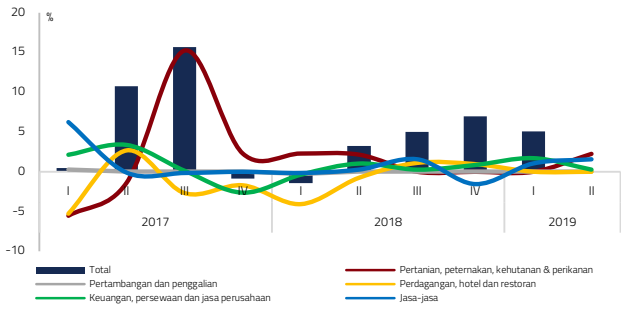

Sumber : SKDU, Bank Indonesia

6.2. KESEJAHTERAAN

6.2.1. Perkembangan Angka Kemiskinan Bali

Angka kemiskinan Bali pada Maret 2019 tercatat sebesar 3,79%, atau sejumlah 163,85 ribu orang yang masuk dalam kategori penduduk miskin. Angka ini menurun dibanding periode September 2018 dan Maret 2018 yang masing-masing sebesar 3,91% (168,34 ribu orang) dan 4,01% (171,76 ribu orang). Bila dianalisis lebih lanjut jumlah penduduk miskin di wilayah perkotaan tercatat sebesar 97,98 ribu orang (3,29%), sementara di wilayah pedesaan sebesar 65,87 ribu orang (4,88%). Jumlah ini menurun dibanding September 2018 yang masing-masing sebesar 98,45 ribu orang (3,36%) dan 69,89 ribu orang (5,08%).

Penurunan angka kemiskinan di Bali tersebut, ditopang oleh meningkatnya tingkat kesejahteraan petani dan penurunan tingkat ketimpangan. Peningkatan tingkat kesejahteraan petani tercermin oleh meningkatnya nilai tukar petani (NTP). Sementara penurunan tingkat ketimpangan terkonfirmasi oleh menurunnya gini rasio. Faktor lain yang juga mempengaruhi angka kemiskinan adalah inflasi.

Pada Maret 2019, tercatat inflasi sebesar 1,85% (yoy), jauh lebih rendah dibanding Maret 2018 sebesar 3,10% (yoy). Inflasi yang melandai ini mendorong terjaganya daya beli masyarakat. Sejalan dengan itu, tetap kuatnya daya beli masyarakat khususnya di pedesaan juga terkonfirmasi oleh kenaikan NTP pada periode yang sama. Pada triwulan I 2019, NTP Bali tercatat sebesar 103,92 meningkat dibanding triwulan I 2018 yang sebesar 103,62. Kondisi ini mencerminkan membaiknya kesejahteraan masyarakat di Bali. Sejalan dengan itu, gini ratio Provinsi Bali yang juga mengalami penurunan sebesar 2,92% (yoy) yaitu 0,377 pada Maret 2018 menjadi 0,366 pada Maret 2019, mengkonfirmasi membaiknya kondisi kesejahteraan masyarakat di Bali. Penurunan tingkat kemiskinan juga dipercepat oleh pelaksanaan program bantuan sosial non tunai, berupa Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dan Program Keluarga Harapan (PKH), dengan cakupan wilayah yang lebih luas dan penambahan kelompok penerima manfaat di tahun 2019.

6.2.2. Perkiraan Angka Kemiskinan Bali 2019

Perkembangan angka kemiskinan di Bali diperkirakan akan mengalami penurunan di tahun 2019. Kondisi ini didorong oleh perluasan program bantuan sosial non tunai, khususnya untuk cakupan luasan wilayah dan peningkatan jumlah Kelompok Penerima Manfaat (KPM) yang diiringi dengan meningkatnya nilai yang diterima, baik untuk Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) maupun Program Keluarga Harapan (PKH).

Tabel 6.7. Perkembangan Jumlah Penduduk Miskin

Keterangan	2017		2018		2019
	Mar	Sep	Mar	Sep	Mar
Jumlah Penduduk Miskin (Ribu Orang)	180,13	176,48	171,76	168,34	163,85
Persentase Penduduk Miskin (%)	4,25	4,14	4,01	3,91	3,79
- Kota	3,58	3,46	3,32	3,36	3,29
- Desa	5,45	5,42	5,38	5,08	4,88
Garis Kemiskinan (Rp)	361.387	364.064	382.598	388.451	400.624
Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1)	0,68	0,55	0,69	0,52	0,54
Indeks Keparahan Kemiskinan (P2)	0,16	1,12	1,18	0,12	0,11

Sumber: BPS Provinsi Bali, diolah

Sejalan dengan itu, peningkatan nilai NTP pada triwulan II 2019 sebesar 103,49 dan diperkirakan akan terus berlanjut pada triwulan berikutnya, juga menjadi salah satu faktor pendukung penurunan kemiskinan di Bali pada 2019. Sejalan dengan itu, implementasi Peraturan Gubernur Provinsi Bali No.99 tahun 2018 mengenai pemanfaatan produk pertanian, perikanan, dan industri lokal Bali diharapkan dapat mendorong kepastian pasar bagi hasil panen petani, sehingga pada gilirannya diharapkan dapat mendorong melandainya angka kemiskinan ke depan, khususnya di tingkat pedesaan. Melandainya tingkat inflasi di Bali pada tahun 2019, juga didukung oleh perkiraan melandainya inflasi yang lebih rendah dibanding tahun 2018, sehinggga mendukung terjaganya daya beli masyarakat, yang pada gilirannya mendorong penurunan angka kemiskinan. Berbagai kebijakan pengentasan kemiskinan yang dilakukan oleh pemerintah daerah baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota, juga diharapkan dapat mendukung penurunan tingkat kemiskinan di Provinsi Bali pada tahun 2019.

Grafik 6.11. Perkembangan Kemiskinan di Provinsi Bali

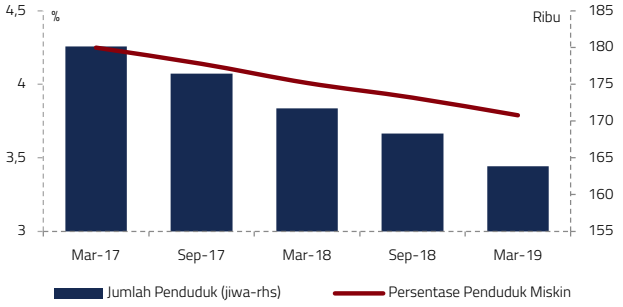

Sumber :BPS Provinsi Bali, diolah

Grafik 6.12. Indikator dan Keterkaitan Kemiskinan di Provinsi Bali

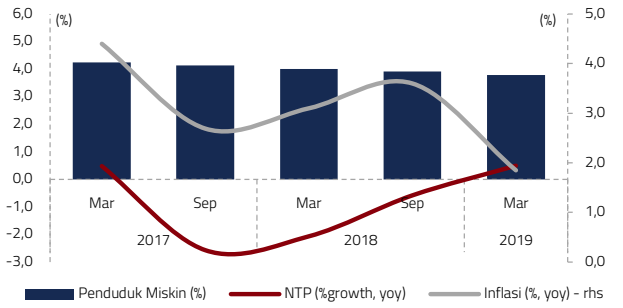

Sumber :BPS Provinsi Bali, diolah

6.2.3. Kedalaman dan Keparahan Kemiskinan

Untuk menganalisis lebih lanjut mengenai angka kemiskinan suatu daerah, dilakukan analisis terkait dengan Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan kemiskinan (P2). Indeks P1 mengukur kesenjangan kemiskinan, yaitu sejauh mana individu berada di bawah garis kemiskinan pada suatu daerah/ wilayah (dihitung dari jarak rata-rata pengeluaran penduduk miskin terhadap garis kemiskinan). Sementara itu, indeks P2 menggambarkan kesenjangan pengeluaran diantara penduduk miskin satu dengan yang lainnya.

Berdasarkan data Maret 2019, indeks P1 Provinsi Bali tercatat sebesar 0,54, membaik dibanding Maret 2018 yang sebesar 0,69. Kondisi ini menjelaskan bahwa rata-rata total pengeluaran penduduk di Bali (miskin dan non-miskin) masih berada 0,54% di bawah garis kemiskinan (Rp400.624 per kapita per bulan) pada Maret 2019, lebih baik dibanding Maret 2018. Membaiknya kondisi ini didukung oleh peningkatan pendapatan masyarakat tercermin antara lain oleh peningkatan NTP, meningkatnya UMP dan terjaganya daya beli masyarakat (inflasi yang melandai). Sejalan dengan kondisi tersebut, juga terjadi penurunan P2 dari 1,18 pada Maret 2018, menjadi 0,11 pada Maret 2019. Kondisi ini menunjukkan bahwa kesenjangan pengeluaran diantara penduduk miskin di Bali semakin menurun. Nilai P2 sebesar 0,11 menginformasikan bahwa besarnya deviasi total pengeluaran diantara penduduk miskin di Bali terus mengecil. Keadaan ini mengkonfirmasi bahwa program-program pengentasan kemiskinan yang dilakukan oleh pemerintah telah memberikan kontribusi yang nyata dalam penurunan angka kemiskinan dan tingkat kesenjangan, termasuk dari sisi pengeluaran diantara penduduk miskin.

6.2.4. Ketimpangan Pengeluaran Penduduk

Tingkat kesejahteraan suatu daerah tidak hanya mengacu pada angka kemiskinan, namun juga dari sisi tingkat ketimpangannya, yang tercermin oleh indikator rasio gini. Sejalan dengan penurunan angka kemiskinan di Bali, dan melandainya inflasi, tingkat ketimpangan

di Bali di Maret 2019 juga menunjukkan penurunan. Tingkat rasio gini Provinsi Bali tercatat sebesar 0,366 pada Maret 2019, menurun dibanding periode Maret 2018 yang tercatat 0,377. Angka ini juga lebih rendah dibanding rasio gini Nasional di Maret 2019 yang sebesar 0,382. Kondisi ini menunjukkan semakin menurunnya tingkat ketimpangan/kesenjangan ekonomi antar penduduk di Provinsi Bali. Kondisi ini didukung oleh berbagai upaya pemerintah (pusat dan daerah) yang komprehensif dan berkelanjutan serta terintegrasi dalam mengurangi kesenjangan/ ketimpangan ekonomi, termasuk diantaranya melalui pelaksanaan program-program bantuan social non tunai, peningkatan realisasi dana desa serta pengembangan infrastruktur termasuk meningkatkan konektivitas antar daerah. Sejalan dengan itu, upaya pemerintah yang terus mendorong pengembangan dan pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) juga memberikan kontribusi terhadap capaian penurunan tingkat ketimpangan tersebut. Penurunan Rasio Gini Provinsi Bali juga sejalan dengan penurunan Rasio Gini Nasional dalam periode yang sama.

Penurunan Rasio Gini Provinsi Bali pada Maret 2019 juga didorong oleh peningkatan pengeluaran kelompok 40% berpengeluaran rendah, serta terjadi penurunan pengeluaran kelompok 20% berpengeluaran tinggi pada tahun Maret 2019 dibanding Maret 2018. Sejalan dengan itu, pengeluaran kelompok 40% berpengeluaran menengah juga mengalami penurunan, sehingga mendukung penurunan rasio gini Provinsi Bali.

Grafik 6.13. Perkembangan Gini Ratio Provinsi Bali dan Nasional

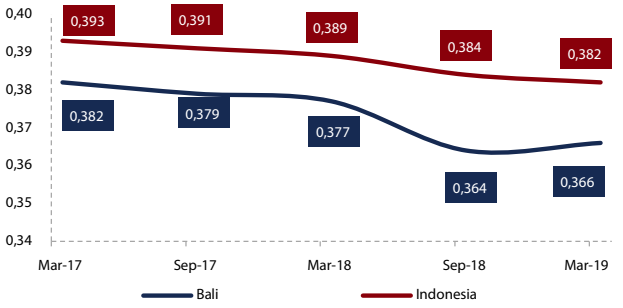

Sumber :BPS Provinsi Bali, diolah

Grafik 6.14. Distribusi Pendapatan Perkapita Penduduk

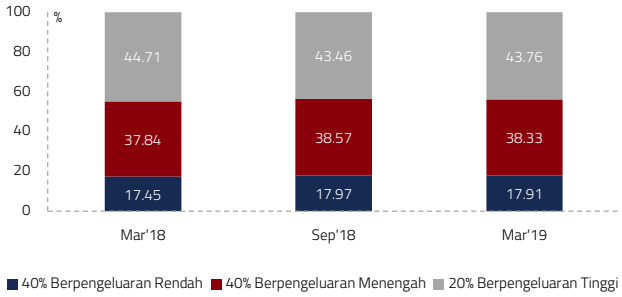

Sumber :BPS Provinsi Bali, diolah

6.2.5. Kesejahteraan Masyarakat Pedesaan

Tingkat kesejahteraan masyarakat khususnya di wilayah pedesaan, dapat terkonfirmasi oleh perkembangan indikator Nilai Tukar Petani (NTP). Sejalan dengan mata pencaharian masyarakat pedesaan yang teronsentrasi pada lapangan usaha pertanian. Perkembangan NTP Bali pada triwulan II 2019 tercatat sebesar 103,49, relatif stabil dibanding triwulan II 2018 yang sebesar 103,32. Peningkatan NTP ini didorong oleh naiknya Indeks Harga yang Dibayarkan Petani (IB) sebesar 3,79% (qtq) dapat tertutupi oleh peningkatan Indeks Harga yang Diterima Petani (IT) sebesar 4,11% (qtq). Dilihat dari subsektornya, perkebunan dan peternakan kembali mengalami penurunan dibanding triwulan sebelumnya, disamping subsektor tanaman pangan. Sementara itu, NTP subsektor hortikultura dan perikanan semakin terakselerasi sehingga tetap mampu mendorong NTP Bali pada triwulan II 2019 lebih tinggi dibanding NTP Nasional (102,39).

Grafik 6.15. NTP Bali, Indeks yang Diterima (IT), dan Indeks yang Dibayar (IB)

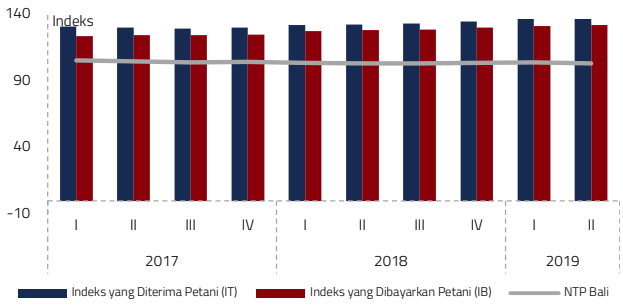

Sumber :BPS Provinsi Bali, diolah

Grafik 6.16. Perbandingan NTP Provinsi Bali dan Nasional

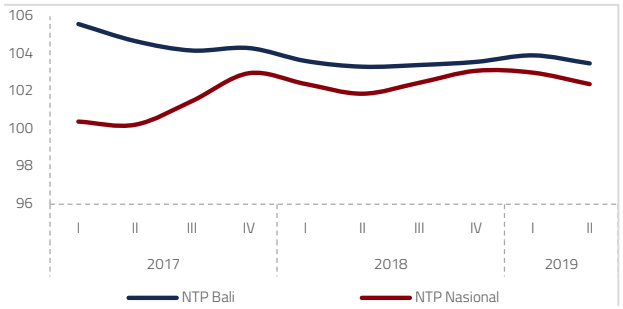

Sumber :BPS Provinsi Bali, diolah

6.3. INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA

Perkembangan indikator pembangunan manusia di Bali semakin membaik, tercermin oleh peningkatan nilai IPM Bali pada tahun 2018 dibanding tahun sebelumnya. Sejalan dengan itu nilai IPM Bali yang berada diatas Nasional dan *trend* yang meningkat juga menunjukkan membaiknya kondisi perkembangan kualitas pembangunan manusia di Bali. IPM Provinsi Bali pada tahun 2018 tercatat sebesar 74,77, mengalami peningkatan dibanding tahun 2017 yang tercatat sebesar 74,3, dan lebih tinggi dibanding IPM Nasional tahun 2018 yang sebesar 71,39. IPM Bali tersebut menempati urutan ke-5 di antara 34 Provinsi di Indonesia.

Peningkatan IPM Bali pada tahun 2018, dipengaruhi oleh peningkatan komponen pembentuk IPM yaitu Umur Harapan Hidup saat Lahir (UHH), Harapan Lama Sekolah (HLS), Rata-rata Lama Sekolah (RLS), dan Pengeluaran Per Kapita. Pada tahun 2018, UHH Provinsi Bali mencapai 71,68 tahun, artinya bayi yang lahir pada tahun 2018 memiliki peluang untuk hidup hingga 71,68 tahun. Nilai ini meningkat 0,22 tahun dibanding tahun sebelumnya yang tercatat sebesar 71,46 tahun. Sementara itu, dimensi pengetahuan HLS dan RLS pada tahun 2018 masing-masing mencapai 13,23 tahun dan 8,65 tahun. Keadaan ini mengindikasikan bahwa anak-anak yang pada tahun 2018 berusia 7 tahun memiliki harapan dapat menikmati pendidikan selama 13,23 tahun (Diploma I), lebih lama 0,02 tahun dibanding tahun 2017. Sementara itu, penduduk usia 25 tahun ke atas secara rata-rata telah menempuh pendidikan selama 8,65 tahun (kelas IX), lebih lama 0,10 tahun dibanding tahun sebelumnya. Kedua indikator ini terus menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun. Komponen pembentuk IPM lain yang mengalami peningkatan adalah Pengeluaran Per Kapita yang menggambarkan kelayakan standar hidup. Pada tahun 2018, pengeluaran per kapita penduduk Provinsi Bali mencapai Rp13,88 juta per tahun atau meningkat Rp313 ribu dibanding tahun 2017. Membaiknya kualitas pembangunan manusia di Bali tersebut juga didorong oleh berbagai program dari pemerintah dalam rangka mendorong peningkatan kualitas sumber daya manusia di Wilayah Bali.

Grafik 6.17. Perkembangan IPM Provinsi Bali

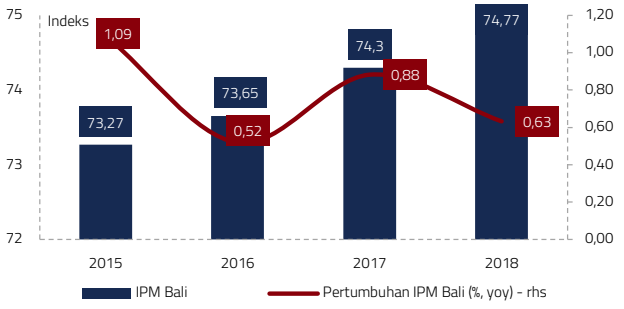

Sumber :BPS Provinsi Bali, diolah

Grafik 6.18. Perbandingan IPM Provinsi Bali dan Nasional

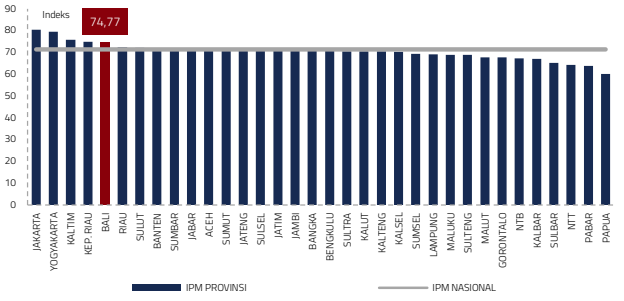

Sumber :BPS Provinsi Bali, diolah

BAB VII

PROSPEK PEREKONOMIAN DAERAH

- Pertumbuhan ekonomi Bali pada triwulan IV 2019 diprakirakan akan melambat dibanding triwulan sebelumnya, yaitu dalam kisaran 5,60%-6,00% (yoy), terutama disebabkan *base effect* tingginya kinerja ekonomi triwulan IV 2018. Sejalan dengan kondisi tersebut, kinerja ekonomi Bali pada tahun 2019 diprakirakan juga akan melambat dalam kisaran 5,70%-6,10% (yoy).
- Tingkat inflasi Bali pada triwulan IV 2019 diprakirakan akan meningkat dibanding triwulan sebelumnya, yaitu dalam kisaran 2,80%-3,20% (yoy). Meskipun demikian, inflasi Bali diprakirakan melandai di tahun 2019 dalam kisaran 2,80%-3,20% (yoy).

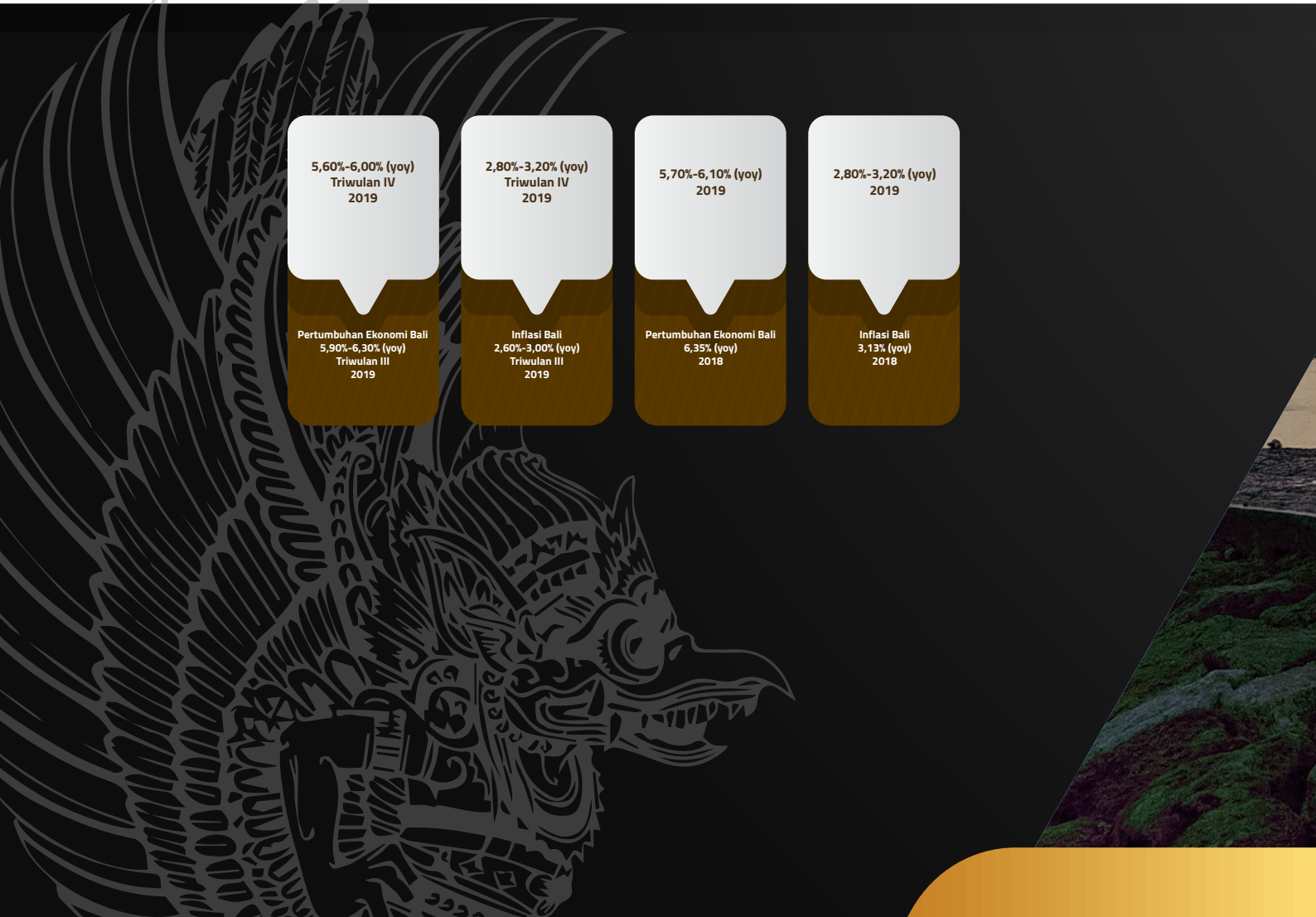

Pantai Sanur

7.1. PROSPEK PERTUMBUHAN EKONOMI PROVINSI BALI

PERKIRAAN PERTUMBUHAN EKONOMI TRIWULAN IV 2019

Pertumbuhan ekonomi Provinsi Bali di triwulan IV 2019 diperkirakan akan berada dalam kisaran 5,60%-6,00% (yoy), mengalami perlambatan dibanding triwulan III 2019. Dari sisi permintaan, melambatnya kinerja perekonomian Bali tersebut disebabkan oleh tertahannya kinerja komponen utama perekonomian. Kondisi tersebut sebagai dampak *base effect* tingginya kinerja ekonomi Bali pada triwulan IV 2018, sebagai dampak dari penyelenggaraan IMF-WB AM 2018. Komponen utama yang diperkirakan akan mengalami perlambatan kinerja adalah konsumsi rumah tangga, konsumsi pemerintah dan ekspor luar negeri. Sementara itu, kinerja investasi yang diperkirakan mengalami akselerasi, dapat menahan dalamnya perlambatan kinerja ekonomi Bali tersebut. Dari sisi penawaran, melambatnya kinerja ekonomi Bali diperkirakan disebabkan oleh melambatnya kinerja 4 lapangan usaha utama, yaitu **lapangan usaha penyediaan akomodasi makan dan minum, perdagangan besar dan eceran, transportasi dan pergudangan serta industri pengolahan.**

Grafik 7.1. Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Bali Triwulan III & IV Tahun 2019

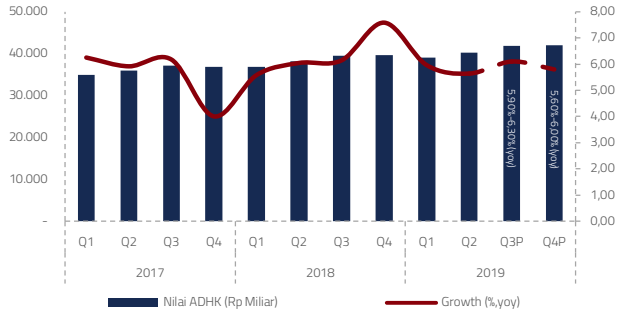

Sumber: BPS Provinsi Bali, diolah
Keterangan : p) Angka Proyeksi Bank Indonesia

SISI PERMINTAAN

Prospek ekonomi Bali pada triwulan IV 2019 diperkirakan mengalami perlambatan kinerja. Dari sisi permintaan, kondisi ini diperkirakan disebabkan oleh tertahannya kinerja tiga komponen utama ekonomi Bali, yaitu: ekspor luar negeri, konsumsi rumah tangga dan konsumsi pemerintah. Beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya perlambatan kinerja perekonomian tersebut meliputi:

- Minimnya stimulus fiskal seperti yang terjadi pada triwulan sebelumnya (gaji ke 13 & 14 ASN), menahan kinerja konsumsi rumah tangga.
- Alokasi anggaran rumah tangga yang telah terserap untuk tahun ajaran baru, liburan sekolah dan HBKN juga akan menahan kinerja konsumsi rumah tangga.
- *Base effect* penyelenggaran IMF-WB AM di tahun 2018 yang mendorong peningkatan aktivitas MICE (termasuk yang diselenggarakan oleh pemerintah) dan kunjungan wisman, menahan kinerja ekspor luar negeri khususnya jasa dan konsumsi pemerintah.
- Semakin dalamnya perlambatan kinerja ekonomi negara mitra dagang utama Bali di tahun 2019, beresiko menjadi penahan kinerja ekspor barang luar negeri.
- Perkiraan jumlah kunjungan wisman yang tertahan pada 2019, diperkirakan akan berdampak pada pendapatan daerah, khususnya di wilayah kabupaten/kota (pangsa terbesar), sehingga beresiko akan berdampak terhadap penyesuaian realisasi belanja dan menahan kinerja konsumsi pemerintah.

Tertahannya kinerja ekonomi Bali di triwulan IV 2019, juga terkonfirmasi oleh tertahannya pendapatan konsumen di periode tersebut. Berdasarkan hasil survei konsumen triwulan II 2019, terkonfirmasi menurunnya optimisme konsumen terhadap ekspektasi penghasilan untuk 6 bulan yang akan datang (triwulan IV 2019). Sejalan dengan ini juga terkonfirmasi terjadinya penurunan nilai Indeks Ekspektasi Konsumen (grafik 7.2). Kondisi tersebut menyimpulkan bahwa laju konsumsi rumah tangga pada triwulan IV 2019 diperkirakan melambat dibanding triwulan sebelumnya.

Grafik 7.2. Perkembangan Indeks Ekspektasi Konsumen

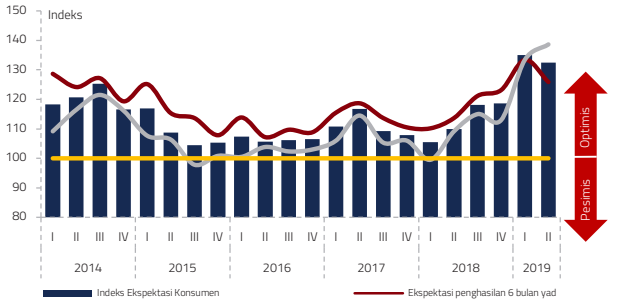

Sumber : Survei Konsumen, Bank Indonesia

Meskipun kinerja ekonomi Bali diperkirakan tumbuh melambat pada triwulan IV 2019, namun masih terdapat peluang yang dapat mendorong kinerja ekonomi Bali meliputi:

- Berdasarkan hasil survei konsumen pada triwulan II 2019 (grafik 7.2), mengkonfirmasi meningkatnya indeks ketersediaan lapangan kerja 6 bulan yang akan datang (triwulan IV 2019). Kondisi ini berpeluang mendorong dibukanya lapangan usaha baru atau meningkatnya kinerja konsumsi rumah tangga.
- Masuknya periode panen komoditas tabama pada triwulan IV 2019, diperkirakan berpeluang menjadi faktor pendukung meningkatnya konsumsi rumah tangga.
- Adanya pembukaan *direct flight* international pada triwulan sebelumnya[80] berpotensi menjadi penopang kinerja ekspor jasa di periode tersebut.
- Adanya upaya pemerintah baik kementerian dan lembaga vertikal (APBN), maupun pemerintah daerah (provinsi maupun kabupaten-kota) untuk terus mendorong percepatan realisasi belanja, berpotensi mendorong kinerja konsumsi rumah tangga.
- Telah ditetapkan presiden dan wakil presiden terpilih oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU), mendorong optimisme pelaku usaha sehingga diperkirakan dapat mendorong peningkatan kinerja investasi.

SISI PENAWARAN

Perkiraan melambatnya kinerja ekonomi Bali dari sisi penawaran di triwulan IV 2019, disebabkan oleh tertahannya kinerja 4 lapangan usaha utama Bali, meliputi lapangan usaha **penyediaan akomodasi makan minum, perdagangan besar dan eceran, transportasi dan pergudangan dan industri pengolahan.** Perkiraan melambatnya kinerja lapangan usaha utama tersebut disebabkan beberapa faktor, meliputi:

- Melambatnya kinerja ekonomi mitra dagang utama Bali[81], menahan kinerja industri pengolahan, sebagai komoditas utama ekspor LN Bali.
- *Base effect* tingginya penyelenggaraan kegiatan MICE pada triwulan IV 2019, sejalan dengan terlaksananya kegiata IMF-WB AM di tahun 2018, menjadi faktor penahan kinerja akmamin, transportasi dan perdagangan.
- Frekuensi HBKN yang tidak sebanyak triwulan sebelumnya juga menjadi faktor penahan kinerja ekonomi Bali, khususnya lapangan usaha perdagangan.
- Harga tiket pesawat udara yang tetap tinggi, diperkirakan juga menjadi faktor penahan kinerja ekonomi Bali.
- Semakin berkembang dan meningkatnya kualitas destinasi wisata dunia, termasuk di kawasan Asia Tenggara, beresiko mendorong semakin meningkatnya kompetisi antar destinasi wisata, sehingga dapat menahan laju kinerja ekonomi Bali.

Meskipun demikian, masih terdapat beberapa peluang yang berpotensi mendorong laju kinerja ekonomi Bali pada triwulan IV 2019. Beberapa faktor yang menjadi pendorong kinerja ekonomi Bali tersebut meliputi:

- Berlanjutnya pengerjaan proyek infrastruktur

80. Terdapat pembukaan rute penerbangan langsung baru yaitu Vietnam-Denpasar oleh maskapai VietJet pad bulan Maret dan Denpasar-Adelaide pada bulan April 2019. Pada Juli 2019, Turkish Airlines resmi mengoperasikan penerbangan langsung rute Istanbul-Denpasar. Pada bulan Agustus 2019, Malindo Air akan memulai layanan rute internasional baru dari Kuala Lumpur ke Sydney, Australia.
81. Berdasarkan World Economic Outlook (WEO) IMF pada periode Juli 2019 pertumbuhan ekonomi dunia tahun 2019 diperkirakan tumbuh 3,20% (yoy), lebih rendah dibandingkan tahun 2018 yang sebesar 3,60% (yoy), update proyeksi ekonomi dunia tersebut lebih rendah dibanding periode April 2019 yang sebesar 3,33% (yoy). Ekonomi AS, Australia, Singapura dan Tiongkok pada tahun 2019 diperkirakan tumbuh melambat, masing-masing sebesar sebesar 2,60% (yoy); 2,07% (yoy); 2,31% (yoy) dan 6,20% (yoy), lebih rendah dibandingkan realisasi 2018 yang masing-masing sebesar 2,90% (yoy); 2,81% (yoy); 3,23 % (yoy) dan 6,60% (yoy).

maupun konstruksi di Provinsi Bali meliputi pembangunan bendungan Sidane, dimulainya pengerjaan bendungan Tamblang, RET bandara Ngurah Rai, pengembangan pelabuhan Celukan Bawang, pengerjaan *shortcut* jalan titik 5-6 & 3-4, pengembangan kawasan Nusa Dua serta peningkatan kapasitas jalan dan jembatan serta bangunan milik pemerintah, diperkirakan mendorong akselerasi kinerja konstruksi pada triwulan IV 2019.

- Masuknya periode panen komoditas tabama dan program intensifikasi peningkatan produksi pertanian, diperkirakan mendorong peningkatan kinerja pertanian.
- Diadakannya beberapa kegiatan MICE yang akan diikuti oleh peserta dalam jumlah yang besar antara lain Asia World Model United Nations (AWMUN) yang akan dilaksanakan pada bulan Nopember 2019 dan diikuti oleh 12.252 orang peserta, diprakirakan dapat menjadi peluang peningkatan kinerja ekonomi Bali, khususnya lapangan usaha akmamin, transportasi dan perdagangan.

Telah sepakatnya Pemerintah dan maskapai menurunkan harga tiket pesawat LCC rute domestik sebesar 50% dari Tarif Batas Atas (TBA) secara terbatas, yaitu pada jadwal tertentu (hari Selasa, Kamis, dan Sabtu pukul 10.00-14.00), berpotensi mendorong peningkatan jumlah kunjungan wisatawan domestik

PERKIRAAN PERTUMBUHAN EKONOMI TAHUN 2019

Dengan mencermati perkembangan ekonomi, *prompt* indikator, hasil suvei dan liaison terakhir, diperkirakan perekonomian Provinsi Bali pada tahun 2019 akan tetap tumbuh kuat dengan kecenderungan yang melambat. Ekonomi Bali diperkirakan akan tumbuh dalam kisaran 5,7%-6,10% (yoy), lebih rendah dibanding *range* proyeksi di periode sebelumnya[82]. Komponen yang menjadi motor penggerak ekonomi Bali adalah konsumsi di tengah laju investasi yang melambat. Sementara itu dari sisi lapangan usaha, ekonomi Bali masih sangat bergantung bidang usaha pariwisata, meskipun dengan kecenderungan yang melambat. Pelaksanaan pemilihan umum tahun 2019, juga memberikan kontribusi terhadap meningkatnya kinerja industri pengolahan, sehingga dapat menahan perlambatan lebih lanjut ekonomi Bali di 2019. Melambatnya kinerja ekonomi Bali, dari sisi permintaan terutama disebabkan oleh perlambatan kinerja komponen ekspor luar negeri dan investasi. Sementara dari sisi penawaran, melambatnya kinerja ekonomi Bali disebabkan oleh melambatnya 4 lapangan usaha utama ekonomi Bali, yaitu lapangan usaha akomodasi makan minum, pertanian, konstruksi dan transportasi.

Perkiraan melambatnya kinerja ekonomi Bali di 2019, baik dari sisi permintaan maupun penawaran disebabkan oleh beberapa faktor, yang meliputi:

- Tingginya harga tiket pesawat dan pengenaan bagasi berbayar kepada penumpang oleh beberapa maskapai, menahan laju kunjungan wisatawan, khususnya wisatawan domestik, sehingga berdampak terhadap tertahannya kinerja lapangan usaha yang terkait dengan bidang usaha pariwisata.
- Risiko terjadinya gangguan cuaca ekstrem (musim kemarau lebih panjang) pada tahun 2019 dengan puncaknya diperkirakan terjadi pada triwulan

Tabel 7.1. Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Bali 2019

Keterangan	Tahun			
	2016	2017	2018	2019P
Pertumbuhan Ekonomi Bali (%,yoy)	6,33	5,57	6,35	5,70-6,10

Sumber: BPS Provinsi Bali, diolah
Untuk Proyeksi 2019: Bank Indonesia

82. Range proyeksi pertumbuhan ekonomi Bali 2019 pada buku LPP Periode Mei 2019 adalah 5,90%-6,30% (yoy)

III 2019, beresiko menekan laju produksi sektor pertanian. Kondisi ini semakin berat dengan terjadinya alih fungsi lahan pertanian, yang berdampak pada pengurangan luas areal tanam lahan pertanian, sehingga dapat menyebabkan terjadinya penurunan produksi pertanian.

- Pengerjaan infrastruktur dan proyek konstruksi di 2019 yang tidak semasif seperti pada 2018 dalam rangka mendukung pelaksanaan IMF-WB AM.
- Peningkatan Upah Minimum Provinsi Bali pada 2019 yang sebesar 8,03% (yoy), lebih rendah dibandingkan peningkatan 2018 yang sebesar 8,71% (yoy).
- Berdasarkan hasil survei dan liaison, melambatnya kinerja ekspor luar negeri juga disebabkan oleh semakin meningkatnya persaingan untuk produk-produk ekspor barang sejenis yang dihasilkan Bali, antara lain *handicraft*, olahan kayu, pakaian jadi dan tekstil, serta perhiasan dengan kualitas dan harga yang kompetitif.
- Berdasarkan hasil survei dan liaison, terus berkembang dan meningkatnya kualitas berbagai destinasi wisata dunia, termasuk di wilayah Asia Tenggara dengan biaya yang juga bersaing, beresiko menahan laju kunjungan wisman ke Bali.
- Perkiraan melambatnya kinerja ekonomi beberapa negara mitra dagang utama Bali, yaitu AS, Australia, Singapura dan Tiongkok[83] pada 2019 dibandingkan 2018.
- Berdasarkan hasil survei dan liaison, kebijakan penegakan *Zero Dollar Tourism* (wisman Tiongkok) dan ekses negatif pelaksanan Pemilihan Umum yang terjadi di Jakarta pada Mei 2019, menjadi faktor penyebab tertahannya kunjungan wisman.

Pertumbuhan kinerja investasi pada tahun 2019 diperkirakan akan tumbuh melambat dibanding tahun 2018. Kondisi ini disebabkan oleh terbatasnya investasi bangunan, sejalan dengan proyek konstruksi dan infrastruktur yang tidak semasif pada tahun 2018 (IMF-WB AM). Sejalan degan itu, beberapa proyek pembangunan infrastruktur, yang diinisiasi oleh pemerintah daerah, seperti bendungan dan jalan *shortcut* Mengwitani-Singaraja yang bersifat multiyears, alokasi anggaran terbesar mulai terealisasi di tahun 2020. Sejalan dengan itu, sikap *wait and see* pelaku usaha menanti kebijakan presiden terpilih, diperkirakan akan menjadi salah satu faktor penyebab melambatnya ekonomi Bali. Kebijakan presiden terpilih baru akan terkonfirmasi pada periode triwulan IV 2019, sehingga respon pelaku usaha melalui kebijakan ekspansi investasinya akan signifikan dilakukan mulai 2020. Sehubungan dengan itu, dampak beberapa kebijakan investasi tersebut terhadap perekonomian Bali diperkirakan baru akan menunjukkan peningkatan di 2020.

Tabel 7.2. Outlook Ekonomi Dunia dan Negara Mitra Dagang Utama Provinsi Bali 2019-2024

Negara	Pangsa Nilai Ekspor Barang Luar Negeri Bali TW II 2019 (%)	Realisasi dan Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi (%,yoy)							
		2017	2018	2019**	2020**	2021**	2022**	2023**	2024**
Amerika Serikat	29,35	2,20	2,90	2,60	1,90	1,77	1,64	1,62	1,57
Singapura	8,52	3,93	3,23	2,31	2,36	2,50	2,64	2,58	2,57
Australia	8,50	2,38	2,81	2,07	2,76	2,76	2,64	2,65	2,64
Hongkong	6,44	3,84	3,02	2,73	3,00	3,02	3,02	2,96	2,99
Jepang	5,25	1,90	0,80	0,90	0,40	0,54	0,51	0,53	0,52
Tiongkok	3,10	6,80	6,60	6,20	6,00	6,00	5,75	5,60	5,50
World Output		3,80	3,60	3,20	3,50	3,63	3,61	3,64	3,65

Sumber : World Economic Outlook, International Monetary Fund (IMF)
*Keterangan :**) angka proyeksi IMF update Juli 2019*

83. Berdasarkan World Economic Outlook (WEO) IMF pada periode Juli 2019 pertumbuhan ekonomi dunia tahun 2019 diperkirakan tumbuh 3,20% (yoy), lebih rendah dibandingkan tahun 2018 yang sebesar 3,60% (yoy), update proyeksi ekonomi dunia tersebut lebih rendah dibanding periode April 2019 yang sebesar 3,33% (yoy). Ekonomi AS, Australia, Singapura dan Tiongkok pada tahun 2019 diperkirakan tumbuh melambat, masing-masing sebesar sebesar 2,60% (yoy); 2,07% (yoy); 2,31% (yoy) dan 6,20% (yoy), lebih rendah dibandingkan realisasi 2018 yang masing-masing sebesar 2,90% (yoy); 2,81% (yoy); 3,23 % (yoy) dan 6,60% (yoy)

Kinerja ekspor luar negeri Bali yang didominasi oleh kinerja ekspor jasa, diperkirakan akan tumbuh melambat pada 2019. Dominasi wisatawan mancanegara (wisman) asal Tiongkok, masih tetap terjadi di tahun 2019, meskipun diperkirakan akan mengalami penurunan sejalan dengan karakter wisman Tiongkok yang bukan merupakan *repeater* tour*ists* (berbeda dengan wisman Australia dan Eropa). Penurunan wisman Tiongkok tersebut telah terlihat pada semester I 2019 yang terkontraksi cukup dalam sebesar 17,36% (yoy), menurun secara signifikan dibanding periode semester II 2018 yang terkontraksi 8,22% (yoy). Penurunan kunjungan wisman tersebut, juga disebabkan oleh dampak lanjutan kebijakan penegakan *Zero Dollar Tourism*. Sejalan dengan kondisi tersebut, berdasarkan hasil survei dan liaison terkonfirmasi bahwa melambatnya kunjungan wisman juga disebabkan oleh terus berkembang dan meningkatnya kualitas destinasi wisata dunia, khususnya di Wilayah Asia, seperti Vietnam, Filipina, Malaysia dan Thailand. Peningkatan kunjungan wisman yang tertahan juga disebabkan oleh kapasitas bandara Ngurah Rai yang telah mendekati kapasitas optimum, sehingga penambahan *direct flight* baru untuk memenuhi permintaan dari beberapa maskapai negara asal wisman menghadapi tantangan. Oleh karena itu, pengembangan Bandara Ngurah Rai dan peningkatan konektivitas dari beberapa bandara di wilayah lain di luar Bali, merupakan beberapa solusi jangka pendek untuk mengatasi kondisi ini. Sementara dalam jangka panjang, peningkatan akses menuju Bali termasuk melalui jalur laut merupakan salah satu solusinya. Sejalan dengan perlambatan kinerja ekspor jasa, kinerja ekspor barang luar negeri juga diperkirakan tumbuh melambat, disebabkan oleh melambatnya pertumbuhan ekonomi beberapa negara mitra dagang utama Bali di 2019, terutama Amerika Serikat, Australia, Singapura dan Tiongkok[84].

Kinerja sektor konsumsi (rumah tangga dan LNPRT) diperkirakan akan mengalami akselerasi pada tahun 2019 dibanding 2018. Meningkatnya kinerja konsumsi rumah tangga, sejalan dengan perluasan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) untuk pelaksanaan kegiatan bantuan sosial non tunai (Program Keluarga Harapan/PKH dan Bantuan Pangan Non Tunai/BPNT), yang diikuti oleh peningkatan nilai nominal. Sejalan dengan itu, peningkatan gaji ASN di 2019 sebesar 5% (yoy), yang diikuti oleh naiknya gaji ke 14 dan 13 ASN, memberikan kontribusi terhadap menguatnya konsumsi rumah tangga. Peningkatan kinerja konsumsi RT dan terjaganya daya beli masyarakat, juga ditopang oleh peningkatan NTP terkonfirmasi pada semester I 2019[85]. Perkiraan menguatnya konsumsi RT, juga terkonfirmasi oleh hasil Survei Konsumen (SK) yang menunjukkan peningkatan nilai indeks, khususnya indeks ketersediaan lapangan kerja (grafik 7.2). Kondisi ini menunjukkan masyarakat masih memiliki keyakinan yang baik terhadap prospek ekonomi ke depan, khususnya terkait dengan potensi pendapatan sejalan dengan menguatnya kesempatan kerja. Sejalan dengan kondisi tersebut, pelaksanaan kegiatan pemilihan umum, baik untuk presiden/wakil presiden maupun legislatif yang diikuti oleh peningkatan aktivitas partai politik mendorong peningkatan konsumsi LNPRT.

Pertumbuhan konsumsi pemerintah di 2019 diperkirakan akan mengalami akselerasi. Peningkatan ini terutama didorong oleh percepatan tahapan realisasi belanja, khususnya pada anggaran belanja yang menggunakan APBN maupun APBD kabupaten/kota. Kegiatan perencanaan yang semakin baik pada tahun 2019, khususnya untuk proyek yang terkait dengan belanja modal, berkontribusi terhadap percepatan proses pengadaan yang telah mulai dilakukan pada akhir tahun 2018 (APBN). Capaian percepatan realisasi belanja tersebut terkonfirmasi

84. Berdasarkan World Economic Outlook (WEO) IMF pada periode Juli 2019 pertumbuhan ekonomi dunia tahun 2019 diperkirakan tumbuh 3,20% (yoy), lebih rendah dibandingkan tahun 2018 yang sebesar 3,60% (yoy), update proyeksi ekonomi dunia tersebut lebih rendah dibanding periode April 2019 yang sebesar 3,33% (yoy). Ekonomi AS, Australia, Singapura dan Tiongkok pada tahun 2019 diperkirakan tumbuh melambat, masing-masing sebesar sebesar 2,60% (yoy); 2,07% (yoy); 2,31% (yoy) dan 6,20% (yoy), lebih rendah dibandingkan realisasi 2018 yang masing-masing sebesar 2,90% (yoy); 2,81% (yoy); 3,23 % (yoy) dan 6,60% (yoy).

85. Nilai rata-rata NTP Bali pada semester I 2019 tercatat sebesar 103,69, meningkat dibanding rata-rata NTP semester I 2018 yang sebesar 103,47

oleh meningkatnya serapan realisasi belanja hingga triwulan II 2019, dibanding triwulan II 2018[86]. Kondisi ini diperkirakan akan terus belanjut hingga akhir tahun 2019. Sejalan dengan itu, perkiraan meningkatnya serapan pendapatan daerah juga memberikan kontribusi terhadap peningkatan kinerja konsumsi pemerintah. Upaya untuk mendorong peningkatan pendapatan daerah, melalui optimalisasi pencairan dana perimbangan (DAK dan DAU) melalui pemenuhan dokumen dan administrasi yang dipersyaratkan, juga memberikan kontribusi terhadap peningkatan pendapatan daerah. Sejalan dengan itu, upaya pemerintah daerah di tingkat kabupaten/kota untuk mendorong optimalisasi penerimaan, khususnya terkait dengan penerimaan pajak dan retribusi daerah, melalui ekstensifikasi dan intensifikasi penghimpunan PAD, juga menjadi faktor yang mendorong meningkatnya pendapatan daerah. Kondisi ini terkonfirmasi oleh serapan realisasi pendapatan daerah naik di triwulan II 2019 dibanding triwulan II 2018[87], yang diperkirakan akan terus berlanjut hingga akhir 2019.

Dari sisi Lapangan Usaha (LU), melambatnya kinerja ekspor luar negeri dan investasi berdampak terhadap perlambatan kinerja lapangan usaha akmamin, transportasi, konstruksi. Sementara itu, kinerja lapangan usaha pertanian juga tertahan oleh resiko terjadinya kondisi cuaca ekstrem musim kemarau yang lebih panjang dan berlanjutnya alih fungsi lahan pertanian. Sementara itu, kinerja LU industri pengolahan akan tetap tumbuh kuat dan menunjukkan kecenderungan akselerasi, sejalan dengan pelaksanaan kegiatan pemilihan umum.

Kinerja lapangan usaha akmamin dan transportasi di 2019 diperkirakan akan menunjukkan kecenderungan pertumbuhan yang melambat dibandingkan 2018. Perlambatan ini, disebabkan oleh tingginya harga tiket pesawat udara dan pengenaan tarif bagasi berbayar, sehingga berdampak tertahannya jumlah kedatangan wisatawan domestik. Seiring dengan kondisi tersebut, perkiraan melambatnya kinerja ekspor jasa di tahun 2019, juga menjadi faktor penyebab melambatnya kinerja kedua lapangan usaha tersebut.

Kinerja sektor konstruksi di tahun 2019 diperkirakan akan tumbuh melambat, sejalan dengan perkiraan melambatnya kinerja investasi di periode yang sama. Konstruksi yang melambat disebabkan oleh pengerjaan proyek konstruksi pada tahun 2019, tidak semasif proyek konstruksi pada tahun 2018 ketika berlangsungnya IMF-WB Annual Meeting. Seiring dengan itu, pengerjaan beberapa proyek konstruksi yang dimulai pada tahun 2019, alokasi anggarannya baru akan terealisasi signifikan di 2020, seperti pembangunan bendungan Sidane dan Tamblang serta *shortcut* jalan Mengwitani-Singaraja. Sikap pelaku usaha yang *wait and see* menanti kebijakan presiden terpilih, diperkirakan juga baru akan signifikan direspon oleh pelaku usaha melalui kebijakan investasi di 2020. Kondisi ini menjadi faktor penyebab melambatnya kinerja LU konstruksi.

Meskipun diperkirakan tumbuh melambat, namun masih terdapat beberapa faktor yang berpotensi mendorong kinerja perekonomian Bali pada tahun 2019, yaitu:

- Berlanjutnya pengerjaan proyek infrastruktur maupun konstruksi di Provinsi Bali meliputi pembangunan bendungan Sidane, dimulainya pengerjaan bendungan Tamblang, RET bandara Ngurah Rai, pengembangan pelabuhan Celukan Bawang, pengerjaan *shortcut* jalan titik 5-6 & 3-4, pengembangan kawasan Nusa Dua serta peningkatan kapasitas jalan dan jembatan serta bangunan milik pemerintah, diperkirakan akan mendukung kinerja konstruksi dan investasi di 2019.
- Pelaksanaan kegiatan pemilihan umum legislatif

86. Serapan realisasi belanja pemerintah (APBN & APBD) di Bali pada triwulan II 2019 tercatat sebesar 33,77%, meningkat dibanding triwulan II 2018 yang sebesar 32,62%.
87. Serapan realisasi pendapatan pemerintah (APBD Provinsi dan Kabupaten/Kota) pada triwulan II 2019 tercatat sebesar 43,69%, meningkat dibanding triwulan II 2018 yang sebesar 41,83%

dan pemilihan umum presiden pada 2019, berpotensi mendorong akselerasi kinerja konsumsi pemerintah dan LNPRT dari sisi permintaan; sementara dari sisi penawaran akan meningkatkan kinerja industri pengolahan.

- Upaya peningkatan dan pengembangan promosi, termasuk melalui *Bali Beyond and Travel Fair* (BBTF 2019) dan penambahan *direct flight international*[88] berpotensi mendorong kinerja ekonomi Bali, khususnya ekspor luar negeri, lapangan usaha akmamin dan transportasi. Sejalan dengan itu, peningkatan upaya promosi, pengembangan produk dan destinasi wisata termasuk Bali *and Beyond*, dan pengembangan pasar alternatif wisman (India dan Timur Tengah), yang diikuti dengan peningkatan pelayanan dan pengembangan Bali *and Beyond* serta produk dan destinasi wisata, berpotensi mendorong kinerja ekonomi Bali.
- Upaya peningkatan produksi pertanian melalui intensifikasi pertanian, khususnya untuk komoditas tanaman bahan makanan, melalui Gerakan Pengelolaan Pertanian Tanaman Terpadu (GPPTT) berupa penyediaan benih bersertifikasi, bantuan pupuk dan sarana produksi serta pendampingan dan bantuan teknis yang diikuti oleh perbaikan jaringan irigasi (primer, sekunder dan tersier), berpotensi mendorong kinerja pertanian pada tahun 2019. Peningkatan kinerja lapangan usaha pertanian juga diperkirakan akan semakin signifikan, sejalan dengan mulai beroperasinya Waduk Titab sejak awal 2019 yang mengairi lahan pertanian seluas 1.795 hektar dan mendorong peningkatan indeks penanaman padi menjadi 275% dari sebelumnya 169% untuk luasan lahan tersebut. Akselerasi kinerja pertanian juga didorong dengan upaya perbaikan saluran irigasi (primer, sekunder maupun tersier) yang telah dilakukan maupun akan dilakukan pada 2019, diperkirakan mendorong akselerasi kinerja pertanian, khususnya untuk komoditas pangan.
- Dampak lanjutan pelaksanaan kegiatan IMF-WB AM 2018 membuat Bali semakin dikenal sebagai pelaksana kegiatan MICE dengan skala international dan salah satu destinasi wisata dunia oleh peserta dari 189 negara, yang berpotensi mendorong peningkatan kunjungan wisatawan mancanegara dan MICE di Bali.

Grafik 7. 3. Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Bali Tahun 2019

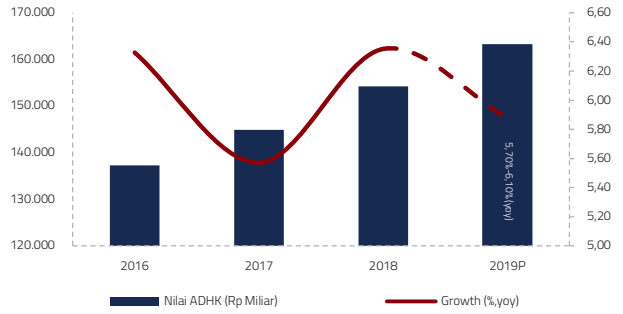

Sumber : Badan Pusat Statistik, diolah
Keterangan : p) Angka Proyeksi Bank Indonesia

7.2. PROSPEK INFLASI BALI

PERKIRAAN INFLASI TRIWULAN IV 2019

Inflasi Bali pada triwulan IV 2019 diperkirakan akan meningkat dibanding triwulan sebelumnya, yaitu dalam kisaran 2,80%-3,20% (yoy). Hal ini didukung oleh masuknya periode *peak season* pariwisata di Bali, pelaksanaan HBKN dan dampak lanjutan musim kering yang berkepanjangan terutama di triwulan III 2019 beresiko menahan produksi pertanian. Seiring dengan hal tersebut, masih terdapat beberapa faktor yang beresiko mendorong peningkatan laju inflasi, meliputi:

- Meningkatnya frekuensi perayaan HBKN pada triwulan IV 2019 dan liburan akhir tahun, beresiko mendorong permintaan, yang pada gilirannya akan meningkatkan laju inflasi, terutama untuk komoditas bahan makanan.
- Potensi meningkatnya serangan hama dan penyakit tanaman, seiring masuknya periode panen komoditas tabama beresiko menahan laju produk komoditas pangan, yang pada gilirannya dapat mendorong peningkatan harga.

88. Terdapat pembukaan rute penerbangan langsung baru yaitu Vietnam-Denpasar oleh maskapai VietJet pad bulan Maret dan Denpasar-Adelaide pada bulan April 2019. Pada Juli 2019, Turkish Airlines resmi mengoperasikan penerbangan langsung rute Istanbul-Denpasar. Pada bulan Agustus 2019, Malindo Air akan memulai layanan rute internasional baru dari Kuala Lumpur ke Sydney, Australia.

- Masuknya periode *peak season* pariwisata Bali di triwulan IV 2019, berpotensi mendorong peningkatan kunjungan wisatawan, yang pada gilirannya akan mendorong peningkatan permintaan, sehingga dapat memberikan dampak pada peningkatan laju inflasi, khususnya komoditas bahan makanan dan transportasi udara.

Meskipun terdapat resiko kenaikan inflasi, namun melalui koordinasi dan kerjasama dengan Tim Pengendalian Inflasi Daerah, tingkat inflasi Bali pada triwulan IV 2019 diperkirakan dapat tetap terkendali. Upaya TPID se-Provinsi Bali dalam pengendalian inflasi dan beberapa langkah-langkah strategis yang akan dilakukan untuk melakukan pengendalian inflasi melalui:

- Kerjasama dalam rangka pengembangan demplot dan pemanfaatan teknologi pangan, termasuk diantaranya pemanfaatan teknologi tepat guna ramah lingkungan antara lain: pengembangan Teknologi sistem Salibu (Tanam Sekali panen berkali-kali) serta pengembangan SRI (*System Rice Intensification*) untuk pertanian organik dan peningkatan kualitas produksi pangan serta pengembangan pertanian hidroponik perkotaan (*Urban Farming*).
- Optimalisasi program peningkatan produksi melalui pemberian subsidi pupuk organik dan anorganik, bantuan alsintan (olah tanah, tanam, panen), pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya, pemberian subsidi pajak oleh beberapa Kabupaten, Peraturan Daerah (PERDA) mengenai buah lokal, serta asuransi pertanian.
- Program kerjasama antar kabupaten/kota yang mengalami surplus di Provinsi Bali untuk pemenuhan komoditas pangan strategis. Sejalan dengan itu, mendorong pemanfaatan Sub Terminal Agribisnis (STA) sebagai salah satu upaya distribusi komoditas pangan. Implementasi peraturan Gubernur Bali No.99 tahun 2018 mengenai pemanfaatan dan pemasaran produk local, merupakan upaya untuk mendorong peningkatan produksi pertanian.
- Upaya pengendalian inflasi daging ayam ras dan telur ayam : (a) pembinaan usaha agribisnis dan monev kelompok pengolah hasil ternak; (b) pembinaan dan lomba kelompok petani ternak; (c) pelatihan Pemuda Tani; dan (d) pengembangan agribisnis pedesaan.
- Mendorong intensifikasi agar terus dilaksanakan dalam rangka meningkatkan hasil produksi.
- Pengembangan model bisnis kerja sama perdagangan antar daerah dan fasilitasi kerja sama antar daerah, a.l dengan mengoptimalkan peran swasta dan BUMD.

Grafik 7.4. Proyeksi Inflasi Bali 2019

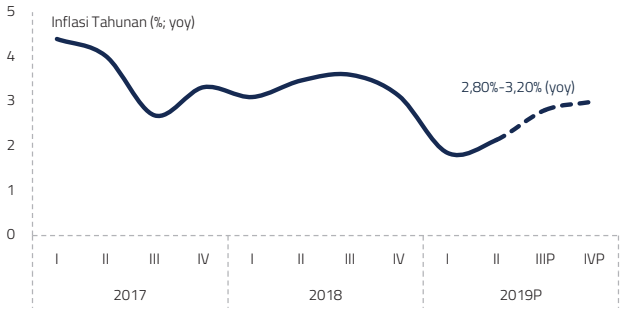

Sumber : Badan Pusat Statistik, diolah
Keterangan : p) Angka Proyeksi Bank Indonesia

PERKIRAAN INFLASI 2019

Secara keseluruhan, inflasi Bali tahun 2019 diperkirakan akan melandai dan berada dalam kisaran 2,80%-3,20% (yoy), lebih rendah dibanding realisasi inflasi tahun 2018 yang tercatat sebesar 3,13% (yoy). Proyeksi ini sedikit lebih tinggi dari proyeksi di periode sebelumnya[89]. Penyempurnaan proyeksi dilakukan dengan memasukkan informasi terkait datangnya fenomena musim kemarau yang lebih panjang yang berdampak pada kekeringan dan kenaikan harga beberapa komoditas termasuk cabe. Perkiraan inflasi tersebut juga berada dalam

89. *Range* proyeksi inflasi Bali di 2019 pada buku LPP Periode Mei 2019 adalah 2,70%-3,10% (yoy)

rentang sasaran inflasi Nasional sebesar 3,5%±1% (yoy), sebagaimana tercantum dalam PMK No.93/ PMK.011/2014 tentang Sasaran Inflasi.

Berdasarkan disagregasinya, melandainya tekanan inflasi pada tahun 2019, terutama bersumber dari hampir semua kelompok pengeluaran, terutama kelompok bahan makanan dan kelompok makanan jadi, minuman, rokok dan tembakau serta kelompok transportasi, komunikasi dan jasa keuangan. Tendensi penurunan tekanan inflasi kelompok bahan makanan, didorong oleh:

- Kecukupan pasokan beras, seiring peningkatan produksi pangan dan ketersediaan stok beras BULOG dalam jumlah yang cukup dan memadai.
- Mulai beroperasinya waduk Titab sejak awal tahun 2019, berpotensi mendorong peningkatan indeks penanaman menjadi 275% dari 169% untuk luasan lahan sebesar 1.795 Ha.
- Upaya rehabilitasi dan perbaikan jaringan irigasi primer, sekunder dan tersier, mendukung peningkatan produksi pangan.

Sementara itu dari kelompok makanan jadi, minuman, rokok dan tembakau serta kelompok transportasi, komunikasi dan jasa keuangan, melandainya tekanan inflasi pada kelompok ini sejalan dengan telah dilakukannya penurunan tarif batas atas angkutan udara sebesar 15% yang berlaku sejak Mei 2019. Meskipun demikian, masih terdapat beberapa potensi resiko yang dapat mendorong peningkatan inflasi di Wilayah Bali, meliputi:

- Potensi peningkatan jumlah kunjungan wisatawan (termasuk wisatawan mancanegara), sejalan dengan bertambahnya jumlah *direct flight* dari dan ke Bali (mendorong peningkatan wisman), sehingga berpotensi mendorong peningkatan permintaan, khususnya untuk beberapa komoditas strategis, yang sebagian besar didatangkan dari luar Wilayah Bali (Jawa Timur). Kondisi ini akan berpotensi mendorong peningkatan harga beberapa komoditas bahan makanan.
- Peningkatan biaya-biaya usaha tani sesuai dengan pola historisnya (biaya sarana dan prasarana produksi termasuk biaya buruh tani), berpotensi mendorong peningkatan harga jual gabah, yang pada gilirannya akan mendorong peningkatan harga jual beras.
- Resiko terjadinya cuaca ekstrem (El Nino), berdampak pada tertahannya produksi komoditas tabama dan hortikultura.

Grafik 7.5. Proyeksi Inflasi Bali 2019

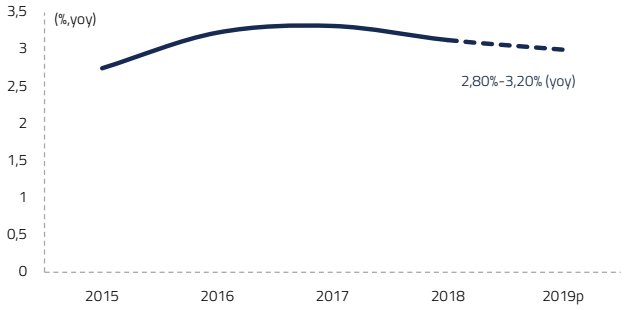

Sumber : Badan Pusat Statistik, diolah
Keterangan : p) Angka Proyeksi Bank Indonesia

Dalam rangka mengantisipasi resiko tersebut Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Provinsi Bali, telah melakukan beberapa kegiatan dan program sebagaimana tertuang dalam *roadmap* pengendalian inflasi.

Upaya yang dilakukan dalam kerangka *road map* pengendalian inflasi meliputi: 1) peningkatan produksi tabama dengan upaya intensifikasi produk pangan dan program gerakan penerapan pengelolaan tanaman terpadu (GPPTT) serta program Sapi induk wajib bunting (SIWAB), 2) upaya TPID dalam menjaga ketersediaan komoditi pangan di seluruh wilayah Provinsi Bali, melalui operasi pasar (beras) dan pasar murah, dan 3) penyediaan data harga di tingkat produsen sebagai *early warning system*. Diharapkan melalui kegiatan dan progam tersebut, volatilitas harga kelompok bahan makanan dapat ditahan. Selain upaya tersebut, dalam menghadapi peningkatan permintaan termasuk menjelang perayaan HBKN 2019, TPID

Provinsi Bali juga melakukan beberapa upaya strategis meliputi:

- Rapat koordinasi kesiapan sarana, prasarana dan operator angkutan.
- Memprioritaskan penyeberangan angkutan komoditas strategis.
- Berkomunikasi dg supermarket / distributor / retail untuk memberikan program diskon.
- Melaksanakan sidak pasar, gudang distributor, pelabuhan.
- Mengirimkan surat kepada maskapai untuk meninjau kebijakan tarif angkutan udara.
- Pembentukan posko terpadu pada terminal, pelabuhan, serta bandara.
- Pelaksanaan kegiatan *talkshow* di televisi dan radio berkenaan kesiapan TPID.
- Kegiatan ceramah keagamaan belanja bijak dan tidak berlebihan.

Selain itu, himbauan TPID terhadap ritel modern untuk tetap menjaga pasokan barang dan tingkat harga yang wajar, termasuk saat menjelang HBKN diharapkan dapat menjadi salah satu strategi yang tepat dan efektif dalam mengendalikan laju inflasi Bali. Sementara itu, penanganan tekanan inflasi dari kelompok transportasi, komunikasi dan jasa keuangan dilakukan melalui pemberian himbauan secara resmi oleh TPID Pronvisi Bali kepada maskapai penerbangan agar menetapkan tarif penerbangan secara wajar, khususnya saat pelaksanaan HBKN dan periode *peakseason* pariwisata. Di sisi lain, tekanan inflasi inti tetap terkendali didukung oleh terjaganya ekspektasi masyarakat dan masih kuatnya sisi penawaran dalam merespon permintaan.

DAFTAR ISTILAH

Administered Price (AP)	Salah satu disagregasi inflasi, yaitu untuk komoditas yang perkembangan harganya diatur oleh pemerintah.
Andil inflasi	Sumbangan perkembangan harga suatu komoditas/kelompok barang/kota terhadap tingkat inflasi secara keseluruhan.
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)	Rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
Bobot inflasi	Besaran yang menunjukkan pengaruh suatu komoditas terhadap tingkat inflasi secara keseluruhan, yang diperhitungkan dengan melihat tingkat konsumsi masyarakat terhadap komoditas tersebut.
Capital Adequacy Ratio (CAR)	Rasio antara modal (modal inti dan modal pelengkap) terhadap aktiva tertimbang menurut risiko (ATMR).
Cash Inflows	Jumlah aliran kas yang masuk ke kantor Bank Indonesia yang berasal dari perbankan dalam periode tertentu.
Cash Outflows	Jumlah aliran kas keluar dari kantor Bank Indonesia kepada perbankan dalam periode tertentu.
Dana Perimbangan	Sumber pendapatan daerah yang berasal dari APBN untuk mendukung pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah dalam mencapai tujuan pemberian otonomi daerah.
Dana Pihak Ketiga (DPK)	Dana masyarakat (berupa tabungan, deposito, giro, dll) yang disimpan di suatu bank.
Ekspor	Keseluruhan barang dan atau jasa yang keluar dari suatu wilayah/daerah baik yang bersifat komersil maupun bukan komersil.
Faktor Fundamental	Faktor fundamental adalah faktor pendorong inflasi yang dapat dipengaruhi oleh kebijakan moneter, yakni interaksi permintaan-penawaran atau *output* gap, eksternal, serta ekspektasi inflasi masyarakat.
Faktor Non Fundamental	Faktor non fundamental adalah faktor pendorong inflasi yang berada di luar kewenangan otoritas moneter, yakni produksi maupun distribusi bahan pangan (*volatile foods*), serta harga barang/jasa yang ditentukan oleh pemerintah (*administered price*).
Financing to Deposit Ratio (FDR)	Rasio antara pembiayaan yang diberikan oleh bank syariah terhadap dana yang diterima. Konsep ini sama dengan konsep LDR pada bank konvensional.
Impor	Seluruh barang dan atau jasa yang masuk suatu wilayah/daerah baik yang bersifat komersil maupun bukan komersil.

Imported inflation	Salah satu disagregasi inflasi, yaitu inflasi yang berasal dari pengaruh perkembangan harga di luar negeri (eksternal).
Indeks Ekspektasi Konsumen (IEK)	Salah satu pembentuk IKK. Indeks yang menunjukkan level keyakinan konsumen terhadap ekspektasi kondisi ekonomi 6 bulan mendatang, dengan skala 1–100.
Indeks Harga Konsumen (IHK)	Sebuah indeks yang merupakan ukuran perubahan rata-rata harga barang dan jasa yang dikonsumsi masyarakat pada suatu periode tertentu.
Indeks Kondisi Ekonomi (IKE)	Salah satu pembentuk IKK. Indeks yang menunjukkan level keyakinan konsumen terhadap kondisi ekonomi saat ini, dengan skala 1–100.
Indeks Keyakinan Konsumen (IKK)	Indeks yang menunjukkan level keyakinan konsumen terhadap kondisi ekonomi saat ini dan ekspektasi kondisi ekonomi enam bulan mendatang, dengan skala 1–100.
Indeks Pembangunan Manusia	Ukuran kualitas pembangunan manusia yang diukur melalui pencapaian rata-rata 3 hal kualitas hidup yaitu pendidikan, kesehatan, daya beli.
Inflasi	Kenaikan harga barang secara umum dan terus menerus (*persistent*).
Inflasi IHK	Kenaikan harga barang dan jasa dalam suatu periode yang diukur dengan perubahan Indeks Harga Konsumen, yang mencerminkan perubahan harga barang dan jasa yang dikonsumsi oleh masyarakat luas.
Inflasi inti	Inflasi inti adalah inflasi yang dipengaruhi oleh faktor fundamental (merupakan Inflasi IHK setelah mengeluarkan komponen *administered price*s dan *volatile food*).
Investasi	Kegiatan meningkatkan nilai tambah suatu kegiatan produksi melalui peningkatan modal.
Kliring	Pertukaran warkat atau data keuangan elektronik antar peserta kliring baik atas nama peserta maupun atas nama nasabah peserta yang perhitungannya diselesaikan pada waktu tertentu.
Kualitas kredit	Penggolongan kredit berdasarkan prospek usaha, kinerja debitur, dan kelancaran pembayaran bunga dan pokok. Kredit digolongkan menjadi 5 kualitas yaitu Lancar, Dalam Perhatian Khusus, Kurang Lancar, Diragukan dan Macet.
Liaison	Kegiatan pengumpulan data/statistik dan informasi yang bersifat kualitatif dan kuantitatif yang dilakukan secara periodik melalui wawancara langsung kepada pelaku ekonomi mengenai perkembangan dan arah kegiatan ekonomi dengan cara yang sistematis dan didokumentasikan dalam bentuk laporan.
Loan to Deposit Ratio (LDR)	*Ratio* yang menunjukkan perbandingan antara jumlah pinjaman yang disalurkan dengan dana pihak ke tiga yang dihimpun pada suatu waktu tertentu.

mtm (*month to month*)	Perbandingan antara data satu bulan dengan bulan sebelumnya.
Net Cashflows	Selisih bersih antara jumlah *cash inflows* dan *cash outflows* pada periode yang sama yang terdiri dari: *net cash outflows* bila *cash outflows* lebih tinggi dibandingkan dengan cash *inflow*s, dan *net inflow*s bila terjadi sebaliknya.
Non-Performing Loan (NPL)	Kredit atau pembiayaan yang termasuk dalam kualitas kurang lancar, diragukan dan macet.
Omzet	Nilai penjualan bruto yang diperoleh dari satu kali proses produksi.
PDRB	Produk Domestik Regional Bruto. Pendapatan suatu daerah yang mencerminkan hasil kegiatan ekonomi yang ada di suatu wilayah tertentu. 1. PDRB atas dasar harga berlaku Penjumlahan nilai tambah bruto yang mencakup seluruh komponen faktor pendapatan yaitu gaji, bunga, sewa tanah, keuntungan, penyusutan dan pajak tak langsung dari seluruh sektor perekonomian 2. PDRB atas dasar harga konstan Perhitungan PDRB yang didasarkan atas produk yang dihasilkan menggunakan harga tahun tertentu sebagai dasar perhitungannya.
Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Pendapatan yang diperoleh dari aktivitas ekonomi suatu daerah seperti hasil pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah.
Perusahaan	Suatu unit usaha yang diselenggarakan/dikelola secara komersil yang menghasilkan barang dan jasa sehomogen mungkin, umumnya terletak pada suatu lokasi dan mempunyai catatan administrasi tersendiri mengenai produksi, bahan baku, pekerja, dan sebagainya yang digunakan dalam proses produksi.
qtq (*quarter to quarter*)	Perbandingan antara data satu triwulan dengan triwulan sebelumnya.
Saldo Bersih	Selisih antara persentase jumlah responden yang memberikan jawaban "meningkat" dengan persentase jumlah responden yang memberikan jawaban "menurun" dan mengabaikan jawaban "sama".
Saldo Bersih Tertimbang (SBT)	Nilai yang diperoleh dari hasil perkalian saldo bersih sektor/subsektor yang bersangkutan dengan bobot sektor/subsektor yang bersangkutan sebagai penimbangnya.
Sektor ekonomi dominan	Sektor ekonomi yang mempunyai nilai tambah besar sehingga mempunyai pengaruh dominan pada pembentukan PDRB secara keseluruhan.
Sistem Bank Indonesia *Real Time Gross Settlement* (BI RTGS)	Proses penyelesaian akhir transaksi pembayaran yang dilakukan seketika (*real time*) dengan mendebet maupun mengkredit rekening peserta pada saat bersamaan sesuai perintah pembayaran dan penerima pembayaran.

Survei Kegiatan Dunia Usaha (SKDU)	Survei triwulanan yang bertujuan untuk mendapatkan indikator pertumbuhan ekonomi dari sisi penawaran secara triwulanan.
Survei Konsumen (SK)	Survei bulanan yang bertujuan untuk mengetahui keyakinan konsumen mengenai kondisi ekonomi saat ini dan ekspektasi terhadap kondisi perekonomian pada 6 bulan mendatang.
Volatile food	Salah satu disagregasi inflasi, yaitu untuk komoditas yang perkembangan harganya sangat bergejolak karena faktor-faktor tertentu.
yoy (*year on year*)	Perbandingan antara data satu tahun dengan tahun sebelumnya.
Derajat Desentralisasi Fiskal	Kemampuan daerah untuk memenuhi pendapatan daerah dari komponen Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Kontraksi	Pertumbuhan yang negatif.
Akselerasi	Pertumbuhan yang lebih tinggi pada periode laporan dibandingkan dengan periode tertentu.
Melambat	Pertumbuhan yang lebih rendah pada periode laporan dibandingkan dengan periode tertentu.
Kredit	Penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara kreditur (bank) dengan pihak lain, yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utang atau pinjamannya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.

TIM PENYUSUN

Penanggung Jawab
Trisno Nugroho

Koordinator Penyusun
M. Setyawan Santoso

Editor
Leo Ediwijaya

Tim Penulis
Umran Usman
Wilda Tri Farizqi
Riyan Hidayat

Kontributor
Grup *Advisory* dan Pengembangan Ekonomi
Kelompok Koordinator Asesmen Ekonomi Keuangan Regional dan *Advisory* Daerah

Produksi dan Distribusi
Fungsi Asesmen Ekonomi dan Surveilans

Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali
Grup *Advisory* dan Pengembangan Ekonomi
Jl. Letda Tantular No. 4
Denpasar – Bali, 80234
Tel. (0361) 248982
Fax. (0361) 222988

BANK INDONESIA
BANK SENTRAL REPUBLIK INDONESIA

Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali

Jl. Letda Tantular No. 4, Denpasar - 80235
Telp : 62-361-248982, Fax : 62-361-248993 - 222988
Website : http://www.bi.go.id